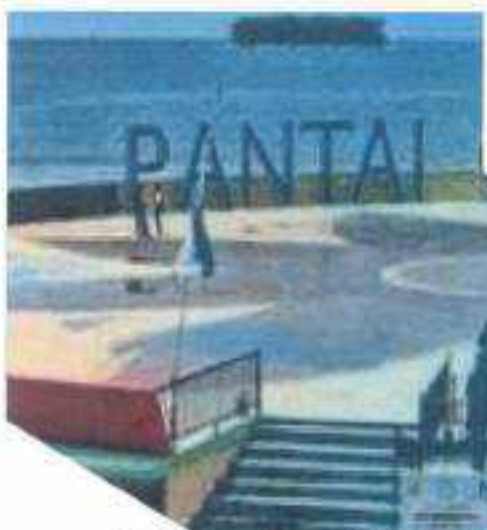




LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

2024



Jl. Imam Bonjol No. 44 Pariaman, Sumatera Barat
Telp. (0751) 92202, Fax. (0751) 91012, Laman www.pariamankota.go.id



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN INSPEKTORAT

Jl. Rohana Kudus No. 44 Taratak, Kota Pariaman
Telp./Fax. (0751) 91557

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LKJIP PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Pariaman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu Kami, masih terdapat kondisi atau hal - hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pariaman, 27 Maret 2025
Inspektur Kota Pariaman



ALFIAN HARUN, SE, MM

19660910 198712 1 002.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada ALLAH SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 dapat disusun dengan baik. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas kontribusi dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026 yang telah dituangkan juga pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 ini menggambarkan capaian kinerja sasaran strategis RPD Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Kota Pariaman Tahun 2024.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja pembangunan Kota Pariaman di masa mendatang serta bermanfaat bagi masyarakat dan berbagai pihak yang ingin memperoleh gambaran mengenai hasil pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Pariaman.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Pariaman, 27 Maret 2025.

Wali Kota Pariaman,



Yoga Balad



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kota Pariaman Tahun 2024. Kota Pariaman memiliki 19 (Sembilan Belas) Sasaran Strategis dengan total 26 (dua puluh enam) indikator kinerja dan 26 (dua puluh enam) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 26 (dua puluh enam) target tersebut Kota Pariaman bisa dikatakan berhasil, dengan rata-rata capaian keseluruhan indikator sebesar 84%, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan realisasi di atas 100% sebanyak 8 indikator.
- 2) Target dengan realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator
- 3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 17 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kota Pariaman tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	Angka Harapan Lama Sekolah	14,73 Tahun	14,80 Tahun	100,47%
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	11,22 Tahun	11,06 Tahun	98,57%
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	71,31 Tahun	74,37 Tahun	104,29%
	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,7%	10,5%	133%



Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan	(Ribu/Rp) 13.814	(Ribu/Rp) 13.784	99,78%
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55,25	53,91*	97,57%
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,28	98,07*	98,78%

Keterangan:

**Realisasi menggunakan pengukuran tahun 2023*

Tujuan 2

Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,91%	15,62%	98,17%
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	17,95%	17,38%	96,82%
Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	Persentase Pertumbuhan <i>Spending of Money</i>	3%	0,3%	10%
Meningkatnya iklim usaha dan investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	2,6%	-3,16%	-121,53%
Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	3,92%	4,26%	91,32%



Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,72%	5,32%	87,28%
Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7874	0,8045	102,17%

Tujuan 3

Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kota	65,15 (B)	57,43 (CC)	88,15%
	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	100%
Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks SPBE	2,7	3,44	127,40%
	Indeks Profesional ASN	85,96 (Tinggi)	78,65 (Sedang)	91,49%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,51 (Pelayanan Prima)	4,32 (Kategori A-)	95,78%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,15 (Baik)	83,29 (Baik)	100,16%

Tujuan 4

Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	64,25%	62,92%	97,92%



Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,02	59,44 Sedang	104,24%
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	84,15	74,35	88,35%
	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	25,05 Ha	1,79 Ha	7,14%
Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Mitigasi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	46	44	95,65%
Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan keamanan masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	69,15%	70%	101,22%

Kinerja APBDP Kota Pariaman Tahun 2024 menunjukkan realisasi **Rp648.100.984.541,33** atau sebesar **95,89%** dari total Anggaran sebesar **Rp675.857.149.536,00** dengan **nilai efisiensi sebesar 20,27%** (Penghitungan nilai efisiensi menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga).

Capaian kinerja Pemerintah Kota Pariaman diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Gambaran Umum	3
1.4 Analisis Isu-isu Strategis	6
1.5 Sistematika Laporan	11
BAB II PERENCANAAN	13
2.1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026	13
2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024	17
2.3 Program dan Anggaran Tahun 2024	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
1. Pengukuran Kinerja	24
2. Analisis Capaian Kinerja	27
1) Angka Harapan Lama Sekolah	27
2) Angka Rata-rata lama sekolah	32
3) Angka Usia Harapan Hidup	36
4) Prevalensi <i>Stunting</i>	41
5) Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	48
6) Indeks Pemberdayaan Gender	54
7) Indeks Pembangunan Gender	61
8) Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	65
9) Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	69
10) Persentase Pertumbuhan <i>Spending of Money</i>	74
11) Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	78
12) Angka Kemiskinan	82
13) Tingkat Pengangguran Terbuka	94
14) Indeks Desa Membangun	99
15) Nilai Evaluasi AKIP	104
16) Opini BPK terhadap LKPD	110
17) Indeks SPBE	114



18) Indeks Profesionalitas ASN	120
19) Indeks Pelayanan Publik	127
20) Indeks Kepuasan Masyarakat	135
21) Indeks Infrastruktur Daerah	142
22) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	148
23) Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	157
24) Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	171
25) Indeks Ketahanan Daerah	179
26) Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	184
B. Realisasi Anggaran	190
C. Penghargaan	194
BAB IV PENUTUP	203
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

2.1 Keselarasan Tujuan RPD dengan Misi RPJPD	13
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026	14
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	18
2.4 Program dan Anggaran 2024	19



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan tuntutan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Masyarakat semakin kritis terhadap kinerja instansi pemerintah, terutama dalam hal penggunaan anggaran publik dan pencapaian hasil pembangunan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja.

Pelaporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja setiap instansi daerah berdasarkan perencanaan kinerja yang telah disusun tahun sebelumnya yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dan dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Setiap instansi daerah wajib menyampaikan laporan kinerja tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan kinerja merupakan bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap kinerja yang telah dicapai selama periode tertentu. Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja:

A. Maksud

1. Akuntabilitas Publik



Memberikan informasi yang transparan kepada publik tentang capaian kinerja, penggunaan anggaran, dan hasil program kerja, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

2. Kepatuhan terhadap Regulasi

Memenuhi kewajiban hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta peraturan turunan lainnya yang mewajibkan instansi pemerintah menyusun laporan kinerja.

3. Refleksi Kinerja Organisasi

Menjadi alat evaluasi diri bagi instansi untuk menganalisis sejauh mana target kinerja telah tercapai, serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan tantangan dalam pelaksanaan program.

4. Dasar Pengambilan Keputusan

Menyediakan data dan informasi kinerja yang akurat untuk mendukung perencanaan strategis, alokasi sumber daya, dan perbaikan kebijakan di masa mendatang.

B. Tujuan

1. Mengukur Pencapaian Target

Menilai kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) instansi.

2. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi

Mengidentifikasi celah kinerja, inefisiensi, atau pemborosan sumber daya agar dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan anggaran.

3. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan

Menjadi dasar untuk merancang langkah-langkah korektif, inovasi, dan peningkatan kapasitas organisasi guna mencapai kinerja yang lebih baik di periode berikutnya.

4. Memperkuat Transparansi dan Kepercayaan Publik

Membangun kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi, sehingga publik dapat memahami kontribusi instansi dalam pembangunan dan penggunaan dana negara.

5. Mendukung Reformasi Birokrasi



Sebagai alat pemantauan dalam kerangka reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada hasil.

6. Memfasilitasi Evaluasi oleh Pihak Eksternal

Menyediakan data yang komprehensif bagi pihak pengawas seperti BPK, BPKP, Kementerian PANRB, atau lembaga terkait lainnya dalam melakukan audit kinerja dan penilaian akuntabilitas.

1.3 Gambaran Umum Kota Pariaman

A. Pembentukan Kota Pariaman

Kota Pariaman adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pesisir pantai barat Pulau Sumatera. Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.

B. Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe B.
- b. Sekretariat DPRD Tipe C.
- c. Inspektorat Tipe B.
- d. Dinas Daerah:
 - 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe B.
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe B.
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tipe B.
 - 4) Dinas Sosial Tipe C.
 - 5) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A.
 - 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe C.
 - 7) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B.



- 8) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B.
- 9) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B.
- 10) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Tipe B.
- 11) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A.
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C.
- 13) Dinas Perhubungan Tipe C.
- 14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C.
- 15) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C.
- 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C.
- e. Badan Daerah:
 - 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A.
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe B.
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C.
 - 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- g. Kecamatan Pariaman Tengah Tipe A.
- h. Kecamatan Pariaman Utara Tipe A.
- i. Kecamatan Pariaman Selatan Tipe A.
- j. Kecamatan Pariaman Timur Tipe A.

C. Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman

Jumlah Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Pariaman per Desember 2024 sebanyak 2515 orang yang terdiri dari 2370 orang PNS dan 145 orang PPPK.



1. Perbandingan Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin di Kota Pariaman

Perbandingan ASN Menurut Jenis Kelamin

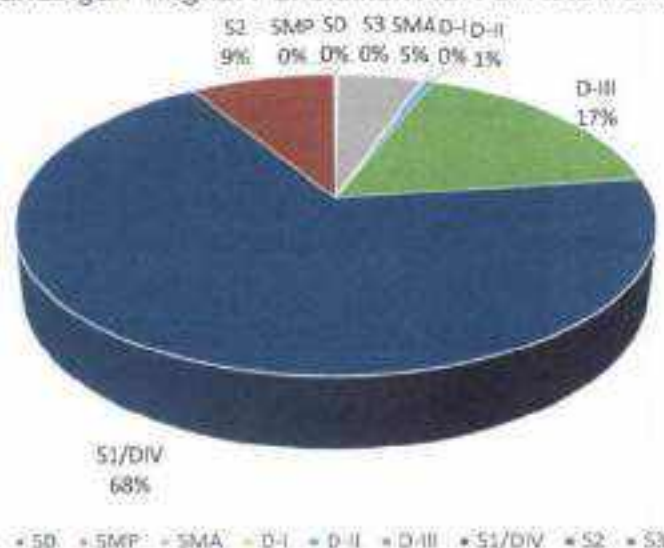


Sumber: <https://api-esdm.pariamankota.go.id/>

2. Perbandingan Tingkat Pendidikan ASN di Kota Pariaman



Perbandingan Tingkat Pendidikan ASN di Kota Pariaman



Sumber: <https://api-esdm.pariamankota.go.id/>

1.4 Analisis Isu-isu Strategis

Berdasarkan pengkajian dan penelaahan terhadap dokumen perencanaan dan kebijakan di atas baik sektoral, regional, nasional maupun internasional, maka isu-isu strategis RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Produktivitas sektor pariwisata yang masih rendah

Potensi permasalahan pembangunan daerah dalam pengembangan wisata di kawasan pesisir yang berkelanjutan di Kota Pariaman, umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Kondisi saat ini yang dihadapi Pemerintah Kota Pariaman dalam mengoptimalkan pembangunan kawasan pesisir untuk wisata adalah:

- 1) Potensi obyek pariwisata pantai dan pariwisata pesisir yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan belum tersedianya infrastruktur dasar yang memadai dan sarana prasarana pariwisata lainnya. Selain itu juga belum dilakukan promosi yang maksimal terhadap potensi wisata pesisir di Kota Pariaman.
- 2) Belum diprioritaskannya pembangunan wisata pada kawasan pesisir yang berbasis bencana gempa dan tsunami oleh pemerintah kota Pariaman, karena



pembangunan kawasan pesisir yang berbasis pada bahaya bencana gempa dan tsunami belum disikapi secara optimal oleh sektor terkait.

- 3) Belum berkembangnya sistem informasi yang dapat memberikan akses pada informasi produk unggulan, pasar, dan teknologi. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penggunaan teknologi ini menjadi salah satu kendala dan pemicu adanya eksploitasi sumber daya pesisir yang merusak potensi lestari dan berdampak negatif bagi lingkungan. Belum tertatanya sistem kelembagaan dan manajemen yang belum terkelola dengan baik untuk pengelolaan pengembangan wisata pada kawasan pesisir yang terpadu, dan berkelanjutan, dalam memberikan dukungan kepada peningkatan daya saing produk dan kawasan yang dikembangkan.

Dilihat dari isu permasalahan dalam pengelolaan pengembangan wisata pada kawasan pesisir Kota Pariaman yang sedang terjadi saat ini, maka diperlukan *smart solution* untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu:

- 1) Kebijakan pengelolaan dan pembangunan kawasan pesisir di Kota Pariaman sebaiknya dilakukan dengan Co-Management dimana pengelolaan ini melibatkan unsur-unsur dari pemerintah (*government based management*) baik Pemerintah Kota maupun OPD terkait yang kemudian bekerja sama dengan masyarakat lokal (*community based management*) serta investor (*private sector*) yang berwawasan lingkungan sebagai sumber pendanaan dalam membiayai pembangunan sarana atau fasilitas penunjang kawasan wisata pesisir di Kota Pariaman.
- 2) Pemanfaatan wilayah pesisir dan laut ini juga seharusnya dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) wilayah tersebut.

Beberapa permasalahan pada bidang pariwisata yaitu:

1. Belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif.
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Pariaman masih kecil.
3. Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum menunjukkan performa yang sesuai dengan potensinya.

Kondisi yang menjadi akar masalah masih belum optimalnya perkembangan pariwisata, yaitu:



1. Terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang menekan lama kunjung wisatawan.
 2. Belum terinternalisasinya nilai-nilai *hospitality* di masyarakat.
 3. Belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi.
 4. Belum berkembangnya produk ekonomi kreatif lokal
2. Belum Optimalnya Kualitas Pendidikan

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dasar merupakan kewajiban pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan Kota Pariaman sebagai Kota Pendidikan, maka peningkatan kualitas baik dari sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik, siswa maupun lulusan, menjadi sebuah keharusan. Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Pariaman telah memenuhi target pencapaian. Masalah yang perlu ditanggulangi adalah terkait akses untuk pendidikan PAUD dan sarana dan prasarana Sekolah SD yang belum memadai serta distribusi tenaga pendidik yang berkualitas belum merata.

Seiring dengan hal tersebut pemerintah daerah diharapkan juga mampu mengakomodir perubahan preferensi masyarakat dalam memilih sekolah dengan muatan agama dan karakter. Fenomena yang terjadi adalah tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak ke sekolah swasta dengan muatan agama dan karakter. Sementara muatan pendidikan agama dan karakter di Kota Pariaman Tahun 2024-2026 pendidikan dasar negeri dirasakan masih rendah. Ditambah lagi dengan banyaknya siswa terutama Sekolah SMP yang berasal dari luar Kota Pariaman, di satu sisi ini menjadi sebuah alasan yang menguatkan bahwa pendidikan di Kota Pariaman lebih baik dibandingkan daerah sekitar. Kondisi ini perlu diatasi dengan pembenahan tata kelola sekolah dan pemerataan kualitas dan kuantitas dari sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang diterima di setiap sekolah. Perbaikan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada peningkatan proses belajar dan mutu lulusan. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas layanan pendidikan perlu menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan pembangunan terkait pengembangan Sumber Daya Manusia ke depan.

Hal lain yang juga harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah adalah upaya fasilitasi terhadap perkembangan Perguruan Tinggi yang ada di Kota Pariaman. Keberadaan perguruan tinggi ini diharapkan dapat memberikan



dampak yang luas Bagi masyarakat Pariaman (*multiplier effect*) baik dari segi peningkatan kualitas manusia, peningkatan taraf ekonomi dan sosial budaya.

Isu Optimalisasi kualitas pendidikan ini juga sejalan dengan isu yang ada di tingkat Provinsi Sumatera Barat terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang juga merupakan jawaban atas isu Nasional berupa pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas dan peningkatan kualitas pembelajaran. Terkait peran pemuda dan olah raga dalam mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik sudah tidak diragukan lagi. Selain bermanfaat jasmani, olahraga juga berperan dalam pengembangan karakter bangsa. Olahraga mampu melahirkan kebiasaan yang baik seperti jujur, disiplin, sportif, tanggung jawab dan kerja sama. Walaupun bidang olah raga memiliki alat ukur yang jelas dalam pencapaian prestasi dan keberhasilannya, namun tak bisa dipungkiri pembangunan olah raga di Kota Pariaman masih menemui hambatan dan keterbatasan. Persoalan pembinaan terhadap bibit-bibit atlet berprestasi yang masih belum terarah seperti; sistem rekrutmen calon atlet, pembibitan, pembinaan pada cabang olah raga, sampai pada peningkatan prestasi.

3. Belum optimalnya Kualitas dan layanan Kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan pelayanan dasar salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Pariaman termasuk masyarakat miskin. Pembangunan kesehatan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta meningkatnya kearifan budaya lokal. Peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang; penguatan karakter berbasis kearifan lokal,



penguatan nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti; pelestarian dan pengembangan seni budaya.

5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan krusial di Kota Pariaman mengingat terdapat 5,20% penduduk Kota Pariaman yang terkategori miskin pada tahun 2017 menurut BPS. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan krusial di kawasan perkotaan termasuk Kota Pariaman.

6. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Prioritas utama Kota Pariaman dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kota Pariama dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data.

Fokus Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman terkait dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat *leveling* kapabilitas APIP, meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari pembenahan reformasi dan birokrasi di Kota Pariaman. Peningkatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya adalah peningkatan pelayanan publik melalui penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu (*smart city*); pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas dengan pembangunan Mall Pelayanan Publik.

7. Peningkatan Tata Ruang Dan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup mencakup ketersediaan produk hukum



pengaturan tata ruang (RTRW, RDTRK, zonasi) yang dapat dijadikan acuan dalam membangun ruang kota, peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan.

8. Peningkatan Infrastruktur yang Tangguh, modern, dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana.

Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan mengandung pengertian di mana pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang serta mampu merespon perubahan situasi yang terjadi. Pembangunan infrastruktur menyangkut kinerja pelayanan infrastruktur kota yang baik dengan tetap memerhatikan kualitas lingkungan hidup, sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas serta meningkatnya ketangguhan bencana.

9. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19

Struktur perekonomian daerah Kota Pariaman yang didominasi oleh sektor pertanian, sektor konstruksi dan industri pengolahan, walaupun disadari sektor pertanian dari tahun sebelumnya mengalami kontribusi yang sedikit menurun yang disebabkan karena mulai meningkatnya sektor Perdagangan, Jasa dan Pariwisata. Pada satu sisi sektor ini memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain perekonomian yang didominasi oleh sektor konstruksi dan industri pengolahan strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya dan potensi lokal berupa usaha mikro dan koperasi harus lebih ditingkatkan produktifitasnya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah.

1.5 Sistematika Laporan

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum terkait latar belakang penyusunan, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Kota Pariaman, Analisis Isu-isu Strategis.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan mengenai Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Program dan Anggaran Tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja



Pada Bab ini disajikan informasi terkait analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan langkah-langkah untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kota Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Tujuan dan Sasaran yang terkandung dalam dokumen RPD ini berpedoman pada visi dan misi serta sasaran pokok yang termuat pada dokumen RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025.

Dalam RPD Kota Pariaman 2024-2026 disebutkan Visi pembangunan Kota Pariaman yaitu **"Mewujudkan Pariaman Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani"**, dengan 5 (empat) misi pembangunan meliputi:

1. Meningkatkan Kualitas SDM dan Derajat Sosial Masyarakat;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan rasa tertib dan aman dalam kehidupan beragama dan bernegara;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan daerah.

Selanjutnya, dalam RPD Kota Pariaman 2024-2026 Kota Pariaman juga ditetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang mengacu kepada tujuan pada dokumen RPJPD Kota Pariaman 2005-2025, yaitu:

1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas
2. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat
3. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel
4. Terwujudnya Kota Pariaman layak huni

Tabel 2.1

Keselarasan Tujuan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dengan Misi RPJPD
Kota Pariaman Tahun 2005-2025



Tujuan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026		Misi RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025	
Tujuan 1	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	Misi 1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan derajat sosial masyarakat
Tujuan 2	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat	Misi 2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan
Tujuan 3	Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Misi 3	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan
Tujuan 4	Terwujudnya Kota Pariaman layak huni	Misi 4	Mewujudkan rasa tertib dan aman dalam kehidupan beragama dan bernegara
		Misi 5	Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan daerah

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 19 (sembilan belas) sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Pariaman pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Adapun keselarasan tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta indikator kinerja, serta target akhir periode 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026 Pemerintah Kota Pariaman

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Target 2025	Target 2026 (Akhir Periode)
Tujuan 1: Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	77,88	78,15	78,42
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	Angka Harapan Lama Sekolah	14,73 Tahun	14,79 Tahun	14,85 Tahun
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,22 Tahun	11,46 Tahun	11,72 Tahun
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	71,31 Tahun	71,71 Tahun	72,21 Tahun
	Prevalensi Stunting (pendek	15,7%	12,8%	10,3%



	dan sangat pendek) pada balita			
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan	13.814	14.146	14.478
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55,25	57,45	59,55
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,28	99,50	99,72
Tujuan 2: Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,25%	5,45%	5,65%
	Gini Rasio (Indeks Gini)	0,255	0,250	0,245
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,91%	16,14%	16,37%
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	17,95%	17,96%	17,97%
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	Persentase Pertumbuhan <i>Spending of Money</i>	3%	3,5%	4%
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya iklim usaha dan investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	2,6%	2,8%	3%
Sasaran Strategis 5: Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	3,92%	3,76%	3,55%
Sasaran Strategis 6: Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,72%	4,54%	4,10%
Sasaran Strategis 7: Meningkatnya kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7874	0,8003	0,8133
Tujuan 3: Terwujudnya pemerintahan yang	Indeks RB	65,65 (B)	70,05 (BB)	74,25 (BB)



efektif, efisien dan akuntabel				
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kota	65,15 (B)	70,01 (BB)	75,25 (BB)
	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	Indeks SPBE	2,7	2,85	3
	Indeks Profesional ASN	85,96 (Tinggi)	85,96 (Tinggi)	85,96 (Tinggi)
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,51 (Pelayanan Prima)	4,52 (Pelayanan Prima)	4,53 (Pelayanan Prima)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,15 (Baik)	86,20 (Baik)	88,35 (Baik)
Tujuan 4: Terwujudnya Kota Pariaman layak huni	Indeks Kota Layak Huni (Liveable City)	63,25%	65,15%	68,40%
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	64,25%	66,15%	68,25%
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,02	57,70	58,08%
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	84,15	85,10	86,25%
	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani (Ha)	25,05Ha	19,62Ha	64,4 Ha
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Mitigasi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	46	48	52
Sasaran Strategis 5: Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	69,15%	72,06%	75,01%



2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, maka target yang terdapat pada Indikator Kinerja Utama Kota Pariaman dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Kota Pariaman Tahun 2024 baik level Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah yang diunggah pada esr.menpan.go.id seluruhnya belum ditandatangani/diformalkan. Mengingat dokumen PK merupakan gambaran komitmen/kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan agenda pembangunan dan bagaimana gambaran kontribusi perangkat daerah dalam mendukung kinerja tersebut maka Pemerintah Kota Pariaman (Bagian Organisasi) telah menyampaikan beberapa kali Laporan terkait Hasil Evaluasi AKIP Kota Pariaman kepada Pj. Wali Kota Pariaman yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Pariaman, namun Pj. Sekretaris Daerah Kota Pariaman (Yaminu rizal) belum berkenan untuk menandatangani laporan dimaksud, terakhir tanggal 18 Desember 2024 Pj. Sekretaris Daerah yang baru (Mursalim) setuju untuk menandatangani laporan tersebut yang memberikan saran, memohon persetujuan untuk menandatangani Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan memimpin rapat pembahasan tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024, dan disposisi/arahan Pj. Wali Kota Pariaman agar diselesaikan.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi sesuai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024, telah dilakukan upaya untuk memformalkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2024. Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur:

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.



Sesuai surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor 000.8.6.3/1916/ORANG/XII-2024 tanggal 18 Desember 2024 Hal Permintaan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, telah disampaikan surat permintaan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024 kepada Pimpinan perangkat daerah. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah selesai diformalkan dan ditandatangani oleh seluruh pimpinan OPD pada tanggal 30 Desember 2024 dan disampaikan kepada Pj. Wali Kota Pariaman untuk ditandatangani, namun sampai dengan laporan ini dibuat Pj. Wali Kota Pariaman, belum berkenan untuk menandatangani.

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kota Pariaman Tahun 2024
yang disesuaikan dengan perubahan APBD**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas Manusia yang berdaya saing	Angka Harapan Lama Sekolah	14,73 Tahun
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,22 Tahun
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	71,31 Tahun
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,7%
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan	(Ribu/Rp) 13.814
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55,25
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,28
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,91%
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	17,95%
Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	Persentase Pertumbuhan <i>Spending Of Money</i>	3%
Meningkatnya iklim usaha dan investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	2,6%
Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	3,92%
Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,72%
Meningkatnya kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7874



Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kota	65,15 (B)
	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP
Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	Indeks SPBE	2,7
	Indeks Profesional ASN	85,96 (Tinggi)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,51 (Pelayanan Prima)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,15 (Baik)
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	64,25%
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,02
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	84,15
	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani (Ha)	25,05 Ha
Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Mitigasi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	46
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	69,15%

2.3 Program dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan Program dan Anggaran Tahun 2024, yang terdiri dari 121 (seratus dua puluh satu) program dan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.4

Program dan Anggaran Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024

No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp368,742,758,543
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp35,442,197,007
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp13,009,000
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp221,803,950
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp1,603,938,250
6	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp200,000,000



7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp55,512,076,775
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp622,267,250
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp372,901,000
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp219,198,000
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp797,657,150
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp935,950,000
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp4,018,682,633
14	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp1,716,635,200
15	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp3,098,697,686
16	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp181,408,400
17	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp14,880,398,159
18	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp4,900,000
19	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp304,702,840
20	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp52,523,250
21	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp91,729,250
22	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp3,968,850,271
23	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp25,000,150
24	Program Pengembangan Perumahan	Rp97,735,000
25	Program Kawasan Permukiman	Rp4,073,356,400
26	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp4,353,456,750
27	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp416,655,250
28	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp1,353,114,530
29	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp1,478,339,502
30	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp32,345,150
31	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp40,491,750
32	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluh Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp55,779,300
33	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp5,304,500
34	Program Pengelolaan Persampahan	Rp6,895,522,297
35	Program Penanggulangan Bencana	Rp1,711,056,735



36	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp4,360,971,870
37	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp2,442,902,768
38	Program Pemberdayaan Sosial	Rp195,058,150
39	Program Rehabilitasi Sosial	Rp726,098,970
40	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp95,031,800
41	Program Penanganan Bencana	Rp96,948,800
42	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp39,795,430
43	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp22,500,000
44	Program Perlindungan Perempuan	Rp204,043,850
45	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp32,200,000
46	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp41,229,500
47	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp315,960,000
48	Program Pengendalian Penduduk	Rp103,800,000
49	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp2,290,652,000
50	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera (KS)	Rp1,682,662,000
51	Program Pendaftaran Penduduk	Rp271,064,940
52	Program Pencatatan Sipil	Rp4,990,000
53	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp13,596,400
54	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp5,723,850
55	Program Penataan Desa	Rp3,000,000
56	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp94,045,196
57	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat	Rp2,292,557,364
58	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp392,447,662
59	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp1,171,978,886
60	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp1,900,426,400
61	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp31,665,946
62	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp15,338,250
63	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp3,750,000
64	Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	Rp233,578,000
65	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp33,831,500
66	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp440,591,000
67	Program pengembangan UMKM	Rp13,287,500
68	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp1,802,875,287
69	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp11,701,250



70	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp19,733,000
71	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp31,323,300
72	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp24,114,000
73	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp4,000,000
74	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp2,045,000
75	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp146,324,000
76	Program Hubungan Industrial	Rp19,238,500
77	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp5,094,000
78	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp355,798,348
79	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp397,530,000
80	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp916,015,499
81	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp215,366,820
82	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp634,500
83	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp1,275,890,815
84	Program Pemasaran Pariwisata	Rp73,699,232
85	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp100,971,349
86	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp222,397,080
87	Program Pengelolaan Arsip	Rp289,232,450
88	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp6,971,000
89	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp252,709,293
90	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp19,610,252
91	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp61,245,586
92	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp478,442,010
93	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp492,395,040
94	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp69,898,500
95	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp578,017,150
96	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp15,321,488
97	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp313,799,736
98	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp112,302,750
99	Program Penyuluhan Pertanian	Rp274,812,916
100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp3,920,721,132
101	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp314,210,778
102	Program Dukungan Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD	Rp14,111,502,853



103	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp1.000,049,959
104	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp420,772,465
105	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp227,346,200
106	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp90,902,674,868
107	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp659,111,612
108	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp1,881,238,000
109	Program Kepegawaian Daerah	Rp1,004,754,331
110	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp224,058,701
111	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp4,000,000
112	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp833,130,831
113	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp14,980,745,719
114	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp82,640,500
115	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp210,495,750
116	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp596,044,865
117	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp1,686,215,915
118	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp1,010,055,981
119	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp1,699,000
120	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp83,999,966
121	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp0
Jumlah		Rp675.857.149.536



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

1. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
 2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
 3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang
- Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Wali Kota Pariaman Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Pemerintah Kota Pariaman merupakan kinerja tahun ke-1 pada periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 84% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	Angka Harapan Lama Sekolah	14,73 Tahun	14,80 Tahun	100,47%
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	11,22 Tahun	11,06 Tahun	98,57%
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	71,31 Tahun	74,37 Tahun	104,29%
	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,7%	10,5%	133%
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan	(Ribu/Rp) 13.814	(Ribu/Rp) 13.784	99,78%



Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55,25	53,91*	97,57%
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,28	98,07*	98,78%
Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,91%	15,62%	98,17%
Sasaran Strategis 6: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	17,95%	17,38%	96,82%
Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	Persentase Pertumbuhan <i>Spending of Money</i>	3%	0,3%	10%
Sasaran Strategis 8: Meningkatnya iklim usaha dan investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	2,6%	-3,16%	-121,53%
Sasaran Strategis 9: Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	3,92%	4,26%	91,32%
Sasaran Strategis 10: Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,72%	5,32%	87,28%
Sasaran Strategis 11: Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7874	0,8045	102,17%
Sasaran Strategis 12: Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kota	65,15 (B)	57,43 (CC)	88,15%
	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	100%
Sasaran Strategis 13: Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks SPBE	2,7	3,44	127,40%
	Indeks Profesional ASN	85,96 (Tinggi)	78,65 (Sedang)	91,49%



Sasaran Strategis 14: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,51 (Pelayanan Prima)	4,32 (Kategori A-)	95,78%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,15 (Baik)	83,29 (Baik)	100,16%
Sasaran Strategis 15: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	64,25%	62,92%	97,92%
Sasaran Strategis 16: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,02	59,44 Sedang	104,24%
Sasaran Strategis 17: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	84,15	74,35	88,35%
	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani (Ha)	25,05 Ha	1,79 Ha	7,14%
Sasaran Strategis 18: Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Mitigasi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	46	44	95,65%
Sasaran Strategis 19: Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan keamanan masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	69,15%	70%	101,22%

2. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Manusia yang Berdaya Saing			
Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian
Angka Harapan Lama Sekolah	14,73 Tahun	14,80 Tahun	100,47%
Angka Rata-rata Lama Sekolah	11,22 Tahun	11,06 Tahun	98,57%

A. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa



mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Cara Perhitungan Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah adalah indikator makro yang penghitungannya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, di mana angka harapan lama sekolah Tahun 2024 adalah 14,80 tahun.

Penetapan target indikator Angka Harapan Lama Sekolah mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan sama yaitu 14,79 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Pariaman tahun 2024 adalah 14,80 yang setara dengan Tahun 2 di Perguruan Tinggi, Realisasi tahun 2024 adalah 14,80 tahun dengan capaian 100,47%, dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 14,79 tahun. mengalami peningkatan sebesar 0,01.

Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)
1	Kota Padang	16,57
2	Kota Padang Panjang	15,47
3	Kota Bukittinggi	15,28
4	Kabupaten Tanah Datar	15,05
5	Kota Pariaman	14,80
6	Kota Payakumbuh	14,57
7	Kota Solok	14,37
8	Kabupaten Padang Pariaman	14,20
9	Kabupaten Agam	14,16
10	Kota Sawahlunto	13,86
11	Kabupaten Pasaman Barat	13,72



12	Kabupaten Solok	13,56
13	Kabupaten Pasaman	13,52
14	Kabupaten Lima Puluh Kota	13,42
15	Kabupaten Pesisir Selatan	13,37
16	Kabupaten Solok Selatan	13,07
17	Kabupaten Kepulauan Mentawai	12,91
18	Kabupaten Dharmasraya	12,89
19	Kabupaten Sijunjung	12,76

Sumber: Pariaman dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel di atas, Kota Pariaman berada di peringkat 5 dari 19 Kab/ Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Peringkat 1 adalah Kota Padang dan yang terakhir adalah Kabupaten Sijunjung.

Perbandingan realisasi angka harapan lama sekolah Kota Pariaman terhadap Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman Tahun 2024	Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat	Capaian
14,80 Tahun	14,30 Tahun	103,50%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Angka harapan lama sekolah di Kota Pariaman melebihi angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat dengan capaian 103,50%.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Realisasi (Tahun)				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
14,80	14,79	14,61	14,55	100,47%	100,61%	100,34%	100%

Realisasi angka Harapan Lama sekolah Kota Pariaman dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 selalu mengalami kenaikan, tertinggi pada Tahun 2024 dan capaian selalu berada di atas 100%.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 Kota Pariaman:

Target RPJMD 2018-2023 (Tahun)	Target RPD (Tahun)	Realisasi (Tahun)



2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
14,55	14,56	14,70	14,79	14,55	14,61	14,79	14,80

Capaian realisasi Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 dibandingkan dengan target Akhir RPD 2024-2026 sebagai berikut:

Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2024	Target AHLS Kota Pariaman Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
14,80 Tahun	14,85 Tahun	99%

Tingkat capaian Angka Harapan Lama sekolah Kota Pariaman Tahun 2024 terhadap target akhir periode mencapai 99%. Pada Tahun 2026 (tahun terakhir RPD 2024-2026), Angka Harapan Lama Sekolah ditargetkan dapat tercapai 14,85 tahun. Target tahun 2025 pada RPD adalah 14,79 dan tahun 2026 adalah 14,85. dari realisasi tahun 2024 sebesar 14,80 terdapat perbedaan sebesar 0,06 tahun. Dari program dan kegiatan dan kebijakan dari Pemerintah Kota Pariaman, maka target 2026 akan dapat tercapai.

Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman dengan rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah secara Nasional sebagai berikut:

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman Tahun 2024	Angka Harapan Lama Sekolah Nasional Tahun 2024	Capaian
14,80 Tahun	13,21 Tahun	112%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Angka harapan lama sekolah Nasional adalah 13,21 tahun dibandingkan dengan capaian Kota Pariaman maka Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman lebih tinggi sebesar 1,59 tahun atau dengan capaian 112% terhadap capaian nasional.

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target Angka Harapan Lama Sekolah tersebut tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu yang tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.



- 2) Peningkatan Kualitas Guru dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
- 3) Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini yaitu mengedukasi masyarakat tentang manfaat pendidikan untuk anak usia dini.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun pada tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Kondisi Ekonomi: Keterbatasan ekonomi keluarga dapat menghambat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- 2) Kesadaran dan Motivasi: Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan.

Strategi yang akan ditargetkan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk mempertahankan dan meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun selanjutnya, sebagai berikut:

1. Melanjutkan Program Beasiswa yang sudah ada Kartu Pariaman Pintar yaitu : Memberikan bantuan keuangan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk mendorong mereka melanjutkan pendidikan.
2. Peningkatan Kualitas Guru yaitu Mengadakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajaran.

Program yang mendukung peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 adalah:

1. Program Pengelolaan Pendidikan dengan sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD dan SMP, dengan Anggaran Rp807.049.130,- dan Realisasi Rp760.157.138,- (94,19%).
2. Program Pengelolaan Pendidikan dengan sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SD dan SMP, dengan Anggaran Rp476.563.114,- dan Realisasi Rp244.147.250,- (51,23%).

Untuk mencapai indikator peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah, Kota Pariaman melaksanakan 2 Program dengan 2 Sub Kegiatan dengan anggaran yang berasal dari APBDP Kota Pariaman Tahun 2024 dengan Jumlah



Rp1.283.612.244,- dan telah terealisasi dengan jumlah Rp1.004.304.388,- atau dengan capaian 78,24%. Pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dan efektif untuk mencapai indikator Angka Harapan Lama Sekolah.

Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp279.307.856,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Angka Harapan Lama Sekolah (100,47%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (78,24%) dengan nilai **efisiensi sebesar 100%**.

B. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Peningkatan rata-rata lama sekolah mengindikasikan perbaikan tingkat pendidikan penduduk. Cara Perhitungan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dihitung dengan menjumlahkan tahun yang dihabiskan penduduk dalam pendidikan formal, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk yang dihitung.

Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih besar yaitu 11,22 tahun. Realisasi Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2024 adalah 11,06 Tahun dengan capaian 98,57%. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Pariaman tahun 2024 adalah 11,06 Tahun yang setara dengan kelas 2 SMA.

Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Pariaman dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
1	Kota Padang Panjang	12,00
2	Kota Bukittinggi	11,65
3	Kota Padang	11,63
4	Kota Solok	11,37
5	Kota Pariaman	11,06



6	Kota Payakumbuh	10,89
7	Kota Sawahlunto	10,53
8	Kabupaten Tanah Datar	9,29
9	Kabupaten Agam	9,23
10	Kabupaten Pasaman Barat	8,99
11	Kabupaten Dharmasraya	8,98
12	Kabupaten Solok Selatan	8,85
13	Kabupaten Pesisir Selatan	8,81
14	Kabupaten Sijunjung	8,62
15	Kabupaten Padang Pariaman	8,42
16	Kabupaten Pasaman	8,14
17	Kabupaten Lima Puluh Kota	8,13
18	Kabupaten Kepulauan Mentawai	8,03
19	Kabupaten Solok	7,91

Sumber: Pariaman dalam Angka 2025

Berdasarkan Dari tabel dapat dilihat bahwa Kota Pariaman berada di peringkat 5 dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Peringkat 1 adalah Kota Padang Panjang dan terakhir adalah Kabupaten Solok.

Perbandingan realisasi Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Pariaman beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Realisasi (Tahun)				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
11,06	10,79	10,78	10,67	98,57%	98,09%	99,8%	98%

Dari tabel di atas, terlihat realisasi Angka Rata-rata Lama Sekolah adanya tren peningkatan realisasi selama 4 (empat) tahun terakhir, namun capaian dari Tahun 2021 sampai dengan 2024 belum bisa mencapai 100%.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 Kota Pariaman:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
10,84	10,80	11	11,22	10,67	10,78	10,79	11,06



Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Pariaman dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 selalu mencapai target 100%, namun pada tahun 2023 sampai tahun 2024 realisasi berada di bawah target.

Adapun capaian realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD adalah sebagai berikut:

Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2024	Target ARLS Kota Pariaman Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
11,06 Tahun	11,72 Tahun	94,36%

Tingkat capaian Angka Harapan Lama sekolah Kota Pariaman Tahun 2024 terhadap target akhir periode mencapai 94,36%. Pada Tahun 2026 (tahun terakhir RPD 2024-2026), Angka Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan dapat tercapai 11,72 tahun. Target tahun 2025 pada RPD adalah 11,46 dan tahun 2026 adalah 11,72. Dari realisasi tahun 2024 sebesar 11,06 terdapat perbedaan sebesar 0,66 tahun. Dari program dan kegiatan dan kebijakan dari Pemerintah Kota Pariaman, maka target 2026 akan dapat tercapai.

Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Pariaman dengan Angka Rata-rata Lama Sekolah secara Nasional sebagai berikut:

Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Pariaman Tahun 2024	Angka Rata-rata Lama Sekolah Seluruh Indonesia Tahun 2024	Capaian
11,06 Tahun	8,85 Tahun	124%

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Angka Rata-rata Lama Sekolah Nasional adalah 9,22 tahun. Capaian angka rata-rata lama sekolah Kota Pariaman terhadap angka rata-rata lama sekolah secara nasional adalah 124%, capaian Kota Pariaman lebih baik dari pada realisasi secara nasional. Kota Pariaman lebih tinggi sebesar 2,21 tahun dari pada realisasi secara nasional.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam pencapaian target Angka Rata-rata lama sekolah Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Perhitungan Angka rata-rata lama sekolah adalah penduduk usia 25 tahun ke atas dan kewenangan Dinas Pendidikan Kota Pariaman hanya sampai



SMP, maka diperlukan anggaran yang besar untuk mendukung capaian indikator ini.

- 2) Adanya penduduk Kota Pariaman yang sudah menamatkan pendidikan tinggi merantau keluar Kota Pariaman.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Angka Rata-rata lama sekolah :

- 1) Memberikan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu yang kuliah pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk/yang sudah bekerja sama.
- 2) Pendidikan Gratis 12 tahun (SD-SMA/SMK).
- 3) Penyelenggaraan Pembelajaran Non Formal/Kesetaraan (Paket A, B dan C), yang merupakan tempat Pendidikan bagi anak-anak putus sekolah.

Strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk pencapaian target Angka Rata-rata lama sekolah pada tahun selanjutnya:

- 1) Memperbanyak kerja sama dengan perguruan tinggi sehingga lebih banyak pilihan penduduk Kota Pariaman untuk mendapatkan pendidikan tinggi.
- 2) Melakukan pendataan terhadap anak putus sekolah/anak tidak sekolah dan memberikan bantuan/beasiswa agar anak putus sekolah/anak tidak sekolah mau kembali bersekolah.

Program yang mendukung meningkatkan Angka Rata-rata lama sekolah di Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Anggaran Rp1.955.000.000,- dan Realisasi Rp1.167.200.000,- (59,70%), Anggaran di Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Anggaran Rp2.335.680.000,- dan Realisasi Rp2.335.680.000,- (100%) Anggaran di BPKPD.
3. Program Pengelolaan Pendidikan dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/ Kesetaraan (Ujian Paket A, B dan C), dengan Anggaran Rp53.044.000,- dan Realisasi : Rp8.844.000,- (16,67%).

Untuk mencapai Angka Rata-rata Lama Sekolah, Kota Pariaman melaksanakan 3 Program dengan anggaran yang berasal dari APBDP Kota Pariaman Tahun 2024 dengan Jumlah Rp4.343.724.000,- dan telah terealisasi dengan jumlah Rp3.511.724.000,- Dengan capaian realisasi 80,85%.



Pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dan efektif untuk mencapai indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp832.000.000,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah (98,57%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (80,85%) dengan nilai efisiensi sebesar 94,31%.

Sasaran Strategis 2			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	71,31 Tahun	74,37 Tahun	104,29%
Prevalensi Stunting	15,7%	10,5%	133%

A. Angka Usia Harapan Hidup (UHH)

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil Proyeksi SP2010. Salah satu indikator yang digunakan sebagai barometer kualitas pembangunan sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Usia Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Usia harapan hidup adalah data yang menggambarkan usia kematian pada suatu populasi. Data ini merupakan ringkasan pola usia kematian yang terjadi pada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.

Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Capaian kinerja indikator Angka Usia Harapan Hidup pada Tahun 2024 adalah 104,29% dari target 71,31 tahun terealisasi 74,37 tahun. Pada aspek realisasi, rata-rata umur masyarakat Kota Pariaman mengalami peningkatan sebesar 0,17 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Angka Harapan Hidup (AHH) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)
1	Kota Bukittinggi	75,62
2	Kota Padang	75,20
3	Kota Payakumbuh	75,08
4	Kota Solok	74,85
5	Kota Padang Panjang	74,48
6	Kabupaten Agam	74,39
7	Kota Pariaman	74,37
8	Kabupaten Tanah Datar	74,26
9	Kabupaten Dharmasraya	74,24
10	Kota Sawahlunto	74,12
11	Kabupaten Padang Pariaman	73,88
12	Kabupaten Pesisir Selatan	73,44
13	Kabupaten Lima Puluh Kota	73,42
14	Kabupaten Sijunjung	72,89
15	Kabupaten Pasaman Barat	72,75
16	Kabupaten Solok	72,52
17	Kabupaten Solok Selatan	72,50
18	Kabupaten Pasaman	72,36
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	71,21

Sumber: Pariaman dalam Angka 2025

Berdasarkan Dari tabel dapat dilihat bahwa Kota Pariaman berada di peringkat ke 7 dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, angka harapan hidup tertinggi adalah Kota Bukittinggi dan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Perbandingan realisasi Usia Harapan Hidup Kota Pariaman dengan Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Angka UHH Kota Pariaman 2024	Angka UHH Provinsi Sumbar 2024	Capaian
74,37 Tahun	74,37 Tahun	100%



Realisasi Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah 74,37 Tahun, sama dengan realisasi Angka Usia Harapan Hidup Kota Pariaman, dengan capaian 100%.

Perbandingan realisasi indikator kinerja serta capaian dari Angka Harapan Hidup Kota Pariaman Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Realisasi (Tahun)				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
74,37	74,20	73,98	73,69	104,29%	104,24%	104,37%	104,48%

Dari tabel di atas, terlihat realisasi Angka Harapan Hidup Kota Pariaman setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Capaian Angka UHH selalu berada di atas 100%. Kenaikan angka harapan hidup ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Kemudahan akses pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan yang baik, lingkungan yang bersih dan aman, pola hidup sehat, program kesehatan ibu dan anak dan transformasi sistem kesehatan.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 Kota Pariaman, sebagai berikut:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
70,53	70,88	71,18	71,31	73,69	73,98	74,20	74,37

Berdasarkan hasil realisasi Angka Usia Harapan Hidup Kota Pariaman beberapa tahun terakhir (2021 s.d. 2024) capaian Angka Usia Harapan Hidup Kota Pariaman selalu berada di atas target jangka menengah. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih kecil yaitu 71,31 Tahun karena penyusunan target RPD 2024-2026 atau penyusunan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 belum mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan realisasi Tahun 2024, maka Pemerintah Kota Pariaman menetapkan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 74,37 Tahun sebagaimana tercantum pada tabel berikut:



Realisasi UHH 2024	Target UHH 2025 (RPD 2024- 2026)	Penyesuaian/Rencana Target UHH 2025
74,37 Tahun	71,71 Tahun	74,37 Tahun

Adapun capaian realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut

Angka Usia Harapan Hidup Kota Pariaman Tahun 2024	Target Angka UHH Kota Pariaman Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
74,37 Tahun	72,21 Tahun	103%

Realisasi Tahun 2024 telah melebihi target Angka Usia Harapan Hidup akhir periode RPD 2024-2026 yaitu 72,21 Tahun dengan capaian 103%.

Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Kota Pariaman dengan Angka Usia Harapan Hidup secara Nasional sebagai berikut:

Angka Usia Harapan Hidup Kota Pariaman	Angka Usia Harapan Hidup Indonesia Tahun 2024	Capaian
74,37 Tahun	74,2 Tahun	100,22 %

Sumber: Badan Pusat Statistik

Angka Usia Harapan hidup Kota Pariaman berada di atas Angka Usia Harapan Hidup Nasional dengan capaian 100,22%. Usia harapan hidup berbeda pada tiap Negara. Usia harapan hidup ini mencakup berbagai parameter yang menjelaskan derajat kesehatan suatu daerah. Beberapa parameternya secara kuantitatif adalah angka kematian bayi, angka kematian anak dibawah 5 tahun, Sedangkan parameter kualitatif seperti jenis kelamin, genetik, akses ke pelayanan kesehatan, kebersihan lingkungan, diet, nutrisi, gaya hidup dan tingkat kriminalitas.

Berdasarkan data Statistik Indonesia Tahun 2025, negara yang memiliki usia harapan hidup paling tinggi adalah Hongkong sebesar 85,5 Tahun dan yang terendah adalah Negara Nigeria yaitu 54,6 tahun.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman penyebab berhasilnya pencapaian target, sebagai berikut:



1. Meningkatkan edukasi, promosi dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat baik di posyandu, puskesmas, Rumah Sakit, Sekolah dan tempat lainnya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan puskesmas dengan puskesmas Integrasi Layanan Primer (ILP).
3. Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).

Faktor penghambat dalam pencapaian target, sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Rendahnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan seperti sumber daya manusia, sarana prasarana dan alat kesehatan.

Strategi yang akan ditargetkan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan Angka Usia Harapan Hidup pada tahun selanjutnya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat.
2. Membudayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
3. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan.
4. Meningkatkan mutu fasilitas pelayanan Kesehatan.
5. Memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Pariaman.
6. Melakukan skrining kesehatan pada semua kelompok umur secara berkala.

Program yang mendukung meningkatkan Angka Usia Harapan Hidup di Kota Pariaman Tahun 2024 adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan jumlah anggaran Rp55.515.084.775 dan realisasi Rp50.664.318.191 (91,26%).

Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp4.850.766.584,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Angka Usia Harapan Hidup (104,29%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (91,26%) dengan nilai **efisiensi sebesar (82,57%)**.



B. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi serius pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata atau anak sangat pendek serta tubuhnya tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai usianya dan berlangsung dalam waktu lama. *Stunting* merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak *stunted*, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif.

Penetapan target indikator prevalensi stunting mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Kota Pariaman menargetkan Prevalensi *Stunting* pada Tahun 2024 sebesar 15,7% dengan realisasi 10,5% dengan capaian 133%. Cara penghitungan prevalensi *stunting* adalah jumlah balita pendek berdasarkan Tinggi Badan per Umur (TB/U) (jumlah balita pendek 650 orang) dibagi dengan jumlah balita yang ditimbang (6163 orang) dikali 100%, maka didapatkan prevalensi stunting yaitu 10,5%.

Faktor penunjang keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya penurunan *stunting* dilakukan oleh Kota Pariaman melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor.

Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Intervensi spesifik ini umumnya diberikan oleh sektor kesehatan. Intervensi gizi sensitif mencakup: (a) Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; (b) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; (c) Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak (d) Peningkatan akses pangan bergizi. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar sektor Kesehatan. Sasaran intervensi



gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat dan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Prevalensi *Stunting* menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut:

No	Kab/kota	Sasaran Balita	Jumlah Balita Diukur	Jumlah Balita Stunting	% Stunting
1	Kepulauan Mentawai	8.017	8.017	1.341	16,7
2	Pasaman	22.533	22.533	3.698	16,4
3	Sijunjung	17.628	17.628	2.366	13,4
4	Pasaman Barat	34.656	34.656	4.385	12,7
5	Tanah Datar	18.742	18.742	2.332	12,4
6	Solok	28.892	28.892	3.446	11,9
7	Solok Selatan	11.44	11.432	1.292	11,3
8	Kota Padang Panjang	3.542	3.542	401	11,3
9	Kota Pariaman	6.178	6.178	647	10,5
10	Lima Puluh Kota	24.091	24.091	2.513	10,4
11	Padang Pariaman	28.013	28.013	2.773	9,9
12	Kota Solok	4.418	4.418	388	8,8
13	Pesisir Selatan	35.899	35.866	3.019	8,4
14	Kota Bukittinggi	7.499	7.499	603	8
15	Agam	31.896	31.896	2.239	7
16	Dharmasraya	17.094	17.094	1.243	7,3
17	Kota Sawah Lunto	4.272	4.272	206	4,8
18	Kota Padang	58.515	58.479	1.569	2,7
19	Kota Payakumbuh	9.229	9.229	194	2,1

Sumber: data e-pggbm melalui intervensi serentak

Berdasarkan Dari tabel dapat dilihat bahwa Kota Pariaman berada di peringkat ke 9 dari 19 Kabupaten/Kota peringkat *stunting* tertinggi di Sumatera Barat, Urutan pertama dengan *stunting* tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan yang terendah adalah Kota Payakumbuh.

Kota Pariaman masih harus berupaya untuk menurunkan *stunting* dengan program dan kegiatan yang melibatkan OPD terkait Jika dibandingkan dengan capaian berdasarkan data e PPGBM Tahun 2024 prevalensi *stunting* Kota Pariaman adalah 10,5%.

Perbandingan realisasi *stunting* Kota Pariaman dengan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

<i>Stunting</i> Kota Pariaman Tahun 2024	Realisasi <i>Stunting</i> Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Capaian



10,5%	9,3%	87%

Capaian realisasi *Stunting* Kota Pariaman terhadap realisasi Provinsi Sumatera Barat sebesar 87%.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator Prevalensi *Stunting* Kota Pariaman beberapa tahun terakhir, sebagai berikut:

Realisasi (%)				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
10,5	10,5	9	10,03	133%	116%	146,42%	103,49%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa trend prevalensi balita *stunting* di Kota Pariaman berfluktuatif dari sejak tahun 2021. Capaian Prevalensi *Stunting* Kota Pariaman selalu berada di atas 100%. Realisasi tahun 2024 sama dengan capaian pada tahun 2023 (Capain berdasarkan data dari e-PPGBM Tahun 2024). Data e-PPGBM merupakan surveilans gizi dari laporan rutin penimbangan balita di posyandu yang di entry oleh petugas ke dalam aplikasi ePPGBM yang berguna untuk intervensi masalah gizi balita.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 Kota Pariaman, sebagai berikut:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
10,02	16,8	12,5	15,7	10,03	9	10,5	10,5

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih besar yaitu 14,73% karena penyusunan target RPD 2024-2026 atau penyusunan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 belum mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan mempertimbangkan realisasi Tahun 2024, maka Pemerintah Kota Pariaman menetapkan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 10,5% Tahun sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Realisasi Prevalensi <i>Stunting</i> 2024	Target Prevalensi <i>Stunting</i> 2025 (RPD 2024- 2026)	Penyesuaian/Rencana Target Prevalensi <i>Stunting</i> 2025
10,5%	12,8%	10,5%

Adapun capaian realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Realisasi Prevalensi Stunting Kota Pariaman Tahun 2024	Target Prevalensi Stunting Kota Pariaman Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
10,5%	10,3%	98%

Tingkat capaian Prevalensi Stunting Kota Pariaman Tahun 2024 terhadap target akhir periode RPD 2024-2026 adalah 98%. Kota Pariaman optimis target akhir periode RPD dapat tercapai pada tahun 2026.

Perbandingan Prevalensi Stunting Kota Pariaman dengan Prevalensi Stunting secara Nasional sebagai berikut:

Realisasi Prevalensi Stunting Kota Pariaman Tahun 2024	Prevalensi Stunting Nasional	Capaian
10,5%	21,5%*	151%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

*Realisasi yang digunakan menggunakan pengukuran Tahun 2023

Realisasi Prevalensi Stunting Nasional yang digunakan adalah Tahun 2023 karena realisasi Prevalensi Stunting Nasional Tahun 2024 belum keluar sampai dengan Laporan ini dibuat. Prevalensi Stunting Kota Pariaman berada di atas Prevalensi Stunting Nasional dengan capaian 102,73%. Capaian Pemerintah Pariaman menekan *stunting* lebih baik dari capaian secara nasional.

Faktor Pendukung Keberhasilan menurunkan prevalensi stunting antara lain adalah :

1. Kota Pariaman melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting dengan menetapkan Desa/Kelurahan Lokus stunting melalui 8 langkah Aksi Konvergensi/Integrasi yaitu :
 - a. Analisis situasi program penurunan stunting.
 - b. Penyusunan Rencana Kegiatan.
 - c. Rembuk Stunting.
 - d. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia.
 - e. Sistem Manajemen Data Stunting.
 - f. Pengukuran dan Publikasi Data Stunting.
 - g. Reviu Kinerja Tahunan.



2. Kegiatan terkait penurunan stunting melalui Intervensi Gizi Spesifik oleh sektor Kesehatan antara lain :
 - a. Pembinaan dalam peningkatan status gizi masyarakat.
 - b. Pembinaan dalam peningkatan pengetahuan gizi masyarakat.
 - c. Pembinaan Pencegahan Stunting.
 - d. Pelaksanaan Strategi Promosi Kesehatan.
 - e. Peningkatan Surveilans Gizi.
 - f. Penguatan Intervensi Suplementasi Gizi Pada Ibu Hamil Dan Balita.
 - g. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil KEK.
 - h. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kekurangan Gizi.
 - i. Suplementasi Zat Gizi Mikro.
 - j. pembinaan dalam peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - k. pembinaan pelaksanaan STBM.
 - l. Imunisasi dasar lengkap dan Pengendalian penyakit.
3. Mengacu pada Perpres 72 Tahun 2021, Sektor Kesehatan mendukung percepatan penurunan stunting dalam koordinasi intervensi spesifik dengan program yang menyoar remaja putri, ibu hamil, dan balita .
4. Upaya pencegahan anemia dimulai dengan skrining anemia yaitu pemeriksaan kadar hemoglobin pada siswi kelas 7 dan 10. Remaja putri minum tablet tambah darah (TTD) Bersama di sekolah setiap minggu.
5. Upaya pencegahan primer pada ibu hamil melalui pemeriksaan ante natal care minimal 6 kali, termasuk pemeriksaan status gizi dan pemberian TTD minimal 90 tablet. Jika ditemui permasalahan segera dilakukan tatalaksana. Bagi ibu hamil yang mengalami kurang energi kronik (KEK) diberikan makanan tambahan.
6. Setelah lahir, bayi mendapatkan ASI eksklusif dan pemantauan tumbuh kembang. Bagi baduta diberikan makanan tambahan .
7. Kegiatan intervensi sensitif yang mendorong keberhasilan intervensi spesifik adalah peningkatan literasi keluarga dan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi, kampanye, dan kemitraan. Hambatan keuangan bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan Kesehatan diatasi dengan tercakupnya keluarga miskin sebagai peserta PBI atau PBPU daerah.



8. Kondisi lingkungan yang sehat juga mempengaruhi Kesehatan remaja, ibu hamil dan tumbuh kembang balita. Salah satu kegiatan yang penting untuk menjaga agar tidak terjadi penularan penyakit adalah stop buang air besar sembarangan.
9. Kerjasama dengan Lintas sektor, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Mitra kerja, Tokoh agama, Basnaz, dan Dewan Masjid.
10. Sosialisasi dan Pelatihan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) bagi petugas kesehatan di Puskesmas dalam penurunan stunting.

Untuk mencapai target akhir periode tersebut masih terdapat Hambatan/Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman, yaitu sebagai berikut:

1. Belum efektifnya program-program pencegahan stunting.
2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi.
3. Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana.
4. Perilaku PHBS dan praktik dan Pola asuh masyarakat masih rendah.

Strategi yang akan ditargetkan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk mengatasi permasalahan prevalensi stunting pada tahun selanjutnya, sebagai berikut:

1. Pemenuhan gizi: Memenuhi asupan gizi yang cukup sebelum dan selama kehamilan, serta selama 1.000 hari pertama kehidupan anak.
2. Edukasi Pemberian ASI: Memberikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan.
3. Peningkatan Imunisasi: Memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal.
4. Pemantauan perkembangan anak: Memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala.
5. Penyuluhan kesehatan: Memberikan edukasi kesehatan mulai dari hamil sampai menyusui.



6. Penyuluhan kebersihan dan sanitasi: Mempromosikan kebersihan dan sanitasi yang baik.
7. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): PAUD dapat menjadi sarana pelatihan/edukasi bagi orang tua atau pengasuh untuk bisa memberikan asupan nutrisi yang baik.
8. Konvergensi program pencegahan stunting: Melakukan pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama dengan OPD terkait.

Untuk mencapai target akhir periode tersebut masih terdapat Hambatan/Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman, yaitu sebagai berikut:

1. Belum efektifnya program-program pencegahan stunting.
2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi.
3. Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana.
4. Perilaku PHBS dan praktik dan Pola asuh masyarakat masih rendah.

Program yang mendukung menurunkan prevalensi *stunting* di Kota Pariaman Tahun 2024 adalah Program terkait prevalensi stunting yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan jumlah anggaran Rp55.515.084.775 dan realisasi Rp50.664.318.191 (91,26 %).

Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp4.850.766.584,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Prevalensi *Stunting* (133%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (91,26%) dengan nilai **efisiensi sebesar 100%**.

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat			
Indikator Kinerja	Target (Ribu/Rp)	Realisasi (Ribu/Rp)	Capaian



Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	13,814	13,784	99,78%

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/ril dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi yaitu sebesar 13,814 (Ribu/Rp). Berdasarkan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kota Pariaman yaitu Kota Pariaman Dalam Angka 2025, realisasi pengeluaran per kapita yang disesuaikan adalah 13,784 (Ribu/Rp). Belum mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu sebesar 13,814 (Ribu/Rp). Persentase capaian jika dibandingkan dengan target adalah 99,78%.

Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Pariaman dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Realisasi 2024 (Ribu/Rp)
1	Kota Padang	15,458
2	Kota Bukittinggi	14,297
3	Kota Payakumbuh	14,260
4	Kota Pariaman	13,784
5	Kota Solok	12,995
6	Kabupaten Dharmasraya	12,254
7	Kota Padang Panjang	11,840
8	Kabupaten Padang Pariaman	11,756
9	Kabupaten Sijunjung	11,395
10	Kabupaten Solok Selatan	11,240



11	Kabupaten Tanah Datar	11,223
12	Kota Sawahlunto	11,187
13	Kabupaten Solok	10,988
14	Kabupaten Agam	10,686
15	Kabupaten Lima Puluh Kota	10,648
16	Kabupaten Pesisir Selatan	10,211
17	Kabupaten Pasaman Barat	9,888
18	Kabupaten Pasaman	9,194
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	7,192

Sumber: Pariaman dalam Angka 2025

Berdasarkan Dari tabel dapat dilihat bahwa Kota Pariaman berada di peringkat ke 4 dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, pengeluaran perkapita yang disesuaikan tertinggi adalah Kota Padang dan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Pariaman Tahun 2024 sudah baik apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat.

Jika dibandingkan dengan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Pariaman 2024	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Sumatera Barat 2024	Capaian
13.784	11.718	117%

Realisasi Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Sumatera Barat adalah 11.718, lebih rendah dari pada realisasi Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Pariaman 2024 dengan capaian 117%.

Perbandingan realisasi indikator Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Pariaman beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Realisasi				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
13.784	13.355	13.150	12.818	99,78%	95,39%	97,04%	97,47%

Dari tabel di atas, terlihat realisasi Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Pariaman setiap tahun selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2021 sampai



dengan tahun 2024 dan Capaian Kota Pariaman dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 belum bisa mencapai 100%.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 Kota Pariaman sebagai berikut:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
13.150	13.550	14.000	13.814	12.818	13.150	13.355	13.784

Berdasarkan realisasi pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Pariaman beberapa tahun terakhir, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 pengeluaran per kapita disesuaikan cenderung naik, namun masih belum bisa mencapai target Jangka Menengah dan RPD.

Adapun capaian realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Realisasi Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan Kota Pariaman Tahun 2024	Target Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
13.784	14.478	95,20%

Tingkat capaian Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan Kota Pariaman Tahun 2024 terhadap target akhir periode RPD 2024-2026 adalah 95,20%. Kota Pariaman optimis target akhir periode RPD dapat tercapai pada tahun 2026.

Perbandingan Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan Kota Pariaman dengan Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan secara Nasional sebagai berikut:

Realisasi Pengeluaran Perkapita yang d disesuaikan Kota Pariaman Tahun 2024	Realisasi Pengeluaran Perkapita yang d disesuaikan Nasional Tahun 2024	Capaian
13.784	12.341	111,69%

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024



Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan Kota Pariaman berada di atas Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan Nasional dengan capaian 111,69% terhadap realisasi nasional.

Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi Daya Beli Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan adalah:

1. Ketidakstabilan harga-harga barang kebutuhan pokok. Angka inflasi m-to-m Kota Pariaman sepanjang tahun 2024 cukup fluktuatif, di mana pada bulan Juli sampai dengan September mengalami penurunan dikisaran angka (0,03) – (0,87). Pada bulan Oktober sampai dengan Desember angka inflasi Kota Pariaman kembali mengalami kenaikan dikisaran 0,15 - 0,25. Inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa naik, sedangkan pendapatan masyarakat tidak berubah. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk sektor strategis daerah. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman pada tahun 2024 sebesar 4,51%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 4,79%. Tingkat produktivitas yang rendah dapat menurunkan pendapatan masyarakat, menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk membeli barang, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat.
3. Keterbatasan lapangan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Pariaman tahun 2024 sebesar 69,92 %, terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 71,23. Kondisi tersebut terjadi salah satunya disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan untuk angkatan kerja di Kota Pariaman. Lapangan kerja terbatas menyebabkan pengangguran yang berarti, pendapatan masyarakat akan terpengaruh, pada gilirannya dapat menurunkan kemampuan mereka untuk membeli barang dan jasa.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan Pengeluaran per kapita Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Mendukung peningkatan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan akses mudah terhadap pembiayaan, perizinan, pelatihan usaha, dan pasar.



2. Menurunkan angka Pengangguran, dengan menyiapkan para pencari kerja yang siap pakai dan sesuai dengan kebutuhan pasarkerja maka dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan keterampilan para pencari kerja melalui program pelatihan-pelatihan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan kerja.
3. Pemberian bantuan sosial seperti bantuan tunai atau program keluarga harapan, yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah.
4. Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2024 mengatur pengalokasian, penyaluran, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hambatan/kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Pengeluaran per kapita Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Ketidakselarasan Program Antar Perangkat Daerah.
2. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya.
3. Pendidikan dan Keterampilan yang Terbatas.
4. Resistensi terhadap Perubahan (terutama yang berkaitan dengan digitalisasi layanan).
5. Ketergantungan pada Sektor Tertentu (terhadap sektor pertanian).

Strategi yang akan ditargetkan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka mencapai target akhir periode RPD Kota Pariaman

1. Meningkatkan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru.
3. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan usaha (produksi) masyarakat.
4. Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan Usaha menengah, Usaha kecil, dan Usaha mikro (UMKM).



5. Pembentukan Pusat layanan usaha terhadap pengembangan usaha masyarakat.

Program yang mendukung meningkatkan Pengeluaran per kapita Kota Pariaman Tahun 2024 adalah :

1. Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha kecil, dan Usaha mikro (UMKM) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp440.591.000 dengan realisasi sebesar Rp435.749.880 atau dengan capaian realisasi 98,9%.
2. Program Pengembangan UMKM dengan Pagu Anggaran sebesar Rp13.287.500 dengan realisasi sebesar Rp13.210.000 atau dengan capaian realisasi 99,4%.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan Pagu Anggaran sebesar Rp578.017.150 dengan realisasi sebesar Rp524.674.750 atau dengan capaian realisasi 90,8%.
4. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp738.121.277 dengan realisasi sebesar Rp728.047.400 atau dengan capaian realisasi 98,6%.
5. Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp252.709.293 dengan realisasi sebesar Rp225.406.061 atau dengan capaian realisasi 89,2%.
6. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp69.898.500 dengan realisasi sebesar Rp40.048.500 atau dengan capaian realisasi 57,3%.
7. Program Penyuluh Pertanian dengan Pagu Anggaran sebesar Rp84.009.760 dengan realisasi sebesar Rp83.662.000 atau dengan capaian realisasi 99,6%.
8. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan Pagu Anggaran sebesar Rp146.324.000 dengan realisasi sebesar Rp144.691.240 atau dengan capaian realisasi 98,9%.
9. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp5.094.000 dengan realisasi sebesar Rp5.094.000 atau dengan capaian realisasi 100%.



10. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp345.483.348 dengan realisasi sebesar Rp320.598.362 atau dengan capaian realisasi 92,8%.

Untuk mencapai indikator Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan, terdapat 10 anggaran pendukung dengan yang berasal dari APBDP Kota Pariaman Tahun 2024 dengan Jumlah Rp2.673.535.828,- dan telah terealisasi dengan jumlah Rp2.521.182.193,- atau dengan capaian realisasi 94,30%.

Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp152.353.635,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (96,67%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (94,30%) dengan nilai efisiensi sebesar 55,92%.

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55,25%	53,91%*	97,57%
Indeks Pembangunan Gender	99,28	98,07*	98,78%

*Realisasi menggunakan pengukuran Tahun 2023

A. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Kesetaraan gender (*Gender Equality*) merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Dalam konsep gender terdapat Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan gender (IPG) mengukur pencapaian dimensi dan variabel makro. IDG menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. Untuk tingkat daerah, pelaksanaan IDG di diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan Surat Edaran Gubernur Sumbar No: 463/155/DP3AP2KB/1V/2024 tentang Pedoman pelaksanaan rencana aksi daerah pengarusutamaan gender bagi pemerintah Kab/kota se-Sumbar Tahun 2024. Pelaksanaan Pemberdayaan Gender memuat Keberhasilan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di



Kota Pariaman dapat dilihat dari kenaikan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan gender (IDG). IDG menunjukkan perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IDG bertujuan menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di Kota Pariaman dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dalam dan penguasaan terhadap proses pembangunan.

Pelaksanaan IDG adalah suatu capaian Kota Pariaman yang variabel pembentuknya tidak hanya kegiatan pada DP3AKB. Variabel pendukung lebih menitikberatkan pada partisipasi dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. Yang secara keseluruhan publikasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi.

Tujuan dari penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah untuk mengetahui sejauh mana kesetaraan kesempatan dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi sebagai dimensi IDG.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat digunakan untuk:

1. Mengetahui partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan;
2. Mengetahui perkembangan capaian indeks pemberdayaan gender;
3. Memberikan gambaran peran aktif perempuan dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan;
4. Memberikan gambaran peran aktif perempuan dan kehidupan ekonomi;
5. Memanfaatkan sebagai pedoman untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pembangunan yang responsive gender;
6. Sebagai alat monitoring hasil pembangunan berbasis gender.



Indikator Indeks Pemberdayaan Gender sebagai berikut:

Dimensi	Indikator
Keterwakilan di parlemen	Proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan
Pengambilan keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi laki-laki dan perempuan
Distribusi pendapatan	Upah buruh non pertanian, laki-laki dan perempuan

IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu, keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG juga difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. Penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Cara penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender:

$$IDG : 1/3 (Ipar+IDM+Lin-Dist)$$

Keterangan:

Ipar : Indeks Keterwakilan di Parlemen

IDM : Indeks pengambilan keputusan

Lin-Dist : Indeks distribusi pendapatan

Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi yaitu sebesar 55,25. Capaian untuk indeks pemberdayaan gender pada tahun 2024 sampai saat Laporan ini dibuat belum di sampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi untuk realisasi tahun 2023 Kota Pariaman telah memperoleh 53,91 dan nilai ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya di mana pada tahun 2022 Kota Pariaman mendapatkan nilai 52,62. Tahun 2023 IDG Kota Pariaman sebesar 53,91 % dengan target saat itu adalah 56%. Artinya, IDG belum memenuhi target yang diinginkan. Dapat dimaknai bahwa ada

ketimpangan peran yang didapatkan antara perempuan dan laki-laki. Kecenderungan peran domestik dan publik.

Untuk capaian tahun 2024 berkemungkinan besar juga akan mengalami kenaikan karena salah satu dari ketiga indikator penilaian yaitu keterwakilan di parlemen untuk wanita juga meningkat yang sebelumnya untuk anggota DPRD periode 2019-2024 ada 1 orang perempuan sedangkan pada periode 2024-2029 ada 2 orang perempuan yang menjadi anggota DPRD.

Adapun perbandingan nilai IDG Kota Pariaman Tahun 2023 dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Realisasi
1	Kota Payakumbuh	71,09
2	Kota Padang	68,27
3	Kota Padang Panjang	67,58
4	Kabupaten Agam	64,43
5	Kota Solok	64,23
6	Kota Sawahlunto	62,55
7	Kabupaten Sijunjung	61,72
8	Kabupaten Pasaman Barat	61,04
9	Kabupaten Pasaman	61,01
10	Kota Bukittinggi	60,96
11	Kabupaten Tanah Datar	59,46
12	Kabupaten Solok	59,38
13	Kota Pariaman	53,91
14	Kabupaten Pesisir Selatan	53,79
15	Kabupaten Dharmasraya	51,83
16	Kabupaten Lima Puluh Kota	49,40
17	Kabupaten Solok Selatan	48,70
18	Kabupaten Kepulauan Mentawai	48,50
19	Kabupaten Padang Pariaman	47,79

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Dari tabel dapat dilihat bahwa Kota Pariaman berada di peringkat ke 13 dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Indeks



Pemberdayaan Gender tertinggi adalah Kota Payakumbuh dan yang terendah adalah Kabupaten Padang Pariaman.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender beberapa tahun terakhir, sebagai berikut:

Realisasi				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
53,91*	53,91	52,62	53,42	97,57%	-	-	-

* Realisasi menggunakan pengukuran Tahun 2023

Capaian Kota Pariaman Tahun 2024 adalah 97,57%, capaian tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 belum bisa ditampilkan karena indikator indeks pemberdayaan gender merupakan indikator baru yang terdapat pada dokumen RPD 2024-2026. Tahun 2023 IDG meningkat dari tahun 2022. Secara umum, terlihat kecenderungan penurunan realisasi. Penurunan ini dipengaruhi banyak hal diantaranya partisipasi perempuan di parlemen yang masih dibawah 30% hampir lima tahun dan sumbangan pendapatan perempuan.

Sementara perempuan yang mulai mengisi jabatan pada beberapa lembaga pemerintah juga tidak banyak. Dapat dimaknai kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dijalankan selama ini serta penguasaan sumber daya ekonomi yang lebih memfasilitasi kegiatan DW/DWP belum membuahkan hasil. Terasa belenggu stereotype jika perempuan berada di ranah publik disamping beberapa norma budaya, agama yang membatasi aktifitas perempuan. Masih belum efektifnya program yang berfokus untuk memperkuat peran perempuan, menghilangkan diskriminasi gender, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembangunan. Tumpuan harapan memang tidak terfokus bidang pengampu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tetapi harus dipetakan dan saling menguatkan dalam mewujudkan indikator pembentuk IDG.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 Kota Pariaman, sebagai berikut:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024



-	-	-	55,25	53,42	52,62	53,91	*53,91

* Realisasi menggunakan pengukuran Tahun 2023

Berdasarkan hasil penghitungan IDG Kota Pariaman beberapa tahun terakhir, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 nilai IDG Kota Pariaman cenderung naik dan turun.

Adapun capaian realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Nilai IDG Kota Pariaman Tahun 2024	Target nilai IDG Kota Pariaman Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
53,91*	59,55	90,5%

Tingkat capaian IDG Kota Pariaman Tahun 2024 terhadap target akhir periode RPD berkemungkinan masih dapat diwujudkan berpatokan pada realisasi yang pernah didapat sebelumnya. Capaian dalam 5 (lima) tahun terakhir paling tinggi sebesar 54,45. Namun perlu upaya kerja keras.

Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Pariaman dengan Indeks Pemberdayaan Gender secara Nasional sebagai berikut:

Nilai IDG Kota Pariaman Tahun 2024	Realisasi IDG Nasional Tahun 2024	Capaian
53,91*	76,90*	70%

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Indeks Pemberdayaan Gender Kota Pariaman berada di bawah realisasi secara nasional dengan capaian 70%. Berdasarkan data diatas tahun 2022 dan 2023 ada kecendrungan peningkatan IDG Kota Pariaman, dari 52,62% meningkat menjadi 53,91%. Namun masih belum tercapai dari sisi target yang ditetapkan yakni 55% dan 56% demikian juga halnya secara nasional meningkat dari 76,59% menjadi 76,90%. Dapat diartikan walaupun belum mendekati capaian ideal kesetaraan gender mulai ada pergerakan. Walaupun untuk pencapaian tingkat Kota di Sumatera Barat, IDG Kota Pariaman paling rendah dibanding Kota-Kota di Sumatera Barat. Masih harus kerja keras dan mendapatkan perhatian khusus semua perangkat daerah.



Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Nilai IDG Kota Pariaman Tahun 2024 adalah melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana memberikan kesempatan untuk perempuan berkontribusi dalam pembangunan dengan beberapa tindakan:

- 1) Melakukan penguatan peran perempuan dalam ekonomi dengan cara mendukung lembaga dan organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang ekonomi.
- 2) Penguatan peran perempuan dalam politik dengan cara mendukung dan turut serta dalam sosialisasi organisasi yang bergerak dalam bidang politik.
- 3) Pembuatan kebijakan tentang pengarusutaman gender.

Beberapa kendala Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Nilai IDG Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Kurang informasi dari BPS terkait indikator dan juga acuan penilaian dari IDG.
2. Masih ada stigma masyarakat yang menyebutkan bahwa perempuan adalah ibu rumah tangga murni, sehingga banyak perempuan yang mengurungkan niat untuk berkarya dalam ketiga aspek tersebut.
3. Masih rendahnya kesempatan bagi perempuan dalam berkreasi.
4. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perempuan dalam memimpin suatu organisasi

Beberapa upaya/strategi yang akan ditargetkan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka meningkatkan Nilai IDG Kota Pariaman Tahun 2025 untuk mencapai target nilai IDG 57,45. sesuai dengan Target Kota Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesetaraan gender.
2. Melakukan edukasi terhadap penguatan peran perempuan.
3. Melakukan pembinaan terhadap organisasi perempuan dalam bidang ekonomi dan politik.
4. Melakukan perbaikan kebijakan kebijakan yang membatasi peran dan gerak perempuan.



Program yang mendukung secara langsung peningkatan IDG Kota Pariaman Tahun 2024 adalah Program Pengarusutamaan gender dan program pemberdayaan perempuan dengan pagu anggaran Rp22.500.000 dan Realisasi Rp18.475.000 atau dengan capaian 82,11%.

Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp832.000.000,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (97,57%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (82,11%) dengan nilai efisiensi sebesar 88,65%.

B. Indeks Pembangunan Gender

IPG menjadi tolak ukur penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan pembangunan manusia yang inklusif. Pencapaian IPG yang tinggi menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai pembangunan manusia yang berkualitas. IPG menjadi indikator dalam melihat capaian pembangunan manusia dan pembangunan gender dengan memperhatikan ketimpangan gender. Suatu daerah diharapkan bukan hanya mampu meningkatkan kualitas hidup manusia namun juga mengurangi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, idealnya daerah yang memiliki IPM yang tinggi akan mendorong pada pembangunan gender yang lebih baik.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat digunakan untuk mengukur pembangunan manusia berbasis gender yang melihat kesenjangan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Tiga dimensi dasar pembangunan manusia tersebut adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar layak hidup.

Indikator Indeks Pembangunan Gender sebagai berikut:

Dimensi	Indikator
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Diukur dengan angka harapan hidup saat lahir



Pengetahuan	Diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah
Standar Hidup Layak	Diukur dengan pendapatan perkapita

Cara penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender:

$$IPG : 1/3 (X_{ede(1)} + X_{ede(2)} + I_{inc-dis})$$

$X_{ede(1)}$: harapan hidup

$X_{ede(2)}$: pendidikan

$I_{inc-dis}$: Indeks distribusi pendapatan

Penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi yaitu sebesar 99,28. Capaian untuk indeks pembangunan gender pada tahun 2024 belum di sampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi untuk realisasi tahun 2023 Kota Pariaman telah memperoleh 98,07, jika dibandingkan dengan target 2024 maka capaian Kota Pariaman 98,78%.

Adapun perbandingan nilai Penghitungan Indeks Pembangunan Gender Kota Pariaman Tahun 2023 dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Realisasi
1	Kota Bukittinggi	99,17
2	Kota Payakumbuh	98,58
3	Kota Padang Panjang	98,19
4	Kota Pariaman	98,07
5	Kabupaten Tanah Datar	97,73
6	Kabupaten Agam	97,19
7	Kota Solok	96,64
8	Kabupaten Solok	96,17
9	Kabupaten Pesisir Selatan	95,57
10	Kota Sawahlunto	95,36
11	Kabupaten Solok Selatan	95,27



12	Kabupaten Lima Puluh Kota	94,77
13	Kabupaten Sijunjung	94,28
14	Kota Padang	93,94
15	Kabupaten Padang Pariaman	93,32
16	Kabupaten Pasaman	92,70
17	Kabupaten Pasaman Barat	90,05
18	Kabupaten Kepulauan Mentawai	89,57
19	Kabupaten Dharmasraya	89,11

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Dari tabel dapat dilihat bahwa Kota Pariaman berada di peringkat ke 4 dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Indeks Pembangunan Gender tertinggi adalah Kota Bukittinggi dan yang terendah adalah Kabupaten Dharmasraya.

Jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Indeks Pembangunan Gender Kota Pariaman 2024	Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sumatera Barat 2024	Capaian
98,07*	94,93*	103,30%

*Realisasi menggunakan pengukuran tahun 2023

Realisasi Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sumatera Barat adalah 94,93 lebih rendah dari pada realisasi Indeks Pembangunan Gender Kota Pariaman 98,07 dengan capaian 103,30%.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator Indeks Pembangunan Gender beberapa tahun terakhir, sebagai berikut:

Realisasi				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
98,07*	98,07	98,64	98,62	98,78%	-	-	-

* Realisasi menggunakan pengukuran Tahun 2023

Berdasarkan hasil penghitungan IPG Kota Pariaman beberapa tahun terakhir, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 nilai IPG Kota Pariaman cenderung naik dan turun. Capaian Kota Pariaman Tahun 2024 adalah 98,78%, capaian tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 belum bisa ditampilkan karena



indikator indeks pembangunan gender merupakan indikator baru yang terdapat pada dokumen RPD 2024-2026.

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja dari Nilai IPG Kota Pariaman dengan target jangka menengah dan RPD Kota Pariaman sebagai berikut:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
-	-	-	99,28	98,62	98,64	98,07*	Belum release

* Realisasi menggunakan pengukuran Tahun 2023

Adapun capaian realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Nilai IPG Kota Pariaman Tahun 2024	Target IPG Kota Pariaman Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
98,07*	99,72	98,34%

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

* Realisasi menggunakan pengukuran Tahun 2023

Capaian Nilai IPG Kota Pariaman terhadap target akhir periode adalah 98,34%. Kota Pariaman optimis target akhir periode bisa tercapai.

Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Pariaman dengan Indeks Pemberdayaan Gender secara Nasional sebagai berikut:

Nilai IPG Kota Pariaman Tahun 2024	Realisasi IPG Nasional Tahun 2024	Capaian
98,07*	91,85*	106,77%

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

* Realisasi menggunakan pengukuran Tahun 2023

Realisasi Kota Pariaman berada di atas rata-rata realisasi Nasional dengan capaian 106,77%.

Kendala/Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Nilai IPG Kota Pariaman Tahun 2024 adalah karena Indeks Pembangunan Gender bukan hanya berbicara tentang gender itu sendiri, tetapi ada 3 (tiga) faktor yang menjadi tolak ukur dalam penilaian, yaitu angka



harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan juga pendapatan perkapita. Dari ketiga hal yang menjadi tolak ukur penilaian tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan hanya menjadi perangkat daerah pendukung bukan utama.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Nilai IPG Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam meningkatkan masing-masing indikator.
2. Ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan perilaku hidup sehat untuk meningkatkan angka harapan hidup.
3. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk melakukan pendataan angka putus sekolah dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang memberikan pelatihan keterampilan (khusus untuk anak korban kekerasan yang putus sekolah).

Strategi yang akan ditargetkan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka meningkatkan Nilai IPG untuk mencapai target akhir periode sebagai berikut: terus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menjadi penentu dari ketiga dimensi tersebut, misalnya dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas koperasi dan UMKM dan juga bagian ekonomi dan kesra sekretariat daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan perangkat daerah pendukung dalam peningkatan nilai IPG di Kota Pariaman, namun program yang mendukung secara tidak langsung peningkatan IPG Kota Pariaman Tahun 2024 adalah: Program Pemberdayaan Perempuan dengan 0 Anggaran.

Sasaran Strategis 5			
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,91%	15,62%	98,17%

Tujuan dari Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah Mendorong peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang



kondusif. Data kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diperoleh dari BPS Kota Pariaman melalui Kota Pariaman Dalam Angka.

Untuk mengetahui peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

menggunakan rumus : $\frac{\sum \text{Kontribusi PDRB sektor perdagangan}}{\sum \text{PDRB}} \times 100\%$

Sumber: RPD Kota Pariaman 2024-2026

Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi yaitu sebesar 15,91.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pariaman Dalam Angka Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh BPS Kota Pariaman, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pariaman untuk tahun 2024 sebesar 15,62 persen, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 15,91 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,17 %. Sehingga kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tidak tercapainya target persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2024 dikarenakan :

1. Pertumbuhan ekonomi menurun
2. Terjadinya inflasi Kota Pariaman
3. DAU berkurang
4. Nilai investasi di Kota Pariaman kecil
5. Pendapatan asli daerah rendah
6. Penyerapan tenaga kerja rendah

Adapun perbandingan Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Pariaman dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Realisasi 2024
1	Bukittinggi	34.51
2	Kota solok	25.77



3	Payakumbuh	25.02
4	Padang panjang	18.28
5	Padang	17.52
6	Pariaman	15.62

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas, Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pariaman Tahun 2024 adalah terendah jika dibandingkan dengan beberapa Kota lain di Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pariaman beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Realisasi				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
15,62	15,47	15,45	14,90	98,17%	99,23%	100,12%	66,22%

Berdasarkan hasil realisasi persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pariaman beberapa tahun terakhir selalu mengalami tren kenaikan dan capaian Kota Pariaman beberapa tahun terakhir juga mengalami naik turun.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 Kota Pariaman sebagai berikut:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
22,5	15,43	15,59	15,91	14,90	15,45	15,47	15,62

Berdasarkan data di atas, Realisasi persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB selalu berada di bawah target, beberapa tahun terakhir hanya tahun 2022 yang melampaui target.

Capaian realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Persentase kontribusi sektor perdagangan	Target Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap	Capaian



terhadap PDRB Kota Pariaman Tahun 2024	PDRB Kota Pariaman Periode Akhir RPD (2026)	
15,62	16,37%	95,41%

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Tingkat capaian Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pariaman Tahun 2024 terhadap target akhir periode hanya bisa mencapai 95,41%. Kota Pariaman optimis target akhir periode akan tercapai pada tahun 2026.

Perbandingan realisasi Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Pariaman dengan Realisasi Nasional adalah sebagai berikut:

Realisasi Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2024	Realisasi Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDB Nasional	Capaian
15,62	12,91%	120,99%

Tingkat capaian realisasi Kota Pariaman terhadap realisasi secara Nasional adalah 120,99%. Persentase kontribusi sektor perdagangan Kota Pariaman lebih tinggi dari pada realisasi secara nasional sebesar 2,71%.

Beberapa kendala Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Belum adanya *database* pelaku UMKM dan IKM yang terupdate setiap tahunnya.
2. Tidak bisa melakukan intervensi terhadap harga pasar.
3. Kurangnya perencanaan yang disusun.
4. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan persentase sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2024 adalah :

1. Melakukan pemberian peralatan masak dan peralatan pembuatan minuman.
2. Melakukan pelatihan, pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM dan pelaku industri kecil menengah secara rutin.



3. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap koperasi yang ada di Kota Pariaman untuk mendukung usaha masyarakat dibidang permodalan.
4. Memfasilitasi penerbitan sertifikat halal, pembuatan logo dan kemasan produk UMKM dan menyediakan konsultasi mengenai UMKM.

Strategi yang akan ditargetkan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2025 untuk mencapai target hasil 16,14% sesuai dengan Target Kota Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memunculkan kegiatan pendataan database pelaku UMKM dan IKM.
2. Melakukan monitoring harga pasar setiap hari dan mengusulkan operasi pasar jika diperlukan ke pemerintah provinsi.
3. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan.

Program Penunjang Keberhasilan Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kota Pariaman adalah Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan Pagu Anggaran sebesar Rp11.701.250,- dengan realisasi sebesar Rp11.316.250,- atau dengan capaian realisasi 96,71%.

Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp385.000,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (98,17%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,71%) dengan **nilai efisiensi sebesar (53,65%)**.

Sasaran Strategis 6			
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	17,95%	17,38%	96,82%

Penghitungan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB bertujuan untuk mengetahui tingkat kontribusi pendapatan masyarakat dari



sektor pertanian terhadap total PDRB dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja sektor pertanian yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Penghitungan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalah sebagai berikut.

$$\text{Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB} = \frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Pertanian}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$

Data jumlah kontribusi PDRB sektor pertanian diperoleh dari jumlah kontribusi PDRB sub sektor pertanian yaitu:

1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu
3. Perikanan

Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024-2026. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi yaitu sebesar 17,95%.

Berdasarkan hasil penghitungan BPS Kota Pariaman, persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2024 sebesar 17,38 dengan capaian 96,82%. Hasil ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan kontributor tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya terhadap jumlah PDRB Kota Pariaman Tahun 2024. Hasil ini tertuang dalam Buku Kota Pariaman Dalam Angka 2025.

Adapun perbandingan Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Pariaman dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Realisasi 2024
1	Kota Pariaman	17,38%
2	Kota Sawahlunto	8,76%
3	Kota Payakumbuh	5,56%
4	Kota Padang Panjang	4,99%
5	Kota Solok	4,97%
6	Kota Padang	4,95%
7	Kota Bukittinggi	1,04%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas, persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Pariaman Tahun 2024 adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan enam kota lain di Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Pariaman beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Realisasi				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
17,38	17,67	17,73	17,93	96,82%	94,64%	95,47%	97,07%

Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Pariaman beberapa tahun terakhir fluktuatif, realisasi tertinggi adalah pada tahun 2021 dan terendah tahun 2024. Pada tahun 2024 mengalami penurunan 0,29%. Capaian Kota Pariaman dari Tahun 2021 belum pernah mencapai 100%.

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja dari persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dengan target jangka menengah dan RPD Kota Pariaman sebagai berikut:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
18,47	18,57	18,67	17,95	17,93	17,73	17,67	17,38

Berdasarkan hasil realisasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan dan belum mampu mencapai target jangka menengah.

Perbandingan realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Tahun 2024	Target Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
17,38%	17,97%	96,72%

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024



Tingkat capaian Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Pariaman Tahun 2024 terhadap target akhir periode hanya bisa mencapai 96,72%. Kota Pariaman optimis target akhir periode akan tercapai pada tahun 2026.

Perbandingan realisasi Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Pariaman dengan Realisasi Nasional adalah sebagai berikut:

Realisasi Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Tahun 2024	Realisasi Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDB Nasional	Capaian
17,38%	12,98%	133,89%

Tingkat capaian realisasi Kota Pariaman terhadap realisasi secara Nasional adalah 133,89%. Persentase kontribusi sektor pertanian Kota Pariaman lebih tinggi dari pada realisasi secara nasional sebesar 4,4%.

Kendala/Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman penyebab tidak tercapainya target persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2024 adalah:

1. Menurunnya luas baku sawah Kota Pariaman sebesar 8,85%.
2. Menurunnya luas tanam dan luas panen pertanian.
3. Belum optimalnya produktifitas pertanian dan perikanan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2024 adalah:

1. Menyalurkan bantuan bibit/benih untuk budidaya pertanian dan perikanan
2. Menyalurkan bantuan teknologi budidaya pertanian dan perikanan
3. Menyalurkan bantuan kapal nelayan
4. Memfasilitasi peningkatan kualitas pakan ternak
5. Memfasilitasi pemeliharaan jaringan irigasi tersier
6. Memfasilitasi pemanfaatan lahan terlantar untuk pertanian
7. Memfasilitasi pengendalian kesehatan ternak
8. Memberikan pembinaan kelompok pertanian dan perikanan

Beberapa upaya/strategi yang akan ditargetkan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka meningkatkan persentase kontribusi



sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2025 untuk mencapai target sebesar 17,97% sesuai dengan target Kota Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi sektor pertanian, perikanan dan peternakan.
2. Meningkatkan produktivitas padi.
3. Meningkatkan kapasitas petani maupun kelembagaan petani melalui intensifikasi pembinaan dan pendampingan kelompok tani.
4. Meningkatkan kapasitas petani maupun kelembagaan petani melalui intensifikasi pembinaan dan pendampingan kelompok tani.
5. Meningkatkan kerja sama dengan instansi vertikal dalam pemenuhan sarana dan prasarana perikanan.
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan ternak melalui inovasi TAMPAN.
7. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular zoonosis.

Program yang mendukung meningkatkan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2024 adalah:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pagu Anggaran Rp478.442.010 Rp354.189.093 dengan capaian 74,03%.
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Pagu Anggaran Rp184.092.020 dan realisasi Rp180.030.900 dengan capaian 97,79%.
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pagu Anggaran Rp69.898.500 dan realisasi Rp40.048.500 dengan capaian 57,30%.
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pagu Anggaran Rp578.017.150 dan realisasi Rp524.674.750 dengan capaian 90,77%.
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pagu Anggaran Rp15.321.488 dan realisasi Rp15.320.600 dengan capaian 99,99%.
6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pagu Anggaran Rp250.670.403 dan realisasi Rp241.365.480 dengan capaian 96,29%.
7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Pagu Anggaran Rp112.302.750 dan realisasi Rp112.252.750 dengan capaian 99,96%.



8. Program Penyuluhan Pertanian Pagu Anggaran Rp84.009.760 dan realisasi Rp83.662.000 dengan capaian 99,59%.

Untuk mencapai Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB, Kota Pariaman melaksanakan 8 Program anggaran yang berasal dari APBDP Kota Pariaman Tahun 2024 dengan Jumlah Rp1.772.754.081,- dan telah terealisasi dengan jumlah Rp1.551.544.073,- Dengan capaian realisasi 87,52%.

Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp221.210.008,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (96,82%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (87,52%) dengan **nilai efisiensi sebesar 44,80%**.

Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pertumbuhan <i>Spending of Money</i>	3%	0,3%	10%

Formula yang digunakan untuk menghitung Persentase Pertumbuhan *Spending of Money* sebagai berikut:

% Pertumbuhan <i>Spending of Money</i> :	$\frac{\text{Total uang yang dibelanjakan wisatawan pada tahun berjalan (n) - Total uang yang dibelanjakan wisatawan pada tahun sebelumnya}}{\text{Total uang yang dibelanjakan wisatawan pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$

% Pertumbuhan <i>Spending of Money</i> :	$\frac{297.255 - 296.300}{296.300} \times 100\%$

Sehingga didapat % Pertumbuhan *Spending of Money* tahun 2024 adalah 0,3%.

Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi yaitu sebesar 3% dan berdasarkan pengukuran % Pertumbuhan



Spending of Money tahun 2024 didapatkan realisasi sebesar 0,3%, jika dibandingkan dengan target RPD yaitu 3% **dengan capaian sebesar 10%.**

Perbandingan realisasi % Pertumbuhan Spending of Money beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Realisasi				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
0,3%	0,2%	1,93%	1,17%	10%	5,71%	42,88%	33,42%

Berdasarkan realisasi beberapa tahun terakhir, terlihat peningkatan *spending of money* pada tahun 2022 dikarenakan terdapat peningkatan signifikan dari tahun 2020 ke 2022, di mana pengeluaran meningkat dari 101.711 menjadi 295.824. Terjadinya peningkatan pengeluaran wisatawan di tahun 2022, hasil kerja sama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dengan Universitas Bung Hatta terkait dengan Indikator kinerja pariwisata salah satu indikatornya ialah *Spending of Money*. Selanjutnya terjadi penurunan realisasi dari tahun 2022 ke tahun 2023 menjadi 0,2% dan terjadi kenaikan di tahun 2024 sebesar 0,1%. Capaian % Pertumbuhan *Spending Of Money* belum pernah mencapai 100%.

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja dari % Pertumbuhan *Spending of Money* Kota Pariaman dengan target jangka menengah dan RPD Kota Pariaman sebagai berikut:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
3,5%	4,5%	3,5%	3%	1,17%	1,93%	0,2%	0,3%

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada dokumen RPJMD dan RPD, realisasi *spending of money* tidak pernah melewati target, untuk tahun selanjutnya Pemerintah Kota Pariaman akan melakukan evaluasi terhadap penetapan target *spending of money*.

Perbandingan realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut:



% Pertumbuhan <i>Spending of Money</i> Kota Pariaman Tahun 2024	Target Akhir Periode RPD (2026)	Capaian
0,3%	4%	7,5%

Tingkat capaian % Pertumbuhan *Spending of Money* Kota Pariaman Tahun 2024 terhadap target akhir periode hanya bisa mencapai 7,5%.

Hambatan/masalah penyebab tidak tercapainya target *spending of money*, karena Kunjungan yang berkurang akibat jalan yang rusak tidak bisa dilalui kendaraan sehingga menyebabkan wisatawan dari luar Provinsi dan luar kota tidak mempunyai akses untuk berkunjung ke Kota Pariaman, selain itu berkurangnya kunjungan wisatawan juga disebabkan karena dermaga ke pulau angso duo yang merupakan daerah destinasi wisata unggulan mengalami kerusakan, Capaian % Pertumbuhan *Spending of money* di RPJMD merupakan Pertumbuhan *Spending of money* untuk Kota Pariaman, sehingga seharusnya ada masukan atau perhitungan capaian *Spending Of Money* dari beberapa OPD terkait, seperti : UPT Parkir, Koperindag, BPKPD dan OPD lainnya yang mempengaruhi *Spending Of Money* Kota Pariaman, dan % Pertumbuhan *Spending Of Money* yang dihitung di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya mencakup Pertumbuhan *Spending Of Money* di Kawasan/Daerah Destinasi wisata saja.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengeluaran pengunjung di objek wisata, beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi seperti akomodasi dan kegiatan lokal.
2. Peningkatan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan, promosi melalui media sosial, serta penyediaan fasilitas yang menarik.
3. Kolaborasi dengan agen travel dan penyelenggaraan event rutin juga dapat menarik lebih banyak pengunjung.
4. Terkait dengan infrastruktur jalan dan akses ke destinasi wisata, telah dilakukan koordinasi dengan PUPR tapi terkendala dengan tidak adanya anggaran.



5. Untuk perbaikan dermaga telah diusulkan melalui dana DAK pada tahun 2024, tetapi tidak ada anggaran yang diturunkan dan di daerah juga tidak ada anggaran.
6. Terkait belum adanya langkah kongkret integrasi dalam *spending of money* dari OPD lain disebabkan tidak adanya koordinator dari OPD yang mempunyai tugas dan fungsi selaku koordinator OPD.

Strategi yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pariaman untuk mencapai target pada tahun selanjutnya, sebagai berikut

1. Melakukan promosi objek wisata.
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dalam Memasarkan wisata dapat melakukan promosi Hotel, *Homestay* dan Kuliner di Kota Pariaman.
3. Penyediaan Paket Wisata Menarik.
4. Peningkatan Infrastruktur.
5. Kolaborasi dengan Pelaku Industri.
6. Selenggarakan acara tahunan, festival, atau kompetisi yang menarik perhatian wisatawan, seperti festival budaya, konser musik, atau lomba olahraga.

Program yang mendukung meningkatkan Pertumbuhan Nilai Investasi Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Program Pengembangan Kebudayaan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp916.015.499,- dengan realisasi sebesar Rp912.244.636,- atau dengan capaian realisasi 99,59%.
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan Pagu Anggaran sebesar Rp215.366.820 dengan realisasi sebesar Rp195.064.215 atau dengan capaian realisasi 90,57%.
3. Program Pengelolaan Permuseuman dengan Pagu Anggaran sebesar Rp634.500 dengan realisasi sebesar Rp634.500 atau dengan capaian realisasi 100%.
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.275.890.815 dengan realisasi sebesar Rp1.218.543.462 atau dengan capaian realisasi 95,51%.



5. Program Pemasaran Pariwisata dengan pagu anggaran sebesar Rp73.699.232 dengan realisasi sebesar Rp73.456.200 atau dengan capaian sebesar 99,67%.
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pagu anggaran sebesar Rp100.971.349 dengan realisasi sebesar Rp98.241.349 atau dengan capaian sebesar 97,30%.

Untuk mencapai indikator % Pertumbuhan Spending of Money, Kota Pariaman melaksanakan 6 Program anggaran yang berasal dari APBDP Kota Pariaman Tahun 2024 dengan Jumlah Rp2.582.578.215,- dan telah terealisasi dengan jumlah Rp2.498.184.362,- Dengan capaian realisasi 96,73%.

Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp84.393.853,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator % Pertumbuhan Spending of Money (10%) lebih rendah dari realisasi anggaran (96,73%) dengan **nilai efisiensi sebesar 0**.

Sasaran Strategie 8 Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	2,6%	-3,16%	-121,53%

Persentase Pertumbuhan Investasi adalah Total Investasi pada tahun berjalan (n) dikurangi dengan total investasi pada tahun sebelumnya (n-1) dibagi dengan total investasi pada tahun sebelumnya (n-1) di kali 100%.

Data diperoleh dengan :

1. LKPM Online melalui <https://OSS.go.id>.
2. Memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pelaporan LKPM setiap tahunnya secara periodid per tiwulan.
3. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha yang ingin melakukan pelaporan secara mandiri (jika anggaran tersedia).

Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan



lebih tinggi yaitu sebesar 2,6%. Ini dapat dilihat pada tabel realisasi nilai investasi per 31 Desember 2024 yang diambil secara *online* melalui aplikasi OSS dengan capaian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Realisasi investasi tahun } n - \text{Realisasi investasi } n-1 \times 100 \% \\ & \text{Realisasi investasi } n-1 \\ & = \frac{\text{Rp. 50.546.724.286,-} - \text{Rp. 52.196.905.043,-}}{\text{Rp. 52.196.905.043,-}} \times 100 \% = - 3,16 \% \end{aligned}$$

Adapun perbandingan Nilai Investasi Kota Pariaman dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Nilai Investasi (Rp. Juta) 2024
1	Kabupaten Padang Pariaman	3.422.044
2	Kota Padang	1.710.848
3	Kabupaten Pasaman Barat	941.068
4	Kabupaten Pesisir Selatan	459.545
5	Kabupaten Sijunjung	437.346
6	Kabupaten Dharmasraya	424.853
7	Kabupaten Solok Selatan	388.938
8	Kabupaten Agam	323.096
9	Kota Sawahlunto	266.670
10	Kabupaten Lima Puluh Kota	201.961
11	Kota Payakumbuh	85.806
12	Kabupaten Tanah Datar	36.878
13	Kabupaten Solok	23.903
14	Kabupaten Pasaman	23.549
15	Kota Bukittinggi	21.500
16	Kota Solok	14.966
17	Kota Padang Panjang	10.823
18	Kabupaten Kepulauan Mentawai	7.910
19	Kota Pariaman	7.381

Sumber: DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat



Berdasarkan tabel di atas, dari 19 Kota/Kabupaten di Sumatera Barat nilai Investasi Kota Pariaman adalah yang paling rendah di Sumatera Barat.

Perbandingan realisasi dan capaian Pertumbuhan Nilai Investasi Kota Pariaman Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Realisasi (%)				Capaian (%)			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
-3,16	-0,11	-22,07	-18,08	-121,53	-23,40	-4,597%	-2916%

Pertumbuhan Nilai investasi di Kota Pariaman dari tahun 2021 sampai tahun 2024 selalu berada pada zona minus (-). Yang terdalam adalah pada tahun 2022 di mana pertumbuhan nilai investasi saat itu adalah -22,07%. Capaian Kota Pariaman juga berada di zona minus (-).

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja dari Pertumbuhan Nilai Investasi Kota Pariaman dengan target jangka menengah dan RPD Kota Pariaman sebagai berikut:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
0,62	0,48	0,47	2,6	-18,08	-22,07	-0,11	-3,16

Berdasarkan hasil realisasi Pertumbuhan Nilai Investasi Kota Pariaman beberapa tahun terakhir, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 pertumbuhan nilai investasi Kota Pariaman cenderung turun dan belum ada satupun realisasi yang bisa mencapai target jangka menengah, selanjutnya terdapat penurunan pertumbuhan nilai investasi pada Tahun 2024 menjadi -3,16%. Penetapan target ke depan akan dikaji kembali saat perencanaan.

Adapun capaian realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan nilai investasi Kota Pariaman Tahun 2024	Target Pertumbuhan nilai Investasi Kota Pariaman Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
-3,16 %	3,0%	-105,33%



Tingkat capaian Pertumbuhan Nilai Investasi Kota Pariaman Tahun 2024 terhadap target akhir periode hanya bisa -105,33%. Kota Pariaman optimis target akhir periode akan tercapai pada tahun 2026.

Kendala/permasalahan-permasalahan yang menyebabkan turunnya nilai investasi di Kota Pariaman, sebagai berikut :

1. Tidak ada preamban investasi di perusahaan NON UMK
Penurunan investasi dari perusahaan non-UMK, seperti PT Hayati Pratama Mandiri Pariaman dan PT Cipta Niaga Semesta, pada tahun 2024 disebabkan oleh ketentuan dalam pelaporan LKPM. Penambahan biaya operasional atau modal kerja tidak diakui sebagai penambahan realisasi investasi, karena hanya diakui satu kali pada saat penyampaian LKPM pertama. Oleh karena itu, apabila tidak ada penambahan pembelian aset, laporan LKPM mereka akan tercatat dengan nilai Rp 0.
2. Persaingan dengan Daerah Lain:
Kota Pariaman menghadapi persaingan dengan daerah lain yang menawarkan fasilitas dan insentif investasi yang lebih menarik.
3. Hambatan Perizinan dan Regulasi.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan pertumbuhan nilai investasi di Kota Pariaman pada tahun 2024 meliputi:

1. Penyusunan Feasibility Study (FS) Proyek Investasi – Pemerintah Kota Pariaman bekerjasama dengan Provinsi Sumatera Barat untuk menyusun studi kelayakan untuk rencana pembangunan *Convention Centre* yang berlokasi di Taluak, Sumatera Barat.
2. Pelatihan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) – Mengadakan pelatihan bagi pelaku usaha agar dapat menyampaikan LKPM dengan baik dan sesuai ketentuan.
3. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Usaha – Pemerintah turut serta dalam membantu penyelesaian kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan investasinya.



4. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kemudahan Berinvestasi – Menyusun regulasi untuk memberikan kemudahan bagi calon investor sehingga lebih tertarik berinvestasi di Kota Pariaman.

Strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan Nilai Investasi Kota Pariaman Tahun 2025 sebesar 2.8 % adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan pelatihan atau sosialisasi kepada perusahaan mengenai aturan dan mekanisme pelaporan LKPM, termasuk jenis-jenis investasi yang dapat diakui dalam laporan.
2. Meningkatkan promosi peluang investasi dengan menggencarkan kampanye melalui media digital, partisipasi dalam forum investasi, serta membangun citra positif Kota Pariaman sebagai kota ramah investasi.
3. Memberikan berbagai insentif seperti pengurangan pajak, keringanan retribusi daerah, serta kemudahan akses lahan untuk menarik investor baru.
4. Mempercepat dan mempermudah proses perizinan melalui sistem pelayanan terpadu berbasis digital untuk meningkatkan kemudahan berusaha.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kota Pariaman berharap dapat meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Program yang mendukung meningkatkan Pertumbuhan Nilai Investasi Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

7. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp5.094.000,- dengan realisasi sebesar Rp5.094.000,- atau dengan capaian realisasi 100%.
8. Program Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp355.798.348,- dengan realisasi sebesar Rp330.913.362,- atau dengan capaian realisasi 93%.
9. Program Program Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp397.530.000,- dengan realisasi sebesar Rp386.242.080,- atau dengan capaian realisasi 97.16%.

Untuk mencapai indikator Pertumbuhan Nilai Investasi, Kota Pariaman melaksanakan 3 Program anggaran yang berasal dari APBDP Kota Pariaman



Tahun 2024 dengan Jumlah Rp758.422.348,- dan telah terealisasi dengan jumlah Rp722.249.442,- Dengan capaian realisasi 95,23%.

Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp36.172.906,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Pertumbuhan Nilai Investasi (-121,53%) lebih rendah dari realisasi anggaran (95,23%) dengan nilai efisiensi sebesar 0.

Sasaran Strategis 9			
Menurunnya Angka Kemiskinan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kemiskinan	3,92%	4,26%	91,32%

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan ekonomi yang harus segera diatasi. Kemiskinan memiliki dampak pada penurunan kualitas hidup, menghambat terciptanya sumberdaya manusia unggul, menciptakan beban sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan kriminalitas dan menurunkan ketertiban umum.

Cara Menghitung Angka Kemiskinan:

1. Menghitung angka kemiskinan melibatkan beberapa langkah, dimulai dengan menentukan garis kemiskinan, yaitu pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, lalu membandingkannya dengan pengeluaran per kapita penduduk, dan menghitung persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Berikut adalah langkah-langkah lebih detail:

1. Menentukan Garis Kemiskinan (GK):

- a. Kebutuhan Pokok:

Garis kemiskinan (GK) adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, yaitu kebutuhan makanan (setara 2100 kkal/kapita/hari) dan kebutuhan non-makanan.

- b. Pengeluaran Minimum:



GK mencakup pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan dan non-makanan, yang digunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa yang dianggap miskin.

c. Metode BPS:

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk mengumpulkan data pengeluaran dan harga komoditas untuk menghitung GK.

2. Menghitung Pengeluaran Per Kapita:

- a. Pengeluaran Total: Hitung total pengeluaran yang dilakukan oleh setiap rumah tangga.
- b. Pengeluaran Per Kapita: Bagi total pengeluaran rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga untuk mendapatkan pengeluaran per kapita.

3. Menentukan Penduduk Miskin:

- a. Membandingkan dengan GK: Bandingkan pengeluaran per kapita setiap individu dengan garis kemiskinan (GK).

4. Penduduk Miskin: Jika pengeluaran per kapita seseorang di bawah GK, maka orang tersebut dianggap miskin.

5. Menghitung Persentase Penduduk Miskin:

- a. Rumus: Persentase penduduk miskin dihitung dengan membagi jumlah penduduk miskin dengan jumlah total penduduk, lalu dikalikan 100%.
- b. Rumus Matematis: $(\text{Jumlah penduduk miskin} / \text{Jumlah total penduduk}) \times 100\%$.

6. Indikator Tambahan:

- a. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1): Menunjukkan rata-rata selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan.
- b. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2): Menunjukkan rata-rata selisih kuadrat pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan.

7. Head Count Index (HCI-P0): Persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Contoh:



- a. Jika garis kemiskinan adalah Rp 263.301 per bulan (setara 2100 kkal/hari), dan seorang memiliki pengeluaran per kapita Rp 200.000 per bulan, maka orang tersebut dianggap miskin.
- b. Jika dari 100 orang, 20 orang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan, maka persentase penduduk miskin adalah 20%.

Data pengeluaran per kapita yang disesuaikan dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan penjelasan:

1. Susenas merupakan sumber data rata-rata pengeluaran per kapita setahun dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota.
2. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP).
3. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah.
4. Pengeluaran per kapita memberikan gambaran tingkat daya beli masyarakat.
5. Pengeluaran per kapita dapat dipengaruhi oleh pendapatan perkapita yang dihasilkan masyarakat.
6. Pengeluaran per kapita digunakan untuk mengukur standar hidup manusia.
7. Pengeluaran per kapita menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk.
8. Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, angka kemiskinan Kota Pariaman di tahun 2024 adalah sebesar 4,26%. Angka ini sedikit naik dari angka kemiskinan Kota Pariaman di Tahun 2023 yakni sebesar 4.20%. Realisasi di Tahun 2024 belum sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni sebesar 3.92 %. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman mencatat angka kemiskinan Kota Pariaman naik menjadi 4,26 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.010 jiwa pada tahun 2024. Angka ini mengalami kenaikan dibanding hasil



survei ekonomi pada tahun 2023 yaitu 4,20 persen dan tahun 2022 yaitu 4,13 persen.

Kenaikan angka kemiskinan Kota Pariaman pada 2024 dibandingkan tahun 2023 bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kenaikan garis kemiskinan perkotaan, peningkatan angka inflasi dan perubahan kebijakan bantuan sosial.

1. Pada 2023 Garis kemiskinan di Kota Pariaman adalah Rp 548.147,00 per kapita per bulan, sementara pada tahun 2024 terjadi kenaikan garis kemiskinan di menjadi sebesar Rp. 619.000,00 per kapita per bulan, dalam hal ini kenaikan garis kemiskinan dapat berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di Kota Pariaman pada tahun 2024.
2. Pada April 2024 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* di Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,81 persen dibandingkan kondisi angka inflasi pada bulan April 2023. Hal ini membuat kenaikan harga barang dan jasa, terutama bahan pokok sehingga dapat mengurangi daya beli masyarakat membuat lebih banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Dari sisi pendapatan masyarakat miskin yang cenderung konstan/tetap sementara kebutuhan pengeluaran yang harus dipenuhi mengalami peningkatan akibat dari lonjakan tersebut. Hal ini mendorong masyarakat rentan yang hidup diambang batas garis kemiskinan mendorong kenaikan jumlah penduduk miskin.
3. Perubahan dari bantuan sosial tunai menjadi bantuan tidak tunai atau penghapusan aturan penggunaan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, dapat berdampak pada kelompok rentan yang sebelumnya mengandalkan bantuan tersebut.

Tidak tercapainya target dibandingkan realisasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Pariaman pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Dikarenakan masih banyaknya penduduk yang rentan miskin (penduduk yang berada sedikit diatas garis kemiskinan tahun 2023) sehingga ketika sewaktu adanya peningkatan garis kemiskinan di tahun 2024, penduduk yang rentan tersebut akan jatuh menjadi penduduk miskin.
2. Pada saat dilaksanakan pendataan Register Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilaksanakan pada bulan tahun 2023, terjadi lonjakan ekonomi/inflasi



akibat kenaikan harga barang komoditas pertanian dan jasa yang berdampak langsung terhadap kebutuhan pokok masyarakat.

3. Dari sisi pendapatan masyarakat miskin yang cenderung konstan/tetap sementara kebutuhan pengeluaran yang harus dipenuhi mengalami peningkatan akibat dari lonjakan tersebut.
4. Belum optimalnya harmonisasi dan integrasi data antara Data DTKS dan data kemiskinan ekstrem P3KE, sehingga tidak bisa disandingkan karena adanya perbedaan metode pendataan yang dilaksanakan, sehingga membuat pendistribusian program jaminan sosial tumpang tindih dalam proses penyaluran kepada masyarakat penerima manfaat.

Adapun perbandingan Angka Kemiskinan/Persentase Penduduk Miskin Kota Pariaman dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin 2024
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	13.89
2	Kabupaten Pesisir Selatan	7.49
3	Kabupaten Solok	7.31
4	Kabupaten Pasaman Barat	7
5	Kabupaten Lima Puluh Kota	6.92
6	Kabupaten Agam	6.83
7	Kabupaten Pasaman	6.74
8	Kabupaten Solok Selatan	6.56
9	Kabupaten Padang Pariaman	6.27
10	Kabupaten Sijunjung	5.78
11	Kabupaten Dharmasraya	5.32
12	Kota Padang Panjang	5.31
13	Kota Payakumbuh	5.19
14	Kabupaten Tanah Datar	4.28
15	Kota Pariaman	4.26
16	Kota Bukittinggi	4.08
17	Kota Padang	4.06



18	Kota Solok	3.07
19	Kota Sawahlunto	2.33

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel di atas, Persentase penduduk miskin Kota Pariaman masih berada dibawah angka rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan berada pada posisi 5 terendah di Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan realisasi dan capaian Angka Kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Realisasi				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
4.26%	4.20%	4.13%	4.38%	91,32%	80%	94,10%	95,71%

Berdasarkan realisasi beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan pada tahun 2022, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024. Capaian dari Angka Kemiskinan Kota Pariaman belum pernah mencapai 100%.

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja Menurunkan Angka Kemiskinan Kota Pariaman dengan target jangka menengah dan RPD Kota Pariaman sebagai berikut:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2021	2021	2022	2023	2024
4.20%	3.90%	3.50%	3.92%	4.38%	4.13%	4.20%	4.26%

Berdasarkan realisasi Persentase Penduduk Miskin Kota Pariaman beberapa tahun terakhir, dari Tahun 2021 hingga Tahun 2022 mengalami penurunan, namun dari Tahun 2022 ke Tahun 2024 cenderung naik, namun masih belum bisa mencapai target RPD Tahun 2024.

Adapun capaian realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Angka Kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2024	Target Angka Kemiskinan Kota Pariaman Periode Akhir RPD (2026)	Capaian



4.26%	3,55%	80%

Tingkat capaian Angka Kemiskinan terhadap target akhir periode RPD hanya 80%.

Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Pariaman dengan Angka Kemiskinan secara Nasional sebagai berikut:

Angka Kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2024	Angka Kemiskinan Nasional Tahun 2024	Capaian
4.26%	9,03%	152,8%

Sumber: fiskal.kemenkeu.go.id

Angka Kemiskinan Kota Pariaman berada di bawah Angka Kemiskinan Nasional dengan capaian 152,8%. Tercatat tingkat kemiskinan pada 2023 berada di angka 9,36% turun menjadi 9,03% pada 2024. Selain itu, tingkat kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan dari 1,12% menjadi 0,83%.

Kota Pariaman telah melakukan berbagai upaya dalam menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dengan berfokus kepada 3 Strategi Utama:

1. Meningkatkan Pendapatan

- Meningkatkan Pendapatan melalui Akses terhadap Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar. Dalam Hal ini kota Pariaman melalui Dinas PMTSP dan Naker telah melakukan Upaya memberikan akses pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi melalui Kerja sama dengan berbagai pihak.
- Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat melalui program SAGA SAJA (Satu Keluarga Satu Sarjana) dengan memastikan anak-anak berpotensi dari keluarga berpenghasilan rendah mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik sehingga mereka dapat keluar dari rantai kemiskinan di keluarganya.
- Melakukan Peningkatan Kapasitas UMKM dan Akses Pembiayaan UMKM. Kegiatan ini dilakukan melalui Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dengan tujuan agar



meningkatnya skala usaha UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran serta melalui Kegiatan Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro yang bertujuan Meningkatkan status usaha mikro dari non formal menjadi formal (legalitas usaha).

2. Menurunkan Beban Pengeluaran

Dalam menurunkan beban pengeluaran, Kota Pariaman memastikan Kelompok Miskin dan Miskin Ekstrem memperoleh berbagai program-program perlindungan sosial. Kegiatan ini dilakukan melalui program yang ada di Dinas Sosial Kota Pariaman melalui penyaluran Bantuan Tunai (BLT) maupun Non Tunai (PKH, Permakanan, dll).

- a. Kegiatan Penyediaan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- b. Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan tujuan memulangkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis ke daerah asalnya. Dengan memfasilitasi orang terlantar dalam perjalanan dan membantu biaya untuk menuju daerah tujuannya.
- c. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bagi anak jalanan dan anak putus sekolah agar bisa mendapatkan keterampilan untuk menunjang kehidupannya di masa yang akan datang.
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini bertujuan untuk memastikan terlaksananya verifikasi dan validasinya PBI-JKN (Pusat) dalam DTKS dan terlaksananya survey usulan data dari kelurahan untuk JKSS dan PB Pemda yang berguna untuk ketepatan sasaran dalam pengentasan kemiskinan.

3. Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

1. Meningkatkan Akses terhadap Layanan Dasar

- a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal



- dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan keluarga melalui keberagaman gizi yang seimbang dan aman.
- b. Program Penanganan Kerawanan Pangan; Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan, Dimana kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan di Kota Pariaman.
 - c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dengan tujuan Meningkatkan kemampuan Kelompok Pembudidaya Ikan dalam menerapkan teknologi terapan melalui Pembuatan Pakan Alternatif dan Bantuan Sarana Pembudidaya Ikan.
 - d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. Program ini bertujuan Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha olahan hasil perikanan di mana dengan adanya fasilitasi pemasaran hasil Perikanan melalui bazar promosi dan pameran dapat mendongkrak penjualan produk olahan.
 - e. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi. Program ini bertujuan fasilitasi petani dalam menerima manfaat pupuk bersubsidi, melalui penyusunan e-RDKK (e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
 - f. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman yang bertujuan untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Melalui Pengembangan Padi dan Jagung (Bantuan Benih Padi), Pengembangan benih Bawang Merah dan Benih Siap Tanam (BST).
 - g. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan tujuan untuk Peningkatan Populasi Ternak



Sapi melalui Pemberian Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) secara gratis kepada Peternak.

II. Mendorong konvergensi anggaran

Bappeda Kota Pariaman sudah memastikan bahwa anggaran yang terintegrasi dengan program penanggulangan kemiskinan di Kota Pariaman sudah masuk ke dalam tagging anggaran kemiskinan dan berkelanjutan melakukan evaluasi kesesuaian dan keselarasan program tersebut agar sepenuhnya mendukung program penanggulangan kemiskinan di Kota Pariaman

III. Meningkatkan Peran Daerah dan Pemangku Kepentingan

Komitmen Kota Pariaman dalam penanggulangan kemiskinan Kota Pariaman sudah tertuang dalam Keputusan Walikota Pariaman Nomor 116/050/2024 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pariaman Tahun 2024. SK ini jelas melibatkan seluruh SKPD dalam pengentasan kemiskinan di Kota Pariaman.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi melambat dan cenderung menurun sejak Pandemi Covid-19 namun mulai tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sudah mulai positif dengan 4,79%.
2. Masih rendahnya Pengeluaran Perkapita Disesuaikan tahun 2023 sebesar Rp.13.150.000,-/orang/tahun.
3. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka cenderung stagnan sebesar 5,68 % pada tahun 2023.
4. Pembangunan Manusia masih belum tinggi. Pada Tahun 2023 IPM Kota Pariaman berada pada nilai 79,76 Tahun, sudah cukup Baik. Tapi masih perlu ditingkatkan dan berada pada nomor urut Ke-4 di Provinsi Sumatera Barat.
5. Angka Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2023 berada pada nilai 14,61 tahun yang artinya masyarakat Kota Pariaman rata-rata pendidikan berada hampir D.III. Dan ke depan bisa ditingkatkan menjadi S-1/D.IV
6. Produktivitas Sektor Pariwisata Yang Masih Rendah dengan Kontribusinya masih sebesar 5 % Terhadap PAD



7. Rata-rata Lama Sekolah pada Tahun 2023 berada pada nilai 10,79 Tahun. Sudah cukup Baik. Tapi masih perlu ditingkatkan agar Wajib Belajar 12 Tahun bisa tercapai di Kota Pariaman. Walaupun Nasional masih menargetkan 9 Tahun.
8. Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pariaman Tahun 2023 baru mencapai 74,20 Tahun.

Beberapa upaya/strategi yang akan ditargetkan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Dalam Rangka Menurunkan Angka Kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2025, Arah kebijakan untuk memenuhi target ini adalah dengan;

1. Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi.
3. Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
4. Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Pariaman.
5. Kesempatan Kerja bagi Keluarga Miskin.
6. Pengurangan beban hidup warga kurang mampu.
7. Meningkatkan ketepatan sasaran warga kurang mampu penerima manfaat.

Program yang mendukung meningkatkan Pertumbuhan Nilai Investasi Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan tujuan untuk memastikan tersedianya data dan informasi ketenagakerjaan yang akurat, di mana realisasi anggaran untuk Tahun 2024 untuk 150 Orang yakni sebesar Rp124.712.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp123.154.740 (98,75%)
2. Program SAGA SAJA dengan terus melanjutkan kemudahan akses pendidikan bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin/berpenghasilan rendah. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini di Tahun 2024 berjumlah Rp1.925.000.000 dengan realisasi sebesar Rp1.139.600.000 (59,2%).
3. Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha kecil, dan Usaha mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM untuk memastikan semakin meningkatnya skala UMKM yang terfasilitasi pemasaran melalui kegiatan



pengembangan usaha mikro. Realisasi Anggaran kegiatan ini sudah Sebesar 98.8% dimana Pagu Anggaran Keseluruhan adalah Rp1.425.577.777 dengan realisasi sebesar Rp1.408.469.657.

4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan mencegah kerawanan pangan. Realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp241.937.908 (76.1%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 318.002.908.
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dimana Kota Pariaman akan terus memastikan kelompok miskin dan miskin ekstrem tetap memperoleh berbagai program perlindungan social melalui bantuan pangan tunai maupun non tunai. Memastikan penerima manfaat sudah sesuai dan tepat guna. Total Anggaran untuk kegiatan ini selama Tahun 2024, baik dari yang bersumber APBN Kemensos RI dan APBD Kota Pariaman berjumlah Rp2.472.480.000, dengan realisasi sudah 100%.

Untuk mencapai indikator angka kemiskinan, Kota Pariaman melaksanakan 5 Program dengan anggaran yang berasal dari APBDP Kota Pariaman Tahun 2024 dan APBN dengan Jumlah Rp4.343.724.000,- dan telah terealisasi dengan jumlah Rp3.511.724.000,- Dengan capaian realisasi 80,85%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp880.130.880,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Angka Kemiskinan (91,32%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (85,95%) dengan nilai efisiensi sebesar 36,76%.

Sasaran Strategis 10 Menurunnya Angka Pengangguran			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,72%	5,32%	87,28%

Pengangguran terbuka adalah situasi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja aktif tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.



Penjelasan terkait tingkat pengangguran terbuka:

1. Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja
2. TPT menunjukkan indikasi besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran
3. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menyebabkan rendahnya TPT

$$\text{Cara penghitungan TPT : } \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi yaitu sebesar 4,72%. Berdasarkan data Pariaman dalam angka 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pariaman di tahun 2024 adalah sebesar 5,32%. Angka ini turun dari Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pariaman di Tahun 2023 yakni sebesar 5,68%. Realisasi di Tahun 2024 belum sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni sebesar 4,72%.

Perbandingan hasil evaluasi Kota Pariaman dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka 2024
1	Kota Padang	9,88
2	Kabupaten Padang Pariaman	6,59
3	Kabupaten Pasaman Barat	6,34
4	Kabupaten Dharmasraya	6,02
5	Kota Sawahlunto	5,55
6	Kota Pariaman	5,32
7	Kabupaten Tanah Datar	5,30
8	Kabupaten Pasaman	5,25
9	Kabupaten Pesisir Selatan	5,06
10	Kota Padang Panjang	4,94
11	Kota Payakumbuh	4,87
12	Kabupaten Agam	4,73



13	Kabupaten Sijunjung	4,73
14	Kota Bukittinggi	4,72
15	Kabupaten Lima Puluh Kota	3,68
16	Kabupaten Solok	3,62
17	Kota Solok	3,62
18	Kabupaten Solok Selatan	2,30
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1,44

Sumber: Pariaman Dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka, Kota Pariaman berada di urutan ke 6 dari 19 Kabupaten Kota dengan persentase TPT terbanyak, urutan TPT terbanyak adalah Kota Padang dengan 9,88% dan TPT paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari tabel berikut:

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pariaman Tahun 2024	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Capaian
5,32%	5,75%	107,5%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa perbandingan realisasi TPT Kota Pariaman sebanyak 5,32% berada di bawah TPT Provinsi Sumatera Barat 5,75% dengan capaian 107,5% terhadap TPT Sumatera Barat.

Perbandingan realisasi dan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pariaman Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Realisasi				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
5,32	5,68	5,19	6,09	87,28%	86,62%	103,88%	93,71%

Berdasarkan realisasi beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan pada tahun 2022, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023.



Perbandingan target dan realisasi capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pariaman dengan target jangka menengah dan RPD Kota Pariaman sebagai berikut:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5.73	5.40	5.01	4,72	6,09	5,19	5,68	5,32

Berdasarkan hasil realisasi TPT Kota Pariaman beberapa tahun terakhir, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Kota Pariaman cenderung turun, namun masih belum bisa mencapai target jangka menengah, selanjutnya terdapat peningkatan pada Tahun 2024 menjadi 5.32 %

Adapun capaian realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut:

TPT Kota Pariaman Tahun 2024	Target TPT Kota Pariaman Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
5,32 %	4,10 %	70%

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Tingkat capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pariaman terhadap target akhir periode RPD hanya 70%.

Perbandingan hasil capaian Kota Pariaman dengan TPT secara Nasional sebagai berikut:

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pariaman Tahun 2024	Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional Tahun 2024	Capaian
5,32%	4,91%	91,6%

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa perbandingan realisasi TPT Kota Pariaman berada di atas realisasi TPT Nasional yaitu 4,91% dengan capaian 91,6% terhadap nasional. Kota Pariaman masih melakukan upaya dengan meningkatkan kesempatan kerja agar Tingkat Pengangguran Terbuka menurun setiap tahunnya.



Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan tingkat kesempatan kerja sehingga menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pencari kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi pada berbagai lembaga pelatihan kerja.
2. Meningkatkan pelayanan kepada para pencari kerja melalui aplikasi SIAPkerja, dengan semakin banyak pencari kerja yang mengakses dan memanfaatkan layanan SIAPkerja, maka semakin banyak informasi ketenagakerjaan yang tersampaikan kepada pencari kerja, seperti informasi lowongan pekerjaan dan program-program kementerian ketenagakerjaan yang dapat diterapkan di Kota Pariaman untuk memperluas kesempatan kerja.
3. Memperbanyak kerja sama dengan lembaga pemberi kerja yaitu melanjutkan kerja sama penempatan tenaga kerja dengan Batam Shipyard & Offshore Association (BSOA) dan melakukan program pemagangan, bekerjasama dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Bidang Vokasi dan Sertifikasi, tentang Pemagangan dalam dan luar negeri melalui Program *Ground Handling*.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan masih ditemui sejumlah kendala/permasalahan-permasalahan di antaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pencari kerja melalui pelatihan berbasis
2. Meningkatkan pelayanan kepada para pencari kerja melalui aplikasi SIAPkerja
3. Memperbanyak kerja sama dengan lembaga pemberi kerja

Untuk mencapai target akhir periode tingkat pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Pariaman melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pariaman khususnya bidang tenaga kerja tetap merencanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi namun karena adanya *recofusing* anggaran maka kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. Namun kami tetap melakukan koordinasi dengan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kepada warga Kota Pariaman.



2. Memberikan sosialisasi bagi pelaku usaha agar dapat bersinergi dalam menentukan pelatihan apa saja yang memang dibutuhkan.
3. Mengirim peserta pelatihan diberbagai Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) seperti BBPVP Serang, BBPVP Bandung, BBPVP Medan, BBPVP Bekasi dan BBPVP Semarang.
4. Meningkatkan pelayanan informasi pasar kerja kepada para pencari kerja di Kota Pariaman.

Program yang mendukung penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan Pagu Anggaran sebesar Rp146.324.000,- dengan realisasi sebesar Rp144.691.240,- atau dengan capaian realisasi 98.88%.
2. Program Program Program Hubungan Industrial dengan Pagu Anggaran sebesar Rp19.238.500,- dengan realisasi sebesar Rp18.738.500,- atau dengan capaian realisasi 97.40%.

Untuk mencapai indikator angka kemiskinan, Kota Pariaman melaksanakan 2 Program anggaran yang berasal dari APBDP Kota Pariaman Tahun 2024 dengan Jumlah Rp165.562.500,- dan telah terealisasi dengan jumlah Rp162.429.740,- Dengan capaian realisasi 98,71%.

Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp2.132.760,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (87,28%) lebih rendah dari realisasi anggaran (98,71%) dengan nilai efisiensi sebesar 27,01%.

Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Kemandirian Desa			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Desa Membangun	0,7874	0,8045	102,17%

IDM Merupakan indeks komposit untuk memotret atau mengetahui tingkat perkembangan suatu desa berdasarkan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan



Lingkungan. Dengan IDM ini akan dapat diketahui status perkembangan desa yaitu Tertinggal, Berkembang, Maju dan Mandiri.

Pelaksanaan perhitungan IDM 2024 berpedoman kepada Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor. 400 Tahun 2024 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024. Cara perhitungan IDM adalah dengan menetapkan setiap indikator memakai skor. Nilai skor adalah 0-5, penetapan skor berdasarkan FGD *Analitycal Hierarchy Proces* (AHP). Perhitungan Indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode skoring dan remediasi ditransformasikan menjadi sebuah indeks

$$Ix = \frac{\sum_{i=1}^n \text{skor } X_i}{n \times 5}$$

$$n \times 5$$

Ix = Indeks

N = Jumlah indikator

Untuk perhitungan IDM adalah dengan cara menghitung indeks rata-rata ketahanan sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus :

$$\text{IDM} = \frac{\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL}}{3}$$

$$3$$

IDM = Indeks Desa Membangun

IKS = Indeks Ketahanan Sosial

IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan

Setelah didapatkan hasil dari perhitungan IDM maka dapat ditetapkan kriteria status perkembangan desa seperti dibawah ini :

No.	Nilai IDM	Status Perkembangan Desa
1	$\text{IDM} \leq 0,4907$	Desa Sangat Tertinggal
2	$0,4907 < \text{IDM} \leq 0,5989$	Desa Tertinggal
3	$0,5989 < \text{IDM} \leq 0,7072$	Desa Berkembang
4	$0,7072 < \text{IDM} \leq 0,8155$	Desa Maju
5	$\text{IDM} > 0,8155$	Desa Mandiri



Untuk menghitung IDM tingkat Daerah Kab/Kota dilakukan dengan cara :

$$\text{IDM kab/kota} = \frac{\text{Jumlah IDM seluruh desa}}{\text{Jumlah seluruh desa}}$$

Sumber data diperoleh melalui Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor. 400 Tahun 2024 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Walikota Pariaman No.35 Tahun 2003 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 maka target tahun 2024 ditetapkan lebih rendah yaitu 0,7874. Realisasi tahun 2024 adalah 0,8045 dengan capaian 102,17% terhadap target.

Perbandingan hasil evaluasi Kota Pariaman dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Nilai 2024
1	Kabupaten Tanah Datar	0,8304
2	Kabupaten Sijunjung	0,8217
3	Kabupaten Lima Puluh Kota	0,8106
4	Kota Pariaman	0,8045
5	Kabupaten Agam	0,8008
6	Kabupaten Solok Selatan	0,7885
7	Kota Sawahlunto	0,7876
8	Kabupaten Dharmasraya	0,7868
9	Kabupaten Pesisir Selatan	0,7743
10	Kabupaten Solok	0,7461
11	Kabupaten Padang Pariaman	0,7444
12	Kabupaten Pasaman	0,7432
13	Kabupaten Pasaman Barat	0,7126
14	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0,6791

Sumber: Kepmen Desa PDTT No.400 Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas maka nilai IDM Kota Pariaman Tahun 2024 berada pada tingkat menengah dan masuk 5 (lima) besar tertinggi Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat



Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dari Indeks Desa Membangun Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

Realisasi				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
0,8045	0,7953	0,7744	0,7485	102,17%	100,41%	100,44%	106,69%

Berdasarkan data IDM di atas diketahui bahwa capaian nilai IDM Desa di Kota Pariaman selalu berada di atas 100% sejak tahun 2021. Hal ini tidak lepas dari komitmen Pemerintah Kota dan pihak terkait lainnya seperti pendamping desa, OPD terkait, Pemerintah Desa sendiri serta masyarakat pada umumnya. Namun untuk kedepannya akan diupayakan peningkatan status perkembangan desa bagi desa yang belum mempunyai Status Mandiri.

Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja IDM Kota Pariaman dengan target jangka menengah dan RPD Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
0,7015	0,7710	0,7920	0,7874	0,7485	0,7744	0,7953	0,8045

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil realisasi IDM Kota Pariaman di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan upaya yang serius dari Pemerintah Kota Pariaman serta *stakeholder* terkait lainnya untuk berkomitmen memajukan desa di Kota Pariaman

Capaian realisasi IDM Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPD adalah sebagai berikut :

IDM Kota Pariaman Tahun 2024	Target IDM Kota Pariaman Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
0,8045	0,8133	98,91%

Capaian IDM Kota Pariaman tahun 2024 dibandingkan target akhir RPD 2026 mencapai 98,91%, hal ini cukup tinggi dan memuaskan.



Perbandingan realisasi IDM Kota Pariaman tahun 2024 dengan IDM rata-rata Kab/Kota secara nasional adalah sebagai berikut :

IDM Kota Pariaman Tahun 2024	IDM Kab/Kota Secara Nasional	Capaian
0,8045	0,7034	114,37%

Sumber: Indeks Desa Membangun 2024

Capaian IDM Kota Pariaman tahun 2024 dibandingkan dengan IDM rata-rata Kab/Kota secara nasional adalah 114,37%. Hasil ini cukup tinggi dan melebihi capaian IDM rata-rata Kab/Kota secara nasional.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan nilai IDM Kota Pariaman tahun 2024 adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perangkat desa.
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas OPD dan instansi terkait.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pemerintah Desa.
4. Memberdayakan lembaga-lembaga ekonomi desa.
5. Peningkatan keterampilan dan keprofesionalan.
6. Mengadakan kerja sama antar desa dan pihak ketiga.
7. Menciptakan kebijaksanaan bagi peningkatan lingkungan yang kondusif untuk pemberdayaan perekonomian desa.

Kendala dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan IDM Kota Pariaman tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kapasitas aparatur desa.
2. Lemahnya tata kelola kewenangan desa.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa.
4. Rendahnya inovasi dalam pemberdayaan ekonomi desa.
5. Regulasi yang semakin berubah dan kurangnya sinkronisasi kebijakan.

Strategi yang akan di implementasikan dalam rangka meningkatkan IDM oleh Pemerintah Kota Pariaman pada tahun selanjutnya, untuk mencapai target akhir periode, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur desa.
2. Melakukan koordinasi yang efektif dengan OPD/instansi terkait.



3. Peningkatan efektifitas, efisiensi, akuntabel dan transparansi kewenangan desa.
4. Peningkatan daya inovasi pemerintah desa dalam pembangunan dan pelayanan.

Program yang mendukung peningkatan IDM Kota Pariaman tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan Desa dengan pagu anggaran Rp3.000.000,- dengan realisasi Rp3.000.000 atau dengan capaian realisasi 100%.
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran Rp127.988.079,- dengan realisasi Rp71.029.496,- atau dengan capaian realisasi 55,49%.
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran Rp2.380.496.166,- dengan realisasi Rp.2.197.499.166,- atau dengan capaian realisasi 92,31%.

Untuk mencapai Indeks Desa Membangun, Kota Pariaman melaksanakan 3 Program anggaran yang berasal dari APBDP Kota Pariaman Tahun 2024 dengan Jumlah Rp2.511.484.245,- dan telah terealisasi dengan jumlah Rp2.271.528.662 atau dengan capaian 90,45%

Hal ini menunjukan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp251.061.589,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Indeks Desa Membangun (102,17%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (90,45%) dengan **nilai efisiensi sebesar 64,23%**.

Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Evaluasi AKIP Kota	65,15 (B)	57,43 (CC)	88,15%
Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%

A. Nilai Evaluasi AKIP Kota

Tujuan dari evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan



pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Adapun predikat dalam penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai)
6	C	>30-50	Kurang
7	D	>0-30	Sangat Kurang

Sumber: Menpan.go.id

Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi yaitu sebesar 65,15 dengan predikat B.

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024, Kota Pariaman memperoleh nilai 57,43 dengan predikat "CC", dengan capaian sebesar 88,15% dari target 2024 yaitu 65,15 (B). Implementasi SAKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja. Hasil ini tertuang dalam Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/120/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahu 2024.

Hasil Evaluasi AKIP Kota Pariaman beserta perbandingan dengan nilai tahun sebelumnya digambarkan pada tabel di bawah ini.

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		Naik/ Turun
		2023	2024	
a. Perencanaan Kinerja	30	21,15	18,38	-2,77
b. Pengukuran Kinerja	30	17,73	16,98	-0,75
c. Pelaporan Kinerja	15	9,96	9,66	-0,3
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,65	12,41	-0,24



Nilai Hasil Evaluasi	100	61,49	57,43	-4,06
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	CC	

Sumber: Hasil Evaluasi AKIP 2024

Berdasarkan tabel di atas, terjadi penurunan realisasi nilai AKIP Kota Pariaman Tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 4,06 poin. Masing-masing komponen penilaian sebagaimana dimaksud di atas menjadi target Perjanjian Kinerja dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah, yaitu Komponen Perencanaan Kinerja dan Komponen Pengukuran Kinerja menjadi target kinerja oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman, Komponen Pelaporan menjadi target kinerja dari Sekretaris Daerah Kota Pariaman dan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja menjadi target kinerja dari Inspektur Kota Pariaman.

Penurunan nilai AKIP Kota Pariaman Tahun 2024 dikarenakan kurangnya komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah selain itu faktor terbesar penyebab turunnya nilai AKIP Tahun 2024 dikarenakan dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Kota Pariaman Tahun 2024 baik level Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah yang diunggah pada halaman esr.menpan.go.id seluruhnya belum ditandatangani/diformalkan.

Perbandingan hasil evaluasi Kota Pariaman dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Nilai 2024	Predikat
1	Kota Padang	78,68	BB
2	Kota Payakumbuh	76,01	BB
3	Kota Bukittinggi	71,43	BB
4	Kabupaten Padang Pariaman	71,05	BB
5	Kabupaten Pesisir Selatan	68,94	B
6	Kota Solok	68,59	B
7	Kabupaten Solok	68,58	B
8	Kabupaten Tanah Datar	67,60	B
9	Kabupaten Dharmasraya	67,24	B
10	Kabupaten Agam	67,11	B
11	Kabupaten Sijunjung	65,99	B
12	Kabupaten Kepulauan Mentawai	65,80	B



13	Kota Padang Panjang	64,22	B
14	Kota Sawahlunto	64,00	B
15	Kabupaten Pasaman	63,10	B
16	Kabupaten Pasaman Barat	63,01	B
17	Kabupaten Lima Puluh Kota	62,16	B
18	Kabupaten Solok Selatan	61,30	B
19	Kota Pariaman	57,43	CC

Sumber: Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel di atas, Hasil evaluasi Kota Pariaman Tahun 2024 adalah nilai evaluasi terendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja dari Nilai Evaluasi AKIP Kota Pariaman Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Realisasi				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
57,43 (CC)	61,49 (B)	61,08 (B)	60,06 (B)	88,15%	87,83%	99,31%	97,65%

Hasil evaluasi AKIP Kota Pariaman selalu mengalami kenaikan dari Tahun 2021 sampai Tahun 2023, namun mengalami penurunan pada Tahun 2024. Kota Pariaman telah menindaklanjuti sebagian hasil rekomendasi hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya yaitu sebagai berikut:

- Melakukan reviu terhadap perjenjangan kinerja yang disusun pada Perangkat Daerah.
- Melakukan publikasi terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah pada website resmi.
- Menetapkan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di mana evaluasi AKIP internal menjadi bagian dari perhitungan.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 Kota Pariaman, sebagai berikut:



Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
61,50 (B)	61,50 (B)	70,01 (BB)	65,15 (B)	60,06 (B)	61,08 (B)	61,49 (B)	57,43 (CC)

Berdasarkan hasil realisasi penilaian AKIP Kota Pariaman beberapa tahun terakhir, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 belum ada capaian AKIP yang bisa melampaui target jangka menengah, selanjutnya terdapat penurunan nilai evaluasi pada Tahun 2024 menjadi CC dengan target B.

Capaian realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD adalah sebagai berikut:

Nilai AKIP Kota Pariaman Tahun 2024	Target nilai AKIP Kota Pariaman Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
57,43 dengan Predikat CC	73,05 dengan Predikat BB	78%

Tingkat capaian Nilai AKIP Kota Pariaman Tahun 2024 terhadap target akhir periode hanya bisa mencapai 78%. Pada Tahun 2026 (tahun terakhir RPD 2024-2026), Nilai AKIP Kota ditargetkan dapat tercapai 73,05 dengan predikat BB. Kota Pariaman optimis bahwa target tersebut dapat tercapai.

Perbandingan hasil evaluasi Kota Pariaman dengan rata-rata nilai SAKIP Kabupaten/Kota secara Nasional sebagai berikut:

Rata-rata Nilai AKIP Kab/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2024	Nilai AKIP Kota Pariaman Tahun 2024	Capaian
64,23 dengan Predikat B	57,43 dengan Predikat B	89,43%

Sumber: Menpan.go.id

Capaian Nilai AKIP Kota Pariaman terhadap rata-rata realisasi secara Nasional adalah 89,43%. Hasil Evaluasi AKIP Kota Pariaman berada di bawah rata-rata realisasi Kabupaten/Kota secara Nasional.

Kendala/hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman penyebab tidak tercapainya indikator Nilai Evaluasi AKIP Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Kurangnya komitmen pimpinan terhadap implementasi SAKIP.
2. Kurangnya kualitas SDM penyusun laporan kinerja.



3. Kurangnya kualitas dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah.
4. Belum optimalnya penggunaan aplikasi e-SAKIP dalam pemantauan serta evaluasi pencapaian kinerja.
5. Kurangnya dukungan anggaran untuk mengawal rencana aksi yang telah ditetapkan.
6. Belum maksimalnya pelatihan/Bimtek bagi evaluator internal sehingga berdampak pada kualitas evaluator internal dalam melakukan reviu AKIP.
7. Belum adanya kebijakan reward atas hasil evaluasi AKIP Internal.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Nilai Evaluasi AKIP Kota Pariaman Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mengupayakan melakukan penyusunan dokumen perjanjian kinerja Kota Pariaman Tahun 2024 namun belum mendapat perhatian oleh Pj. Wali Kota Pariaman, sampai dengan akhir Tahun 2024.
2. Melakukan reviu terhadap perjenjangan kinerja yang disusun oleh Perangkat Daerah.
3. Melakukan publikasi terhadap laporan kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah pada website resmi.
4. Menerapkan *punishment* hasil evaluasi internal sesuai Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dan mengkaji menambahkan *reward* pada Peraturan Walikota tentang TPP.
5. AKIP telah memberikan rekomendasi untuk optimalisasi/penguatan evaluator internal di PD yang dituangkan di lembaran hasil evaluasi AKIP OPD.

Strategi yang ditargetkan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka mencapai target akhir periode, sebagai berikut:

1. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Matriks tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP Kota Pariaman Tahun 2024 dengan Tim SmartID.
2. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen Perjanjian Kinerja dan memastikan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja pertriwulan.



4. Melakukan asistensi/pendampingan dari Kementerian PAN RB/Tim SmartID (pihak ketiga) dalam hal evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman.
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja dengan Narasumber dari Kementerian PANRB.
6. Melaksanakan kerja sama dengan Tim Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-SAKIP Kota Pariaman dalam hal pemantauan dan evaluasi capaian kinerja dengan melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Program yang mendukung meningkatkan Nilai Evaluasi AKIP Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp9.058.000, realisasi Rp6.104.500 dengan capaian 67,39%.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan anggaran Rp25.224.189, realisasi Rp25.204.189 dengan capaian 99,9%.
3. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan anggaran Rp1.000.049.959, realisasi Rp867.027.910 dengan capaian 86,70%.
4. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran Rp420.772.465, realisasi Rp305.706.425 dengan capaian 82,75%.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Kota Pariaman melaksanakan 4 Program anggaran yang berasal dari APBDP Kota Pariaman Tahun 2024 dengan Jumlah Rp1.455.104.613,- dan telah terealisasi dengan jumlah Rp1.204.043.024. Pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dan efektif untuk mencapai indikator Nilai Evaluasi AKIP Kota.

Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp251.061.589,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Nilai Evaluasi AKIP Kota (89,43%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (82,75%) dengan nilai efisiensi sebesar 66,71%.



B. Opini BPK terhadap LKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan ke BPK RI paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Kecukupan pengungkapan.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- Efektifitas sistem pengendalian intern.

Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan sama yaitu WTP.

Berdasarkan surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor 82/8-HP XVIII.PDG/05/2024 tanggal 3 Mei 2024 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023, Kota Pariaman berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI terhadap LKPD dengan capaian 100%, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Hal ini sangat penting mengingat WTP adalah penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dimulai dari tahapan penyusunan laporan keuangan OPD yang selanjutnya laporan keuangan OPD dilakukan reviu oleh Inspektorat Kota Pariaman selanjutnya hasil reviu atas



laporan keuangan OPD disampaikan ke BPKPD di konsolidasi menjadi laporan keuangan an-audit pemerintah daerah Kota Pariaman yang selanjutnya laporan keuangan dimaksud disampaikan ke tim APIP Pemerintah Kota Pariaman untuk di reviu dan hasil reviunya atas LKPD Kota Pariaman menjadi salah satu dokumen dalam penyampaian laporan Keuangan kepada BPK RI yang disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tim pemeriksa BPK RI melaksanakan pemeriksaan untuk memberikan WTP dimulai 2 tahap di mana tahap pertama pemeriksaan interim dilakukan sebelum Pemda melakukan laporan keuangan kepada BPK dengan jadwal minggu ke empat Januari sampai dengan minggu pertama bulan Maret/ menyesuaikan dengan jadwal penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk tahap kedua dilaksanakan setelah laporan LKPD Kota Pariaman disampaikan kepada BPK yang merupakan pemeriksaan terperinci atas LKPD Kota Pariaman, dilaksanakan selama 30 hari oleh tim BPK di lapangan/Pemda. Dan pemberian Opini Pemeriksaan BPK atas laporan LKPD Kota Pariaman disampaikan kepada Pemerintah Daerah 60 hari setelah penyampaian laporan keuangan setelah dilaksanakan pembahasan Tim Pemberian Opini BPK RI dan Tanggapan tindak lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemda.

Perbandingan realisasi dan capaian Opini BPK terhadap LKPD Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir, sebagai berikut:

Realisasi				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%

Kota Pariaman selalu mempertahankan Opini WTP sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan capaian selalu 100%.

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja dari Opini BPK terhadap LKPD dengan target jangka menengah dan RPD Kota Pariaman sebagai berikut:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024



WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, Kota Pariaman selalu konsisten mendapatkan WTP dan capaian Kota Pariaman selalu 100%.

Perbandingan indikator kinerja dari Opini BPK terhadap LKPD dengan target akhir periode, sebagai berikut:

Realisasi Kota Pariaman Tahun 2024	Target Akhir Periode	Capaian
WTP	WTP	100%

Capaian Kota Pariaman terhadap target akhir periode adalah 100%.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk mempertahankan serta meningkatkan indikator Opini BPK terhadap LKPD Tahun 2024, sebagai berikut:

2. Melakukan penyampaian tepat waktu laporan keuangan kepada BPK Republik Indonesia sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
3. Melakukan rekonsiliasi setiap bulan untuk aktualisasi laporan keuangan.
4. Melakukan validasi laporan keuangan OPD untuk menjadi laporan keuangan daerah.
5. Mengupayakan penyampaian tindaklanjut pemeriksa kepada Inspektorat, sebesar 80%.
6. Melaksanakan Bimtek penyusunan laporan keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
7. Melakukan monev tindaklanjut penyelesaian temuan BPK berdasarkan LHP BPK yang dilakukan tiap semester.
8. Menyurati seluruh OPD yang masih terdapat temuan BPK.
9. Membuat SKTJM bagi ASN yang mempunyai temuan BPK dengan cara pemotongan TPP.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan nilai Opini BPK terhadap LKPD, sebagai berikut:



1. Keterlambatan penyampaian laporan dari unit kerja.
2. Ketidaksesuaian data yang disampaikan OPD dengan kondisi riil di lapangan.
3. Terjadi perubahan aturan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah.
4. Sebagian ASN sudah pindah, pensiun dan meninggal dunia, sehingga sulit untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
5. Tidak semua pimpinan unit kerja/pejabat terkait menaruh perhatian serius terhadap temuan BPK.

Strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman pada tahun selanjutnya untuk meningkatkan Opini BPK terhadap LKPD, sebagai berikut:

1. Membuat *schedule* permintaan data dan penyusunan laporan keuangan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
2. Rekonsiliasi oleh unit kerja ke Bidang terkait di Bidang Keuangan di BPKPD di Kota Pariaman.
3. Mencari informasi dan *update* peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah.
4. Menyurati dan mendatangi unit kerja baru bagi ASN yang sudah mutasi.
5. Mendatangi ahli waris untuk temuan ASN yang sudah meninggal dunia.
6. Melakukan pendampingan terhadap OPD yang mempunyai temuan dengan cara membawa OPD langsung dengan tim BPK untuk menyelesaikan temuan tersebut.

Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks SPBE	2,7	3,44	127,40%
Indeks Profesional ASN	85,96	78,65	91,49%

A. Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk



memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Tujuan dari Penilaian SPBE adalah untuk menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - <4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup



5	<1,8	Kurang

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan hasil evaluasi Indeks SPBE Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024, Kota Pariaman memperoleh nilai 3,44 dengan predikat "Baik", yaitu namun masih perlu banyak peningkatan pada ber. Hasil ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2024.

Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi yaitu sebesar 2,70.

Hasil nilai SPBE Kota Pariaman beserta perbandingan dengan nilai tahun sebelumnya digambarkan pada tabel di bawah ini.

No	Nama Indeks	Nilai 2023	Nilai 2024
SPBE		2,65	3,44
1	Domain Kebijakan SPBE	3,60	4,00
	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,60	4,00
2	Domain Tata Kelola SPBE	1,70	2,90
	Perencanaan Strategis SPBE	1,25	1,25
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,25	4,00
	Penyelenggara SPBE	3,50	4,00
3	Domain Manajemen SPBE	1,18	1,73
	Penerapan Manajemen SPBE	1,00	1,25
	Audit TIK	1,67	3,00
4	Domain Layanan SPBE	3,43	4,19
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,50	4,20
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33	4,17

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023 dan 2024

Berdasarkan tabel di atas, terjadi seluruh kenaikan secara signifikan terhadap semua domain pada tahun 2024 dengan capaian 127,40% terhadap target, karena kerjasama dan kolaborasi yang aktif dari semua stakeholders,



yang tetap hanya Perencanaan Strategis SPBE karena belum disusunnya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kota Pariaman ditahun 2024.

Meskipun terdapat kenaikan sebanyak Masih terdapat beberapa dokumen yang perlu ditingkatkan pada level yang lebih baik, seperti masih kurang optimalnya tata kelola khususnya strategis, Manajemen SPBE pada Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK, dan masih dapat ditingkatkan lagi pada Domain Layanan SPBE.

Perbandingan hasil penilaian Kota Pariaman dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Nilai 2024	Predikat
1	Kabupaten Pesisir Selatan	4,23	Sangat Baik
2	Kota Padang	3,96	Sangat Baik
3	Kota Solok	3,75	Sangat Baik
4	Kota Payakumbuh	3,75	Sangat Baik
5	Kabupaten Pasaman Barat	3,66	Sangat Baik
6	Kabupaten Dharmasraya	3,61	Sangat Baik
7	Kabupaten Padang Pariaman	3,51	Sangat Baik
8	Kabupaten Solok	3,49	Baik
9	Kota Pariaman	3,44	Baik
10	Kota Sawahlunto	3,41	Baik
11	Kabupaten Solok Selatan	3,28	Baik
12	Kota Padang Panjang	3,16	Baik
13	Kabupaten Sijunjung	3,00	Baik
14	Kabupaten Tanah Datar	2,81	Cukup
15	Kabupaten Lima Puluh Kota	2,70	Baik
16	Kabupaten Pasaman	2,67	Baik
17	Kabupaten Agam	2,56	Cukup
18	Kota Bukittinggi	2,49	Cukup
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2,46	Cukup

Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem



Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Hasil Penilaian Kota Pariaman Tahun 2024 adalah nilai peringkat 9 dari 19 Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

Realisasi				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
3,44 (baik)	2,65 (baik)	2,64 (baik)	2,42 (cukup)	127,40 %	98,14 %	101,53 %	78,06 %

Hasil evaluasi Indeks SPBE selalu mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun, kenaikan terbesar pada tahun 2024 sebesar 0,79 point. Capaian tertinggi pada Tahun 2024.

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja dari Nilai SPBE Kota Pariaman dengan target jangka menengah dan RPD Kota Pariaman sebagai berikut:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
3,1	2,6	2,7	2,7	2,42 (cukup)	2,64 (baik)	2,65 (baik)	2,65 (baik)

Capaian realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD adalah sebagai berikut:

Nilai SPBE Kota Pariaman Tahun 2024	Target nilai SPBE Kota Pariaman Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
3,44	3	114,66%

Tingkat capaian Indeks SPBE Kota Pariaman terhadap target RPD akhir periode yaitu 114,66%. Realisasi 2024 telah mencapai target akhir periode tahun 2026, sehingga tahun 2025 Kota Pariaman menetapkan target SPBE sebesar 3,51.

Perbandingan hasil evaluasi Kota Pariaman dengan rata-rata Indeks SPBE Kabupaten/Kota secara Nasional sebagai berikut:



Rata-Rata Nilai SPBE Kab/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2024	Nilai SPBE Kota Pariaman Tahun 2024	Capaian
3,12 dengan Predikat Baik	3,44 dengan Predikat Baik	110,26%

Capaian Nilai SPBE Kota Pariaman terhadap rata-rata realisasi secara Nasional adalah 110,26%. Hasil Evaluasi SPBE Kota Pariaman berada di atas rata-rata Nasional.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam terhadap pencapaian target Tahun 2024 adalah melakukan perbaikan menyeluruh pada semua Domain dengan beberapa tindakan:

- 1) Pembuatan beberapa dokumen penting SPBE,
- 2) Penganturan tugas yang lebih baik dalam manajemen ICT,
- 3) Pembuatan kebijakan utama penyokong SPBE Kota Pariaman,
- 4) Sudah dilakukan restrukturisasi tim SPBE, sudah diakui oleh penilaian SPBE Tahun 2024 Kemenpan RB dalam domain tata kelola, namun untuk pelaksanaan anggaran belum bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran oleh Diskominfo.
- 5) Sudah mengajukan kepada Pimpinan optimalisasi pemanfaatan/ mengugaskan SDM yang bekerja pada OPD lain yang memiliki kualifikasi IT untuk bekerja pada Diskominfo, namun belum ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Beberapa kendala Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Nilai SPBE Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

- 1) Kurangnya komitmen pimpinan terhadap implementasi SPBE yang berdampak pada semua aspek, terutama anggaran.
- 2) Kurangnya kualitas SDM kunci pelaksana SPBE, seperti tidak adanya programmer dan hanya tersedia satu orang petugas jaringan.
- 3) Kurangnya kualitas dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah.



- 4) Belum adanya kebijakan *reward and punishment* atas hasil penerapan SPBE, bahkan pada pelaksanaan dalam urusan wajib seperti Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE.

Beberapa upaya/strategi yang akan ditargetkan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka meningkatkan Nilai Evaluasi SPBE sebagai berikut:

1. Membangun kerjasama dengan Telkom University dalam pendampingan penilaian SPBE.
2. Melakukan penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE dengan bantuan konsultan.
3. Melakukan kerjasama dengan PT Telkom Indonesia terhadap pengembangan pengetahuan ICT untuk meningkatkan kompetensi ICT ASN.
4. Melakukan perbaikan domain SPBE pada domain tata kelola khususnya strategis, Domain Manajemen SPBE pada Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK, dan juga optimalisasi kembali pada Domain Layanan SPBE.

Program yang mendukung meningkatkan Indeks SPBE Kota Pariaman Tahun 2024 adalah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan anggaran Rp1.900.426.400, realisasi Rp1.879.551.976 dengan capaian 98,90%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp20.874.424,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Indeks SPBE (127,40%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (98,90%) dengan nilai efisiensi 100%.

B. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah sebuah indikator atau ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana profesionalisme, kinerja, dan kompetensi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai acuan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai acuan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Untuk melaksanakan Permenpan RB tersebut diatur melalui Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin dengan bobot yang berbeda-beda yaitu Dimensi Kualifikasi (25%), Dimensi Kompetensi (40%), Dimensi Kinerja (15%) dan Dimensi Disiplin (5%). Adapun kategori tingkat profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut :

No.	Nilai	Interprestasi
1	91 - 100	Sangat Tinggi
2	81 - 90	Tinggi
3	71 - 80	Sedang
4	61 - 70	Rendah
5	60 ke bawah	Sangat Rendah

Sumber: bkn.go.id

Data penilaian diperoleh dengan :

10. Untuk dimensi kualifikasi diukur berdasarkan jenjang tingkat pendidikan formal PNS yang terakhir dicapai oleh PNS tersebut. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Pariaman membuka seluas-luasnya untuk para PNS untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya dengan mengikuti tugas belajar maupun izin belajar sehingga pada dimensi kualifikasi dapat meningkat skornya.
11. Untuk dimensi kompetensi diukur berdasarkan pengembangan kompetensi yang telah ditempuh. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Pariaman khususnya BKPSDM Kota Pariaman selalu aktif menginformasikan kepada para ASN untuk mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti diklat kepemimpinan bagi pejabat yang menduduki jabatan struktural (eselon II, III dan IV), diklat fungsional bagi pejabat yang menduduki jabatan fungsional, diklat teknis bagi pegawai sesuai dengan tupoksinya minimal 20 (dua puluh)



jp, dan mengikuti seminar/workshop/kursus sesuai dengan tupoksi pegawai tersebut.

12. Untuk dimensi kinerja merupakan riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). BKPSDM Kota Pariaman setiap tahun selalu aktif mengingatkan kepada seluruh pegawai di Pemerintah Kota Pariaman untuk menyampaikan dan melaporkan hasil penilaian kinerja mereka setiap tahunnya melalui aplikasi kinerja BKN.
13. Untuk dimensi disiplin diukur dari data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima oleh pegawai baik berupa hukuman disiplin berat, sedang dan ringan. Hukuman disiplin yang dimaksud yaitu hukuman yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi yaitu sebesar 85,93 dengan kategori "Tinggi".

Berdasarkan hasil pengukuran profesionalitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024, Pemerintah Kota Pariaman memperoleh nilai 78,65 dengan kategori "Sedang" dengan capaian 91,49%. Hasil ini tertuang dalam Surat Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor 0717/B-BJ.03.02/SD/KR.XII/2024 tanggal 2 Oktober 2024 Hal Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN.

Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kota Pariaman beserta perbandingan dengan nilai tahun sebelumnya digambarkan pada tabel di bawah ini.

Dimensi Yang Dinilai	Bobot	Nilai		Naik/ Turun
		2023	2024	
Kualifikasi	25	21,35	21,72	0,37
Kompetensi	40	34,66	27,28	7,38
Kinerja	30	24,95	24,65	0,30
Disiplin	5	5,00	5,00	0,00



Nilai Hasil Pengukuran	100	85,96	78,65	8,05
Kategori		Tinggi	Sedang	

Sumber: Hasil Pengukuran IP ASN 2024

Berdasarkan tabel di atas, terjadi penurunan realisasi nilai IP ASN Kota Pariaman Tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 8,05 poin.

Perbandingan hasil pengukuran IP ASN Kota Pariaman dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Nilai 2024	Kategori
1	Kota Padang Panjang	84,92	Tinggi
2	Kabupaten Tanah Datar	84,62	Tinggi
3	Kabupaten Sijunjung	83,65	Tinggi
4	Kabupaten Dharmasraya	82,77	Tinggi
5	Kota Solok	81,81	Tinggi
6	Provinsi Sumatera Barat	80,81	Sedang
7	Kota Bukittinggi	80,60	Sedang
8	Kabupaten Pesisir Selatan	79,26	Sedang
9	Kota Pariaman	78,65	Sedang
10	Kabupaten Pasaman Barat	78,55	Sedang
11	Kabupaten Agam	78,43	Sedang
12	Kabupaten Solok Selatan	78,28	Sedang
13	Kota Payakumbuh	78,22	Sedang
14	Kota Padang	78,21	Sedang
15	Kota Sawahlunto	77,36	Sedang
16	Kabupaten Limapuluh Kota	77,29	Sedang
17	Kabupaten Solok	77,13	Sedang
18	Kabupaten Padang Pariaman	75,81	Sedang
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	69,97	Rendah

Sumber: Kanreg XII BKN Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, terjadi penurunan realisasi nilai IP ASN Kota Pariaman Tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar



8,05 poin. Penurunan nilai IP ASN Kota Pariaman Tahun 2024 dikarenakan beberapa faktor, yaitu :

1. Jumlah pegawai yang dinilai pada tahun 2023 sebanyak 2.293 orang sedangkan di tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 178 pegawai menjadi 2.471 orang.
2. Masih adanya pegawai yang belum menyelesaikan pendidikan melalui izin/tugas belajar sehingga kualifikasi pendidikan yang dipakai pada saat CPNS.
3. Masih kurangnya kesadaran pegawai untuk melakukan updating data pelatihan yang pernah diikuti selama 1 (satu) tahun terakhir.
4. Masih kurangnya kesadaran pegawai dalam melaporkan hasil kinerja pegawai tersebut untuk tepat waktu sehingga masih ada yang tidak melaporkan hasil kinerja yang telah diperjanjikan selama 1 (satu) tahun.

Perbandingan realisasi dan capaian IP ASN Kota Pariaman Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir, sebagai berikut:

Realisasi				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
78,65 (Sedang)	85,96 (Tinggi)	45,85 (Sangat Rendah)	45,78 (Sangat Rendah)	91,49%	100,53%	87,5%	112,75%

Capaian nilai IP ASN Kota Pariaman mengalami naik turun, capaian tahun 2023 sudah berhasil mencapai target, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan capaian sebesar 9,04%.

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja dari Nilai Pengukuran IP ASN Kota Pariaman dengan target jangka menengah dan RPD Kota Pariaman sebagai berikut:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
40,60 (Sangat Rendah)	52,40 (Sangat Rendah)	65,50 (Tinggi)	65,96 (Tinggi)	45,78 (Sangat Rendah)	45,85 (Sangat Rendah)	65,96 (Tinggi)	78,65 (Sedang)



Berdasarkan hasil realisasi pengukuran IP ASN Kota Pariaman beberapa tahun terakhir, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 nilai IP ASN Kota Pariaman cenderung naik, namun masih belum bisa mencapai target jangka menengah, selanjutnya terdapat penurunan nilai evaluasi pada Tahun 2024 menjadi kategori "Sedang".

Capaian realisasi IP ASN Tahun 2024 dibandingkan dengan target Akhir RPD adalah sebagai berikut:

Nilai IP ASN Kota Pariaman Tahun 2024	Target nilai IP ASN Kota Pariaman Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
78,65 dengan Kategori "Sedang"	87,11 dengan Kategori "Tinggi"	90,28%

Tingkat capaian Nilai IP ASN Kota Pariaman Tahun 2024 terhadap target akhir periode hanya bisa mencapai 90,28%.

Perbandingan hasil evaluasi IP ASN Kota Pariaman dengan rata-rata realisasi Kabupaten/Kota di Instansi Wilayah Kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru

Rata-rata Nilai IP ASN Kab/Kota di Instansi Wilayah Kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru Tahun 2024	Nilai IP ASN Kota Pariaman Tahun 2024	Capaian
78,12 dengan Kategori "Sedang"	78,65 dengan Kategori "Sedang"	100,67%

Sumber: Kanreg XII BKN Pekanbaru

Capaian Nilai IP ASN Kota Pariaman terhadap rata-rata realisasi di Instansi Wilayah Kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru adalah 100,67%. Hasil IP ASN Kota Pariaman sudah berada di atas rata-rata realisasi Kabupaten/Kota di Instansi Wilayah Kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru.

Beberapa kendala Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota penyebab turunnya nilai IP ASN Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Kurangnya komitmen Pegawai dalam melaporkan hasil penilaian kinerja nya.
2. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan diklat manajerial, diklat fungsional maupun diklat teknis.



Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Nilai IP ASN Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Membuka seluas-luasnya untuk para PNS untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya dengan mengikuti tugas belajar maupun izin belajar sehingga pada dimensi kualifikasi dapat meningkat skor-nya.
2. Selalu aktif menginformasikan kepada para ASN untuk mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti diklat kepemimpinan bagi pejabat yang menduduki jabatan struktural (eseelon II, III dan IV), diklat fungsional bagi pejabat yang menduduki jabatan fungsional, diklat teknis bagi pegawai sesuai dengan tupoksinya minimal 20 (dua puluh) jp, dan mengikuti seminar/workshop/kursus sesuai dengan tupoksi pegawai tersebut.
3. Setiap tahun selalu aktif mengingatkan kepada seluruh pegawai di Pemerintah Kota Pariaman untuk menyampaikan dan melaporkan hasil penilaian kinerja mereka setiap tahunnya melalui aplikasi kinerja BKN.
4. Telah dilakukan sosialisasi mengenai kode etik terhadap pegawai.
5. Menginformasikan secara rutin agar melakukan pembaharuan data pada aplikasi MyASN di menu "Riwayat Diklat/Kursus".
6. Sudah dilakukan pemberian teguran kepada ASN sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Nomor 800/577/BKPSDM/PP-2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Pemberian Sanksi Administrasi bagi ASN yang tidak/belum menyampaikan hasil penilaian kerjanya.

Beberapa upaya/strategi yang akan ditargetkan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka meningkatkan Nilai IP ASN Kota Pariaman Tahun 2025 untuk mencapai target IP ASN 86,54 dengan Kategori **"Tinggi"** sesuai dengan Target Kota Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Aktif menginformasikan kepada para ASN untuk mengembangkan kompetensinya.
2. Melakukan kerja sama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Barat dan PPSDM Regional Bukittingi dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN Kota Pariaman.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja perbulan.



4. Melakukan asistensi/pendampingan dari Kanreg XII BKN Pekanbaru dalam hal penilaian dan pelaporan kinerja ASN Pemerintah Kota Pariaman.

Program yang mendukung meningkatkan Nilai IP ASN Kota Pariaman Tahun 2024 adalah Program Kepegawaian Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.004.754.331,- dengan realisasi sebesar Rp914.075.508,- atau dengan capaian realisasi 90,98%.

Hal ini menunjukan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp90.678.823,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator IP ASN (91,49%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (90,98%) dengan nilai efisiensi 51,29%.

Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pelayanan Publik	4,51	4,32	95,78%
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,15	83,29	100,16%

A. Indeks Pelayanan Publik

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bab I pasal 1 menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut mempertegas bahwa pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik.

Pelayanan publik yang diberikan harus berkualitas. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Kualitas layanan publik menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintah yang baik.

Tujuan Pelayanan Publik adalah:



- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Publik.

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan Nilai Untuk Setiap Indikator Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang berbeda-beda disesuaikan dengan bobot per aspek. Karena nilai indeks merupakan nilai komposit dari 3 formulir, maka nilai per indikator merupakan nilai rerata formulir F01, F02, dan F03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator: $(\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}) / 3 \times \text{bobot perindikat}$
2. Menentukan Nilai Setiap Aspek Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dimana Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat melihat aspek mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan. Nilai setiap aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek: $\sum \text{nilai perindikator}$
3. Menentukan Indeks Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks: $\sum (\text{nilai aspek} \times \text{bobot aspek})$.

No.	Kategori	Indeks
1	A	4,51-5,00
2	A-	4,01-4,50
3	B	3,51-4,00
4	B-	3,01-3,50
5	C	2,51-3,00



6	C-	2,00-2,51
7	D	1,51-2,00
8	E	1,01-1,50
9	F	0,10 -1,00

Sumber: Surat Menpan RB.

Data penilaian diperoleh dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024

Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi yaitu sebesar 4,32 dengan predikat A-.

Berdasarkan hasil Pemantauan Evaluasi dan kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024, Kota Pariaman memperoleh nilai 4,32 dengan predikat A- Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pariaman sudah sangat baik, namun masih perlu di tingkatkan untuk mendapatkan nilai dengan Predikat Pelayanan Prima. Hasil ini tertuang dalam Surat Kementerian PANRB Nomor 659 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024, hasil Pemantauan Evaluasi dan kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024. Hasil nilai PEKPPP Kota Pariaman beserta perbandingan dengan nilai tahun sebelumnya digambarkan pada tabel di bawah ini.

Indeks Pelayanan Publik	Nilai	Predikat
a. Tahun 2022	4,4	A
b. Tahun 2023	4,09	A-
c. Tahun 2024	4,32	A-

Sumber: Hasil Evaluasi Kemenpan RB 2024

Berdasarkan tabel di atas, terjadi kenaikan realisasi nilai PEKPPP Kota Pariaman Tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 0,23 poin dengan capaian 95,78% terhadap target 2024.



Peningkatan nilai PEKPPP Kota Pariaman Tahun 2024 didorong dengan adanya komitmen Pimpinan masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan yang kuat, dan adanya upaya Pembinaan dan Pendampingan secara intensif yang dilakukan Tim Pendampingan Pelayanan Publik terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik khususnya yang ditetapkan sebagai lokus PEKPPP Tahun 2024.

Pencapaian sasaran ini diukur berdasarkan indikator berupa Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang dilakukan melalui mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB secara rutin setiap tahun. Indeks Pelayanan Publik Kota Pariaman diperoleh sebagai nilai akumulasi dari pencapaian Indeks Pelayanan Publik masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) yang ditetapkan sebagai unit lokus evaluasi oleh Kementerian PAN RB.

Berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 4,51 dengan predikat A, dapat direalisasikan sebesar 4,32 dengan predikat A-, artinya berhasil memperoleh capaian kinerja sebesar 95,78%. Nilai ini diperoleh berdasarkan akumulasi nilai yang diraih oleh masing-masing unit lokus evaluasi Tahun 2024 yaitu Dinas Sosial sebesar 4,22, RSUD dr Sadikin sebesar 4,21 dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 4,5.

Sumber data/Perhitungan Realisasi: Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Kementerian PANRB Nomor 659 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terdapat peningkatan nilai Indeks Pelayanan Publik, yaitu sebesar 4,09 atau kategori A- pada tahun 2023 dengan 3 (tiga) unit lokus evaluasi yaitu Dinas Sosial sebesar 4,1, Kecamatan Pariaman Tengah sebesar 3,94 dan RSUD dr Sadikin sebesar 4,24. Sedangkan realisasi yang dicapai pada tahun 2022 diperoleh sebesar 4,4 dengan predikat A, dengan 2 (dua) unit lokus yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas PMPTSP Naker Dan jika



dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2026 yaitu sebesar 4,53 dengan predikat A, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih konkrit dan maksimal untuk dapat mencapai target yang ditetapkan, meliputi komitmen, dukungan anggaran, SDM dan sumber daya lainnya.

Perbandingan hasil Evaluasi Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Sumatera Barat:

NO	PROVINSI/KOTA/KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPD DISDUKCAPIL	IPP KOTA	KATEGORI
1	KOTA PAYAKUMBUH	4.51	4.48	4.51	4.50	A-
2	KABUPATEN PESISIR SELATAN	4.53	4.39	4.47	4.46	A-
3	KABUPATEN SOLOK	4.51	4.32	4.55	4.46	A-
4	KABUPATEN SIJUNJUNG	4.41	4.42	4.25	4.36	A-
5	KOTA PARIAMAN	4.22	4.21	4.52	4.32	A-
6	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	4.23	4.47	4.17	4.29	A-
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	4.52	4.32	3.96	4.27	A-
8	KABUPATEN TANAH DATAR	3.86	4.40	4.53	4.26	A-
9	KOTA PADANG PANJANG	3.51	4.45	4.56	4.17	A-
10	KOTA BUKITTINGGI	3.62	4.44	4.33	4.13	A-
11	KABUPATEN PASAMAN	3.68	4.16	4.54	4.13	A-
12	KOTA SOLOK	3.9	NA	4.26	4.08	A-
13	KABUPATEN SOLOK SELATAN	3.52	4.22	3.77	3.84	B
14	PROVINSI SUMATERA BARAT	2.83	4.49	3.59	3.64	B
15	KABUPATEN PASAMAN BARAT	3.57	3.16	3.77	3.50	B-
16	KOTA PADANG	2.98	3.52	3.87	3.44	B-
17	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	3.41	3.49	2.9	3.27	B-
18	KABUPATEN AGAM	3.26	3.82	2.66	3.25	B-
19	KABUPATEN DHAMASRAYA	4.20	2.41	3.03	3.21	B-
20	KOTA SAWAHLUNTO	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Kepmen PANRB Nomor 659 Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian PAN RB, Indeks Pelayanan Publik Kota Pariaman Tahun 2024 menduduki peringkat ke-5 di antara Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, dan berada pada peringkat ke-2 jika dibandingkan antar Pemerintah Kota di lingkungan Pemerintah Sumatera Barat.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir, sebagai berikut:

Realisasi	Capaian



2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
4,32 (A-)	4,09 (A-)	4,4 (A)	3,91 (B)	95,78%	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, terjadi kenaikan realisasi nilai PEKPPP Kota Pariaman Tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 naik sebesar 0,23 poin. Peningkatan nilai PEKPPP Kota Pariaman Tahun 2024 dikarenakan hasil Pembinaan dan Pendampingan terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta komitmen Pimpinan yang kuat dan Sosialisasi yang berjalan dengan baik. Untuk capaian 2021 sampai dengan 2023 tidak bisa ditampilkan karena Indeks Pelayanan Publik merupakan target baru pada dokumen RPD 2024-2026.

Adapun perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja dari Nilai evaluasi PEKPPP Kota Pariaman dengan target jangka menengah dan RPD Kota Pariaman sebagai berikut:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
-	-	-	4,51 (A-)	3,91 (B)	4,4 (A)	4,09 (A-)	4,32 (A-)

Berdasarkan hasil realisasi penilaian PEKPPP Kota Pariaman beberapa tahun terakhir, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 nilai evaluasi PEKPPP Kota Pariaman mengalami fluktuasi, namun masih belum bisa mencapai target jangka menengah, selanjutnya terdapat peningkatan nilai evaluasi pada Tahun 2024 menjadi 4,32 (A-)

Adapun capaian realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD adalah sebagai berikut:

Nilai PEKPPP Kota Pariaman Tahun 2024	Target nilai PEKPPP Kota Pariaman Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
4,32 dengan Predikat A-	4,53 dengan Predikat A	95,4%

Tingkat capaian Nilai PEKPPP Kota Pariaman Tahun 2024 terhadap target akhir periode mencapai 95,4%.



Adapun perbandingan hasil evaluasi Kota Pariaman dengan rata-rata nilai IPP Kabupaten/Kota secara Nasional sebagai berikut:

Rata-rata Nilai PEKPPP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Nilai PEKPPP Kota Pariaman Tahun 2024	Capaian
3,64 dengan Predikat B	4,23 dengan Predikat A-	116,3%

Sumber: Menpan.go.id

Capaian Nilai PEKPPP Kota Pariaman terhadap rata-rata realisasi secara Provinsi Sumatera Barat adalah 116,3%. Hasil Evaluasi PEKPPP Kota Pariaman berada di atas rata-rata realisasi Provinsi Sumatera Barat.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tahun 2024 adalah:

1. Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada Unit Penyelenggara Pelayanan
2. Melakukan Pembinaan terkait Penyusunan Standar Pelayanan dan Pemantauan Pemenuhan serta Pelaksanaan Standar Pelayanan di masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan
3. Melakukan Pembinaan dan Pendampingan kepada Unit Lokus Evaluasi dalam tahap evaluasi atau penilaian penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB
4. Melakukan berbagai upaya peningkatan pemahaman dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik terkait komponen dan aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik, seperti Sosialisasi / Bimbingan Teknis terkait Penyusunan Standar Pelayanan, Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, dan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.
5. Selain itu, Tim Pendamping Pelayanan Publik yang terdiri dari beberapa Perangkat Daerah terkait di koordinir Bagian Organisasi Sekretariat Daerah juga berupaya dalam mendorong optimalisasi pemenuhan Standar Pelayanan, serta membangun komunikasi yang intensif dengan Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan, serta melakukan advokasi untuk membangun komitmen Pimpinan yang lebih kuat.



6. Dalam upaya pengukuran awal sekaligus menilai tingkat pemenuhan aspek dan indikator dalam PEKPPP, Bagian Organisasi memfasilitasi Unit Penyelenggara Pelayanan untuk melakukan *self asesment* dan pra penilaian mandiri menggunakan instrumen penilaian yang dilengkapi dengan bukti dukung dan *evidence* yang sesuai.

Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Kurangnya komitmen Pimpinan Daerah (Penjabat Walikota) terhadap penyelenggaraan dan evaluasi Pelayanan Publik.
2. Belum optimalnya kualitas maupun kuantitas SDM yang memadai dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3. Belum optimalnya dukungan anggaran dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
4. Belum diberlakukannya kebijakan terkait pemberian *punishment* atas hasil Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik.

Beberapa upaya/strategi yang akan ditargetkan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman pada Tahun 2025, yaitu untuk mencapai target berupa Nilai hasil evaluasi Kinerja Pelayanan Publik atau Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,51 dengan predikat "A" sesuai dengan Target Kota Pariaman Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Bagian Organisasi melakukan Rapat Persiapan Tim Pendampingan dan Pembinaan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2. Bagian Organisasi bersama Tim Pendamping melakukan Sosialisasi terkait Indikator Penilaian dan Teknis Pengisian Formulir/Instrumen Penilaian melalui Aplikasi Menter PAN RB kepada seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Kota Pariaman.
3. OPD terkait melakukan *self asesment* terkait penerapan seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Bagian Organisasi bersama Tim Pendamping melakukan Pendampingan sekaligus *self asesment* terkait penerapan seluruh aspek penyelenggaraan



pelayanan publik, seperti aspek kebijakan Pelayanan Publik dalam hal penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

5. OPD terkait melakukan upaya konkrit dalam pemenuhan aspek dan indikator penilaian penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Bagian Organisasi bersama Tim Pendamping melakukan verifikasi dan validasi dokumen maupun secara fisik lapangan terkait pemenuhan aspek dan indikator penilaian.
7. Melakukan advokasi dan pelibatan Pimpinan Daerah untuk melakukan verifikasi peninjauan lapangan terkait pemenuhan aspek dan indikator penilaian.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp114.075.100 dengan realisasi sebesar Rp39.000.000 atau dengan capaian realisasi 35,01%.

Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp75.075.100,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Indeks Pelayanan Publik (95,78%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (35,01%) dengan nilai efisiensi 100%.

B. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan dari Penilaian SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

No.	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
1	A	88,31 - 100	Sangat Baik
2	B	76,61 – 88,30	Baik



3	C	65,00 – 76,60	Kurang Baik
4	D	25,00 – 64,99	Tidak Baik

Sumber: Menpan.go.id

Data penilaian diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat masing-masing Perangkat Daerah. Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi yaitu sebesar 83,15 dengan predikat B.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2024, Kota Pariaman memperoleh nilai 83,29 dengan predikat "B", yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat sudah baik, namun masih perlu peningkatan untuk mendapat IKM yang sangat baik. Hasil IKM Kota Pariaman beserta perbandingan dengan nilai tahun sebelumnya digambarkan pada tabel di bawah ini.

Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Jumlah OPD / UPP
Tahun 2022	79,21	15
Tahun 2023	83	37
Tahun 2024	83,29	21

Sumber: Hasil IKM 2024

Berdasarkan tabel di atas, terjadi kenaikan realisasi nilai IKM Kota Pariaman Tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 0,29 poin. Peningkatan nilai IKM Kota Pariaman Tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adanya upaya sosialisasi dan edukasi kepada Unit Penyelenggara Pelayanan yang dilakukan oleh unit yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman. Upaya ini dilakukan untuk membangun komitmen pimpinan Perangkat Daerah yang lebih kuat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat.

Pencapaian sasaran dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2024 diperoleh berdasarkan nilai rata-rata dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai oleh masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman pada Tahun 2024



berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh masing-masing UPP. Metode perolehan nilai ini sedikit berbeda dengan metode yang dilakukan pada tahun 2023 di mana pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan dan di koordinir oleh satu unit kerja yaitu Bagian Organisasi, dengan lokus survey sesuai UPP yang ditentukan sebagai objek survey, sementara untuk pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 dilakukan dengan metode mandiri oleh masing-masing UPP.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh sebanyak 21 (dua puluh satu) Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman pada Tahun 2024, diperoleh nilai rata-rata sebesar 83,29 (predikat B) dari target sebesar 83,15 (predikat B). Artinya untuk indikator ini diperoleh capaian kinerja sebesar 100,17% atau melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil ini tertuang dalam Laporan SKM Kota Pariaman yang dikirimkan ke Kementerian PAN RB pada tanggal 13 Desember 2024.

Adapun hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atau Nilai dan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pariaman beberapa Unit Penyelenggara Pelayanan di Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Perangkat Daerah	Nilai 2024	Predikat
1	BKPSDM	85,82	B
2	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	98,44	A
3	Puskesmas Kp. Baru Padusunan	88,91	A
4	Puskesmas Marunggi	88,98	A
5	Puskesmas Kurai Taji	83,95	B
6	Puskesmas Pariaman	82,9	B
7	Puskesmas Air Santok	87,83	B
8	Puskesmas Sikapak	81,68	B
9	Puskesmas Naras	83,09	B
10	Instalasi Farmasi	81,64	B
11	UPTD Labor	83,68	B
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93,64	A
13	Inspektorat	77,88	B
14	Bappeda	83	B
15	Kesbangpol	88,51	A
16	Sekretariat DPRD	81,22	B
17	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	81,77	B



18	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	91,4	A
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	81,01	B
20	Dinas Komunikasi dan Informasi	93,22	A
21	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	78,65	B
IKM Kota Pariaman (Rata-rata)		83,29	B

Sumber: Bagian Organisasi Kota Pariaman

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan (21 UPP) yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat berhasil memperoleh nilai dengan predikat minimal B (Baik), bahkan terdapat 8 UPP yang berhasil memperoleh predikat A. Namun demikian masih ada UPP yang perlu ditingkatkan dalam hal kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya adalah Inspektorat yang memperoleh nilai terendah jika dibandingkan dengan UPP lainnya yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024, yaitu dengan nilai 77,88 (predikat B).

Sedangkan jika dibandingkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pariaman pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 83 (predikat B) dan realisasi pada tahun 2022 sebesar 79,21 (predikat B), dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pariaman meskipun dengan jumlah UPP yang bervariasi setiap tahunnya. Sedangkan untuk target tahun 2026 sebagaimana telah ditetapkan pada dokumen perencanaan daerah (Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman 2024-2026) yaitu ditetapkan sebesar 88,35 (predikat A).

Perbandingan hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2024 dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Nilai 2024	Predikat
1	Kabupaten Tanah Datar	95,27	A
2	Kota Padang Panjang	95,26	A
3	Kota Payakumbuh	93,88	A
4	Kabupaten Pesisir Selatan	91,49	A



5.	Kota Padang	88,79	A
6	Kota Bukittinggi	88,40	A
7	Kabupaten Solok	88,38	A
8	Kota Sawahlunto	86,43	B
9	Kabupaten Agam	86,30	B
10	Kabupaten Lima Puluh Kota	86,16	B
11	Kabupaten Padang Pariaman	85,31	B
12	Kabupaten Dharmasraya	84,65	B
13	Kabupaten Sijunjung	84,40	B
14	Kota Pariaman	83,29	B
15	Kabupaten Pasaman	83,06	B
16	Kabupaten Pasaman Barat	82,83	B
17	Kota Solok	82,64	B
18	Kabupaten Solok Selatan	82,40	B
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	80,87	B
20	Provinsi Sumatera Barat	87,64	B

Sumber : Bagian Organisasi Kota Pariaman

Berdasarkan tabel di atas, jika diurutkan berdasarkan nilai tertinggi hingga terendah, Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2024 menduduki peringkat ke-14 diantara Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat. Dan jika dibandingkan berdasarkan kategori Pemerintah Kota di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Pariaman menempati peringkat ke-6.

Perbandingan realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

Realisasi				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
83,29 (B)	83 (B)	79,21 (B)	-	100,16	93,93	91,83	-

Capaian Kota Pariaman dari Tahun 2022 sampai dengan 2024 selalu mengalami kenaikan, namun baru Tahun 2024 yang mencapai 100%.



Adapun perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja dari Nilai SKM Kota Pariaman dengan target jangka menengah dan RPD Kota Pariaman sebagai berikut:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
84,5 (B)	86,25 (B)	88,36 (B)	83,15 (B)	-	79,21 (B)	83 (B)	83,29 (B)

Berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan SKM Kota Pariaman beberapa tahun terakhir, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 nilai SKM Kota Pariaman cenderung naik, bahkan sudah melewati target yang ditetapkan sesuai dokumen perencanaan jangka menengah (RPD 2024-2026).

Adapun capaian realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD adalah sebagai berikut:

Nilai SKM Kota Pariaman Tahun 2024	Target nilai SKM Kota Pariaman Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
83,29 dengan Predikat B	88,35 dengan Predikat A	94,27%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tingkat capaian Nilai SKM Kota Pariaman Tahun 2024 terhadap target akhir periode RPD telah mencapai 94,27%.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Nilai IKM Kota Pariaman Tahun 2024 adalah :

1. Bagian Organisasi melakukan Sosialisasi dan edukasi terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat kepada seluruh Perangkat Daerah selaku Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), baik melalui Surat, Rapat Koordinasi, Sosialisasi/Bimbingan Teknis, hingga publikasi dan penyebarluasan informasi melalui media online.
2. Bagian Organisasi mendorong setiap UPP untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat, serta memberikan layanan konsultasi dan



pendampingan dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat kepada UPP

3. Bagian Organisasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat oleh UPP, melalui penyampaian Surat Permintaan Laporan SKM kepada seluruh Perangkat Daerah. Bagian Organisasi melakukan kompilasi dan rekapitulasi Laporan Survey Kepuasan Masyarakat dari masing-masing UPP, dan menyusun serta menyampaikan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2024

Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Nilai IKM Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Kurangnya komitmen Pimpinan Daerah (Penjabat Walikota) terhadap implementasi dan pelaksanaan SKM.
2. Habisnya masa berlaku MoU dan Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga sebagai Pihak Ketiga yang akan ditunjuk sebagai pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat, sehingga pelaksanaan SKM tidak dilakukan secara terpusat atau dikoordinir oleh unit yang memiliki kewenangan dalam hal koordinasi dan pembinaan pelayanan publik tetapi dilakukan oleh masing-masing UPP secara mandiri.
3. Kurangnya kualitas SDM pelaksana SKM dan penyusun laporan SKM.
4. Belum adanya kebijakan reward and punishment atas hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat.
5. Keterbatasan waktu dan dukungan anggaran

Beberapa upaya/strategi yang akan ditargetkan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka meningkatkan Nilai IKM Kota Pariaman Tahun 2025 untuk mencapai target hasil evaluasi IKM 88,35 dengan predikat "A" sesuai dengan Target Kota Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pendampingan kepada UPP terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.
2. Tetap mendorong UPP agar melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri.



3. Bagian Organisasi melakukan kerjasama pelaksanaan SKM dan penyusunan Laporan IKM Kota Pariaman Tahun 2024 dengan Pihak ketiga yang berkompeten, sebagai pembanding pelaksana SKM eksternal.
4. Dalam upaya standarisasi metode, instrumen, pengukuran, dan penghitungan dalam pelaksanaan SKM, akan dilakukan pembangunan/pengembangan 1 (satu) aplikasi terkait Survey Kepuasan Masyarakat melalui Dinas Kominfo.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengukuran IKM UPP minimal per semester berbasis aplikasi.
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan IKM dengan Narasumber dari Kementerian PANRB.
7. Menjadikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan penilaian kinerja dan pemberian *reward* maupun *punishment*.

Dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat, Kota Pariaman melaksanakan 1 Program pendukung, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp114.075.100 dengan realisasi sebesar Rp39.000.000 atau dengan capaian realisasi 35,01%.

Hal ini menunjukan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp75.075.100,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (100,16%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (35,01%) dengan nilai efisiensi 100%.

Sasaran Strategis 15 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Infrastruktur Daerah	64,25%	62,92%	97,92%

Indeks Infrastruktur Daerah adalah sebuah indeks yang menggambarkan pencapaian kualitas infrastruktur yang terdiri dari Infrastruktur jalan, Infrastruktur drainase, Infrastruktur irigasi, Infrastruktur bangunan publik, dan infrastruktur PJU. Dasar Penghitungan Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Walikota Pariaman Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Penetapan



Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024–2026. Adapun indeks infrastruktur daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Indeks Infrastruktur daerah} = \frac{\% \text{ Panjang Jalan Kota dengan kondisi mantap} + \% \text{ Panjang drainase kota dalam kondisi baik} + \% \text{ panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik}}{3}$$

Data penilaian diperoleh dari Data Base Jalan, Data Base Drainase dan Data Base Irigasi. Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 59,01% mengalami kenaikan, Target tahun 2024 ditetapkan sebesar 64,25% dengan dengan realisasi 62,92%.

Penghitungan dari indeks infrastruktur daerah didukung oleh 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Persentase panjang jalan Kota dalam kondisi mantap

Persentase panjang jalan Kota dalam kondisi mantap dengan target 72,16 % realisasi 64,66% mengalami penurunan dari realisasi tahun lalu disebabkan karena berkurangnya jalan rusak ringan dan berat. Indikator ini didukung oleh **Program Penyelenggaraan Jalan** dengan Anggaran Rp 14.880.398.159,- terserap Rp. 14.688.699.475,- (98,71%) realisasi fisik 100% dan **Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** dengan Anggaran Rp.14.880.398.159,- terserap Rp. 14.688.699.475,- (98,71%) realisasi fisik 100%.

Panjang jalan kota dalam berdasarkan kondisi mantap, sebagai berikut:

No.	Kondisi Jalan	Panjang Tahun 2024
1	Kondisi baik (mantap)	173,104 Km
2	Kondisi sedang (mantap)	16,326 Km
3	Kondisi rusak ringan	66,875 Km
4	Kondisi rusak berat	36,650 Km
Total Panjang Jalan		292,955



Penghitungan pencapaian indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan formula yaitu :

Persentase panjang jalan kota dalam kondisi mantap	(Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi mantap :
	= Panjang Jalan Seluruh Kota) x 100 %
	= (189,43 km : 292,955 km) x 100%
	= 64,66 %

Pencapaian Komponen Indikator Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian
		Target (%)	Realisasi (%)	
1	Persentase Panjang jalan kota dalam kondisi mantap	72,16	64,66	89,6%

2. Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik

Indikator kinerja persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan target 72,60 % realisasi 70,513 % mengalami penurunan. Indikator disebabkan penyesuaian data panjang irigasi tersier di lapangan. Indikator ini didukung Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan memiliki 2(dua) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp291.465.650,- terserap Rp285.257.850 (97,87%) realisasi fisik 100%.
- 2) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp506.191.500,- terserap Rp493.519.730 (99,29%) realisasi fisik 100%.

Panjang jaringan irigasi berdasarkan Jenis saluran

No	Jenis Saluran	Panjang (Km)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Irigasi Primer	1,027	1,027	1,117	1,117	1,117
2	Irigasi Sekunder	41,832	56,578	57,058	57,058	57,058
3	Irigasi Tersier	52,788	52,788	52,788	93,232	93,232
	JUMLAH	95,647	110,393	110,963	151,407	151,407

Sumber Data : Lakip Dinas PUPR dan Pertanahan 2024



Panjang jaringan irigasi berdasarkan Kondisi Saluran

No	Kondisi Saluran	Panjang (km)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Baik	67,95	79,73	80,332	14,767	14,767
2	Sedang	-	-	-	91,996	91,996
3	Rusak Ringan	-	-	-	-	-
4	Rusak berat	21,70	30,66	30,63	44,644	44,644
	JUMLAH	95,65	110,39	110,963	151,407	151,407

Sumber Data : Lakip Dinas PUPR dan Pertanahan 2024

Penghitungan capaian indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan formula yaitu :

Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	(Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik: = Panjang jaringan irigasi Seluruh Kota) x 100 % = (106,763 km : 151,407 km) x 100% = 70,513 %

Pencapaian Komponen Indikator Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian
		Target (%)	Realisasi (%)	
1	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	72,60	70,513	97,125%

3. Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik

Indikator kinerja persentase drainase kota dalam kondisi baik dengan target 42,50 % realisasi 52,597 % mengalami kenaikan. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) Program yaitu : 1). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan Anggaran Rp1.716.635.200 terserap Rp1.694.157.590 (98,69%) realisasi fisik 100 % dan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp1.716.635.200 terserap Rp1.694.157.590 (98,69%) realisasi fisik 100%.

Panjang drainase kota dalam kondisi baik

No	Nama Drainase	Total (KM)	Panjang (KM)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Drainase primer	19,122	7,34	7,64	7,84	7,97	7,977
2	Drainase sekunder	44,458	16,81	17,31	17,81	18,08	19,153
	Total	63,58	24,15	24,94	25,65	26,05	27,13



Sumber Data : Lakip Dinas PUPR dan Pertanahan 2024

No	Nama Drainase	Total (KM)	Panjang (KM)
1	Drainase primer	18,536	7,66
2	Drainase sekunder	44,060	25,89
Total		62,596	33,55

Sumber Data : Lakip Dinas PUPR dan Pertanahan 2024

Penghitungan pencapaian indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan formula yaitu :

Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik	=	(Panjang drainase kota dalam kondisi baik :
	=	Panjang seluruh drainase kota) x 100 %
	=	(33,55 km : 62,596 km) x 100%
	=	53,597 %

Pencapaian Komponen Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian
		Target (%)	Realisasi (%)	
1	Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik	42,50	53,597	126,11%

Perbandingan realisasi dan capaian indikator Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Realisasi				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
62,92%	59,01%	62,08%	65,71%	97,92	89,84	93,67	101,87

Berdasarkan hasil realisasi Indeks Infrastruktur Daerah beberapa tahun terakhir, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Indeks Infrastruktur Daerah cenderung turun, disebabkan karena defisit anggaran dan adanya penambahan ruas jalan baru. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,91%. Capaian Kota Pariaman dari Tahun 2021 sampai Tahun 2024 selalu mengalami naik turun.

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja dari Indeks Infrastruktur Daerah dengan target jangka menengah dan RPD Kota Pariaman sebagai berikut:



Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur Daerah	64,50	66,27	65,68	64,25	65,71	62,08	59,01	62,92

Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 belum ada realisasi Indeks Infrastruktur Daerah yang melampaui target. Pada Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 realisasi mengalami penurunan namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan disebabkan adanya dana dari pusat (Dana bagi hasil sawit).

Capaian Kinerja Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2024 Dibandingkan Target Akhir Jangka Menengah (RPD Kota Pariaman Tahun 2026)

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023 (%)	Realisasi 2024 (%)	Target Akhir RPD 2026 (%)	% Capaian 2024 terhadap target 2026
1	Indeks Infrastruktur Daerah	59,01	62,92	68,25	92,19%

Tingkat capaian Indeks Infrastruktur daerah Tahun 2024 terhadap target akhir periode hanya bisa mencapai 92,19 %.

Beberapa kendala Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman yang menyebabkan tidak tercapainya target Indeks Infrastruktur daerah Tahun 2024 adalah:

- 1) Terbatasnya Anggaran APBD Kota Pariaman.
- 2) Belum adanya pembebasan lahan.
- 3) Bencana alam yang merusak infrastruktur.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Indeks Infrastruktur daerah Tahun 2024 adalah:

- 1) Mengajukan Usulan penambahan anggaran ke pusat untuk mendukung indek infrastruktur daerah.
- 2) Perlunya pembebasan lahan sebelum dilakukan pembangunan infrastruktur.
- 3) Melakukan pemeliharaan secara berkala/rutin terhadap infrastruktur

Beberapa upaya/strategi yang akan ditargetkan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka meningkatkan Indeks Infrastruktur



daerah Tahun 2025 untuk mencapai target hasil Indeks Infrastruktur daerah sesuai dengan Target Kota Pariaman Tahun 2025 sebesar 66,15% adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan Usulan penambahan anggaran ke pusat untuk mendukung indek infrastruktur daerah.
- 2) Perlunya pembebasan lahan sebelum dilakukan pembangunan infrastruktur.
- 3) Melakukan pemeliharaan secara berkala/rutin terhadap infrastruktur.

Program penunjang pencapaian indikator Indeks Infrastruktur daerah Tahun 2024 adalah:

1. Program Penyelenggaraan Jalan dengan Anggaran Rp 14.880.398.159,- terserap Rp14.688.699.475,- (98,71%) realisasi fisik 100%.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan Anggaran Rp797.657.150,- terserap Rp778.777.580,- (97,63%) realisasi fisik 100%.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan Anggaran Rp1.716.635.200 terserap Rp1.694.157.590 (98,69%) realisasi fisik 100%.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah, Kota Pariaman melaksanakan 3 Program dengan anggaran yang berasal dari APBDP Kota Pariaman Tahun 2024 dengan Jumlah Rp17.394.690.509,- dan telah terealisasi dengan jumlah Rp17.161.634.546,-. Pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dan efektif untuk mencapai indikator Indeks Infrastruktur Daerah.

Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp233.055.864,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Indeks Infrastruktur Daerah (97,92%) hampir sama dengan realisasi anggaran (98,66%) dengan nilai efisiensi sebesar 48,15%.

Sasaran Strategis 16: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,02	59,44 dengan Kriteria Sedang	104,24%



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kota Pariaman yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH merupakan hasil penggabungan dari 3 indikator komponen lingkungan yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pariaman terkait erat dengan sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. IKLH disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
3. Sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dasar penghitungan indeks IKLH adalah Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang diukur untuk setiap komponen IKLH dan bobot masing-masing komponen dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Kriteria dan Indikator IKLH

No.	Indikator IKLH	Parameter	Bobot
1.	Kualitas Air	pH	0,376
	Badan Air	DO	



	(Sungai, Danau, Waduk dan Situ)	BOD	
		COD	
		TSS	
		Nitrat	
		Total Phospat	
		Fecal Coliform	
2.	Kualitas Udara	SO ₂	0,405
		NO ₂	
3.	Kualitas Lahan	Luas tutupan vegetasi hutan	0,219
		Luas tutupan vegetasi non hutan : - Belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung lahan dengan kemiringan > 25 %, sempadan sungai, pantai dan danau - RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota dan Taman Kota - Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL)	

Rumus yang digunakan untuk IKLH Kabupaten/Kota adalah :

$$\text{IKLH}_{\text{Kab/Kota}} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

Keterangan :

IKLH_Kab/Kota : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota

IKA : Indeks Kualitas Air

IKU : Indeks Kualitas Udara

IKL : Indeks Kualitas Lahan

KATEGORI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	90≤x≤100
2	Baik	70≤x≤90



3	Sedang	$50 \leq x \leq 70$
4	Kurang	$25 \leq x \leq 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x \leq 25$

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH merupakan hasil penggabungan dari 3 indikator komponen lingkungan yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKLH Kota Pariaman Tahun 2024 dihitung berdasarkan :

1. Hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan pada 5 sungai (masing-masing sungai 3 titik: hulu, rentang dan hilir) dan 3 talao di Kota Pariaman, sebanyak 2 kali dalam setahun;
2. Data dari KLHK yang merupakan hasil pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* di Kota Pariaman pada kawasan transportasi, pemukiman, industri dan perkantoran;
3. Hasil pemantauan kualitas udara ambien metode *manual aktif* pada 12 titik di Kota Pariaman;
4. Hasil deliansiasi ruang terbuka hijau dan tutupan vegetasi dengan menggunakan aplikasi *Google Earth*.

Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi yaitu sebesar 57,02 dengan kriteria Sedang.

Hasil Perhitungan IKLH Kota Pariaman Tahun 2024

No.	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil	Kriteria
1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,38	0,405	38,22	Sangat Baik
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	37,78	0,376	14,21	Kurang
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	32,00	0,219	7,01	Kurang
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2024				59,44	Sedang

Sumber: Laporan IKLH Tahun 2024



Dari tabel di atas dapat dilihat pada realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan ketiga indikator penghitungan IKLH yaitu IKA, IKU dan IKL, sehingga nilai IKLH juga mengalami peningkatan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pariaman Tahun 2024 sebesar 59,44 sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada RPD Kota Pariaman yaitu 57,02.

**Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kota Pariaman Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya**

Indikator	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2026
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,08	93,70	93,38	94,38	94,07
Indeks Kualitas Air (IKA)	55,99	31,67	36,67	37,78	38,33
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	27,96	31,71	24,74	32	25,44
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,06	56,80	57,02	59,44	58,08

Sumber data/Perhitungan Realisasi:

- 1) Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar *European Union Directives*.
- 2) Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dengan menggunakan perhitungan status mutu air pada seluruh lokasi pemantauan badan air sungai untuk 8 (delapan) parameter, yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phospat (TP) dan Fecal Coliform menggunakan Indeks (IP) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Sedangkan kelas air yang digunakan adalah kelas 2 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahun 2023 ini, selain 8 (delapan) parameter wajib juga ditambahkan 12 (duabelas) parameter lainnya dalam hitungan IKA, 12 (dua belas) parameter tersebut yaitu Temperatur, TDS, Klorida, Sulfat, Amoniak, Besi, Nitrit, Sianida, Tembaga, Khrom, Detergen Total, Total Coliform.



- 3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) dihitung dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Data tutupan lahan bersumber dari data dari KLHK yang merupakan hasil analisis tutupan lahan berdasarkan data citra satelit 2018 dan juga hasil deliniasi RTH Kota Pariaman dengan menggunakan *Google Earth*.
- 4) Target IKLH tahun 2026 adalah 58,08 dengan kriteria sedang. Jika dilihat dari capaian di tahun 2024 (59,44), maka target tahun 2026 (58,08) tersebut sudah tercapai.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Realisasi				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
59,44	56,80	56,35	54,93	104,24%	88,66%	88,60%	87,01%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi dan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selalu mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja dari Nilai IKLH Kota Pariaman dengan target jangka menengah dan RPD Kota Pariaman sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,13	63,60	64,06	57,02	54,93	56,35	56,80	59,44

Berdasarkan hasil realisasi IKLH Kota Pariaman beberapa tahun terakhir, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 capaian Kota Pariaman cenderung naik, namun masih belum bisa mencapai target jangka menengah, untuk menyesuaikan realisasi 3 tahun terakhir, target IKLH 2024 pada dokumen RPD diturunkan menjadi 57,02. selanjutnya terdapat pencapaian IKLH melebihi target pada Tahun 2024 yaitu 59,44 dari target RPD sebesar 57,02.



Adapun capaian realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD adalah sebagai berikut:

IKLH Kota Pariaman Tahun 2024	Target IKLH Kota Pariaman Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
59,44 dengan Klasifikasi Sedang	58,08 dengan Klasifikasi Sedang	102,34%

Target akhir RPD 2024-2026 telah tercapai pada Tahun 2024, tingkat capaian IKLH Kota Pariaman Tahun 2024 terhadap target akhir periode sudah mencapai 102,34%, melebihi target di tahun 2026.

Perbandingan hasil evaluasi Kota Pariaman dengan rata-rata IKLH secara Nasional sebagai berikut:

No.	Uraian	Nasional		Kota Pariaman	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,5	54,75	36,67	37,78
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,5	90,18	93,38	94,38
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65,5	62,01	24,74	32
4.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	60,5	81,70	-	-
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,74	73,55	57,02	59,44

Rata-Rata IKLH secara Nasional Tahun 2024	Nilai IKLH Kota Pariaman Tahun 2024	Capaian
73,55 dengan Klasifikasi Baik	59,44 dengan Klasifikasi Sedang	80,81%

Sumber : Laporan IKLH tahun 2024

Capaian IKLH Kota Pariaman terhadap rata-rata realisasi secara Nasional adalah 80,81%. Hasil Evaluasi IKLH Kota Pariaman berada di bawah rata-rata realisasi secara Nasional.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup perlu terus dikembangkan sebagai salah satu alat pendukung pembuatan kebijakan, sesuai dengan konsep holistik dan menyeluruh di mana kebutuhan dan ketersediaan data turut mengikuti



konsep tersebut, sehingga diharapkan ditemukan suatu konsep yang sangat mendekati kondisi lapangan.

1. Pembenahan dan penyempurnaan kesahihan dan keakuratan sumber data, terutama memastikan kualitas data mulai dari kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan pemantauan, sehingga dapat ditelusuri (*traceable*) setiap angka indikatifnya dan dapat ditemukan sumber permasalahannya.
2. Perlu upaya pendalaman terhadap permasalahan dengan menggunakan metode analisis Drive – Pressure – State – Impact – Responses (DPSIR) dalam periode tertentu sehingga penanganan akan lebih spesifik.
3. Pengembangan instrumen pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan.
4. Penerapan aturan yang ketat dan konsisten terhadap usaha/kegiatan yang merupakan sumber pencemar (air dan udara).

Beberapa kendala Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Nilai IKLH Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Pembenahan dan penyempurnaan kesahihan dan keakuratan sumber data, terutama memastikan kualitas data mulai dari kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan pemantauan, sehingga dapat ditelusuri (*traceable*) setiap angka indikatifnya dan dapat ditemukan sumber permasalahannya.
2. Perlu upaya pendalaman terhadap permasalahan dengan menggunakan metode analisis Drive – Pressure – State – Impact – Responses (DPSIR) dalam periode tertentu sehingga penanganan akan lebih spesifik.
3. Pengembangan instrumen pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan.
4. Penerapan aturan yang ketat dan konsisten terhadap usaha/kegiatan yang merupakan sumber pencemar (air dan udara).

Sasaran strategi untuk menopang keberhasilan pemerintah untuk program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan instrumen keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan penilaian predikatnya. Penyempurnaan IKLH merupakan upaya yang berkelanjutan dan diharapkan tetap terus dilakukan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebagai berikut:



2. Kualitas udara Kota Pariaman masih dalam kondisi sangat baik, yang disebabkan karena tidak adanya sumber emisi dari industri, sumber emisi hanya berasal dari transportasi dan aktifitas masyarakat skala rumah tangga dan masih banyaknya vegetasi yang mampu menyerap polutan yang ada di udara ambien.
3. Peningkatan nilai IKL ini disebabkan karena peningkatan luasan RTH dan non RTH yang terdeliniasi. Kota Pariaman tidak memiliki hutan, sehingga IKL Kota Pariaman dihitung dari luas RTH yang memiliki vegetasi yang menutupi lahan RTH tersebut (tutupan vegetasi non hutan), karena tidak semua RTH di Kota Pariaman yang memiliki tutupan vegetasi. Selain itu penghitungan nilai IKL Kota Pariaman juga didapat dari luasan non RTH, namun memiliki tutupan vegetasi.

Program yang mendukung meningkatkan Nilai IKLH Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Pagu Anggaran Rp220.770.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp220.736.000 atau dengan capaian realisasi sebesar 99,98%.
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan Pagu Anggaran sebesar 1.478.339.502 dengan realisasi sebesar Rp1.420.732.470 atau dengan capaian realisasi 96,10%.
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan Pagu Anggaran sebesar Rp416.655.250 dengan realisasi sebesar Rp410.903.919 atau dengan capaian realisasi 98,62%.
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.420.500 dengan realisasi sebesar Rp2.420.500 atau dengan capaian realisasi 100%.
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp40.491.750 dengan realisasi sebesar Rp31.882.793 atau dengan capaian realisasi 78,74%.
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp55.779.300



dengan realisasi sebesar Rp55.279.300 atau dengan capaian realisasi 99,10%.

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan Pagu Anggaran sebesar Rp5.304.500 dengan realisasi sebesar Rp3.519.500 atau dengan capaian realisasi 66,35%.
8. Program Pengelolaan Persampahan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp6.895.522.297 dengan realisasi sebesar Rp6.519.352.697 atau dengan capaian realisasi 94,54%.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Kota Pariaman melaksanakan 8 Program dengan anggaran yang berasal dari APBDP Kota Pariaman Tahun 2024 dengan Jumlah Rp9.065.081.099,- dan telah terealisasi dengan jumlah Rp8.664.827.179,-. Pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dan efektif untuk mencapai indikator Indeks Infrastruktur Daerah.

Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp400.253.920,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (104,24%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (82,75%) dengan nilai efisiensi sebesar 71,64%.

Sasaran Strategis 17: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	84,15	74,35	88,35%
Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	25,05 Ha	1,79 Ha	7,14%

A. Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni

Persentase rumah layak huni adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak rumah yang memenuhi standar minimal untuk dianggap layak huni di suatu wilayah tertentu. Standar layak huni biasanya mencakup berbagai aspek seperti kondisi fisik bangunan, akses ke fasilitas dasar



(air bersih, sanitasi, listrik), ventilasi yang memadai, serta faktor-faktor kesehatan dan keselamatan lainnya.

Persentase ini menggambarkan proporsi rumah yang dianggap memenuhi syarat untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi penghuninya. Biasanya digunakan oleh pemerintah atau lembaga perencanaan kota untuk mengevaluasi kondisi perumahan di suatu daerah dan merencanakan perbaikan atau pembangunan baru. Di Indonesia, dua indikator tersebut bisa mengacu pada kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik) dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Dasar perhitungan persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni yaitu dengan menggunakan rumus :

% Perumahan dan Permukiman Layak Huni	=	%Sanitasi Layak Aman+%Air Minum Layak+%Rumah Layak
		3

1. Persentase Rumah Layak Huni

Dasar perhitungan persentase rumah layak huni biasanya didasarkan pada beberapa indikator dan kriteria yang telah ditetapkan dalam regulasi dan standar nasional. Berikut adalah langkah-langkah umum yang biasanya digunakan dalam perhitungan ini:

1. Penentuan Kriteria Rumah Layak Huni: Mengacu pada regulasi seperti Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2012, yang menetapkan kriteria teknis dan administratif untuk rumah layak huni. Kriteria ini dapat mencakup:
 - o Kondisi fisik bangunan (struktur, atap, dinding)
 - o Akses ke fasilitas dasar (air bersih, sanitasi, listrik)
 - o Ventilasi dan pencahayaan yang memadai
 - o Faktor kesehatan dan keselamatan
2. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data mengenai kondisi rumah-rumah di wilayah yang ingin dievaluasi. Data ini bisa diperoleh melalui survei lapangan, sensus perumahan, atau data dari instansi terkait.



3. Penilaian Kelayakan: Menilai setiap rumah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Setiap indikator kelayakan diberi skor atau dikategorikan (misalnya layak huni atau tidak layak huni).
4. Perhitungan Persentase: Menghitung jumlah rumah yang memenuhi kriteria layak huni dan membandingkannya dengan total jumlah rumah yang dievaluasi.
5. Pelaporan dan Analisis: Hasil perhitungan persentase rumah layak huni dilaporkan dan dianalisis untuk menentukan kondisi perumahan di wilayah tersebut dan mengidentifikasi kebutuhan perbaikan atau intervensi.

Rumus yang digunakan adalah :

$\frac{\text{Total Rumah} - (\text{Total RTLH} - \text{Kumulatif RTLH yang ditangani})}{\text{Total Rumah}} \times 100\%$

Sumber: Lakip Dinas PerkimLh 2024

Peraturan yang menjadi acuan untuk penilaian rumah layak huni di Indonesia meliputi beberapa regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: Mengatur tentang standar minimum perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan sehat.
2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Persyaratan Rumah Layak Huni: Menyediakan detail kriteria teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh sebuah rumah agar dianggap layak huni.
3. Standar Nasional Indonesia (SNI): Beberapa SNI terkait dengan bangunan dan konstruksi yang juga menjadi referensi dalam menentukan kelayakan rumah.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih rendah yaitu sebanyak 51 Unit atau sebesar 4,03%. Tabel Target % Rumah layak Huni, sebagai berikut:

Tahun	% Rumah Layak Huni	
	Target RPD/Renstra	Target PK
2023		92,51
2024	92,53	93,16
2025	92,70	



2026	92,87	

Ukuran realisasi indikator kinerja 51 unit (dengan tingkat persentase capaian 99,97% kategori **(sangat tinggi)**) dari target awal 57 Unit rumah Rumah Tidak Layak Huni yang di rehab tahun 2024, melalui program DAK dapat menyelesaikan 51 Unit rumah RTLH kurang dari target yang diberikan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai program/ kegiatan/sub kegiatan yang mendukung capaian tersebut.

Indikator Kinerja	Target		Capaian 2024			Prediket
	RPD/ Renstra	PK	Realisasi	% Capaian dari RPD	% Capaian dari PK	
Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni (Persentase Rumah layak Huni)	92,53%	93,19% (57 Unit)	94,55% (51 Unit)	102,18%	101,46	Sangat Tinggi

Sumber : Lakip Dinas Perkimih tahun 2024

Penanganan Rumah Layak Huni di Kawasan Kumuh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup (Tahun 2018-2024)

No	Tahun	Total Rumah (unit)	Total RTLH (unit)	RTLH Ditangani (unit)	Rumah layak Huni (Unit)	Rumah Layak Huni (%)
Kondisi Awal		17.748	3.403			11,98%
1	2018	17.748	3.403	600	14.945	84,21%
2	2019	17.748	1.653	1.150	16.095	90,69%
3	2020	17.748	1.549	104	16.199	91,27%
4	2021	17.748	1.427	92	16.291	91,79%
5	2022	17.748	1.341	116	16.407	92,44%
6	2023	17.748	1.265	76	16.483	92,87%
7	2024	17.748	1.214	51	16.534	93,16%

Sumber: Lakip Dinas Perkimih tahun 2024

Sumber data/Perhitungan Realisasi:

1. Data Awal pada tahun 2018 Jumlah Rumah layak huni di kawasan kumuh yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebesar 14.945 Unit dari total rumah sebesar 17.748 Unit. Pada tahun 2018 ini dilakukan penanganan RTLH sebanyak 600 Unit melalui program DAK perumahan (APBN) Sebanyak 359 Unit dan



Program BSPS (Provinsi) sebanyak 241 Unit sehingga jumlah RLH meningkat menjadi 14.945 (84,21%) dari total rumah.

2. Pada tahun 2019 rencana awal target untuk penanganan rumah tidak layak huni adalah sebesar 750 unit yang terdiri dari program BSPS dan DAK perumahan swadaya. Dalam waktu berjalan program BSPS terjadi penambahan kuota menjadi 1000 unit dan dari DAK tetap 150 unit sehingga total realisasi pada tahun 2019 menjadi 1.150 unit rumah untuk peningkatan kualitas. Ini juga menunjukkan perbaikan kinerja terhadap penurunan rumah tidak layak huni menjadi 2,12 % dan peningkatan RLH menjadi 16.095 (90,69%).
3. Pada tahun 2020 di target perbaikan RTLH sebanyak 100 unit, target ini ditetapkan sesuai kondisi dan situasi yang masih dalam kondisi pandemi, dan target ini bisa diselesaikan sebanyak 104 unit, sehingga kondisi rumah tidak layak huni sudah berkurang menjadi 1,56% dari total target yang ditetapkan dan RLH meningkat menjadi 16.199 (91,27%).
4. Tahun 2021 Target yang akan di capai sebanyak 92 Unit, yang dikerjakan oleh dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebanyak 49 Unit dengan persentase capaian penurunan menjadi 1,28% dan ini bisa diselesaikan semua dan RLH meningkat lagi menjadi 16.291 (91,79%).
5. Tahun 2022 selain melalui melalui program DAK Perumahan (Dana APBN) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, ada tambahan 5 Unit lagi pengerjaan RTLH dari Baznas sehingga total rumah yang dikerjakan menjadi 116 Unit. Jika dibandingkan dengan target yang diberikan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mampu melaksanakan 58% dari target yang diberikan. RLH meningkat menjadi 16.407 (92,44%).
6. Sisa Rumah Tidak Layak Huni tahun 2022 adalah 117 Unit dan dikerjakan sebanyak 76 Unit tahun 2023 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada IKU Dinas sebanyak 25 Unit, sehingga sisa Rumah Tidak Layak Huni pada akhir periode sebanyak 41 unit.
7. Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian kinerja Kepala Dinas, melalui melalui program DAK Perumahan (Dana APBN) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, ada tambahan 51 Unit lagi



pengerjaan RTLH dari 57 Unit yang ditargetkan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mampu melaksanakan 99,97% dari target yang diberikan dengan RLH meningkat menjadi 16.534 (93,16%).

2. Persentase Akses Sanitasi Layak

Rumah yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Layak

Kecamatan	Rumah yang memperoleh layanan Pengolahan Air Domestik				Jumlah
	Cubluk (septic Tank)	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengolahan Limbah Komunal	
Pariaman Tengah	873	0	487	611	1.971
Pariaman Selatan	1075	0	345	145	1.565
Pariaman Timur	958	0	780	147	1.885
Pariaman Utara	1690	0	717	496	2.903
Jumlah	4.596	0	2.329	1.399	8.324

Persentase Akses Sanitasi layak

Rumah yang memperoleh Layanan Pengolahan Air
= Limbah Domestik (layak + aman) : Jumlah Rumah
Tangga) x 100 %
= $(8324 : 22.275) \times 100\%$
= 37,37 %

Faktor Penyebab Rendahnya Sanitasi Layak

1. Pada laporan SPM tahun 2023, dengan jumlah rumah di Kota Pariaman yaitu 17.748 rumah. Dan berdasarkan hasil pendataan SPM pada tahun 2024, jumlah rumah di Kota Pariaman yaitu 22.275 rumah. Ada penambahan jumlah rumah yaitu sebanyak 4.527 rumah.
2. Kota Pariaman terdapat 4 kecamatan dan terdiri dari 71 Desa dan Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia 2020, dimana di Kota Pariaman terdapat 8 desa yang diklasifikasi kedalam perdesaan yaitu:
 1. Kecamatan Pariaman Selatan
 - 1) Desa Pasir Sunur
 - 2) Desa Marunggi
 - 3) Desa Padang Cukur
 2. Kecamatan Pariaman Utara



- 1) Desa Cubadak Air
 - 2) Desa Cubadak Air Selatan
 - 3) Desa Tungkal Utara
 - 4) Desa Cubadak Air Utara
 - 5) Desa Sintuk
3. Pada laporan SPM tahun 2023, masih menggunakan peraturan lama terdapat 17 desa yang diklasifikasi kedalam perdesaan dengan klasifikasi yaitu:
1. Kecamatan Pariaman Selatan
 - 1) Desa Pasir Sunur
 - 2) Desa Marunggi
 - 3) Desa Padang Cukur
 - 4) Kampung Apar
 - 5) Marabau
 - 6) Sungai Kasai
 2. Kecamatan Pariaman Timur
 - 1) Desa Batang Kabung
 - 2) Desa Bungo Tanjung
 - 3) Desa Sungai Pasak
 - 4) Desa Air Santok
 - 5) Desa Cubadak Mentawai
 - 6) Koto Marapak
 3. Kecamatan Pariaman Utara
 - 1) Desa Cubadak Air
 - 2) Desa Cubadak Air Selatan
 - 3) Desa Tungkal Utara
 - 4) Desa Cubadak Air Utara
 - 5) Desa Sintuk
4. Sesuai dengan Permen PU no 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat: akses pelayanan air limbah domestik terdiri dari air limbah tanpa akses, air limbah dengan akses SPALD-S dan air limbah dengan akses SPALD-T, yaitu:
1. Tanpa Akses, terdiri dari :



- a. BABS atau buang air besar sembarangan
 - b. CUBLUK (Perkotaan)
2. Akses SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- a. CUBLUK (Perdesaan)
 - b. Tangki Septik Individual
 - c. Tangki Septik Komunal
 - d. MCK
3. Akses SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
- a. IPALD Permukiman: IPAL Komunal

3. Persentase Air Minum Layak

Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum Layak

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum/SPAM		
	Jaringan Perpipaan	Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah
Pariaman Selatan	1.180	3.412	4.592
Pariaman Tengah	1.972	4.577	6.549
Pariaman Timur	772	3.053	3.825
Pariaman Utara	1.478	4.168	5.646
Jumlah	5.402	15.210	20.612

Perhitungan Kebutuhan SPM Pekerjaan Umum Pemenuhan Kebutuhan Pokok air Minum Sehari-hari

Kecamatan	Kecamatan Desa	RW	Realisasi					Cap Pelayanan Dasar Air Minum (%)
		Terdayani JP	Terdayani JP	Terdayani BJP	Terdayani Air Minum	Belum Terdayani	Belum Terdayani Air Minum	
Pariaman Selatan	Pasir Surur	90	50	40	100,00	0	0,00	0,00
	Maringgi	540	169	344	95,00	27	5,00	5,00
	Kampung Apar	231	107	120	98,27	4	1,73	1,73
	Sikabu	100	84	18	100,00	0	0,00	0,00
	Palak Aneh	273	50	192	88,64	31	11,36	11,36



Pasar Tengah	Padang Cakur	145	66	79	100,00	0	0,00	0,00
	Taluk	630	169	730	96,67	31	3,33	3,33
	Marbau	244	95	149	100,00	0	0,00	0,00
	Sungai Kasai	166	16	109	80,13	31	19,87	19,87
	Batang Tanjung	206	6	101	51,94	99	48,06	48,06
	Batu Kural Taj	319	15	278	91,85	26	8,15	8,15
	Paub Kural Taj	286	30	260	98,31	5	1,69	1,69
	Singang	231	14	210	96,97	7	3,03	3,03
	Toboh Palasari	462	85	300	91,81	37	8,19	8,19
	Rambai	312	48	249	95,51	14	4,49	4,49
	Punggung Leding	687	175	206	64,74	207	36,26	36,26
	Keran Aur	451	9	228	52,55	214	47,45	47,45
	Jalan Baru	350	115	235	100,00	0	0,00	0,00
	Ujung Baling	254	50	204	100,00	0	0,00	0,00
	Jalan Kereta Api	210	23	125	70,48	62	29,52	29,52
	Cimpunih	750	141	538	90,53	71	9,47	9,47
	Alai Gombang	190	98	31	99,47	1	0,53	0,53
	Teralak	390	88	301	100,00	0	0,00	0,00
	Kampung Baru	480	448	34	100,00	0	0,00	0,00
	Lohong	245	1	244	100,00	0	0,00	0,00
	Pasar	201	1	200	100,00	0	0,00	0,00
	Kampung Perak	157	1	156	100,00	0	0,00	0,00
	Pondok II	245	0	245	100,00	0	0,00	0,00
	Jabal-Jabal I	191	7	184	100,00	0	0,00	0,00
	Jabal-Jabal II	251	67	164	100,00	0	0,00	0,00
	Kampung Jawa II	225	82	143	100,00	0	0,00	0,00
	Kampung Jawa I	230	30	196	98,26	4	1,74	1,74
	Kampung Pondok	381	230	127	98,89	4	1,11	1,11
	Paub Barat	430	187	192	98,14	51	11,86	11,86
	Paub Timur	450	169	281	100,00	0	0,00	0,00
	Rawang	425	128	297	100,00	0	0,00	0,00
	Jail Nilar	375	64	311	100,00	0	0,00	0,00
	Jail Maudik	150	14	81	63,33	56	36,67	36,67
Pasar Timur	Kampung Gedung	301	9	287	91,69	25	8,31	8,31
	Talago Sarik	354	46	261	86,72	47	13,28	13,28
	Bato	276	33	243	100,00	0	0,00	0,00
	Batang Kebung	257	32	176	80,93	49	19,07	19,07



	Sungai Sirih	154	23	120	92,86	11	7,14	7,14
	Bungo Tanjung	260	1	218	83,46	43	16,54	16,54
	Kampung Kandieng	331	2	299	90,94	30	9,06	9,06
	Kaliut	208	0	172	82,50	30	14,42	14,42
	Kajai	201	12	187	93,00	2	1,00	1,00
	Kampung Tangah	90	0	27	30,00	63	70,00	70,00
	Sungai Pasak	201	24	175	87,00	2	1,00	1,00
	Air Santok	370	63	307	100,00	0	0,00	0,00
	Cubadak Mertawai	298	83	215	100,00	0	0,00	0,00
	Koto Marapak	287	283	4	100,00	0	0,00	0,00
	Pakasai	279	140	118	92,47	21	7,53	7,53
	Kp. Baru Padusunan	201	15	206	96,56	10	3,44	3,44
Pahaman Utara	Ampalu	496	9	451	92,74	36	7,26	7,26
	Tanjung Sabar	120	45	71	96,67	4	3,33	3,33
	Apar	324	1	276	85,49	47	14,51	14,51
	Manggung	300	55	243	99,33	2	0,67	0,67
	Cubadak Air	361	68	293	100,00	0	0,00	0,00
	Cubadak Air Selatan	224	132	80	94,64	12	5,36	5,36
	Sikarak Timur	289	182	107	100,00	0	0,00	0,00
	Sikarak Barat	464	174	290	100,00	0	0,00	0,00
	Tungkal Selatan	396	122	257	95,71	17	4,29	4,29
	Tungkal Utara	280	117	163	100,00	0	0,00	0,00
	Cubadak Air Utara	444	130	256	86,71	59	13,29	13,29
	Naras Hilir	305	4	251	83,61	50	16,39	16,39
	Naras I	560	54	457	92,91	39	7,09	7,09
	Balai Naras	600	2	529	88,50	69	11,50	11,50
	Padang Bih-Bih	364	2	348	96,15	14	3,85	3,85
	Sintuk	199	107	92	100,00	0	0,00	0,00
	Sungai Rambai	279	274	5	100,00	0	0,00	0,00
	Total	22.275	5.402	15.210		1.863		
Persentase Layanan		24,25%	58,28%	92,53%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%
Capaian SPM		92,53%						

Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	=	(Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum Layak: Jumlah Rumah Tangga) x 100 %



	=	$(20.612 : 22.275) \times 100\%$
	=	92,53 %

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian persentase penduduk berakses air minum mencapai 92,53%:

1. Air minum merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, akses air minum Jaring Perpipaan (JP) mencapai 24,25% terdiri dari jaringan air minum dari UPTD Air Bersih, PDAM Kabupaten Padang Pariaman dan Jaringan Air Bersih PAMSIMAS. Adanya penamabian pelanggan setiap tahunnya pada UPT Air Bersih, Kegiatan DAK Penambahan Jaringan Perpipaan untuk masyarakat MBR dan adanya bantuan pembangunan PAMSIMAS setiap tahunnya membuat akses air minum jaringan perpipaan akan meningkat.
2. Sedangkan bagi masyarakat yang mampu untuk membangun sumur bor yang masuk kategori Bukan Jaringan Perpipaan mencapai 68,28%. Hal ini tentu saja menambah akses air minum untuk Kota Pariaman.

Rumus yang digunakan untuk menghitung % Perumahan dan Permukiman Layak Huni adalah sebagai berikut:

% Perumahan dan Permukiman Layak Huni	=	$\frac{\% \text{Sanitasi Layak Aman} + \% \text{Air Minum Layak} + \% \text{Rumah Layak}}{3}$

Maka di dapatkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 74,35%.

Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir, sebagai berikut:

Realisasi				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
74,35	92,72	92,15	78,21	88,35%	111,30%	117,85%	97,51%

Dari tahun 2021 sampai tahun 2023 realisasi dan capaian selalu mengalami kenaikan, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi sebesar 18,37% dan penurunan capaian sebesar 22,95%.



Perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja Kota Pariaman dengan target jangka menengah dan RPD Kota Pariaman sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	80,2	78,19	83,3	84,15	78,21	92,15	92,72	74,35

Berdasarkan tabel di atas, jika di bandingkan dengan target jangka menengah, realisasi selalu mengalami kenaikan, penetapan target pada tahun 2024 (84,15%) belum mempertimbangkan realisasi pada tahun sebelumnya (92,72%).

Capaian realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja	Realisasi Kota Pariaman Tahun 2024	Target Kota Pariaman Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	74,35	86,25	86,20%

Tingkat capaian Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni terhadap target akhir periode RPD adalah 86,20%.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk tercapainya sasaran meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni adalah

1. Melakukan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU): Program ini bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan kawasan kumuh di kota-kota besar di Indonesia. Program ini melibatkan penataan ulang kawasan kumuh, pembangunan.
2. Sudah dilakukan pembinaan kepada 7 (tujuh) KSM yaitu Desa Marunggi, Kelurahan Kampung Pondok, Desa pauh Timur, Desa Tungkal Selatan, Desa Pauh Barat, Desa Simpang dan Desa Punggung Ladiang dan 200 warga penerima manfaat.



3. Pembinaan yang dilakukan masih bersifat sosialisasi dengan mengundang KSM dan masyarakat penerima manfaat pada acara sosialisasi.
4. Pembinaan diawali dengan cara melakukan survei terhadap SPALDT yang terbangun apakah masih berfungsi atau tidak.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Air Limbah Domestik sudah disusun pada tahun 2023 dan pada Tahun 2024 telah dilakukan harmonisasi dengan Kemenkum HAM Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat.

Beberapa kendala Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Rumah Layak Huni Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Keterbatasan Dana: Anggaran yang tersedia untuk program peningkatan RLH sering kali tidak memadai untuk menangani jumlah rumah tidak layak huni yang ada. Hal ini membatasi kemampuan kota dalam menyediakan bantuan yang cukup untuk masyarakat.
2. Ketidakmampuan Masyarakat: Banyak masyarakat yang menerima bantuan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni tidak memiliki kemampuan teknis atau finansial untuk melaksanakan proyek tersebut. Hal ini menyebabkan banyak proyek yang tidak selesai atau tidak memenuhi standar RLH.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kekurangan tenaga ahli dan teknisi dalam pelaksanaan program peningkatan RLH juga menjadi tantangan besar. Keterbatasan sumber daya manusia ini dapat memperlambat proses pelaksanaan program dan mengurangi efektivitasnya.
4. Keterbatasan Akses Dana: Meskipun ada bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), akses masyarakat terhadap dana ini sering kali terbatas. Hal ini dapat disebabkan oleh prosedur yang rumit atau kurangnya sosialisasi mengenai program tersebut.
5. Ketidakmampuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR): Masyarakat berpenghasilan rendah sering kali tidak mampu membeli bahan bangunan atau mempekerjakan tenaga kerja untuk memperbaiki rumah mereka. Hal ini memerlukan dukungan lebih dari pemerintah dan pihak lainnya.
6. Pada kegiatan Hibah penyediaan tangki septik individual tahun sebelumnya, ada beberapa warga masyarakat yang menolak diberikan tangki septik individual.



7. Anggaran kegiatan penyediaan sub sistem pengelolaan air limbah domestik sangat minim, pada tahun 2025 tidak ada kegiatan tersebut.
8. Berkurangnya jumlah SR infrastruktur terbangun yang disebabkan oleh masyarakat yang menerima akses SPALDT memutus sambungan rumah
9. KSM pengelola SPALDT tidak berjalan menyebabkan pemeliharaan SPALDT yang terbangun tidak ada dan infrastruktur menjadi rusak dan tidak termanfaatkan
10. Kurangnya pembinaan kepada masyarakat dan KSM menyebabkan jika terjadi permasalahan tidak ada perbaikan terhadap infrastruktur yang rusak
11. Belum adanya Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik menyebabkan tidak adanya pengawasan dan tindakan yang tegas terhadap pembangunan rumah atau usaha yang tidak menggunakan tangki septik yang sesuai standar.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Rumah Layak Huni (RLH) Tahun 2025, kota Pariaman perlu melakukan berbagai langkah strategis. Berikut adalah beberapa penjelasan terkait upaya yang harus dilakukan:

1. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi: Perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pencapaian RLH. Ini termasuk revisi regulasi yang membatasi peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
2. Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia: Perlu meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia mereka untuk melaksanakan program peningkatan RLH. Ini termasuk pelatihan teknis dan finansial bagi masyarakat yang menerima bantuan untuk memperbaiki rumah mereka.
3. Kolaborasi dengan Pihak Lain: Perlu Bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat luas, untuk mempercepat pencapaian target RLH. Sinergi antara berbagai pihak ini sangat penting dalam menciptakan hunian layak dan terjangkau.
4. Pengawasan dan Evaluasi: Harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan RLH secara berkala. Ini untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan.



5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hunian layak dan cara-cara untuk mendapatkan bantuan yang tersedia. Ini termasuk sosialisasi program-program peningkatan RLH dan edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka.
6. Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan tangki septik lebih intensif terkait pemeliharaan dan pengelolaan.
7. Segera mengesahkan ranperda Air Limbah Domestik.
8. Penambahan anggaran untuk penyediaan tangki septik yang sesuai standar, pembangunan IPAL Komunal untuk kawasan perkotaan .

Program yang mendukung meningkatkan Rumah Layak Huni Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Program Kawasan Permukiman dengan Pagu Anggaran Rp4.073.356.400 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.914.322.520 atau dengan capaian realisasi sebesar 96,10%.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan Pagu Anggaran Rp4.018.682.633 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.957.414.577 atau dengan capaian realisasi sebesar 98,48%.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan Pagu Anggaran Rp896.394.000 dengan realisasi anggaran Rp878.811.890 atau dengan capaian realisasi sebesar 98,04%.

Untuk mencapai Indikator Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni, Kota Pariaman melaksanakan 3 Program anggaran yang berasal dari APBDP Kota Pariaman Tahun 2024 dengan Jumlah Rp8.988.433.033,- dan telah terealisasi dengan jumlah Rp8.750.548.987,- dengan capaian 97,35% Pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dan efektif untuk mencapai indikator Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni.

Ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp400.253.920,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni (88,90%) lebih rendah dari realisasi anggaran (97,35%) dengan nilai efisiensi sebesar 26,39%.



B. Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani

Menurut UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Penghitungan luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani biasanya melibatkan beberapa langkah utama:

1. Identifikasi Kawasan Kumuh: Mengidentifikasi area yang memenuhi kriteria kumuh berdasarkan standar yang telah ditetapkan, seperti ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
2. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk data dari pemerintah daerah, survei lapangan, dan data statistik lainnya.
3. Analisis Data: Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menentukan luasan kawasan kumuh yang perlu ditangani.
4. Penghitungan Luasan: Menghitung luasan kawasan kumuh yang telah ditangani dengan menggunakan metode pengukuran yang sesuai, seperti penggunaan teknologi penginderaan jarak jauh (Remote Sensing) atau pengukuran langsung di lapangan.
5. Pelaporan: Menyusun laporan yang mencakup hasil penghitungan luasan kawasan kumuh yang tertangani untuk keperluan perencanaan dan evaluasi.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Luasan Kawasan Kumuh adalah :

$$\text{Luasan Kawasan Kumuh} = \text{Luas Kawasan Kumuh} - \text{Luas Kawasan Kumuh yang ditangani}$$

Sumber: Lakip Dinas Perkimh 2024

Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Lokasi pengurangan luasan kumuh tahun 2024 adalah:

Nomor SK Kumuh : SK Kumuh Walikota Pariaman Nomor: 38/050/2022
Nama Kawasan : Kawasan Pauh Barat – Ampalu
Total Luas Kawasan : 25,05 Ha
Berada di koordinat : Lat : -0.613263°. Long 100.115249°
Desa : Pauh Barat
RT/RW : Dusun Pasir Utara dan Dusun Pasir Selatan
Luas Kawasan : 1,79 Ha
Jumlah Bangunan : 51 Unit



Jumlah Penduduk : 274 Jiwa
Jumlah KK : 69 KK

Kawasan Kumuh Kota Pariaman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

Tahun	Luas Kumuh Total (Ha)	Penanganan (Ha)	Kumulatif Penanganan	% Kumulatif Penanganan	Sisa Kumuh (Ha)	Penanganan Per Tahun (%)
2019	109,41	76,99	76,99	70,37	32,42	70,37
2020	261,35	6,6	83,59	31,98	177,76	31,98
2021	261,35	28,28	111,87	42,80	149,48	15,91
2022	261,35	11,19	123,06	47,09	138,29	7,49
2023	261,35	3,61	126,67	48,47	134,68	2,61
2024	261,35	1,79	128,46	49,15	132,89	1,33

Sumber: Laki Perkimi tahun 2024

Sumber data/Perhitungan Realisasi:

1. Dengan masih tersisanya pengurangan kumuh direalisasikan tahun 2019 sebesar 32,42 Ha, tahun 2020 dikeluarkan/perhitungan kembali SK luas permukiman kumuh sebagai revisi dari SK kumuh tahun 2014, tahun 2020 dengan luas kawasan permukiman kumuh 184,36 Ha. Luas ini adalah penjumlahan sisa luas kawasan kumuh lama ditambah dengan luas kawasan kumuh baru (32,42 Ha + 151,94 Ha), untuk jangka penyelesaian tahun 2020-2024. Dengan adanya penambahan kawasan kumuh baru sebesar 151,94 Ha tersebut, maka Total Luas Kumuh dari Tahun 2014 menjadi 261,35 Ha (109,41 Ha + 151,94 Ha).
2. Tahun 2019 kawasan kumuh dapat dikurangi seluas 76,99 Ha, sehingga sisa kawasan kumuh tinggal 32,42 Ha.
3. Pada tahun 2020 kawasan kumuh dapat dikurangi seluas 6,6 Ha melalui dana BDI. Setelah dilakukan perencanaan ulang dan perhitungan penjarangan kumuh oleh program KOTAKU Kota Pariaman. Realisasi indikator kinerja sebesar 6,60 Ha dari 20,50 Ha target yang ditetapkan pada tahun 2020. Lokasi kawasan kumuh yang ditangani ini adalah daerah Desa Balai Nareh (Kawasan Nareh/Kawasan Nelayan) dengan luas 6,60 Ha dengan kategori tingkat kekumuhan kumuh ringan (prioritas 3) kecamatan Pariaman Utara.



4. Tahun 2021 pengurangan luasan kumuh tahun seluas 28,28 Ha melalui program DAK. Daftar nama lokasi pengurangan luasan kumuh tahun 2021 adalah:
 - a. Kecamatan Pariaman Tengah Kelurahan Karan Aur dengan luas 8,06 Ha.
 - b. Kecamatan Pariaman Tengah Kelurahan Kp. Perak dengan luas 5,77 Ha.
 - c. Kecamatan Pariaman Tengah Kelurahan Lohong dengan luas 8,01 Ha.
 - d. Kecamatan Pariaman Tengah Kelurahan Pasir dengan luas 2,84 Ha.
 - e. Kecamatan Pariaman Tengah Kelurahan Pondok II dengan luas 1,68 Ha.
 - f. Kecamatan Pariaman Tengah Kelurahan Jawi Jawi I dengan luas 1,92 Ha.
5. Tahun 2022 pengurangan luasan kumuh tahun seluas 11,19 Ha. Berdasarkan Berita Acara kesepakatan Penghitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan kumuh Kota Pariaman nomor 600/1574/DISPEKIM-LH/2022 ditetapkan pengurangan sebesar 11,19 Ha (6,06%) dari Luasan kumuh berdasarkan SK No. 38/050/2022 dengan total luasan kumuh 184,36 Ha.
 - a. Kecamatan Pariaman Tengah Kel. Jati Hilir 3,63 Ha (dari 6,51Ha)
 - b. Kecamatan Pariaman Tengah Kel. Kp. Pondok 1,6 Ha (dari 3,63 Ha)
 - c. Kecamatan Pariaman Tengah Kel. Jawi-Jawi I 2,34 Ha (dari 6,16 Ha)
 - d. Kecamatan Pariaman Tengah Kel. Jawi-Jawi II 3,62 Ha (dari 7,99 Ha)
6. Daftar nama lokasi pengurangan luasan kumuh tahun 2023 adalah :
Kecamatan Pariaman Utara Desa Manggung dengan luas kawasan kumuh 13,4 Ha dan pengerjaan seluas 3,61 Ha .
7. Daftar nama lokasi pengurangan luasan kumuh tahun 2024 adalah :
Kecamatan Pariaman Tengah Desa Pauh Barat dengan luas kawasan kumuh 1,79 Ha.

Tahun 2024 target penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pariaman merupakan Kawasan Pauh Barat-Ampalu dengan luas kawasan 25,05 Ha dengan usulan penanganan melalui program DAK Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT). Kota Pariaman merupakan satu-satunya Kota/Kabupaten yang mendapatkan alokasi anggaran melalui program DAK



PPKT tahun 2024. Dengan realisasi Luas Kawasan Permukiman kumuh yang tertangani Kota Pariaman pada Tahun 2024 yaitu 1,79 Ha.

Realisasi dan capaian Luasan Kawasan Permukiman kumuh yang tertangani **tidak dapat diperbandingkan dengan beberapa tahun terakhir**, karena penghitungan beberapa tahun sebelumnya menggunakan indikator Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh yang tertangani.

Perbandingan target dan realisasi capaian peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni Kota Pariaman dengan target RPD Kota Pariaman sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target RPD 2024-2026			Realisasi
	2024	2025	2026	2024
Luasan Kawasan Permukiman kumuh yang tertangani	25,05 Ha	19,62 Ha	19,73 Ha	1,79 Ha

Berdasarkan hasil realisasi pengurangan luasan kawasan kumuh Kota Pariaman beberapa tahun terakhir mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 capaian Kota Pariaman cenderung turun. Selain melalui APBD, Penanganan kawasan kumuh banyak dilaksanakan melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Namun, semenjak tahun 2023 program (KOTAKU) tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Pusat, hal ini mempengaruhi realisasi pengurangan Kawasan Kumuh Kota Pariaman.

Tahun 2024 target penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pariaman merupakan Kawasan Pauh Barat- Ampalu dengan luas kawasan 25,05 Ha dengan usulan penanganan melalui program DAK Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT). Luas Kawasan penanganan untuk usulan Program DAK tematik PPKT adalah di bawah 10 Ha. Kota Pariaman mendapatkan anggaran penanganan kawasan permukiman kumuh melalui Dana DAK Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) 2024 dengan luas 1,79 Ha di Desa Pauh Barat. Realisasi penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pariaman merupakan bagian dari target nasional karena sebagian besar anggaran penanganan merupakan Anggaran yang bersumber dari Dana Pusat (DAK tematik PPKT).



Hambatan/Permasalahan yang dihadapi sehingga tidak dapat mencapai target indikator Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani, sebagai berikut:

1. Keterbatasan Anggaran: Memiliki keterbatasan anggaran untuk program penanganan kawasan kumuh. Hal ini menghambat pelaksanaan proyek-proyek penataan kawasan kumuh yang memerlukan biaya tinggi.
2. Kendala Birokrasi: Proses perizinan dan regulasi yang rumit sering kali menghambat pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh. Kendala birokrasi ini dapat memperlambat progres dan mengurangi efektivitas program.
3. Kurangnya Koordinasi Antar Pihak: Penanganan kawasan kumuh memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Kurangnya koordinasi dan sinergi antar pihak dapat menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan program.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kekurangan tenaga ahli dan teknisi dalam pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh juga menjadi tantangan besar. Keterbatasan sumber daya manusia ini dapat memperlambat proses pelaksanaan program dan mengurangi efektivitasnya.
5. Ketidakmampuan Masyarakat: Banyak masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh tidak memiliki kemampuan finansial atau teknis untuk mendukung program penanganan. Hal ini menyebabkan banyak proyek yang tidak selesai atau tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.
6. Keterbatasan Akses Dana: Meskipun ada bantuan dari berbagai sumber, akses masyarakat terhadap dana ini sering kali terbatas. Prosedur yang rumit atau kurangnya sosialisasi mengenai program-program bantuan dapat menjadi hambatan dalam pencairan dana.
7. Masalah Kepemilikan Lahan: Konflik kepemilikan lahan di kawasan kumuh sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan program penataan. Penyelesaian konflik ini memerlukan waktu dan proses yang tidak sederhana.
8. Resistensi Masyarakat: Beberapa masyarakat mungkin menolak program penanganan kawasan kumuh karena khawatir kehilangan tempat tinggal.



atau tidak memahami manfaat dari program tersebut. Edukasi dan pendekatan yang tepat sangat diperlukan untuk mengatasi resistensi ini.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pariaman untuk mendukung pencapaian target, sebagai berikut:

1. Pemetaan dan Identifikasi: Melakukan pemetaan dan identifikasi kawasan kumuh secara terperinci untuk menentukan luas dan kondisi kumuh di wilayahnya. Teknologi penginderaan jarak jauh dan survei lapangan sering digunakan dalam proses ini.
2. Perencanaan dan Penyusunan Program: Berdasarkan hasil pemetaan, PerkimLH menyusun rencana dan program penanganan kawasan kumuh. Program ini mencakup berbagai aspek seperti peningkatan infrastruktur, perbaikan sarana dan prasarana, serta pengelolaan lingkungan.
3. Koordinasi dan Kolaborasi: Bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan memastikan keberlanjutan program penanganan kawasan kumuh.
4. Penyediaan Dana: Mengalokasikan anggaran khusus untuk program penanganan kawasan kumuh. Sumber dana dapat berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
5. Peningkatan Kapasitas Masyarakat: Program pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh. Pelatihan dan edukasi diberikan agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses perbaikan lingkungan tempat tinggal mereka.
6. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program penanganan kawasan kumuh. Tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
7. Sosialisasi dan Edukasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat melalui sosialisasi dan edukasi. Program ini melibatkan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.



Strategi yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pariaman untuk mencapai target ditahun selanjutnya, sebagai berikut:

1. Pemetaan Kawasan Kumuh: Perlu melakukan pemetaan yang akurat dan komprehensif terhadap kawasan kumuh yang ada di wilayahnya. Penggunaan teknologi penginderaan jarak jauh dan survei lapangan dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengukur luas kawasan kumuh.
2. Penyusunan Rencana Penanganan: Berdasarkan hasil pemetaan, OPD harus menyusun rencana penanganan yang terperinci dan realistis. Rencana ini harus mencakup target penanganan, strategi pelaksanaan, anggaran yang dibutuhkan, serta jadwal pelaksanaan.
3. Pengalokasian Anggaran: Harus memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai untuk program penanganan kawasan kumuh. Sumber dana dapat berasal dari APBD, APBN, serta bantuan dari lembaga donor dan sektor swasta.
4. Penguatan Kolaborasi dan Koordinasi: Perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Kolaborasi yang baik akan meningkatkan efektivitas program penanganan kawasan kumuh.
5. Pemberdayaan Masyarakat: Program pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh. Pelatihan dan edukasi mengenai pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat sangat diperlukan.
6. Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana: Harus fokus pada peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana di kawasan kumuh, seperti pembangunan jalan, penyediaan air bersih, sanitasi, dan listrik. Ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan tersebut.
7. Monitoring dan Evaluasi: Perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program penanganan kawasan kumuh. Tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi hambatan yang muncul, dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
8. Sosialisasi dan Edukasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penanganan kawasan kumuh melalui sosialisasi dan edukasi. Ini melibatkan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.



Program yang mendukung meningkatkan Rumah Layak Huni Kota Pariaman Tahun 2024 adalah Program Kawasan Permukiman dengan Pagu Anggaran sebesar Rp4.073.356.400 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.914.322.520 atau dengan capaian realisasi sebesar 96,10%.

Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp159.033.880,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani (7,14%) lebih rendah dari realisasi anggaran (96,10%) dengan nilai efisiensi sebesar 0%.

Sasaran Strategis 18: Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Mitigasi Bencana			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Daerah	46	44	95,65%

Tujuan dari penilaian Indeks Ketahanan Daerah adalah untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2024 berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. $IKD < 0,4$: Rendah
 5. $0,4 < IKD < 0,8$: Sedang
 6. $IKD > 0,8$: Tinggi
- Sumber: BNPB

Data penilaian diperoleh dengan :

1. Penilaian Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Penilaian Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
3. Penilaian Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
4. Penilaian Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Penilaian Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6. Penilaian Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
7. Penilaian Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.



Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan naik sekitar 2% yaitu sebesar 46 dengan predikat sedang.

Berdasarkan hasil dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2024, Kota Pariaman memperoleh nilai 44 dengan predikat "sedang", yaitu implementasi IKD sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan dan penambahan nilai input pada form jawaban tingkat ketahanan daerah. Hasil ini tertuang dalam Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-06.03/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025 tanggal 8 Januari 2025 Hal Penyampaian IKD 2024 dan IRB 2024 di Provinsi Sumatera Barat. Hasil nilai IKD BPBD Kota Pariaman beserta perbandingan dengan nilai tahun sebelumnya digambarkan pada tabel di bawah ini.

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,74	0,44	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,23		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,48		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,50		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,40		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,51		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20		

Sumber: Hasil Evaluasi IKD 2024

Berdasarkan tabel di atas, terjadi penurunan realisasi nilai IKD BPBD Kota Pariaman Tahun 2024 dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 44 persen. Masing-masing komponen penilaian sebagaimana dimaksud di atas menjadi target Perjanjian Kinerja dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penurunan nilai IKD BPBD Kota Pariaman Tahun 2024 dikarenakan belum lengkapnya data dari komponen yang diisi dan masih adanya beberapa dokumen yang di *upload* yang belum direvisi. Sumber data/Perhitungan Realisasi: Surat dari Badan Nasional Penanggulangan



Bencana Nomor B-06.03/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025 tanggal 8 Januari 2025
Hal Penyampaian IKD 2024 dan IRB 2024 di Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan hasil evaluasi IKD Kota Pariaman dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Nilai 2024
1	Kabupaten Pesisir Selatan	0,52
2	Kota Padang	0,52
3	Kabupaten Padang Pariaman	0,49
4	Kota Pariaman	0,44
5	Kota Sawahlunto	0,43
6	Kabupaten Solok Selatan	0,41
7	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0,39
8	Kabupaten Dharmasraya	0,39
9	Kabupaten Pasaman Barat	0,39
10	Kota Solok	0,36
11	Kabupaten Agam	0,33
12	Kabupaten Sijunjung	0,33
13	Kabupaten Lima Puluh Kota	0,32
14	Kabupaten Pasaman	0,31
15	Kabupaten Solok	0,30
16	Kota Padang Panjang	0,30
17	Kota Payakumbuh	0,30
18	Kota Bukittinggi	0,28
19	Kabupaten Tanah Datar	0,27

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan tabel di atas, Hasil evaluasi IKD Kota Pariaman Tahun 2024 adalah 0,44 dengan kategori "sedang" jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan realisasi dan capaian Indeks Ketahanan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Realisasi				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021



44% (sedang)	45% (sedang)	44 % (sedang)	54% (tinggi)	91,66%	69,23%	70,96%	100%

Realisasi Indeks Ketahanan Daerah Kota Pariaman mengalami naik turun sejak tahun 2021 dan capaian sudah mencapai 100% pada tahun 2021 namun mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023, kemudian terjadi kenaikan lagi pada tahun 2024.

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja dari Nilai IKD Kota Pariaman dengan target jangka menengah dan RPD Kota Pariaman sebagai berikut:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
54% (tinggi)	62% (tinggi)	65% (tinggi)	48% (sedang)	54% (tinggi)	44 % (sedang)	45% (sedang)	44% (sedang)

Berdasarkan hasil realisasi penilaian IKD Kota Pariaman beberapa tahun terakhir, dari realisasi tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 nilai evaluasi IKD Kota Pariaman naik 1%, namun masih belum bisa mencapai target jangka menengah, selanjutnya terdapat penurunan nilai evaluasi pada Tahun 2024 sebesar 1% tetapi masih dengan kategori yang sama yaitu sedang.

Capaian realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD adalah sebagai berikut:

Nilai IKD Kota Pariaman Tahun 2024	Target nilai IKD Kota Pariaman Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
44 dengan Predikat Sedang	52 dengan Predikat Sedang	84%

Tingkat capaian IKD BPBD Kota Pariaman Tahun 2024 terhadap target akhir periode mencapai 84%.

Beberapa kendala Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman penyebab tidak tercapainya target Tahun 2024 adalah:

1. Belum adanya komitmen lintas sektoral dalam penanganan bencana.
2. Belum dilegalitaskan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.



3. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi, diklat dan logistik
4. Belum dilakukan revisi terhadap dokumen kebencanaan.
5. Belum adanya Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Nilai IKD Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Melakukan Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
2. Melakukan Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya.
3. Melakukan Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan.
4. Peningkatan Penanggulangan Bencana dengan Melakukan koordinasi dan sosialisasi secara berkesinambungan dengan OPD yang terkait.
5. Sudah mengalokasikan anggaran pada APBD Tahun 2024, namun saat recoufusing anggaran, sehingga tidak jadi dilaksanakan.
6. Kota Pariaman telah tergabung dalam WAG Pusdalops PB Nasional sebagai media penyampaian informasi kebencanaan kepada Pusdalops PB BNPB dan juga Pusdalops PB Sumbar untuk menyampaikan laporan kebencanaan secara berkala.

Beberapa upaya/strategi yang akan ditargetkan akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana dalam rangka meningkatkan IKD Kota Pariaman Tahun 2025 untuk mencapai target hasil IKD 48 dengan predikat "sedang" sesuai dengan Target Kota Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilakukan kepada, Desa-desa, komunitas masyarakat, Sekolah, Instansi swasta dan negeri.
2. Melakukan revisi terhadap dokumen kebencanaan.
3. Meningkatkan layanan penanggulangan bencana.
4. Melakukan pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik.

Program yang mendukung meningkatkan Nilai IKD Kota Pariaman Tahun 2024 adalah Program Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.711.056.735 dengan realisasi sebesar Rp1.654.203.452 atau dengan capaian realisasi 96,68%.



Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp400.253.920,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Indeks Ketahanan Daerah (101,22%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,68%) dengan nilai efisiensi sebesar 47,43%.

Sasaran Strategis 19: Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan keamanan Masyarakat			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	69,15%	70%	101,22%

Ketenteraman dan ketertiban merupakan salah satu urusan wajib dalam pelayanan dasar pemerintah. Terciptanya ketenteraman dan ketertiban pada masyarakat berdampak pada kualitas hidup yang tertib, aman dan nyaman.

Menghitung indeks ketenteraman dan ketertiban dapat dihitung dengan rumus :

1. Persentase penyelesaian pelanggaran K3 sebanyak 30%

$$\left(\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda K3 yang ditangani}}{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda K3 yang terjadi}} \times 30 \right)$$

2. Persentase Pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebanyak 30 %

$$\left(\frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman yang ditangani}}{\text{Jumlah gangguan ketertiban dan ketenteraman yang terjadi}} \times 30 \right)$$

4. Persentase peningkatan kapasitas Pol PP sebanyak 20%

$$\left(\frac{\text{Jumlah Pol PP yang terlatih}}{\text{Jumlah Pol PP}} \times 20 \right)$$

5. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Perlindungan Masyarakat sebanyak 20 %

$$\left(\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan perlindungan masyarakat}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 20 \right)$$

Data Persentase dapat diperoleh dari :



1. Persentase Penyelesaian pelanggaran K3 diperoleh dari laporan pengaduan masyarakat tentang pelanggaran Perda K3 yang tertangani.
2. Persentase Pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diperoleh dari kegiatan pengamanan event, aset daerah, orang penting atau tamu VVIP dan tempat wisata di seputaran Kota Pariaman.
3. Persentase peningkatan kapasitas Pol PP diperoleh dari personil Pol PP yang mengikuti diklat atau bimtek lainnya.
4. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Perlindungan Masyarakat diperoleh dari jumlah desa/kelurahan yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan linmas.

Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih rendah yaitu 69,15%.

Berdasarkan target yang ada pada RPD tahun 2024-2026 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kota Pariaman pada tahun 2024 sebesar 69,15%, berdasarkan hasil penghitungan realisasi indeks ketenteraman dan ketertiban Kota Pariaman 2024 adalah 70%. Realisasi di Tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 0,85% dengan capaian 101,22% dari target 2024.

Realisasi tahun 2024 diperoleh dari ;

1. Penyelesaian pelanggaran Perda K3

$$\text{Sub indikator 1} = \left(\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda K3 yang ditangani}}{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda K3 yang terjadi}} \times 30 \right) =$$

$$\text{Sub indikator 1} = (45/54) \times 30 = 25$$

2. Pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Sub indikator2=

$$\left(\frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman yang ditangani}}{\text{Jumlah gangguan ketertiban dan ketenteraman yang terjadi}} \times 30 \right) = \text{Sub}$$

$$\text{Indikator 2} = (120/144) \times 30 = 25$$

3. Peningkatan kapasitas Pol PP diperoleh dari personil Pol PP yang mengikuti diklat atau bimtek lainnya

$$\text{Sub Indikator 3} = \left(\frac{\text{Jumlah Pol PP yang terlatih}}{\text{Jumlah Pol PP}} \times 20 \right) =$$



Sub indikator 3 = $(0/41) \times 20 = 0$

4. Peningkatan kapasitas Pol PP diperoleh dari personil Pol PP yang mengikuti diklat atau bimtek lainnya

Sub Indikator 4 =

$$\left(\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan perlindungan masyarakat}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 20 \right)$$

Sub indikator 4 = $(71/71) \times 20 = 20$

Hasil Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (IKK) 2024:

Sub indikator 1 + Sub indikator 2 + Sub indikator 3 + Sub indikator 4

Hasil IKK : $25\% + 25\% + 0\% + 20\% = 70\%$

Realisasi tahun 2024 bisa melebihi target disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, aktifnya masyarakat dalam melaporkan beberapa pelanggaran perda K3, personil Satpol PP yang aktif melakukan pengawalan VVIP dan keaktifan anggota Linmas setiap desa/kelurahan.

1. Pada April 2024 banyaknya masyarakat yang melaporkan aktifitas asusila di Pantai Kata, para pedagang di beberapa titik di pantai kata berjualan dengan memfasilitasi tempat mesum berupa payung ceper, dari sinilah ada 26 kasus yang diselesaikan secara non yustisi.
2. Pada November 2024 terindikasi akan diadakannya demo terhadap Pj. Wali Kota Pariaman, oleh sebab itu Satpol PP membuat tim khusus pengawalan terhadap Pj. Wali Kota Pariaman.
3. Tahun 2024 karena adanya Pilpres, Pileg dan Pilkada maka setiap desa/kelurahan mengaktifkan seluruh linmasnya untuk melakukan pengamanan di TPS.

Pencapaian target realisasi dalam indeks ketenteraman dan ketertiban di Kota Pariaman pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Dikarenakan keikut sertaan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di Kota Pariaman.
2. Pada tahun 2024 adanya Pemilu yang menuntut keaktifan Linmas disetiap Desa/Kelurahan.



Perbandingan realisasi dan capaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kota Pariaman Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

Realisasi				Capaian			
2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
70.00%	93.00%	84.40%	63.49%	101,22%	132,10%	123,21%	95,18%

Berdasarkan realisasi Persentase ketenteraman dan ketertiban Kota Pariaman beberapa tahun terakhir dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023 mengalami kenaikan, namun dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 23%. Capaian tahun 2021 berada di bawah 100%, untuk capaian tahun 2022 sampai 2023 selalu berada di atas 100%.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Pariaman dengan target jangka menengah dan RPD Kota Pariaman, sebagai berikut:

Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
66.70%	68.50%	70.40%	69.15%	63.49%	84.40%	93.00%	70.00%

Berdasarkan data di atas, realisasi dari Indikator Ketenteraman dan ketertiban pada tahun 2023 telah melampaui target RPJMD, namun penetapan target pada tahun 2024 di bawah realisasi 2023. Pada saat penyusunan perencanaan kinerja penetapan target tidak mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya, sehingga target 2024 di bawah realisasi tahun 2023 (sebesar 93%).

Perbandingan realisasi 2024 dengan target periode akhir RPD 2024-2026, sebagai berikut:

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kota Pariaman tahun 2024	Target Akhir Periode RPD	Capaian
70%	75,01%	93,32%

Tingkat capaian realisasi Indeks Ketenteraman dan Ketertiban tahun 2024 terhadap target periode akhir RPD adalah 93,32%.



Faktor penunjang keberhasilan dalam mencapai target indeks Ketenteraman dan Ketertiban, tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman, antara lain:

1. Koordinasi dengan OPD lainnya di Kota Pariaman

Koordinasi ini dilakukan supaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban dengan OPD lainnya agar berjalan dengan optimal, seperti dengan Dinas Pariwisata tentang Pelaku usaha wisata yang sering melanggar Perda.

2. Meningkatkan Peran Niniak Mamak dan Pemangku Kepentingan

Selalu mengikut sertakan niniak mamak atau pemangku kepentingan sebelum melakukan penertiban di suatu desa/kelurahan di Kota Pariaman.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya Menaikan Angka ketentraman dan ketertiban Kota Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana untuk menunjang Seluruh Kegiatan Satpol PP.
2. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan operasional Kegiatan Satpol PP dan Linmas.

Strategi yang akan ditargetkan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Dalam Rangka Meningkatkan Angka Ketenteraman dan Ketertiban Kota Pariaman Tahun 2025, Arah kebijakan untuk memenuhi target ini adalah dengan:

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Satpol PP agar bisa melaksanakan tugas dengan Optimal.
2. Meningkatkan Anggaran Operasional Satpol PP dan Linmas.
3. Mengadakan Kembali Penyuluhan dan Sosialisasi Perda/Perkada.

Program yang mendukung dalam meningkatkan angka Ketentraman dan Ketertiban Kota Pariaman untuk mendukung capaian sasaran adalah Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan tujuan untuk terwujudnya rasa tertib, aman dan nyaman pada masyarakat, dimana pagu anggaran untuk Tahun 2024 sebesar Rp4.360.971.870 dengan reasalisasi anggaran sebesar Rp4.317.359.357 (98.99%).



Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp43.612.513,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (70%) lebih rendah dari realisasi anggaran (98,99%) dengan nilai efisiensi sebesar 0%.



B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pariaman Tahun 2024 adalah Rp675.857.149.536,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp648.100.984.541,33 atau sebesar 95,89% dengan nilai efisiensi sebesar 20,27% (Penghitungan nilai efisiensi menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga). Akan tetapi, formulasi diubah untuk menyesuaikan tujuan pengukuran, yaitu untuk melihat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. Hal tersebut dilakukan karena pada formulasi yang diatur oleh Kementerian Keuangan hanya mengukur efisiensi penggunaan anggaran untuk menghasilkan output anggaran atau program. Formulasi yang telah disesuaikan untuk mengukur efisiensi pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Efisiensi

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

2. Nilai Efisiensi

Nilai efisiensi merupakan efisiensi kinerja yang diubah menjadi skala 0%-100%. Dalam mengubah efisiensi ke nilai efisiensi, ditetapkan asumsi bahwa efisiensi kinerja terendah adalah -20% dan tertinggi 20%. Jadi efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%. Untuk menghitung angka di antara -20% hingga 20%, digunakan formulasi berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (\text{TE}/20 \times 50)$$



Rincian Laporan Realisasi Anggaran Kota Pariaman Tahun 2024, sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	% 2024	Realisasi 2023
4	Pendapatan Daerah	669.473.661.957,00	644.362.029.673,36	96,25	625.829.083.470,04
4.1	Pendapatan Asli Daerah	53.788.984.257,00	45.911.378.642,36	85,35	38.861.600.702,04
4.1.01	Pajak Daerah	14.135.000.000,00	14.396.111.950,00	101,85	14.323.956.113,00
4.1.02	Retribusi Daerah	12.636.235.000,00	9.376.715.070,00	74,20	3.115.174.963,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.331.512.753,00	11.331.512.753,00	100,00	10.042.663.440,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	15.686.236.504,00	10.807.038.869,36	68,90	11.379.806.186,04
4.2	Pendapatan Transfer	615.684.677.700,00	598.450.651.031,00	97,20	580.803.758.528,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	569.225.396.000,00	565.486.692.998,00	99,34	553.174.264.492,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.459.281.700,00	32.963.958.033,00	70,95	27.629.474.036,00
4.3	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	6.163.724.240,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0	1.272.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	4.891.724.240,00



5	Belanja Daerah	675.857.149.536,00	648.100.984.541,33	95,89	619.164.014.291,00
5.1	Belanja Operasi	520.018.545.721,88	501.221.378.133,33	96,39	467.268.136.266,00
5.1.01	Belanja Pegawai	320.340.036.391,38	315.240.554.236,00	98,41	276.716.366.014,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.170.146.627,50	163.720.037.200,00	91,89	174.333.143.316,00
5.1.05	Belanja Hibah	20.784.042.703,00	21.650.244.697,33	104,17	15.822.266.936,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	724.320.000,00	610.542.000,00	84,29	396.360.000,00
5.2	Belanja Modal	64.737.258.930,00	58.767.684.209,00	90,78	63.803.160.485,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	117.700.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.313.469.448,00	10.229.912.049,00	83,08	12.532.002.806,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.744.581.723,00	27.172.296.811,00	88,38	23.033.557.412,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.251.301.659,00	19.973.012.799,00	98,63	27.638.459.867,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.427.906.100,00	1.392.462.550,00	97,52	480.440.400,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.3	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	120.495.000,00	24,10	0
5.4	Belanja Transfer	90.601.344.884,12	87.991.427.199,00	97,12	88.092.717.540,00



5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.581.437.889,12	971.520.204,00	27,13	1.532.483.527,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	87.019.906.995,00	87.019.906.995,00	100,00	86.560.234.013,00
	Surplus/Defisit	(6.383.487.579,00)	(3.738.954.867,97)	58,57	6.665.069.179,04
6	Pembiayaan Daerah	6.383.487.579,00	6.383.487.579,51	100,00	718.418.400,47
6.1	Penerimaan Pembayaran	7.383.487.579,00	7.383.487.579,51	100,00	718.418.400,47
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.383.487.579,00	7.383.487.579,51	100,00	718.418.400,47
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0
	Pembiayaan Netto	6.383.487.579,00	6.383.487.579,51	100,00	718.418.400,47



C. PENGHARGAAN

- 1 Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Publik dengan nilai Tahun 2024 dari Ombudsman Republik Indonesia dengan nilai 90,98 Zona Hijau Kategori A dengan Opini Kualitas Tertinggi



- 2 Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 dari Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia





3. Terbaik VII dalam Ketepatan Penyetoran Iuran Program Wajib Pegawai (IWP 8%), Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran Program Jaminan Kematian (JKM) Tahun 2024 dari PT Taspen Cabang Padang.



4. Peringkat Kedua Pemerintah Daerah dengan Kinerja Pengelolaan DAK Disik Terbaik dari Kementerian Keuangan.





- 5 Peringkat Pertama Kategori Pemerintah Daerah dengan Kinerja Pengelolaan Dana Desa Terbaik Semester I Tahun 2024



- 6 Penghargaan Kota Paling Berkelanjutan ke-Enam di Indonesia dari UI Green Metric





- 7 Penghargaan Apresiasi Pembina Program Kampung Iklim (ProKlim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



- 8 Juara II Poster Competition Audit Kasus Stunting Indonesia 2024 dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN





- 9 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dari Komisi Informasi Sumatera Barat



- 10 Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja Pencapaian Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI





11. Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2023 oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tanggal 18 November 2024.



12. Harapan 1 Kategori Pembina Ketahanan Pangan Kepala Desa/Wali Nagari dari Gubernur Sumatera Barat





- 13 Kota dengan Angka Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) tertinggi Semester 1 Tahun 2024 dan Kota dengan Angka Persentase Perekaman KTP-EI Tertinggi Semester 1 Tahun 2024 dari Gubernur Sumatera Barat



- 14 Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2024 sebagai daerah terinovatif dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia





- 15 Piagam Penghargaan atas Kinerja dan Komitmen dalam Penurunan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia



- 16 Penghargaan Kajian Perpustakaan Indonesia Tahun 2024 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia





- 17 Penghargaan Pencapaian Universal Health Coverage kategori Utama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia



- 18 Penghargaan Puskesmas Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pariaman selama tahun 2024. LKIP Kota Pariaman ini menyajikan hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Kota Pariaman Tahun 2024.

Secara keseluruhan capaian kinerja Pemerintah Kota Pariaman tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif mulai dari Pimpinan hingga ke bawahnya.

Pemerintah Kota Pariaman pada Tahun 2024 dapat dinyatakan "baik" mencapai kinerja dengan rata-rata capaian 84%, karena realisasi 9 dari 26 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kota Pariaman di atas 100%, dengan rincian:

- 1) Target dengan realisasi di atas 100% sebanyak 8 indikator.
- 2) Target dengan realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator
- 3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 17 indikator.

Pemerintah Kota Pariaman pada tahun 2024 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2024 sebesar Rp675.857.149.536,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp648.100.984.541,33 atau sebesar 95,89% dengan selisih anggaran sebesar Rp27.756.164.955,67 dengan **nilai efisiensi sebesar 20,27%**.

Pencapaian di tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023, walaupun masih banyak capaian kinerja yang belum optimal, baik dari proses perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal yang mendalam terhadap seluruh capaian kinerja. Disamping itu, Sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Kota Pariaman belum didukung anggaran yang memadai, sehingga banyak indikator kinerja yang belum mencapai realisasi maksimal. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran



tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya peningkatan Semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pariaman meningkat secara berkelanjutan.

Agar pencapaian indikator sasaran dan pencapaian target kinerja tahun kedepannya dapat lebih optimal, maka dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh Aparatur Sipil Negara akan menjadi fokus utama Pemerintah Kota Pariaman mengingat target indikator hanya dapat dicapai jika Pimpinan terlibat langsung dan turut aktif dalam pencapaian target.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja setiap triwulan oleh masing-masing perangkat daerah.
3. Melakukan identifikasi masalah sejak dini pada saat pelaksanaan program dan kegiatan, jika muncul suatu permasalahan dapat segera dicarikan solusi alternatif, agar pelaksanaan selanjutnya dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.
4. Melakukan koordinasi yang baik dan intensif antar perangkat daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya.
5. Melakukan evaluasi, khususnya pada target-target yang sejak ditetapkan menjadi indikator kinerja utama Kota Pariaman tidak pernah tercapai realisasinya 100%.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pariaman, Desember 2024
Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	Angka Harapan Lama Sekolah	14,73 Tahun
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,22 Tahun
2	Meningkatnya Derajat Kesehaian Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	71,31 Tahun
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,7%
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan	(Ribu/Rp) 13.814
4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55,25
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,28
5	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,91%
6	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	17,95%
7	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Spending Of Money	3%
8	Meningkatnya iklim usaha dan investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	2,6%
9	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	3,92%
10	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,72%
11	Meningkatnya kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7874
12	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kota	65,15 (B)
		Opini WTP BPK Terhadap LKPD	WTP
13	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	Indeks SPBE	2,75
		Indeks Profesional ASN	85,96 (Tinggi)
14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,51 (Pelayanan Prima)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,15 (Baik)
15	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	64,25%

16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,02
17	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	84,15
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani (Ha)	25,05 Ha
18	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Mitigasi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	46
19	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	69,15%

No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp368,742,758,543
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp35,442,197,007
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp13,009,000
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp221,803,950
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp1,603,938,250
6	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp200,000,000
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp55,512,076,775
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp622,267,250
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp372,901,000
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp219,198,000
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp797,657,150
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp935,950,000
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp4,018,682,633
14	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp1,716,635,200
15	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp3,098,697,686
16	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp181,408,400

17	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp14,880,398,159
18	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp4,900,000
19	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp304,702,840
20	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp52,523,250
21	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp91,729,250
22	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp3,968,850,271
23	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp25,000,150
24	Program Pengembangan Perumahan	Rp97,735,000
25	Program Kawasan Permukiman	Rp4,073,356,400
26	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp4,353,456,750
27	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp416,655,250
28	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp1,353,114,530
29	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp1,478,339,502
30	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp32,345,150
31	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp40,491,750
32	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluh Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp55,779,300
33	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp5,304,500
34	Program Pengelolaan Persampahan	Rp6,895,522,297
35	Program Penanggulangan Bencana	Rp1,711,056,735
36	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp4,360,971,870
37	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp2,442,902,768
38	Program Pemberdayaan Sosial	Rp195,058,150
39	Program Rehabilitasi Sosial	Rp726,098,970

40	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp95,031,800
41	Program Penanganan Bencana	Rp96,948,800
42	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp39,795,430
43	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp22,500,000
44	Program Perlindungan Perempuan	Rp204,043,850
45	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp32,200,000
46	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp41,229,500
47	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp315,960,000
48	Program Pengendalian Penduduk	Rp103,800,000
49	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp2,290,652,000
50	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera (KS)	Rp1,682,662,000
51	Program Pendaftaran Penduduk	Rp271,064,940
52	Program Pencatatan Sipil	Rp4,990,000
53	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp13,596,400
54	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp5,723,850
55	Program Penataan Desa	Rp3,000,000
56	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp94,045,196
57	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat	Rp2,292,557,364
58	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp392,447,662
59	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp1,171,978,886
60	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp1,900,426,400
61	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp31,665,946
62	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp15,338,250
63	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp3,750,000

64	Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	Rp233,578,000
65	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp33,831,500
66	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp440,591,000
67	Program pengembangan UMKM	Rp13,287,500
68	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp1,802,875,287
69	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp11,701,250
70	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp19,733,000
71	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp31,323,300
72	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp24,114,000
73	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp4,000,000
74	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp2,045,000
75	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp146,324,000
76	Program Hubungan Industrial	Rp19,238,500
77	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp5,094,000
78	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp355,798,348
79	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp397,530,000
80	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp916,015,499
81	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp215,366,820
82	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp634,500
83	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp1,275,890,815
84	Program Pemasaran Pariwisata	Rp73,699,232
85	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp100,971,349
86	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp222,397,080
87	Program Pengelolaan Arsip	Rp289,232,450
88	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp6,971,000

89	Program Peningkatan Diversifikasi dan Kelahanan Pangan Masyarakat	Rp252,709,293
90	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp19,610,252
91	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp61,245,586
92	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp478,442,010
93	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp492,395,040
94	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp69,898,500
95	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp578,017,150
96	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp15,321,488
97	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp313,799,736
98	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp112,302,750
99	Program Penyuluhan Pertanian	Rp274,812,916
100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp3,920,721,132
101	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp314,210,778
102	Program Dukungan Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD	Rp14,111,502,853
103	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp1,000,049,959
104	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp420,772,465
105	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp227,346,200
106	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp90,902,674,868
107	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp659,111,612
108	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp1,881,238,000
109	Program Kepegawaian Daerah	Rp1,004,754,331
110	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp224,058,701
111	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp4,000,000
112	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp833,130,831

113	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp14,980,745,719
114	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp82,640,500
115	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp210,495,750
116	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp596,044,865
117	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp1,686,215,915
118	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp1,010,055,981
119	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp1,699,000
120	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp83,999,966
121	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp0
Jumlah		Rp675.857.149.536

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mursalim, A.P., M.Si.
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, Desember 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Roberia

Mursalim

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Capaian Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Nilai EPPD Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	10 3,29 (Sedang) 98% (Tuntas Utama) 90,5 (Sangat Baik)

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp19.221.855.032	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp3.929.721.132	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp314.210.778	
	Jumlah	Rp23.465.786.942	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pj. Sekretaris Daerah,


Mursalim



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Sakti, S.H., M.M
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,

Indra Sakti, S.H., M.M
Pembina Utama Madya/IV/d
NIP 196601011989031017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Fungsi DPRD Dalam Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp14.062.376.544	
2	Program Dukungan Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD	Rp14.111.502.853	
	Jumlah	Rp28.173.879.396	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Sekretaris DPRD Kota Pariaman



Indra Sakti, S.H., M.M
Pembina Utama Madya/IV/d
NIP 196601011989031017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfian Harun, SE, MM
Jabatan : Inspektur Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Roberia
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,

Alfian Harun, SE, MM
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196609101987121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tatakelola Pengawasan Pemerintah Kota Pariaman	Level Kapabilitas APIP	3
		Nilai Maturitas SPIP	2,54
		Nilai SAKIP Komponen Evaluasi	12,65
		Persentase Tindak Lanjut Temuan	81
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat	81,63

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp7.325.242.104	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp224.058.701	
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp4.000.000	
	Jumlah	Rp7.553.300.805	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Inspektur,



Alfian Harun, SE, MM
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 196609101987121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Kanderi, M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024
Pihak Pertama,

Drs. Kanderi, M.M.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196412311989031120

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Aksesabilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	62%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	90,5%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	87,50%
2	Meningkatnya Kualitas Pendidik	% Guru sesuai Kualifikasi S1 dan D4	98,50%
		% Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	50,60%
3	Meningkatnya Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan	Rata-rata kemampuan Literasi Siswa SD/MI berdasarkan Rapor Pendidikan	1,90
		Rata-rata kemampuan Literasi Siswa SMP/MTs berdasarkan Rapor Pendidikan	1,95
		Rata-rata kemampuan Numerasi Siswa SD/MI berdasarkan Rapor Pendidikan	1,70
		Rata-rata kemampuan Numerasi Siswa SMP/MTs berdasarkan Rapor Pendidikan	1,80
4	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi	1
5	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi	25

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp116.838.650.445	
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp35.442.197.007	
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp13.009.000	
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp221.803.950	
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp1.603.938.250	

8 Program Pengembangan Kapasitas
Kepramukaan

Rp200.000.000

Jumlah

Rp154.319.598.652

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga

Drs. Kaden, M.M.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196412311989031120



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Arisandi, S.Si., Apt.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,

Rio Arisandi, S.Si., Apt.
Pembina/ IV/a
NIP 197606032000121008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya Angka Morbiditas dan Moralitas	Angka Kematian Ibu (AKI)	96/100.000 KH
		Angka Kematian Bayi (AKB) Stunting	12/1000 KH
		Prevalensi Stunting	15,7%

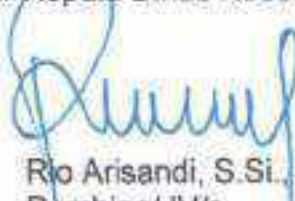
	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp81.120.865.602	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp55.512.076.775	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp622.267.250	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp372.901.000	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp219.198.000	
	Jumlah	Rp137.847.308.627	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pit. Kepala Dinas Kesehatan,



Rio Arisandi, S.Si., Apt.
Pembina/ IV/a
NIP 197606032000121008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dasmaniar, S.Sos., M.M.
Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,

Dasmaniar, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I/IV/b
NIP 196701121988032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Provinsi Mantap	72,16%
		Persentase Panjang Drainase Kota Dalam Kondisi Baik	42,50%
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	72,60%
		Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Representatif	80,10%
2	Meningkatnya Kualitas Permukiman yang Layak Huni	Persentase Akses Sanitasi Layak	71,53%
		Persentase Penduduk berakses Air Minum Layak	96,55%
3	Meningkatnya Kesesuaian Guna Lahan dengan rencana Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang	66,90%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	A

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp11.023.777.803	
2	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp797.657.150	
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp896.394.000	
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	RP4.018.682.633	
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp1.716.635.200	
6	Penataan Bangunan Gedung	Rp3.098.697.686	
7	Penataan Bagunan dan Lingkungannya	Rp181.408.400	
8	Penyelenggaraan Jalan	Rp14.880.398.159	
9	Pengembangan Jasa Kontruksi	Rp4.900.000	
10	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp304.702.840	
11	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp52.523.250	
12	Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp91.729.250	
13	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp1.820.444.319	
	Jumlah	Rp38.887.950.691	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kota Pariaman,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dasmaniar', is written over the official name and title.

Dasmaniar, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I/IV/b
NIP 196701121988032002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feri Andri, ST., MT.
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,

Feri Andri, ST., MT.
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP 196602251994031006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Perumahan Layak Huni dan Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	93,19%
		Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	1,79 Ha
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,02

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp25.000.150	
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp97.735.000	
3	Program Kawasan Permukiman	Rp4.073.356.400	
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp4.353.456.750	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.452.862.429	
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp416.655.250	
7	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp1.353.114.530	
8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp1.478.339.502	
9	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp32.345.150	
10	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp40.491.750	
11	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluh Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp55.779.300	
12	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp5.304.500	
13	Program Pengelolaan Persampahan	Rp6.895.522.297	
14	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp39.556.000	
	Jumlah	Rp29.319.519.008	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup Kota Pariaman,



Feri Andri, ST., MT.
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP 196602251994031006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Roem, S.H., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, Desember 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Roberia

Muhamad Roem, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 196703181986021002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA PARIAMAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	% Masyarakat yang terpenuhi Kebutuhan Dasar Esensial	100%
		% Cakupan Pelayanan PPKS	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.733.737.075	
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp195.058.150	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp726.098.970	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp95.031.800	
5	Program Penanganan Bencana	Rp96.948.800	
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp39.795.430	
Jumlah		Rp3.886.670.225	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman,



Muhamad Roem, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP 196703181986021002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainal, S.Pi., M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,

Zainal, S.Pi., M.Si.
Pembina/ IV/a
NIP 197304122006041019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian	Persentase Capaian Produksi Sektor Pertanian	98%
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	69,93

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp252.709.293	
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp19.610.252	
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp61.245.586	
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp478.442.010	
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp492.395.040	
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp69.898.500	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp14.037.585.834	
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp578.017.150	
9	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp15.321.488	
10	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp313.799.736	
11	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp112.302.750	
12	Program Penyuluhan Pertanian	Rp274.812.916	
	Jumlah	Rp16.706.140.555	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Kepala Dinas Pertanian,
Pangan, dan Perikanan

Zainal, S.Pi., M.Si.
Pembina/ IV/a
NIP 197304122006041019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. dr. Lucyanel Arlym, MARS
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama



Dr. dr. Lucyanel Arlym, MARS
Pembina Tingkat I/IV/b
NIP. 197802162007012005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55,25 %
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	Strata Kota Layak Anak (KLA)	Nindya
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern / mCPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 tahun	67 %
		Cakupan PUS yang ingin yang ber-KB tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	16 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp4.029.370.905	
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp22.500.000	
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp204.043.850	
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp32.200.000	
5	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp41.229.500	
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp315.960.000	
7	Program Pengendalian Penduduk	Rp103.800.000	
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp2.290.652.000	
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp1.682.662.000	
	Jumlah	Rp8.722.418.255	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan
 Perempuan Perlindungan Anak dan
 Keluarga Berencana,



Dr. dr. Lucyahel Arlym, MARS
 Pembina Tingkat I/IV/b
 NIP 197802162007012005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noviardi, SH
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,


Noviardi, SH
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196611041989031011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,75
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	91,1
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik	2,04

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.723.362.403	
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp1.171.978.886	
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp1.900.426.400	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp31.665.946	
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp15.338.250	
	Jumlah	Rp6.842.771.885	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,


Novardi, SH
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196611041989031011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusniyeti Zaunit, S.Kom., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,


Gusniyeti Zaunit, S.Kom. M.Si
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196908181997032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Realisasi Investasi PMA & PMDN	Rp50.000.000.000
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	94,67 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.115.208.254	
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp146.324.000	
3	Program Hubungan Industrial	Rp19.238.500	
4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp5.094.000	
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	RP355.798.348	
6	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp397.530.000	
	Jumlah	Rp5.093.193.102	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja,


Gusniyati Zaun, S.Kom., M.Si
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196908181997032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raski Fitra, S.ST
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,

Raski Fitra, S.ST
Pembina/ IV/a
NIP 197609262002121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	10,5 %
2	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Rata – rata lama tinggal wisatawan	0,5/hari
3	Peningkatan Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Peningkatan pemajuan kebudayaan	2 objek
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	B

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp916.015.499	
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp215.366.820	
3	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp634.500	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp5.035.049.989	
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp1.275.890.815	
6	Program Pemasaran Pariwisata	Rp73.699.232	
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp100.971.349	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,



Raski Fitra, S.ST
Pembina/ IV/a
NIP 197609262002121005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alyendra, SH
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,


Alyendra, SH
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP 196701061998031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan, industri, koperasi dan UMKM	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan	2
		Persentase pertumbuhan sektor industri	1.5
		Persentase peningkatan kualitas koperasi	0.5
		Persentase peningkatan kualitas UMKM	1

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp6.838.368.445	
2	Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Rp3.750.000	
3	Program pendidikan dan latihan koperasi	Rp233.578.000	
4	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Rp33.831.500	
5	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Rp440.591.000	
6	Program pengembangan UMKM	Rp13.287.500	
7	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Rp1.802.875.287	
8	Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rp11.701.250	
9	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Rp19.733.000	
10	Program Standarisasi dan perlindungan Konsumen	Rp31.323.300	
11	Program perencanaan dan pembangunan industri	Rp24.114.000	
12	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp4.000.000	
13	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.2045.000	
	Jumlah	Rp9.459.198.282	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah,



Alyendra, SH
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP 196701061998031005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Junaidi, AP,
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,

Adi Junaidi, AP.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 197506221995011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93
2	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92,80%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.441.676.586	
2	Pendaftaran Penduduk	Rp271.064.940	
3	Pencatatan Sipil	Rp4.990.000	
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp13.596.400	
5	Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp5.723.850	
	Jumlah	Rp3.737.051.776	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,


 Adi Junaidi, AP,
 Pembina Utama Muda/ IV/c
 NIP 197506221995011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afwandi, S.STP, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,

Afwandi, S.STP, M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 197910221998101001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PARIAMAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Keselamatan, Kelancaran Berjalan Lintas	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,6
		Persentase Cakupan Layanan Berjalan Lintas	80,42

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.396.793.936	
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp2.148.405.951	
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp392.447.622	
	Jumlah	Rp7.937.647.549	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Kepala Dinas Perhubungan,



Afwandi, S.STP, M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 197910221998101001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yalvi Endri, SE, Akt, MM
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,

Yalvi Endri, SE, Akt, MM
Pembina Tingkat I/ IV/b
NIP 197703022005011007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Status Desa Berkembang	Persentase Desa Mandiri	37,72% (18 Desa)
		Persentase Desa Maju	67,28% (37 Desa)

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.277.283.680	
2	Program Penataan Desa	Rp3.000.000	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp94.045.196	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat	Rp2.292.557.364	
	Jumlah	Rp5.666.886.240	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,


Yalvi Erchi, SE, Akt, MM
Pembina Tingkat I/ IV/b
NIP. 197703022005011007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfian, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,

Alfian, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 197407261993111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penegakan Perda/Perkada	Persentasi Pencapaian Penegakan Perda/Perkada	90%
		Indek Penanganan Gangguan dan Ancaman Trantibun	93
2	Meningkatnya Pengendalian Bencana Kebakaran	Persentase Bencana kebakaran yang tertangani	100%
		Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>)	15 Menit
		Proporsi Sarana dan Prasarana Yang Tersedia Sesuai Standard	70%
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100%
		Proporsi Personil Penanggulangan Kebakaran yang Terlatih dan Kompeten	80%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.961.954.519	
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp4.360.971.870	
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp2.442.902.768	
Jumlah	Rp12.765.829.157	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,



Affian, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 197407261993111001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syukri, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,

Muhammad Syukri, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 1966120519931001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	60%
2	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Pemerintah	Persentase OPD yang mengelola Arsip sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	35%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.936.674.925,26	
2. Program Pembinaan Perpustakaan	Rp222.397.080	
3. Program Pengelolaan Arsip	Rp289.232.450	
4. Program Perlindungan dan Penyelematan Arsip	Rp6.971.000	
Jumlah	Rp3.455.275.455,26	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman,



Muhammad Syukri, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP 1966120519931001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendri, S.Sos.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,

Hendri, S.Sos.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 197204011993031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBAANGAN DAERAH
KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	73,6%
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	23,5%
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	18,5%
		Persentase Target Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD/RPD) yang tercapai	77,5%
		Persentase Pemanfaatan Dokumen Penelitian Daerah dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan	73,5%

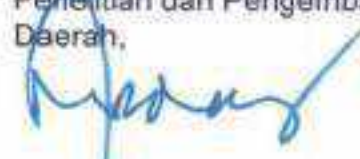
	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.996.923.333	
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp1.000.049.959	
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp420.772.465	
4	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp227.346.200	
	Jumlah	Rp6.645.091.957	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Kepala Badan Perencanaan,
 Penelitian dan Pengembangan
 Daerah,



Henda, S.Sos.
 Pembina Utama Muda/ IV/c
 NIP 197204011993031005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adrial, SE, MM

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kota Pariaman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.

Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, Desember 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Roberia

Adrial, SE, MM
Pembina Tingkat I/ IV/b
NIP 196709251989031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP
2	Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	33 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp13.586.271.036	
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp90.902.674.868	
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp708.387.600	
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	RP1.881.238.000	
	Jumlah	Rp107.029.295.515	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah,



Adrial, SE, MM
Pembina Tingkat II IV/b
NIP 196709251989031004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irmadawani, S.Sos.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama

Irmadawani, S.S.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 196509141986032005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PARIAMAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	85,93
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur	Indeks Penerapan Sistem Merit	210
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	89,4
4	Terselenggaranya Pengelolaan Anggaran BKPSDM Kota Pariaman secara Optimal	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	85%
		Persentase Penyerapan Anggaran BKPSDM	85%

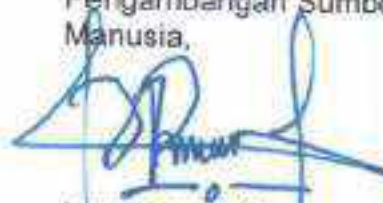
	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.975.240.071	
2	Program Kepegawaian Daerah	Rp1.004.754.331	
	Jumlah	Rp4.979.994.402	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Imadawani, Sos.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196509141986032005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azman, SE, MM

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.

Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,

Azman, SE, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197001251994031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Mitigasi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	44%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.377.595.459	
2	Penanggulangan Bencana	Rp1.711.056.735	
	Jumlah	Rp5.088.652.194	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pariaman,



Azman, SE, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197001251994031004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferry Ferdian Bagindo Putra, S.STP, M.Si.
Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,

Ferry Ferdian B. P., S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I/ IV/b
NIP 198302162001121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pencegahan Konflik Sosial	Persentase Pencegahan Konflik Sosial	100%
2	Meningkatnya Kehidupan Demokrasi di Kota Pariaman	Indeks Demokrasi Kota Pariaman	10

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.902.908.467	
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp833.130.831	
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp14.980.745.719	
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp0	
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp82.640.500	
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp210.495.750	
	Jumlah	Rp18.009.921.267	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik,


 Ferry Ferdian B. P., S.STP, M.Si.
 Pembina Tingkat I/ IV/b
 NIP 198302162001121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arif Gunawan, S.STP
Jabatan : Camat Pariaman Timur Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,



M. Arif Gunawan, S.STP
Pembina/ IV/a
NIP 198511022003121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	88,5
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.919.064.419,32	
2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp7.888.000	
4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp1.298.533	
5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp3.325.366	
Jumlah	Rp1.931.576.318,32	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Camat Pariaman Timur
Kota Pariaman,



M. Arif Gunawan, S.STP
Pembina/IV/a
NIP 198511022003121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Farid Marwan, S.STP, M.M.

Jabatan : Camat Pariaman Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.

Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Pihak Pertama,

Moh. Farid Marwan, S.STP, M.M.
Pembina/ IV/a
NIP 198609192004121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.659.965.836	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp4.942.500	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp6.684.640	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Rp1.699.000	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp6.630.000	
	Jumlah	Rp2.679.921.976	

Pj. Wali Kota Pariaman,

Roberia

Pariaman, Desember 2024

Camat Pariaman Selatan,

Moh. Farid Marwan, S.STP, M.M.
Pembina IV/a
NIP. 198609192004121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahadi Nugraha, S.STP., M.Si.
Jabatan : Camat Pariaman Utara Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roberia, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, Desember 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Roberia



Ahadi Nugraha, S.STP., M.Si.
Pembina/ IV/a
NIP 198507282003121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.460.706.309,94	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp6.086.750	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp15.911.250	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp9.284.000	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp8.219.000	

Jumlah

Rp2.500.207.309,94

Pj. Wali Kota Pariaman,

Pariaman, Desember 2024

Camat Pariaman Utara
Kota Pariaman,

Roberia



Ahadi Nugraha, S.STP., M.Si.
Pembina/IV/a
NIP 198507282003121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH
KOTA PARIAMAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12,563,385,004	Kec + 16 Kel
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	585,015,615	Kec + 16 Kel
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,655,702,025	Kec + 16 Kel
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	65,825,600	Kec + 16 Kel
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	999,473,448	Kec + 16 Kel
Total		15,869,401,692	

Pj. Walikota Pariaman

Roberia

Pariaman, Desember 2024
Camat Pariaman Tengah
Kota Pariaman

Febriady Harko, S.STP.M.H
Pegawai / IVa
NIP. 198202232002121002

Tabel 13.12 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat (tahun), 2020–2024
Table Expected Years of Schooling by Regency/Municipality in Sumatera Barat Province (years) , 2020–2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency						
01.	Kepulauan Mentawai	12,82	12,89	12,89	12,90	12,91
02.	Pesisir Selatan	13,32	13,33	13,35	13,36	13,37
03.	Solok	13,04	13,05	13,10	13,55	13,56
04.	Srôngjông	12,37	12,38	12,64	12,72	12,76
05.	Tanah Datar	14,33	14,34	14,59	14,78	15,05
06.	Padang Panjang	13,67	13,68	13,93	14,19	14,20
07.	Agam	13,87	13,88	13,88	13,89	14,16
08.	Lima Puluh Kota	13,29	13,30	13,40	13,41	13,42
09.	Parang	12,80	12,81	13,05	13,25	13,52
10.	Solok Selatan	12,71	12,72	12,73	12,80	13,07
11.	Dharmasraya	12,43	12,44	12,51	12,68	12,89
12.	Parang Barat	13,61	13,66	13,69	13,70	13,72
Kota/Municipality						
71.	Padang	16,52	16,53	16,54	16,56	16,57
72.	Solok	14,32	14,33	14,34	14,36	14,37
73.	Sawahlunto	13,17	13,18	13,42	13,69	13,86
74.	Padang Panjang	15,06	15,07	15,07	15,29	15,47
75.	Bukittinggi	14,97	14,98	14,99	15,01	15,28
76.	Payakumbuh	14,26	14,27	14,29	14,30	14,57
77.	Parang	14,54	14,55	14,61	14,79	14,80
Sumatera Barat		14,82	14,09	14,1	14,11	14,3

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2024,
 National Social Economic Survey

Sign in

0 WhatsApp x LHR I Kgy Taku x BPD Kota Pare x PERMENPAN x angka harapan x (Metode Baru) x

https://www.bps.go.id/statistics-table/3/NDE3kt-/new-method-expected-years-of-schooling.html

BADAN PUSAT STATISTIK

Beranda Rencana Terbit Produk Layanan Informasi Publik

Perindungan Sosial

Pemukiman dan Perumahan

Hukum dan Kriminal

Budaya

Aktivitas Politik dan Komunitas

Lainnya

Penggunaan Waktu

Statistik Ekonomi

Statistik Lingkungan Hidup dan Multi-domain

Provinsi/Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2022	2023	2024
Nduga	-	-	4,45
Jayawijaya	-	-	12,85
Lanny Jaya	-	-	9,44
Tolikara	-	-	9,03
Mamberaro Tengah	-	-	9,78
Yalimo	-	-	9,80
Yahukimo	-	-	8,05
Pegunungan Bintang	-	-	7,01
INDONESIA	13,10	13,15	13,21

Keterangan Data :

Untuk informasi lebih lanjut mengenai IPMA metode baru, silahkan klik link di bawah ini

31°C
Sebagai ceria

Search

IND 4/8/2025 3:58 PM

Tabel 13.13 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (tahun), 2020–2024
Table *Mean Year of Schooling by Regency/Municipality in Sumatera Barat Province (years) , 2020–2024*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality		2020	2021	2022	2023	2024
(I)		(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)
Kabupaten/Regency						
01.	Kepulauan Mentawai	7,09	7,20	7,48	7,76	8,03
02.	Pesisir Selatan	8,26	8,27	8,43	8,58	8,81
03.	Solok	7,86	7,87	7,89	7,90	7,91
04.	Sijunjung	8,11	8,12	8,30	8,57	8,82
05.	Tanah Datar	8,61	8,62	8,90	9,02	9,29
06.	Padang Pariaman	7,87	7,88	8,16	8,41	8,42
07.	Agam	8,96	8,97	8,98	9,22	9,23
08.	Lima Puluh Kota	7,99	8,07	8,08	8,12	8,13
09.	Pasaman	8,09	8,10	8,11	8,13	8,14
10.	Solok Selatan	8,28	8,32	8,41	8,69	8,85
11.	Dharmasraya	8,47	8,55	8,56	8,71	8,98
12.	Pasaman Barat	8,19	8,21	8,55	8,81	8,99
Kota/Municipality						
71.	Padang	11,58	11,59	11,80	11,62	11,63
72.	Solok	11,03	11,04	11,35	11,36	11,37
73.	Sawahlunto	10,17	10,32	10,43	10,44	10,53
74.	Padang Panjang	11,62	11,63	11,82	11,94	12,00
75.	Bukittinggi	11,31	11,34	11,63	11,64	11,65
76.	Payakumbuh	10,73	10,81	10,82	10,88	10,89
77.	Pariaman	10,59	10,61	10,78	10,79	11,06
Sumatera Barat		8,99	9,07	9,18	9,28	9,44

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2024
 National Social Economic Survey

Sign in (3) WhatsApp (Metode Baru) Rata-rata Lama Sekolah

https://www.bps.go.id/id/statistics/table/2/ND01121+/2/metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html

BADAN PUSAT STATISTIK Beranda Rencana Terbit Produk Layanan Informasi Publik

Kesehatan 2022-2024 2019-2021 2016-2018 2013-2015 2010-2012 Carilah kata kunci

Konsumsi dan Pendapatan
Perlindungan Sosial
Pertukaran dan Perumahan
Hukum dan Kriminalitas
Budaya
Aktivitas Politik dan Komunitas Lainnya
Penggunaan Waktu

Statistik Ekonomi ☒
Statistik Lingkungan Hidup dan Multi-domain ☒

[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

Provinsi/Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
Puncak	-	-	2,39
Puncak Jaya	-	-	4,42
PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	4,21
Noraga	-	-	1,92
Jayawijaya	-	-	6,99
Lanny Jaya	-	-	3,83
Tolikara	-	-	3,69
Manberamo Tengah	-	-	3,70
Yakimo	-	-	3,55
Yahukima	-	-	4,35
Pegunungan Bintang	-	-	3,61
INDONESIA	6,69	6,77	6,85

Keterangan Data:

31°C Sebagian cerah 4:52 PM 4/9/2025

Tabel 13.11 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (tahun), 2021–2024
Table
Life Expectancy at Birth By Regency/Municipality in Sumatera Barat Province (years), 2021–2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Kabupaten/Regency</i>				
01. Kepulauan Mentawai	75,73	76,91	77,06	77,21
02. Pesisir Selatan	73,12	73,20	73,27	73,44
03. Solok	71,72	72,12	72,31	72,32
04. Sijunjung	71,93	72,27	72,39	72,69
05. Tanah Datar	73,69	73,84	74,19	74,26
06. Padang Pariaman	71,58	71,67	73,77	73,88
07. Agam	73,91	74,07	74,22	74,29
08. Lima Puluh Kota	72,79	73,03	73,15	73,42
09. Pasaman	71,34	71,71	72,04	72,36
10. Solok Selatan	71,52	71,89	72,12	72,50
11. Dharmasraya	71,47	71,84	74,04	74,25
12. Pasaman Barat	71,83	72,14	72,44	72,75
<i>Kota/Municipality</i>				
71. Padang	74,47	74,71	74,94	75,20
72. Solok	73,88	74,31	74,56	74,85
73. Sawahlunto	71,20	71,50	73,79	74,12
74. Padang Panjang	71,91	74,03	74,24	74,48
75. Bukittinggi	74,70	75,02	75,33	75,62
76. Payakumbuh	74,18	74,48	74,77	75,08
77. Pariaman	71,69	71,98	74,20	74,37
Sumatera Barat	73,8	73,88	74,14	74,37

Sumber: Sensus – Badan Pusat Statistik, Hasil Hasil Sensus Form SP2021 (SP2021)
 Long form SP2021 Result



Tabel 16.3 Angka Harapan Hidup Penduduk Beberapa Negara (tahun), 2020–2024
Table 16.3 Life Expectancy of Population on Selected Countries (years), 2020–2024

Negara Country (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2024 (6)
Amerika Serikat/United States of America	77,0	76,4	76,0	75,7	75,5
Arab Saudi/Saudi Arabia	77,6	77,1	77,1	76,7	76,0
Australia	83,7	83,6	82,8	83,9	84,1
Bangladesh	71,4	71,1	74,1	74,7	74,9
Belanda/Netherlands	81,8	81,4	81,9	82,2	82,3
Belgia/Belgium	80,8	81,7	81,2	82,1	82,3
Brasil/Brazil	74,5	73,0	74,9	75,8	76,0
Denmark	81,5	81,4	81,3	81,9	82,1
Federasi Rusia/Russian Federation	71,2	69,8	72,5	73,2	71,3
Filipina/Philippines	70,7	66,7	69,5	69,8	69,9
Finlandia/Finland	81,8	81,8	81,2	81,9	82,1
Hong Kong/Hong Kong Special Administrative Region	84,7	85,7	83,7	85,3	85,6
India	70,2	67,1	71,7	72,0	72,2
Indonesia ^a	73,4	73,5	73,7	73,9	74,2
Inggris/United Kingdom	80,4	80,7	81,1	81,3	81,4
Italia/Italy	82,2	82,5	82,1	83,3	83,9
Jepang/Japan	84,7	84,6	84,1	84,7	84,9
Jerman/Germany	81,0	81,7	80,6	81,4	81,5
Kamboja/Cambodia	70,1	69,1	70,5	70,7	70,8
Kanada/Canada	81,7	82,0	81,2	82,6	82,7
Kazakhstan	71,2	70,1	73,5	74,4	74,5
Korea Selatan/Republic of Korea	83,7	83,9	82,7	84,1	84,4
Kuwait	78,2	77,6	78,8	80,4	80,6
Malaysia	76,7	73,9	75,4	76,7	76,8
Meksiko/Mexico	70,4	69,7	74,0	75,1	75,3
Mesir/Egypt	69,8	69,0	71,0	71,6	71,8
Myanmar	66,6	65,6	66,5	66,9	67,1
Nigeria	53,7	53,5	54,1	54,5	54,6
Norwegia/Norway	83,2	84,2	82,6	83,1	83,5
Pakistan	65,7	65,8	67,4	67,6	67,8
Perancis/France	82,2	82,1	82,5	83,1	83,5
Singapura/Singapore	83,7	83,5	82,9	83,7	83,9
Sri Lanka	76,9	76,3	77,3	77,5	77,7
Swedia/Sweden	82,4	81,0	83,0	83,1	83,4
Thailand	72,3	71,6	75,3	76,4	76,6
Tiongkok/China	78,0	78,1	78,2	78,0	78,0
Venezuela	72,4	71,5	72,6	72,3	72,7
Viet Nam	75,4	74,7	74,5	74,6	74,7

Catatan kaki: ^a Badan Pusat Statistik, Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2019–2050 berdasarkan Proyeksi Penduduk 2020–2050 dengan asumsi tahun ke-100 (BPS, *Indonesia's Future: The Results of Indonesian Population Projection 2019–2050 based on Projection Census 2020 and 100 years*)

Sumber/Sources: United Nations, Data Portal Population Division

Prevelensi Stunting per Kabupaten/Kota berdasarkan data e-pggbm melalui intervensi serentak pada bulan Juni 2024

No	Kab/kota	Sasaran Balita	Jumlah Balita Diukur	Jumlah Balita Stunting	% Stunting
1	Kota Payakumbuh	9.229	9.229	194	2,1
2	Kota Padang	58.515	58.479	1.569	2,7
3	Kota Sawah Lunto	4.272	4.272	206	4,8
4	Agam	31.896	31.896	2.239	7
5	Dharmasraya	17.094	17.094	1.243	7,3
6	Kota Bukittinggi	7.499	7.499	603	8
7	Pesisir Selatan	35.899	35.866	3.019	8,4
8	Kota Solok	4.418	4.418	388	8,8
9	Padang Pariaman	28.013	28.013	2.773	9,9
10	Lima Puluh Kota	24.091	24.091	2.513	10,4
11	Kota Pariaman	6.178	6.178	647	10,5
12	Solok Selatan	11.440	11.432	1.292	11,3
13	Kota Padang Panjang	3.542	3.542	401	11,3
14	Solok	28.892	28.892	3.446	11,9
15	Tanah Datar	18.742	18.742	2.332	12,4
16	Pasaman Barat	34.656	34.656	4.385	12,7
17	Sijunjung	17.628	17.628	2.366	13,4
18	Pasaman	22.533	22.533	3.698	16,4
19	Kepulauan Mentawai	8.017	8.017	1.341	16,7
20	Sumatra Barat	372.554	372.477	34.655	9,3

BADAN PUSAT STATISTIK

[Beranda](#)
[Rencana Teknis](#)
[Produk](#)
[Layanan](#)
[Informasi Publik](#)

[Perindungan Sosial](#)
[Perumahan dan Pemukiman](#)
[Hukum dan Kriminal](#)
[Budaya](#)
[Aktivitas Politik dan Komunitas Lainnya](#)
[Penggunaan Waktu](#)
[Statistik Ekonomi](#)
[Statistik Lingkungan Hidup dan Multidimensi](#)

Provinsi/Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		
	2021	2022	2023
Adana	-	-	8.816
Band	-	-	7.870
Batu Jaya	-	-	6.443
Puncak	-	-	8.583
Puncak Jaya	-	-	6.081
RAPUA REGIONALISAN	-	-	5.707
Negeri	-	-	4.587
Jayapura	-	-	8.534
Lanny Jaya	-	-	5.026
Tobara	-	-	5.613
Manikara Tengah	-	-	4.943
Katani	-	-	8.225
Takung	-	-	5.247
Pegunungan Bintang	-	-	6.195
INDONESIA	11.479	11.800	12.341

Keterangan Data :

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai IPM metode Baru silakan klik link di bawah ini:
[Booklet IPM metode Baru](#)
[Bahan Sosialisasi IPM metode Baru](#)

Bagaimana hasil utama untuk status gizi pada balita?

1. Tren Balita stunting nasional 2023 turun menjadi 21,5%. Terdapat 19 Provinsi yang juga mengalami Penurunan. Ada 4 provinsi yang alami penurunan terbesar yakni Provinsi Bali (7,2%), Jambi (13,5%), Riau (13,6%), Lampung (14,9%). Untuk 4 provinsi yang alami kenaikan stunting tertinggi yakni Provinsi NTT (37,9%), Papua (33,6%), Sulawesi Barat (30,3%), dan Sulawesi Tenggara (30%)
2. Pencegahan Stunting sebaiknya dilakukan pada sebelum dan sesudah kehamilan. Pada masa setelah kelahiran bisa dibedakan pada kelompok umur 0-11 bulan dan 12-23 bulan karena terdapat kenaikan prevalensi yang cukup tinggi pada kedua kelompok umur tersebut.
3. Angka Balita Underweight secara nasional mengalami penurunan menjadi 15,9% dengan provinsi yang alami penurunan tertinggi adalah Provinsi Bali (5,7%), Jambi (8,9%), Bengkulu (10,7%), dan Lampung (12,3%). Untuk provinsi yang alami kenaikan tertinggi adalah Provinsi NTT (29,7%), Maluku (25,1%), Sulawesi Tengah (24,4%) dan Sulawesi Tenggara (23,9%)
4. Angka balita Wasting secara nasional meningkat dari 7,7% (2022) menjadi 8,6% (2023). Provinsi yang mengalami kenaikan tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara (15,8%), Maluku (15,4%), Papua (14,2%) dan Aceh (13,6%). Untuk provinsi yang alami kenaikan terendah adalah Provinsi Bali (3,6%), Kepulauan Riau (5,4%), Jawa

Tabel 13.14 Pengeluaran Per kapita Disesuaikan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota (ribu rupiah/orang/tahun), 2020–2024
Table Adjusted Expenditure Per Capita by Regency/Municipality in Sumatera Barat Province (thousand rupiahs/person/year), 2020–2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
<i>Kabupaten/Regency</i>					
01. Kepulauan Mentawai	6.281	6.721	6.567	6.891	7.192
02. Pesisir Selatan	9.212	9.278	9.686	9.953	10.211
03. Solok	10.171	10.215	10.539	10.717	10.988
04. Sijunjung	10.361	10.389	10.582	11.018	11.345
05. Tanah Datar	10.588	10.676	10.695	10.905	11.223
06. Padang Panjang	10.998	11.050	11.159	11.432	11.756
07. Agam	9.651	9.662	10.173	10.402	10.686
08. Lima Puluh Kota	9.596	9.668	10.035	10.285	10.648
09. Pasaman	8.425	8.440	8.619	8.908	9.194
10. Solok Selatan	10.325	10.367	10.560	10.884	11.240
11. Dharmasraya	11.273	11.324	11.690	11.901	12.254
12. Pasaman Barat	9.047	9.089	9.381	9.536	9.888
<i>Kota/Municipality</i>					
71. Padang	14.481	14.540	14.889	15.089	15.458
72. Solok	12.117	12.198	12.515	12.709	12.995
73. Sawahlunto	10.382	10.195	10.537	10.829	11.187
74. Padang Panjang	10.734	10.754	11.153	11.330	11.840
75. Bukittinggi	13.282	13.331	13.631	13.859	14.297
76. Payakumbuh	13.281	13.317	13.687	13.978	14.260
77. Pasaman	12.796	12.818	13.150	13.355	13.784
Sumatera Barat	10.733	10.790	11.110	11.380	11.718

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional.
 National Socio-Economic Survey

Pelindo/Agar Sosial

Pemukim dan Perumahan

Hukum dan Kriminologi

Sudaya

Aktifitas Politik dan Komunitas Lainnya

Penggunaan Waktu

Statistik Ekonomi

Statistik Lingkungan Hidup dan Multi-dimensi

Provinsi/Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Pengeluaran per Kapita Diseuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		
	2022	2023	2024
Naleno	-	-	0.000
Pemid	-	-	7.470
Wan Jaya	-	-	0.463
Purba	-	-	0.363
Puncak Jaya	-	-	0.000
PAPUA PEGUNDAW	-	-	5.103
Meligi	-	-	4.007
Jayan Jaya	-	-	0.134
Lanny Jaya	-	-	3.400
Tidore	-	-	3.453
Manbawa Tengah	-	-	4.949
Takau	-	-	3.120
Takelima	-	-	3.347
Pegunungan Bintang	-	-	3.399
INDONESIA	3.479	3.400	12.341

Keterangan Data :

Untuk pengisian lebih lanjut mengenai IPM metode Baru, silakan klik link di bawah ini:
 - Balcet IPM metode Baru
 - Bahan Sosialisasi IPM metode baru



28°C
Sangat cerah



Search



30:27 AM
4/9/2025

[Statistik dan Indikator Multi-Domain](#)[Buku Tahunan dan Ringkasan
Sejenis](#)[Kondisi Tempat Tinggal, Kemiskinan,
dan Permasalahan Sosial Lintas
Sektor](#)[Gender dan Kotampek Populasi
Khusus](#)[Masyarakat Informasi](#)[Globalisasi](#)[Indikator Millennium Development
Goals \(MDGs\)](#)[Perkembangan Berkelanjutan](#)[Kewirausahaan](#)

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
	2022	2023
DHARMAS RAYA	51,33	51,83
PASAMAN BARAT	61,05	61,04
KOTA PADANG	67,99	68,27
KOTA SOLOK	63,61	64,23
KOTA SAWAH LUNTO	65,62	62,55
KOTA PADANG PANJANG	67,82	67,58
KOTA BUKITTINGGI	63,37	60,96
KOTA PAYAKUMBUH	71,21	71,09
KOTA PARIAMAN	52,62	53,91

Keterangan Data :

- Salah satu variabel pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)



login

http://www.bps.go.id/k0/statistik-table/2/MDY44d--/indeks-pembentayaan-gender--idg-.html

BADAN PUSAT STATISTIK

Beranda Rencana Terbit Produk Layanan Informasi Publik

Statistik dan Indikator Multi-Domain

Buku Tahunan dan Ringkasan Sejenis

Kondisi Tempat Tinggal, Kemiskinan, dan Permasalahan Sosial Lintas Sektor

Gender dan Kelompok Populasi Khusus

Masyarakat Informasi

Globalisasi

Indikator Millenium Development Goals (MDGs)

Perkembangan Berkelanjutan

Kewirausahaan

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pembentayaan Gender (IDG)	
	2022	2023
LANNY JAYA	47,98	27,24
MAMBERAMO TENGAH	49,34	52,77
YALIMO	50,98	44,15
PUNCAK	46,22	46,45
DOGIYAI	48,32	51,83
INTAN JAYA	31,41	35,89
DEIYAI	48,70	49,70
KOTA JAYAPURA	75,55	77,63
INDONESIA	76,59	78,90

Keterangan Data :

- Salah satu variabel pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

30°C
Berawan

Search

IND 3:20 PM 4/8/2025

[Statistik dan Indikator Multi-Domain](#)[Buku Tahunan dan Ringkasan
Sejenis](#)[Kondisi Tempat Tinggal, Kemiskinan,
dan Permasalahan Sosial Lintas
Sektor](#)[Gender dan Kelompok Populasi
Khusus](#)[Masyarakat Informasi](#)[Globalisasi](#)[Indikator Millenium Development
Goals \(MDGs\)](#)[Perkembangan Berkelanjutan](#)[Kewiraswastaan](#)**Provinsi/Kabupaten/Kota****Indeks Pembangunan Gender (IPG)****2022****2023**

Dharmasraya

88,56

89,11

Pasaman Barat

90,17

90,05

Kota Padang

93,85

93,94

Kota Solok

96,67

96,84

Kota Sawah Lunto

95,17

95,36

Kota Padang Panjang

98,24

98,19

Kota Bukittinggi

99,36

99,17

Kota Payakumbuh

98,61

98,56

Kota Pariaman

98,64

98,07

Keterangan Data :



Sign in WhatsApp Indeks pembangunan gender Indeks Pembangunan Gender U4fLXUp Tahun 2024.pdf

https://www.bps.go.id/id/statistik-table/2/NDY2tzd+/indeks-pembangunan-gender-lpgj.html

BADAN PUSAT STATISTIK Beranda Rencana Terbit Produk Laporan Informasi Publik

2022-2024 2019-2021 2016-2018 2013-2015 2010-2012

Freeze judul kolom

Statistik Regional dan Statistik Area Kecil
 Statistik dan indikator Multi-Dimensi
 Buku Tahunan dan Risikosan Sejenis
 Kerdal Tempat Tinggal, kemiskinan, dan Permasalahan Sosial Lintas Sektor
Gender dan kelompok Populasi Khusus
 Masyarakat Informasi
 Digitalisasi
 Indikator Millenium Development Goals (MDGs)
 Pembangunan Berkelanjutan
 Kewirausahaan

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	2022	2023	2024
Puncak	-	-	88,98
Puncak Jaya	-	-	69,64
PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	87,25
Iduga	-	-	90,84
Jayawijaya	-	-	86,08
Lanny Jaya	-	-	94,41
Tolikara	-	-	83,77
Memberamo Tengah	-	-	91,85
Yalimo	-	-	88,44
Yahukimo	-	-	76,67
Pegunungan Bintang	-	-	82,99
INDONESIA	91,63	91,65	91,85

Keterangan Data :

Hujan ringan Ersek

Search

IND 5:04 PM 4/8/2025

Tabel 12.3 Lanjutan/ Continued

Lapangan Usaha / Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Perdagangan dan Keuangan Trade & Finance	2,78	2,89	2,86	2,72	2,79
1 Aktivitas Activities					
1 Real Estate/Real Estate	2,91	2,85	2,82	2,88	2,91
1 Aktivitas Activities					
M.II Lain Perumahan/Dukungan Other Housing/Support	0,14	0,14	0,13	0,14	0,13
0 Aktivitas Activities					
0 Konsultasi/Perencanaan, Perbaikan dan Pemeliharaan Sistem/Regulasi, Risiko Administrasi & Pemasaran Computing, Social Security	6,05	6,55	6,13	5,91	6,07
4 Lain Pendidikan/Edukasi Services	4,04	4,58	4,04	4,51	4,49
0 Kegiatan Sosial Human Health and Social Work Activities	1,54	1,56	1,54	1,48	1,40
0,5,10 Lain Lainnya/ Other Services Activities	1,06	1,17	1,18	1,38	1,61
PDB / GDP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara/ Provisional figures

** Angka sangat sementara/ Very preliminary figures

Sumber/ Source: BPS Kota Pekanbaru, 2025, *Statistik of Pekanbaru Municipality*

Tabel 12.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020–2024
Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product of Pariaman Municipality at Current Market Price by Industry (percent), 2020–2024

Lapangan Usaha / Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Agriculture, Forestry, and Fishing	18,17	17,93	17,73	17,67	17,18
b. Pertambangan dan Penggalian Mining and Quarrying	1,41	1,60	1,71	1,73	1,89
c. Industri Pengolahan Manufacturing	6,89	7,04	6,97	6,89	6,96
d. Pengadaan Listrik dan Gas Electricity and Gas	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,04	0,04	0,04	0,04	0,01
f. Konstruksi Construction	15,54	15,42	15,33	15,21	15,16
g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	15,11	14,90	15,45	15,47	15,62
h. Transportasi dan Pergudangan Transportation and Storage	10,08	10,21	10,32	10,52	10,28
i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	2,36	2,44	2,60	2,62	2,69
j. Informasi dan Komunikasi Information & Communication	8,41	8,60	8,66	8,74	8,74

Sumber: BPS dan Ditjen BPS.



Gambar 1. PDB Atas Dasar Marga Berjalan dan Konstan 2010 (triliun Rp), 2020-2023
Figure 1. GDP at Current and Constant Prices (trillion rupiah), 2020-2023

Struktur perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha tidak berubah secara signifikan selama kurun waktu 2020-2023. Tiga lapangan usaha yang memberi kontribusi terbesar selama periode tersebut adalah Industri Pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 19,03 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 12,98 persen, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 12,91 persen. Sementara Konstruksi serta Pertambangan dan Penggalian masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 10,21 persen dan 9,54 persen.

The structure of the Indonesian economy by industries did not change significantly during the 2020-2023. The three industries that had the largest contribution during the period were the Manufacturing with an average contribution of 19.03 percent, followed by Agriculture, Forestry and Fishing by 12.98 percent, and Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles by 12.91 percent. Meanwhile, Construction and Mining and Quarrying each contributed an average of 10.21 percent and 9.54 percent.



Gambar 2. Rata-Rata Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2023
Figure 2. Average Distribution of GDP (percent), 2020-2023

Tabel 12.3 Lanjutan/ Continued.....
Table

Lapangan Usaha / Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E	Jasa Keuangan dan Asuransi Financial & Insurance Activities	2,78	2,89	2,86	2,72	2,79
L	Real Estat/Real Estate Activities	2,91	2,85	2,82	2,88	2,91
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,14	0,14	0,13	0,14	0,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial/Wajib Public Administration & Defense, Compulsory Social Security	6,49	6,55	6,11	5,91	6,07
P	Jasa Pendidikan/Education Services	4,64	4,58	4,64	4,51	4,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Health and Social Work Activities	1,34	1,36	1,34	1,38	1,40
R,S,T,U	Jasa lainnya/ Other Service Activities	3,06	3,17	3,38	3,50	3,64
PDB / GDP		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara/Preliminary figures

** Angka sangat sementara/very Preliminary figures

Source/Source: BPS Kota Pekanbaru / BPS District of Pekanbaru Municipality

Tabel 12.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024

Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product of Pariaman Municipality at Current Market Price by Industry (percent), 2020-2024

Lapangan Usaha / Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	18,17	17,93	17,71	17,67	17,38
B Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Quarrying</i>	1,83	1,80	1,71	1,73	1,69
C Industri Pengolahan <i>Manufacturing</i>	6,89	7,04	6,57	6,89	6,96
D Pengadaan Listrik dan Gas <i>Electricity and Gas</i>	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,04	0,04	0,04	0,04	0,01
F Konstruksi <i>Construction</i>	15,54	15,42	15,11	15,21	15,18
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	11,71	11,90	11,45	11,47	11,42
H Transportasi dan Pergudangan <i>Transportation and Storage</i>	10,08	10,27	10,12	10,52	10,20
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	2,30	2,44	2,60	2,62	2,66
J Informasi dan Komunikasi <i>Information & Communication</i>	8,41	8,60	8,66	8,74	8,74

Sumber: BPS Kota Pariaman



Gambar 1. PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 (triliun Rp., 2020-2023)
Figure 1. GDP at Current and Constant Prices (trillion rupiah, 2020-2023)

Struktur perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha tidak berubah secara signifikan selama tahun 2020-2023. Tiga lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar selama periode tersebut adalah Industri Pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 19,03 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 12,98 persen, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 12,91 persen. Sementara Konstruksi serta Pertambangan dan Penggalian masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 10,21 persen dan 9,54 persen.

The structure of the Indonesian economy by industries did not change significantly during the 2020-2023. The three industries that had the largest contribution during the period were the Manufacturing with an average contribution of 19.03 percent, followed by Agriculture, Forestry and Fishing by 12.98 percent, and Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles by 12.91 percent. Meanwhile, Contribution and Mining and Quarrying each contributed an average of 10.21 percent and 9.54 percent.



Gambar 2. Rata-Rata Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2023
Figure 2. Average Distribution of GDP (percent), 2020-2023



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jln.H.Bgd.Dahlan Abdullah No.01 Ampalu,Kec.Pariaman Utara,Kota Pariaman
E-mail : disparbud@pariamankota.go.id

PERBANDINGAN TARGET RPJMD DAN HASIL AKHIR RPD
% PERTUMBUHAN SPENDING OF MONEY DINAS PARIWISATA PARIAMAN

NO	Target	Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Kerja Akhir Periode
1	RPJMD	2,5 %	3,0 %	3,5 %	4,0 %	4,0 %

% Pertumbuhan Spending Of Money Tahun 2024 :

$$\frac{\text{Pertumbuhan 2024} - \text{Pertumbuhan 2023}}{\text{Pertumbuhan 2023}} \times 100 \% = \frac{297,255 - 296,300}{296,300} \times 100 \%$$
$$= 0,3 \%$$

Analisa Capaian Spending Of Money :

1. Dalam RPJMD Kota Pariaman disebutkan bahwa target pertumbuhan spending of money pada tahun 2024 adalah 3,0 % , sedangkan % pertumbuhan spending of money Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman hanya 0,3 %
2. Kurangnya Capaian % Pertumbuhan Spending Of Money Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disebabkan karena Kunjungan yang berkurang akibat jalan yang rusak tidak bisa dilalui kendaraan sehingga menyebabkan wisatawan dari luar propinsi dan luar kota tidak mempunyai akses untuk berkunjung ke Kota Pariaman, selain itu berkurangnya kunjungan wisatawan juga disebabkan karena dermaga ke pulau angso duo yang merupakan daerah destinasi wisata unggulan mengalami kerusakan.
3. Capaian % Pertumbuhan Spending of money di RPJMD merupakan Pertumbuhan Spending of money untuk Kota Pariaman, sehingga seharusnya ada masukan atau perhitungan capaian Spending Of Money dari beberapa OPD terkait, seperti : UPT Parkir, Koperindag, BPKPD dan OPD lainnya yang mempengaruhi Spending Of Money Kota Pariaman.
4. % Pertumbuhan Spending Of Money yang dihitung di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya mencakup Pertumbuhan Spending Of Money di Kawasan / Daerah Destinasi wisata saja.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA PARIAMAN


KERNALDI, S.PI, M.SI
NIP.19690124 199903 1 001

1. Tabel Perbandingan Target Spending of Money dari tahun 2024
Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman

NO	Target Spending of Money	Capaian Spending of Money
1.	297,000	297,255

Analisa:

Dari data ini, kita dapat melihat bahwa capaian aktualnya sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Terdapat selisih sebesar 255 antara target dan capaian, yang berarti capaian aktual melebihi target yang diinginkan. Meningkatkan penjualan souvenir karena kualitasnya bagus sehingga menarik minat wisatawan untuk membelinya.

2. Perbandingan Spending of Money di beberapa tahun sebelumnya dan analisa

No	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1.	101,711	122,835	295,824	296,300	297,255

Analisa:

Terdapat peningkatan signifikan dari tahun 2020 ke 2022, di mana pengeluaran meningkat dari 101.711 menjadi 295.824. Setelah tahun 2022, pengeluaran tampak stabil dengan sedikit peningkatan pada tahun 2023 dan 2024. Terjadinya peningkatan pengeluaran wisatawan di tahun 2022, hasil kerja sama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dengan Universitas Bung Hatta terkait dengan Indikator kinerja pariwisata salah satu indikatornya ialah Spending of Money

Terdapat Persentase Kenaikan Spending of Money:

Dari 2020 ke 2021: Kenaikan sekitar 20.5%

Dari 2021 ke 2022: Kenaikan sekitar 141.4%

Dari 2022 ke 2023: Kenaikan sekitar 0.2%

Dari 2023 ke 2024: Kenaikan sekitar 0.3%

3. Target dan Capaian Spending of Money tahun 2020 s.d 2024

No	Tahun	Target	Capaian
1	2020	100,021	101,711
2	2021	110,000	122,835
3	2022	294,135	295,824
4	2023	295,000	296,300
5	2024	297,000	297,255

Tahun 2020:

Target: 100,021

Capaian: 101,711

Analisis Capaian melebihi target sebesar 1,690 (sekitar 1,69% lebih tinggi dari target).

Tahun 2021:

Target: 110,000

Capaian: 122,835

Analisis Capaian melebihi target sebesar 12,835 (sekitar 11,65% lebih tinggi dari target).

Ini menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun 2022:

Target: 294,135

Capaian: 295,824

Analisis Capaian melebihi target sebesar 1,689 (sekitar 0,57% lebih tinggi dari target).

Meskipun capaian masih positif, persentase kelebihanannya menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun 2023:

Target: 295,000

Capaian: 296,300

Analisis Capaian melebihi target sebesar 1,300 (sekitar 0,44% lebih tinggi dari target). Kenalkan capaian mulai melambat.

Tahun 2024:

Target: 297,000

Capaian: 297,255

Analisis Capaian melebihi target sebesar 255 (sekitar 0,09% lebih tinggi dari target).

Ini menunjukkan bahwa meskipun capaian masih positif, pertumbuhan capaian semakin kecil.

4. Upaya yang dilakukan Spending of Money tahun 2024

Untuk meningkatkan pengeluaran pengunjung di objek wisata, beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi seperti akomodasi dan kegiatan lokal, peningkatan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan, promosi melalui media sosial, serta penyediaan fasilitas yang menarik. Selain itu, kolaborasi dengan agen travel dan penyelenggaraan event rutin juga dapat menarik lebih banyak pengunjung.

5. Strategi Pencapaian Target Tahun 2025

1. Melakukan promosi objek wisata
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dalam Memasarkan wisata dapat melakukan promosi Hotel, Homestay dan Kuliner di Kota Pa
3. Penyediaan Paket Wisata Menarik
4. Peningkatan Infrastruktur
5. Kolaborasi dengan Pelaku Industri
6. Selenggarakan acara tahunan, festival, atau kompetisi yang menarik perhatian wisatawan, seperti festival budaya, konser musik, atau lomba olahraga

Dengan mengembangkan dan menerapkan strategi-strategi ini, pemasaran pariwisata dapat lebih efektif dalam menarik wisatawan, dan menciptakan pengalaman yang berkesan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kunjungan, tetapi juga meningkatkan pengeluaran mereka, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan keberlanjutan pariwisata.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jalan Syekh Burhanuddin Nomor 145 Kecamatan Pariaman Selatan,
Kota Pariaman, Sumatera Barat Kode Pos 25538

Pencapaian target RPJMD pertumbuhan nilai investasi :

$$\frac{\text{Realisasi investasi tahun 2024} - \text{Realisasi investasi tahun 2023}}{\text{Realisasi investasi tahun 2023}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp. 50.546.724.286,-} - \text{Rp. 52.196.905.043,-}}{\text{Rp. 52.196.905.043,-}} \times 100 \% = -3,16 \%$$

Kepala Dinas,



Gusniyetti Zaurit, S.Kom, M.Si
Pembina Utama Muda / IV,c
Nip. 196908181997032001

4.4 KEMISKINAN POVERTY

Tabel 4.4.1 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Paramaribo, 2020–2024
Poverty Line, Number of Poor People and Percentage of Poor Population in Paramaribo Municipality, 2020–2024

Tahun Year	Garis Kemiskinan (Rp/ Kap/Bln) Poverty Line	Jumlah Penduduk Miskin Number of Poor People	% Penduduk Miskin (Po) % Poor Population
	(R)	(N)	(%)
2020	480.076	3.560	4,10
2021	495.386	3.587	4,38
2022	522.912	3.796	4,13
2023	576.451	3.980	4,20
2024	609.286	4.016	4,25

Sumber/Sources : Badan Pusat Statistik Kota Paramaribo / BPS - District Paramaribo Municipality

Sign in | WhatsApp | angka.kemiskinan.go.id | Persentase Penduduk | Indeks Pembangunan | UHR LKjip Tahun 2024

← → ↻ <https://www.bps.go.id/persentase/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen> Update

BADAN PUSAT STATISTIK Beranda | Rencana Terbit | Produk | Layanan | Informasi Publik

Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen.

Bagikan

PROFIL KEMISKINAN DI INDONESIA, MARET 2024
Infographic

Tanggal Rilis : 1 Juli 2024
 Ukuran File : 0,89 MB

Abstrak

- Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen.
- Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.
- Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022.
- Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,08 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 12,22 persen.
- Dibanding Maret 2023, jumlah penduduk miskin Maret 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,1 juta orang (dari 11,74 juta orang pada Maret 2023 menjadi 11,64 juta orang pada Maret 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin pedesaan menurun sebanyak 0,58 juta orang (dari 14,16 juta orang pada Maret 2023 menjadi 13,58 juta orang pada Maret 2024).

Unduh Berita Resmi Statistik
 Unduh Balok Tayang

Portofolio Statistik Terkait

- Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 Turun Menjadi 9,34 Persen
- Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 Turun Menjadi 10,16 Persen
- Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 Turun Menjadi 9,82 Persen
- Persentase Penduduk Miskin September 2024 Turun Menjadi 8,57 Persen
- Persentase Penduduk Miskin September 2023 Turun Menjadi 8,52 Persen

100% Selesai

5:06 PM 4/8/2025

Tabel 13.16 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat (persen), 2020–2024
Table Open Unemployment Rate by Regency/Municipality in Sumatera Barat Province (percent), 2020–2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Kabupaten/Regency</i>					
01. Kepulauan Mentawai	3,98	2,79	1,39	1,33	1,44
02. Pesisir Selatan	7,00	3,97	4,61	4,75	5,06
03. Solok	4,45	4,67	5,89	4,99	4,91
04. Sijunjung	5,30	3,57	4,87	4,71	4,73
05. Tanah Datar	4,79	4,63	3,91	5,35	7,3
06. Padang Pariaman	8,13	8,41	6,60	6,69	6,59
07. Agam	4,61	5,36	4,93	4,96	4,73
08. Lima Puluh Kota	3,03	2,25	3,72	3,95	3,68
09. Pasaman	5,04	4,92	5,38	5,09	5,25
10. Solok Selatan	5,62	4,84	3,71	2,57	2,3
11. Dharmasraya	5,31	5,50	6,23	6,22	6,02
12. Pasaman Barat	4,69	5,02	6,33	6,05	6,34
<i>Kota/Municipality</i>					
71. Padang	13,64	13,37	11,69	10,66	9,88
72. Solok	8,35	5,15	3,90	3,72	3,62
73. Sawahlunto	8,20	6,18	5,00	4,98	5,55
74. Padang Panjang	7,22	4,90	4,84	5,49	4,94
75. Bukittinggi	7,31	6,09	4,90	4,99	4,72
76. Payakumbuh	6,68	6,47	5,16	4,84	4,87
77. Parungmuti	5,72	6,09	5,10	5,68	5,32
Sumatera Barat	6,88	6,52	6,28	5,94	5,75

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024
 August Labor National Survey



PERINGKAT

INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM TAHUN 2024)

PROVINSI
KABUPATEN
KECAMATAN

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia

REKAP STATUS PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA TAHUN 2024

KLASIFIKASI STATUS	JUMLAH			
	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA
MANDIRI	2	61	1,190	17,023
MAJU	19	205	2,564	23,063
BERKEMBANG	10	119	1,823	24,532
TERTINGGAL	4	32	554	6,100
SANGAT TERTINGGAL	2	17	423	4,363
TOTAL	37	434	6,554	75,261

*) Catatan

Status IDM Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan diperoleh dari nilai rata-rata IDM Desa di wilayah tersebut

Sebanyak 4 Desa tidak mengeluarkan status IDM 2024 dikarenakan tidak memenuhi kriteria penduduk tidak berada pada desa yang bersangkutan, desa tidak memiliki wilayah karena bencana, dan/atau tidak mempunyai Pemerintah Desa.

STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2024

RANK	NAMA PROVINSI	Rata-rata NILAI IDM Prov 2024	STATUS IDM PROVINSI 2024
1	BALI	0.8692	MANDIRI
2	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	0.8567	MANDIRI
3	RIAU	0.8102	MAJU
4	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0.8093	MAJU
5	JAWA TIMUR	0.8014	MAJU
6	JAWA BARAT	0.8012	MAJU
7	KALIMANTAN BARAT	0.7910	MAJU
8	KALIMANTAN SELATAN	0.7903	MAJU
9	SULAWESI UTARA	0.7813	MAJU
10	NUSA TENGGARA BARAT	0.7797	MAJU
11	SUMATERA BARAT	0.7733	MAJU
12	KALIMANTAN TIMUR	0.7686	MAJU
13	GORONTALO	0.7541	MAJU
14	SULAWESI SELATAN	0.7513	MAJU
15	JAWA TENGAH	0.7485	MAJU

RANK	NAMA PROVINSI	Rata-rata NILAI IDM Prov 2024	STATUS IDM PROVINSI 2024
16	JAMBI	0.7450	MAJU
17	LAMPUNG	0.7380	MAJU
18	KEPULAUAN RIAU	0.7360	MAJU
19	SULAWESI TENGAH	0.7281	MAJU
20	KALIMANTAN TENGAH	0.7181	MAJU
21	BENGKULU	0.7129	MAJU
	RATA-RATA NASIONAL	0.7034	BERKEMBANG
22	SUMATERA SELATAN	0.7033	BERKEMBANG
23	BANTEN	0.6930	BERKEMBANG
24	SULAWESI TENGGARA	0.6884	BERKEMBANG
25	KALIMANTAN UTARA	0.6876	BERKEMBANG
26	ACEH	0.6848	BERKEMBANG
27	MALUKU	0.6800	BERKEMBANG
28	SULAWESI BARAT	0.6670	BERKEMBANG
29	SUMATERA UTARA	0.6436	BERKEMBANG
30	NUSA TENGGARA TIMUR	0.6324	BERKEMBANG

RANK	NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN/KOTA	Rata-rata NILAI IDM Kab/Kota 2024	STATUS IDM KABUPATEN/KOTA 2024
68	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	0.8110	MAJU
69	SUMATERA BARAT	LIMA PULUH KOTA	0.8107	MAJU
70	KALIMANTAN BARAT	SANGGAU	0.8103	MAJU
71	KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	0.8099	MAJU
72	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK UTARA	0.8098	MAJU
73	SULAWESI UTARA	MINAHASA TENGGARA	0.8087	MAJU
74	SULAWESI SELATAN	GOWA	0.8085	MAJU
75	JAWA BARAT	BOGOR	0.8080	MAJU
76	ACEH	KOTA SABANG	0.8064	MAJU
77	SULAWESI SELATAN	SIDENRENG RAPPANG	0.8060	MAJU
78	JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG	0.8055	MAJU
79	KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN	0.8049	MAJU
80	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	0.8045	MAJU
81	JAWA TIMUR	BLITAR	0.8040	MAJU
82	JAWA TIMUR	LAMONGAN	0.8039	MAJU
83	SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA	0.8033	MAJU
84	SUMATERA BARAT	AGAM	0.8008	MAJU

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398362, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.merpan.go.id>

Nomor : B/120/AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2024

3 September 2024

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kota Pariaman
di
Pariaman

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kota Pariaman, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Pariaman. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kota Pariaman telah menindaklanjuti sebagian kecil rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- Melakukan reviu terhadap penjenjangan kinerja yang disusun pada Perangkat Daerah (PD);
- Melakukan publikasi terhadap laporan kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) dan PD pada *website* resmi;
- Menetapkan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dimana Evaluasi AKIP internal menjadi bagian perhitungan.

Meskipun demikian, masih terdapat sebagian besar rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2023 yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan kembali pada masing-masing komponen di bawah ini.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pariaman menunjukkan bahwa nilai sebesar **57,43** dengan predikat **"CC"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Cukup"**, yaitu implementasi SAKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	21,15	18,38
b. Pengukuran Kinerja	30	17,73	16,98
c. Pelaporan Kinerja	15	9,96	9,66
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,65	12,41
Nilai Hasil Evaluasi	100	61,49	57,43
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	CC

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Pariaman tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kota Pariaman telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis. Rumusan kinerja Pemda yang tertuang dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja secara umum telah berorientasi hasil.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 baik level Wali Kota dan Kepala PD yang diunggah pada esr.menpan.go.id seluruhnya belum ditandatangani/diformalkan. Mengingat dokumen PK ini merupakan gambaran komitmen/kinerja pmda dalam mewujudkan agenda pembangunan dan bagaimana kontribusi PD dalam mendukung kinerja tersebut, maka sangat berpengaruh pada kualitas implementasi SAKIP Pemerintah Kota Pariaman secara keseluruhan;
- b. Berdasarkan dokumen PK yang belum ditandatangani tersebut, terdapat indikator kinerja PD yang belum memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan tidak sesuai pada levelnya. Contohnya pada:
 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yaitu indikator "Jumlah pemuda pelopor tingkat provinsi" dalam mendukung sasaran "Meningkatnya prestasi olahraga";
 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yaitu indikator "Persentase guru sesuai kualifikasi S1 dan D4 dan Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik" dalam mendukung sasaran "Meningkatnya kualitas pendidikan";
 - Dinas Sosial yaitu indikator "Persentase cakupan layanan PPKS" dalam mendukung sasaran "Meningkatnya pemenuhan hak dasar PPKS";
 - Dinas Sosial yaitu Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dengan indikator "Jumlah Masyarakat yang dilayani" dalam mendukung sasaran "Meningkatnya layanan terpadu kesejahteraan sosial" yang memiliki target 200 layanan;
 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan indikator "Jumlah dokumen pengembangan perumahan" dalam mendukung sasaran "Tersedianya cakupan pelayanan dan pengembangan perumahan pada lokasi rawan bencana atau realokasi program pemerintah" yang memiliki target 1 dokumen;
- c. Penetapan rencana aksi yang pada PD belum menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras dalam mendukung kinerja yang ingin diwujudkan;
- d. Pemerintah Kota Pariaman dan sebagian besar PD telah menyusun dokumen penjenjangan kinerja (*cascade down*), namun belum memiliki kualitas yang cukup baik karena masih cenderung berdasarkan hierarki organisasi dan belum berdasarkan *logical framework*. Selain itu, penjenjangan kinerja belum diimplementasikan pada dokumen perencanaan tahun berjalan;
- e. Belum menyusun identifikasi dan pemetaan atas potensi terjadinya *crosscutting* antar PD dan pihak-pihak terkait dalam mencapai kinerja

organisasi.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kota Pariaman dan perangkat daerahnya telah menyusun manual Indikator Kinerja Utama (IKU) disertai dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Aplikasi E-Sakip Kota Pariaman belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mempermudah pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kinerja PD. Hal ini ditunjukkan dengan data yang belum lengkap pada aplikasi tersebut;
- b. Pengukuran kinerja pada PD belum dilakukan terhadap kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun berjalan. Hal ini dikarenakan PK masih belum diformalkan;
- c. Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
- d. Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian *reward* dan *punishment*, perubahan strategi dan target kinerja di Pemerintah Kota Pariaman.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kota Pariaman telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023, baik tingkat Pemda maupun PD. Laporan kinerja telah menyajikan realisasi kinerja dari tahun berjalan.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagian laporan kinerja PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, contohnya pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu belum sepenuhnya menjelaskan analisis terkait pencapaian kinerja disertai faktor keberhasilan atau hambatan dan program yang mendukung dalam mencapai sasaran strategis;
- b. Terdapat laporan kinerja PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, contohnya pada Dinas Perhubungan yaitu hanya menjelaskan realisasi kegiatan dan belum sepenuhnya menjelaskan analisis terkait pencapaian kinerja;
- c. Laporan kinerja sebagian PD belum menyajikan *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Sumatera Barat maupun secara nasional;
- d. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti pada Laporan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu indikator "Indeks Keterbukaan Informasi Publik" dengan target 2024 adalah 91,1 sedangkan realisasi indikator kinerja tahun 2023 adalah 96,58.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kota Pariaman telah menetapkan pedoman teknis terkait evaluasi internal dan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh PD. Selain itu, terdapat kebijakan *reward and punishment* terkait evaluasi internal.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Evaluasi internal pada PD belum dilakukan dengan menggunakan dokumen perencanaan terbaru yaitu PK Kepala PD tahun 2024;
- b. Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup dan fokus pada akar permasalahan PD dalam mengimplementasikan SAKIP, terutama pada aspek kualitas dan pemanfaatannya. Contohnya pada Laporan hasil evaluasi Dinas Perhubungan yang belum menunjukkan terkait kualitas dan pemanfaatan komponen perencanaan;
- c. Sebagian besar PD belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh Inspektorat;
- d. Telah memiliki kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal, namun belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di beberapa PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan komitmen pimpinan terhadap implementasi SAKIP baik di tingkat Pemda maupun PD dalam mewujudkan agenda pembangunan daerah;
- 2) Memformalkan dokumen perencanaan kinerja, baik level pemda maupun PD dan segera menyampaikan dokumen tersebut secara lengkap melalui esr.menpan.go.id, untuk memastikan kualitas penjabaran kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Pemda;
- 3) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja. Selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya serta sesuai dengan karakteristik/tugas organisasi;
- 4) Mereviu kembali rencana aksi sebagian PD, dengan memastikan seluruh

kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan kegiatan-kegiatan/aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;

- 5) Melakukan revidi dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemda. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- 6) Melakukan identifikasi dan pemetaan pada *cascading* kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
- 7) Melakukan pengukuran kinerja secara berkala (bulanan/triwulan) pada tingkat Pemda dan PD terhadap kinerja yang ingin diwujudkan, serta memastikan pencapaian kinerja tersebut dapat terkawal;
- 8) Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi E-Sakip Kota Pariaman untuk pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pada seluruh PD dan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan menerapkan kebijakan *reward and punishment* dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi tersebut;
- 9) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;
- 10) Meningkatkan kualitas laporan kinerja terutama pada PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya, memastikan laporan kinerja tersebut selaras dengan kinerja yang diperjanjikan;
- 11) Melakukan revidi terhadap laporan kinerja PD untuk memastikan kualitas dan keselarasan data yang disajikan;
- 12) Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya;
- 13) Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi AKIP dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen terbaru dari PD dan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD;
- 14) Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan *professional judgement* secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;

- 15) Melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemda dan PD;
- 16) Mendorong implementasi kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga akan mendorong percepatan peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.


**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**
Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Pj. Wali Kota Pariaman.



Rata-rata nilai SAKIP pemkab/pemkot tahun 2024 sebesar 84,23, mengalami peningkatan 0,18 poin dari tahun 2023. Sedangkan rata-rata nilai SAKIP pemprov tahun 2024 adalah 76,75, sedikit mengalami penurunan yakni 1,42 poin dari tahun 2023. Penurunan itu disebabkan adanya tambahan dua provinsi baru yang dievaluasi.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khayati Salimudin No. 42 Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Meny
Lampiran
Perihal

K/S-HP XVII PEDGUS/2024

(satu berkas)

Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota
Pariaman Tahun 2023

Padang, 1 Mei 2024

**Kepada Yth:
Walikota Pariaman
di
Pariaman**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Retribusi Grosir dan Pertokoan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tidak Sesuai Ketentuan;
- b. Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Honorarium, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat tidak sesuai ketentuan dengan jumlah sebesar Rp1.903.941.732,76 (Rp1.337.778.000,00 + Rp228.573.187,70 + Rp246.918.653,00 + Rp90.671.892,06); dan
- c. APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 mengalami Defisit Kas sehingga menimbulkan hutang yang harus segera dibayar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Pariaman antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk:
 - a. Menetapkan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran sewa kios dari penyewa pertama dan menagih sebesar minimal sebesar Rp771.671.496,00, serta menyetorkan ke Kas Daerah;
 - b. Menginstruksikan Kepala UPTD Pasar Pariaman untuk:
 - 1) Intensif melakukan pemungutan atas sewa kios yang telah disetor penyewa kedua kepada penyewa pertama minimal Rp276.780.713,00 (Rp174.518.213,00 + Rp102.262.500,00) dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
 - 2) Melakukan pemutakhiran perjanjian sewa menyewa setiap tahun.
 2. Kepala OPD terkait temuan pada Akun Belanja Barang dan Jasa memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.473.583.130,06 (Rp1.225.960.931,00 + Rp156.950.307,00 + Rp90.671.892,06, dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
 3. Sekretaris Daerah supaya:
 - a. Memproyeksikan jumlah pendapatan daerah yang realistis sesuai sumber pendapatan yang senyatanya; dan
 - b. Merumuskan langkah-langkah strategis mengatasi defisit keuangan diantaranya dengan melakukan rasionalisasi anggaran untuk kegiatan yang tidak mendesak dan tidak prioritas.
- Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 37.A/LHP/XVIII.LPDG/05/2024 dan Nomor 37.B/LHP/XVIII.LPDG/05/2024 masing-masing bertanggal 2 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Pariaman, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan



Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP 196808291990031002





**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL XII**

Jalan Hangtuah Ujung Nomor 148 Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau 28285

Telepon (0761) 7870006; Faksimile (0761) 46104

Laman: pekanbaru.bkn.go.id; Pos-el: kanreg12.pekanbaru@bkn.go.id

Nomor : 0717/B-BJ.03.02/SD/KR.XII/2024 Pekanbaru, 2 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN

Yth. Kepala BKD/BKPSDM/BKPP

(Daftar Instansi Terlampir)

Di

Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Jabatan ASN Nomor 301/BM.02/SD/C.II/2024 tanggal 22 September 2024 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional BKN, bersama ini kami sampaikan laporan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 di Instansi Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Regional XII BKN,

 Anna Hafidah Haniyuddin



Tembusan kepada Yth:

1. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN;
2. Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara BKN.

KANTOR REGIONAL XII BKN

Lampiran I Surat Dinas

Nomor : 0717/B-BJ.03.02/SD/KR.XII/2024

Tanggal : 2 Oktober 2024

DAFTAR INSTANSI

No	Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2	Pemerintah Provinsi Riau
3	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
4	Pemerintah Kab. Siak
5	Pemerintah Kab. Kampar
6	Pemerintah Kota Pekanbaru
7	Pemerintah Kab. Bengkalis
8	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
9	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
10	Pemerintah Kab. Rokan Hilir
11	Pemerintah Kab. Rokan Hulu
12	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
13	Pemerintah Kab. Pelalawan
14	Pemerintah Kota Dumai
15	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
16	Pemerintah Kota Batam
17	Pemerintah Kota Tanjungpinang
18	Pemerintah Kab. Natuna
19	Pemerintah Kab. Lingga
20	Pemerintah Kab. Bintan
21	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
22	Pemerintah Kab. Karimun
23	Pemerintah Kota Padang
24	Pemerintah Kab. Tanah Datar
25	Pemerintah Kab. Solok

No	Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
26	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
27	Pemerintah Kab. Agam
28	Pemerintah Kab. Sijunjung
29	Pemerintah Kab. Solok Selatan
30	Pemerintah Kota Bukittinggi
31	Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota
32	Pemerintah Kab. Padang Pariaman
33	Pemerintah Kota Padang Panjang
34	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
35	Pemerintah Kota Pariaman
36	Pemerintah Kab. Dharmasraya
37	Pemerintah Kab. Pasaman
38	Pemerintah Kab. Pasaman Barat
39	Pemerintah Kota Solok
40	Pemerintah Kota Payakumbuh
41	Pemerintah Kota Sawahlunto

KANTOR REGIONAL XII BKN

Lampiran II Surat Dinas

Nomor : 0717/B-BJ.03.02/SD/KR.XII/2024

Tanggal : 2 Oktober 2024

1. Nilai Rata-rata Dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 di Instansi Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Jenis Pegawai	Jumlah Pegawai	Kualifikasi (25)	Kompetensi (40)	Kinerja (30)	Disiplin (5)	Rata Nilai (100)	Kategori
PNS	187.111	21,02	27,73	24,60	5,00	78,44	sedang
PPPK	15.148	24,85	19,59	24,43	5,00	71,88	sedang *
ASN	202.259	21,30	27,15	24,68	5,00	78,12	sedang

Ket. Kategori :

91-100 Sangat Tinggi

81-90 Tinggi

71-80 Sedang

61-70 Rendah

0-60 Sangat Rendah

2. Nilai Indeks Profesionalitas ASN (PNS) Tahun 2023 di Instansi Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

No	Nama Instansi	Jumlah PNS	Kualifikasi (25)	Kompetensi (40)	Kinerja (30)	Disiplin (5)	Rata Nilai (100)	Kategori
1	Pemerintah Kota Padang Panjang	1.743	23,54	23,53	25,03	5,00	83,10	tinggi
2	Pemerintah Kab. Tanah Datar	4.354	20,56	24,38	25,17	5,00	85,11	tinggi
3	Pemerintah Kab. Sijunjung	3.202	20,72	22,90	25,54	5,00	84,20	tinggi
4	Pemerintah Kab. Dharmasraya	3.026	20,75	22,27	25,17	5,00	81,19	tinggi
5	Pemerintah Kota Batam	5.527	21,86	23,28	24,99	4,99	84,73	tinggi
6	Pemerintah Kota Solok	1.857	22,08	20,15	24,88	5,00	82,11	tinggi
7	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	15.784	21,45	29,84	24,91	5,00	81,20	tinggi
8	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	4.776	20,71	28,74	26,37	5,00	80,82	sedang
9	Pemerintah Kota Bukittinggi	3.269	21,45	28,80	25,22	5,00	80,67	sedang
10	Pemerintah Kota Dumai	3.707	21,36	28,47	25,30	5,00	80,34	sedang
11	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	5.361	20,57	29,30	24,86	5,00	79,73	sedang
12	Pemerintah Kab. Nagan	2.818	20,95	28,43	24,93	5,00	79,31	sedang
13	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	4.859	21,85	27,99	24,72	4,99	79,54	sedang
14	Pemerintah Kota Pariaman	2.985	21,61	27,56	24,68	5,00	78,85	sedang
15	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	4.296	20,79	28,25	25,09	5,00	79,33	sedang
16	Pemerintah Kab. Agam	5.173	20,44	28,11	25,21	5,00	78,81	sedang
17	Pemerintah Kab. Solok Selatan	3.182	21,10	27,31	25,14	5,00	78,55	sedang
18	Pemerintah Kota Payakumbuh	2.527	21,36	26,84	25,18	5,00	78,36	sedang
19	Pemerintah Kota Padang	7.143	21,09	27,23	25,18	5,00	78,48	sedang
20	Pemerintah Kab. Pesisir	3.565	20,71	27,97	24,60	5,00	78,29	sedang
21	Pemerintah Provinsi Riau	13.575	21,90	26,06	25,27	5,00	78,04	sedang
22	Pemerintah Kota Pekanbaru	6.092	21,29	26,45	24,96	5,00	77,70	sedang
23	Pemerintah Kota Tanjungpinang	2.917	21,35	26,34	24,96	5,00	77,66	sedang
24	Pemerintah Kota Sawahlertu	1.880	21,29	26,24	24,99	5,00	77,62	sedang
25	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	5.531	20,28	27,68	24,60	5,00	77,56	sedang
26	Pemerintah Kab. Pesisir	4.259	20,33	26,72	24,55	5,00	77,21	sedang
27	Pemerintah Kab. Solok	4.490	20,37	28,05	24,43	5,00	77,88	sedang
28	Pemerintah Kab. Lingga	2.664	20,85	26,31	24,79	5,00	77,27	sedang
29	Pemerintah Kab. Kampar	6.727	20,39	27,20	24,63	5,00	77,06	sedang
30	Pemerintah Kab. Bengkalis	6.048	20,94	26,10	24,57	5,00	76,86	sedang
31	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	1.731	21,22	25,18	25,16	5,00	76,57	sedang
32	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	2.659	20,92	25,65	24,79	5,00	76,32	sedang
33	Pemerintah Kab. Karimun	3.664	20,70	25,52	24,91	5,00	76,13	sedang
34	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	4.926	20,45	26,74	23,77	5,00	75,98	sedang
35	Pemerintah Kab. Bantan	3.195	20,94	25,01	24,80	5,00	75,75	sedang
36	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	3.628	20,81	26,46	23,64	5,00	75,55	sedang
37	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	5.685	20,88	25,48	23,80	5,00	75,14	sedang
38	Pemerintah Kab. Siak	5.212	21,14	24,71	23,69	5,00	74,78	sedang
39	Pemerintah Kab. Rokan Negeri	5.109	20,69	25,39	23,34	5,00	74,82	sedang
40	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	4.210	20,67	25,47	22,91	5,00	74,04	sedang
41	Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai	2.880	21,06	22,97	23,90	5,00	70,51	rendah

3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN (PPPK) Tahun 2023 di Instansi Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

No	Nama Instansi	Jumlah PPPK	Kualifikasi (25)	Kompetensi (40)	Kinerja (30)	Disiplin (5)	Rata Nilai (100)	Kategori
1	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	1142	24,78	21,38	20,42	5,00	21,38	urang
2	Pemerintah Kota Indragiri	89	25,00	20,52	21,12	5,00	21,38	urang
3	Pemerintah Kota Pekanbaru	948	24,94	20,11	21,03	5,00	21,32	urang
4	Pemerintah Kab. Agam	575	24,90	20,10	21,09	5,00	21,09	urang
5	Pemerintah Kota Babel	1.409	24,96	20,02	21,01	5,00	21,01	urang
6	Pemerintah Kota Bukittinggi	30	24,97	20,17	21,12	5,00	21,00	urang
7	Pemerintah Kota, Pematang Sialit	105	24,93	20,04	21,04	5,00	21,00	urang
8	Pemerintah Kota Tanjungpinang	182	25,00	20,00	21,00	5,00	21,00	urang
9	Pemerintah Kab. Pangkajene	45	25,00	20,00	21,00	5,00	21,00	urang
10	Pemerintah Kota Kepulauan Anambas	162	25,00	20,00	21,00	5,00	21,00	urang
11	Pemerintah Kota, Pangkajene	162	24,96	20,16	21,16	5,00	21,09	urang
12	Pemerintah Kab. Karimun	269	24,99	19,96	24,96	5,00	21,01	urang
13	Pemerintah Kota, Natuna	103	24,97	19,45	24,90	5,00	21,02	urang
14	Pemerintah Kab. Bener	236	25,00	19,42	24,85	5,00	21,01	urang
15	Pemerintah Kota, Subang	197	24,77	20,00	21,00	5,00	21,27	urang
16	Pemerintah Kota, Sukoharjo	243	24,71	20,03	24,98	5,00	21,21	urang
17	Pemerintah Kota, Padang Panjang	11	24,08	20,00	21,00	5,00	21,08	urang
18	Pemerintah Kota, Padang	535	24,08	19,86	24,82	5,00	21,06	urang
19	Pemerintah Kota, Tanah Datar	213	24,15	20,05	21,05	5,00	21,05	urang
20	Pemerintah Kota, Kepulauan Negeri	267	25,00	19,85	24,79	5,00	21,04	urang
21	Pemerintah Kota, Bangkai	583	24,88	19,81	24,71	5,00	21,00	urang
22	Pemerintah Kota, Sawahlunto	103	24,85	19,81	24,76	5,00	21,02	urang
23	Pemerintah Kota, Limapuluh Kota	139	24,71	19,86	24,81	5,00	21,07	urang
24	Pemerintah Provinsi Riau	549	25,00	19,86	24,96	5,00	21,07	urang
25	Pemerintah Kota, Payakumbuh	92	24,10	19,95	24,89	5,00	21,03	urang
26	Pemerintah Kota, Dumai	265	24,95	19,86	24,94	5,00	21,17	urang
27	Pemerintah Kota, Lingga	107	25,00	19,83	24,93	5,00	21,10	urang
28	Pemerintah Kota, Padang Pariaman	254	24,86	19,63	24,82	5,00	21,02	urang
29	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	886	24,73	19,53	24,67	5,00	21,03	urang
30	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	685	24,00	18,17	24,46	5,00	21,03	urang
31	Pemerintah Kota, Bontol Selatan	441	24,00	19,17	24,38	5,00	21,05	urang
32	Pemerintah Kota, Rokan Negeri	909	24,98	19,16	24,20	5,00	21,03	urang
33	Pemerintah Kota, Paritaji	80	24,83	19,13	24,84	5,00	21,00	urang
34	Pemerintah Kota, Pematang	85	24,53	19,47	24,18	5,00	21,04	urang
35	Pemerintah Kota, Kabupaten Langkat	222	24,88	19,20	24,95	5,00	21,03	urang
36	Pemerintah Kota, Sibolga	186	24,87	19,01	24,69	5,00	21,07	urang
37	Pemerintah Kota, Kampar	479	24,95	18,87	24,58	5,00	21,00	urang
38	Pemerintah Kota, Pangasinan	270	24,93	18,65	24,31	5,00	21,09	urang
39	Pemerintah Kota, Bontol Negeri	202	24,18	18,18	22,71	5,00	20,28	urang
40	Pemerintah Kota, Sibolga	441	24,73	17,72	22,09	5,00	20,52	urang
41	Pemerintah Kota, Medan	203	25,00	18,83	24,52	5,00	21,15	urang

4. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 di Instansi Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

No	Nama Instansi	Jumlah ASN	Kualifikasi (25)	Kompetensi (40)	Kinerja (30)	Disiplin (5)	Rata Nilai (100)	Kategori
1	Pemerintah Kota Padang Panjang	1.422	21,59	21,30	25,03	5,00	84,92	tinggi
2	Pemerintah Kab. Tanah Datar	4.566	20,75	21,71	25,16	5,00	80,62	tinggi
3	Pemerintah Kab. Sijunjung	1.399	20,35	22,15	25,55	5,00	83,05	tinggi
4	Pemerintah Kab. Dharmasraya	1.188	20,95	21,65	25,17	5,00	82,77	tinggi
5	Pemerintah Kota Batang	6.996	22,20	20,49	24,99	4,99	82,69	tinggi
6	Pemerintah Kota Solok	1.942	22,21	20,71	24,89	5,00	81,81	tinggi
7	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	16.670	21,63	20,29	24,88	5,00	80,81	sedang
8	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	5.078	20,95	20,31	26,37	5,00	80,54	sedang
9	Pemerintah Kota Bukittinggi	2.279	21,69	20,69	25,22	5,00	80,60	sedang
10	Pemerintah Kota Dumai	4.172	21,76	20,49	25,39	5,00	79,65	sedang
11	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	5.802	20,88	20,56	24,82	5,00	79,26	sedang
12	Pemerintah Kab. Natuna	1.011	21,21	20,89	24,93	5,00	79,02	sedang
13	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	5.544	22,24	20,82	24,66	4,98	78,81	sedang
14	Pemerintah Kota Pasaman	1.471	21,72	20,28	24,65	5,00	78,65	sedang
15	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	4.993	21,17	20,11	25,08	5,00	78,35	sedang
16	Pemerintah Kab. Agam	5.696	20,89	20,38	25,20	5,00	78,43	sedang
17	Pemerintah Kab. Solok Selatan	1.421	21,15	20,80	25,14	5,00	78,28	sedang
18	Pemerintah Kota Payakumbuh	4.918	21,46	20,58	25,17	5,00	78,22	sedang
19	Pemerintah Kota Padang	7.678	21,26	20,71	25,15	5,00	78,21	sedang
20	Pemerintah Kab. Pasaman	1.640	20,82	20,77	24,59	5,00	78,17	sedang
21	Pemerintah Provinsi Riau	13.924	21,58	20,90	25,06	5,00	77,95	sedang
22	Pemerintah Kota Pekanbaru	6.512	21,53	20,04	24,97	5,00	77,53	sedang
23	Pemerintah Kota Tanjungpinang	1.089	21,57	20,97	24,96	5,00	77,50	sedang
24	Pemerintah Kota Sawahlunto	1.983	21,47	20,91	24,98	5,00	77,36	sedang
25	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	6.046	20,66	20,01	24,62	5,00	77,29	sedang
26	Pemerintah Kab. Pelalawan	4.304	20,97	20,65	24,55	5,00	77,18	sedang
27	Pemerintah Kab. Solok	4.931	20,76	20,13	24,24	5,00	77,13	sedang
28	Pemerintah Kab. Lingga	2.771	21,11	20,07	24,78	5,00	76,96	sedang
29	Pemerintah Kab. Kampar	7.006	20,57	20,91	24,40	5,00	76,87	sedang
30	Pemerintah Kab. Bangkalis	6.711	21,39	20,48	24,58	5,00	76,82	sedang
31	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	1.893	21,54	20,74	25,15	5,00	76,84	sedang
32	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	2.926	21,29	20,12	24,75	5,00	76,37	sedang
33	Pemerintah Kab. Khatulistiwa	4.033	21,09	20,01	24,91	5,00	76,02	sedang
34	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	5.480	20,83	20,14	24,82	5,00	75,81	sedang
35	Pemerintah Kab. Bintan	1.401	21,22	20,66	24,81	5,00	75,68	sedang
36	Pemerintah Kab. Kuantan Singing	5.350	21,01	20,48	24,68	5,00	75,16	sedang
37	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	6.681	21,47	20,57	24,86	5,00	74,90	sedang
38	Pemerintah Kab. Siak	5.918	21,62	20,21	24,69	5,00	74,54	sedang
39	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	5.301	20,82	20,11	24,32	5,00	74,27	sedang
40	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	6.480	20,85	20,19	24,93	5,00	73,96	sedang
41	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	2.583	21,17	21,96	21,63	5,00	69,97	rendah



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 639 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024;
- b. bahwa hasil evaluasi pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024, telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

- 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 672);
 4. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 5. Keputusan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 238 tentang Penetapan Unit Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 7. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



RINI WIDYANTINI

No	DAFTAR KOTA	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KOTA	KATEGORI
37.	Kota Tanjungpinang	4,21	4,50	4,48	4,40	A-
38.	Kota Gunungsitoli	4,65	*NA	4,13	4,39	A-
39.	Kota Administrasi Jakarta Utara	4,41	4,38	4,38	4,39	A-
40.	Kota Banda Aceh	3,93	4,48	4,73	4,38	A-
41.	Kota Tangerang	4,37	4,42	4,26	4,35	A-
42.	Kota Pontianak	4,09	4,49	4,46	4,35	A-
43.	Kota Bandar Lampung	3,9	4,47	4,61	4,33	A-
44.	Kota Administrasi Jakarta Barat	4,56	3,93	4,48	4,32	A-
45.	Kota Pariaman	4,22	4,21	4,52	4,32	A-
46.	Kota Tasikmalaya	4,1	4,55	4,25	4,30	A-
47.	Kota Pekalongan	4,44	4,10	4,33	4,29	A-
48.	Kota Bontang	4,19	4,39	4,27	4,28	A-
49.	Kota Samarinda	3,71	4,52	4,54	4,26	A-
50.	Kota Pekanbaru	3,79	4,17	4,79	4,25	A-
51.	Kota Tangerang Selatan	4,17	4,39	4,19	4,25	A-
52.	Kota Cilegon	4,21	4,12	4,35	4,23	A-
53.	Kota Kediri	3,91	4,35	4,35	4,20	A-
54.	Kota Batam	4,22	4,37	4	4,20	A-
55.	Kota Mojokerto	3,8	4,24	4,54	4,19	A-

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II. PENGUMPULAN DATA SKM DARI UPP

BAB III. HASIL PELAKSANAAN SKM UPP

BAB IV. KESIMPULAN

LAMPIRAN

- Bukti Dukung Laporan Pelaksanaan SKM Pada Masing-Masing UPP

**LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Diberlakukannya Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Pemerintah Kota Pariaman, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan

Masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkup Pemerintah Kota Pariaman.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dengan dilakukan SKM diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II. PENGUMPULAN DATA SKM DARI UPP

Sebagai tindak lanjut terhadap Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Pariaman mengeluarkan Surat Sekretariat Daerah Kota Pariaman Nomor 000.8.3. 4/1375/ORG/X-2024 perihal permintaan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024. Selanjutnya, Bagian Organisasi melakukan pendampingan kepada beberapa UPP khususnya yang belum pernah melaksanakan SKM, serta mengingatkan seluruh UPP terkait batas waktu pelaporan SKM. Selain itu, beberapa UPP juga telah mengikuti pembinaan dari Kemenpanrb terkait kebijakan SKM yaitu Bimbingan Teknis dan Survei serentak. Adapun UPP yang telah mengikuti kegiatan dimaksud adalah Dindukcapil, DPMPSTSP, dan Kecamatan. Selain itu, PDAM juga termasuk peserta dalam kegiatan pembinaan dari Kemenpanrb.

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 21 UPP telah menyampaikan laporannya. Terdapat 25 UPP yang belum dapat menyampaikan laporan SKM pada tahun ini disebabkan oleh terbatasnya waktu yang tersedia dan kurangnya dana anggaran pada Perangkat Daerah.

BAB III. HASIL PELAKSANAAN SKM UPP

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9					
1	BKPSDM	Tahunan	87,97	86,22	0	0	84,91	84,15	82,5	0	0	85,82	B (Baik)	188	SKM Online	Waktu Penyelesaian
2	Dinas Perikanan, Pangan dan Perikanan	Tahunan	100	98,44	100	86,88	98,44	98,44	98,44	98,44	97,68	98,44	A (Sangat Baik)	16	Mannu al	Kemudahan Pelayanan dan Sarana Prasarana
3	Puskesmas Kp. Baru Padusunan	Januari - Juni	87	87,3	87,4	95,1	96,3	85,5	87,5	85	98,1	86,91	A (Sangat Baik)	370	Mannu al	Sarana Prasarana
4	Puskesmas Marunggi	Januari - Juni	88	90,5	86,6	88,6	88,9	87,9	90,1	90,3	88	88,98	A (Sangat Baik)	370	Mannu al	Kompetensi
5	Puskesmas Kurai Tigi	September - November	83,49	84,23	82,43	93,13	83,82	83,82	84,72	81,69	77,28	83,85	B (Baik)	308	Mannu al	Peningkatan Pengaturan, saran dan masukan dalam pelayanan
6	Puskesmas Panaman	Januari - Juni	81,2	82,1	80,9	87,4	81,7	82,3	83,2	82,9	87,1	82,9	B (Baik)	381	Mannu al	Kecapaian Pelayanan
7	Puskesmas Air Sanick	Januari - Juni	85,2	90	89,1	87,2	87,2	87	87	88,5	88,5	87,83	B (Baik)	368	Mannu al	Kompetensi pelaksanaan
8	Puskesmas Sikapak	Januari - Juni	81,3	80,79	79,08	88,26	78,76	81,15	80,21	90,43	85,1	81,68	B (Baik)	345	Mannu al	Kecapaian Pelayanan
9	Puskesmas Nalis	Januari - Juni	82,67	81,47	82,6	88,8	82,6	83,4	83,6	81	82,47	83,09	B (Baik)	375	Mannu al	Sarana Prasarana
10	Instalasi Farmasi	Tahunan	76,7	81,6	78,5	89,6	79	80,1	82,8	76,7	69,8	81,84	B (Baik)	44	Mannu al	Persyaratan Pelayanan dan Sarana Prasarana
11	UPTD Labor	Tahunan	90,82	88,27	80,47	87,2	82,02	85,15	86,72	90,82	82,82	83,68	B (Baik)	32	SKM Online	Biaya/Tarif
12	Dinas Kependudukan dan	Tahunan	83,93	84,82	83,16	90,2	84,7	86,24	86,24	82,83	90,42	83,54	A (Sangat Baik)	92	Mannu al	Ketegapan pelayanan dengan janji

	Pencatatan Sipil															
13	Inspektorat	Tahunan	78	80,5	78,5	78	78	74,5	80	74,5	68	77,88	B (Baik)	50	SKM Online	Kompetensi dan Serana Prasarana
14	Bappeda	Tahunan	81,75	84	81,5	80,5	83	83,75	86	84	80	83	B (Baik)	60	Manual	Penangan Pengeduan, saran dan masukan dalam pelayanan
15	Keetbangpol	Tahunan	85	78,33	77,5	85	82,5	80	82,5	85	82,5	86,51	A(Sangat Baik)	30	Manual	Ketepatan penyelesaian dengan janji
16	Sekretariat DPRD	Juli - Desember	82,5	82	81	84,5	81,5	83,5	82,5	77	76,5	81,22	B (Baik)	60	Manual	Penangan Pengeduan, saran dan masukan dalam pelayanan
17	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Tahunan	81,96	81,85	78,95	79,67	79,77	80,3	79,97	79,15	94,4	81,77	B (Baik)	241	SKM Online	Kecepatan Pelayanan
18	Dinas Pekerjaan Umum Perataan Ruang dan Pemukiman	Januari - Juni	92,9	88,6	89,5	98,5	88,5	88,5	92,3	84,08	98,58	91,4	A(Sangat Baik)		Manual	
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Januari - Maret	85	78,33	77,5	75,63	82,5	80	82,5	85	82,5	81,01	B (Baik)	10	Manual	Kesigapan petugas dalam pelayanan
20	Dinas Komunikasi dan Informasi	Tahunan	88,73	90,49	88,27	99,65	93,31	94,72	96,83	92,25	96,83	93,22	A(Sangat Baik)	71	SKM Online	Kecepatan Pelayanan
21	Dinas Penanaman	Triwulan I	91,53	94,07	92,8	99,58	93,22	99,58	99,15	97,03	98,31	78,65	B (Baik)	58	Manual	Persyaratan Pelayanan

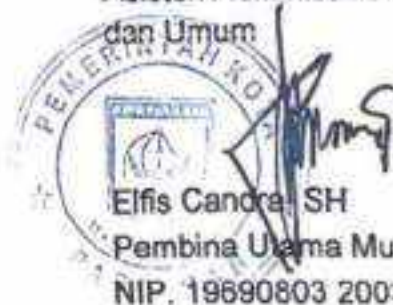
Model Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Teraga Kerja	Triwulan III	100	100	75	100	75	75	75	75	75	68,18	C (Kurang Baik)	10	Ketaepatan Penyelesaian Layanan dengan janji
	Triwulan III	88,89	87,5	87,5	100	86,11	95,83	94,44	88,89	98,61	75,25	C (Kurang Baik)	18	Ketaepatan Penyelesaian Layanan dengan janji
	Rata-rata Tahunan	93,47	93,85	85,1	99,86	84,77	90,13	89,53	86,97	90,64	74,02	C (Kurang Baik)	87	
IKM KOTA PARIAMAN		81,27	85,48	79,19	83,99	84,34	84,79	85,95	80,78	83,77	83,29	B (Baik)		

BAB IV. KESIMPULAN

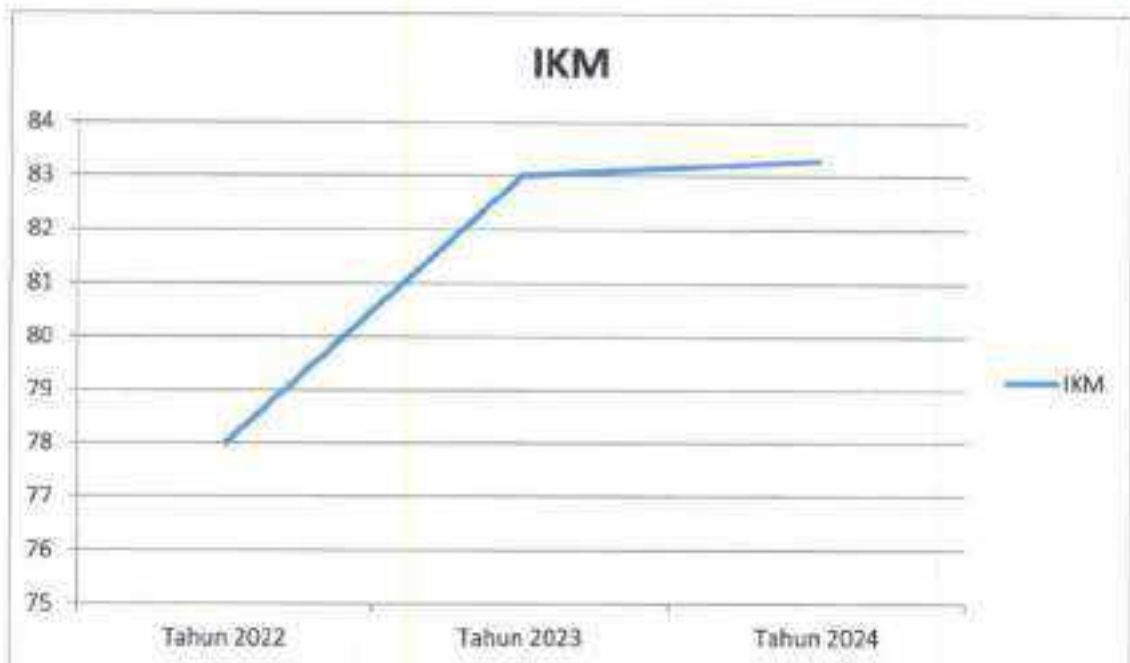
Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Desember 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan public di lingkup Pemerintah Kota Pariaman, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 83,29. Nilai IKM di lingkup Pemerintah Kota Pariaman menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan public dari tahun 2022 hingga 2024.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 21 UPP telah menyampaikan laporannya. Terdapat 25 UPP yang belum dapat menyampaikan laporan SKM pada tahun ini.
3. Dari seluruh UPP yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Kota Pariaman, 13 Desember 2024
a.n Pj. Sekretaris Daerah Kota Pariaman,
Asisten Administrasi Pembangunan

dan Umum

Elfis Candra SH
Pembina Utama Mu
NIP. 19690803 200

Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Pemerintah Kota Pariaman dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2024 di lingkup Pemerintah Kota Pariaman.

LAMPIRAN

Bukti Dukung Laporan Pelaksanaan SKM Pada Masing-Masing UPP

No	Nama UPP	Link Laporan Pelaksanaan SKM
1	BKPSDM	https://drive.google.com/file/d/1ZzFvID9Qj_Ar2KQWuaCArPEHiML5gvUd/view?usp=sharing
2	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	https://drive.google.com/file/d/1QsInKjAtW5r8BFZY43la2QFzWf5YiV0G/view?usp=sharing
3	Puskesmas Kp. Baru Padusuhun	https://docs.google.com/document/d/1eiVEJlfyaDWgcP2BA8pYhY1MYy6vTa3/edit?usp=sharing&oid=105500026756287809085&rtpof=true&sd=true
4	Puskesmas Marunggi	https://docs.google.com/document/d/1hwVHh-LNuO7hfLeGjHayAm0SDND1q-hH/edit?usp=sharing&oid=105500026756287809085&rtpof=true&sd=true
5	Puskesmas Kural Taj	https://drive.google.com/file/d/1P_wpFOFgEia4KqHMI3BORG9dODbsQCcX/view?usp=sharing
6	Puskesmas Pariaman	https://docs.google.com/document/d/1a1yZFFgPFFQ3PFYrBBYtMUJ1m4Mo2uK/edit?usp=sharing&oid=105500026756287809085&rtpof=true&sd=true
7	Puskesmas Air Santok	https://docs.google.com/document/d/1g6QP3hagYf5k8hZ9mcxsykFE26bemGGI/edit?usp=sharing&oid=105500026756287809085&rtpof=true&sd=true
8	Puskesmas Sikapok	https://docs.google.com/document/d/1O1joTJin-UiefxZpSm221TJA0lhveg/edit?usp=sharing&oid=105500026756287809085&rtpof=true&sd=true

9	Puskesmas Nares	https://docs.google.com/document/d/11fTVNCxtBVAXr7vir_cqMWb0piMFWla/edit?usp=sharing&oid=105500026756287809085&rtpof=true&sd=true
10	Instalasi Farmasi	https://docs.google.com/document/d/124cJ0NlYToLO-HxaLw1ZXol9ZvQg-VhP/edit?usp=sharing&oid=105500026756287809085&rtpof=true&sd=true
11	UPTD Labor Lingkungan	https://drive.google.com/file/d/16KjApRWirejKxHPm8tEaFbpTseRXJZRsH/view?usp=sharing
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	https://drive.google.com/file/d/1byoaJ4lOPgxR2jN1C-yM5T-pwO2uVlc8/view?usp=sharing
13	Inspektorat	https://drive.google.com/file/d/1-hPOqU5n9AQitg9LVmIA2u1rLXiBC1Lb/view?usp=sharing
14	Bappeda	https://docs.google.com/document/d/1sbHeScvdffWF-Stlo8NjhCBjQUbe81he/edit?usp=sharing&oid=105500026756287809085&rtpof=true&sd=true
15	Kesbangpol	https://drive.google.com/file/d/1m2X3eGvergX3sKiPN3niDdqbyrF75ju1/view?usp=sharing
16	Sekretariat DPRD	https://drive.google.com/file/d/1v4eb1l6iUB_5MYKf4nymnthTE98n1L2G/view?usp=sharing
17	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	https://drive.google.com/file/d/1QbGap3m7sh559HQXU0UCpJGSR_3WfYMP/view?usp=sharing
18	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Ruang dan Pertanahan	https://drive.google.com/file/d/1wGCfzQy8LS2YU8TnDNplb6JS9FLsTyw-/view?usp=sharing

19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	https://docs.google.com/document/d/1xYa9UrinlyYgKHeu_CpTimyuDxNoNHuf/edit?usp=sharing&ouid=105500026756287809085&rtpof=true&sd=true
20	Dinas Komunikasi dan Informasi	https://drive.google.com/file/d/10JzvGFfdY8cwqYQVn_Zsdd43BGM7gFK3/view?usp=sharing
21	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	https://drive.google.com/drive/folders/1PdFCrv-4lINcQaPQUMliZGm16_FlniYH?usp=sharing



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Jalan Syekh Burhanuddin No. 145 Tel. (0751) 92509

BUKTI DUKUNG INDEKS INFRASTRUKTUR DAERAH

HASIL PENGUKURAN DAN ANALISA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

No.	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	PENJELASAN OPD	PENANGGUNG JAWAB
	Sasaran Strategis 4.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah Indikator: Indeks Infrastruktur Daerah		
1	Penjelasan ringkas terkait indikator	Indeks Infrastruktur Daerah adalah sebuah indeks yang menggambarkan pencapaian kualitas infrastruktur yang terdiri dari 1) Infrastruktur jalan, 2) infrastruktur drainase, 3) infrastruktur irigasi, 4) Infrastruktur bangunan publik, 5) infrastruktur PJU	
2	Penjelasan ringkas terkait indikator yang digunakan untuk	a. Cara penghitungan Dasar Penghitungan Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Walikota Pariaman Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama	

	mengukur sasaran	Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 – 2026: Adapun indeks infrastruktur daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus: $\text{Indeks Infrastruktur daerah} = \frac{\% \text{ Panjang Jalan Kota dengan kondisi mantap} + \% \text{ Panjang drainase kota dalam kondisi baik} + \% \text{ panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik}}{3}$ b. Sumber perolehan data Data penilaian diperoleh dari : 1. Data Base Jalan 2. Data Base Drainase 3. Data Base Irigasi.	
3	Penjelasan ringkas terkait dasar penetapan target	Penetapan target indikator mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 59,01% mengalami kenaikan, Target tahun 2024 ditetapkan sebesar 64,25% dengan dengan realisasi 62,92%.	
4	Penjelasan terkait realisasi 2024	Penghitungan dari Indeks infrastruktur daerah didukung oleh 3(tiga) indikator yaitu : 1. Persentase panjang jalan Kota dalam kondisi mantap Persentase panjang jalan Kota dalam kondisi mantap dengan target 72,16 % realisasi 64,66% mengalami penurunan dari realisasi tahun lalu disebabkan karena berkurangnya jalan rusak ringan dan berat. Indikator ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Jalan dengan Anggaran Rp 14.880.398.159,- terserap Rp. 14.688.699.475,- (98,71%) realisasi fisik	

100,00.% dan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp.14.880.398.159,- terserap Rp. 14.688.699.475,- (98,71%) realisasi fisik 100%.

Panjang jalan kota dalam berdasarkan kondisi mantap

No	Kondisi Jalan	Panjang (KM)		
		2024	2025	2026
1	Kondisi baik (mantap)	173,104		
2	Kondisi sedang (mantap)	16,326		
3	Kondisi rusak ringan	66,875		
4	Kondisi rusak berat	36,650		
Total panjang jalan kota		292,955		

Penghitungan pencapaian indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan formula yaitu :

Persentase panjang jalan kota dalam kondisi mantap	=	(Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi mantap : Panjang Jalan Seluruh Kota) x 100 %
	=	(189,43 km : 292,955 km) x 100%
	=	64,66 %

**Pencapaian Komponen Indikator
Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian (%)	Ket
		Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase Panjang jalan kota dalam kondisi mantap	72,16	64,66	89,6	

2. Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik

Indikator kinerja persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan target 72,60 % realisasi 70,513 % mengalami penurunan. Indikator disebabkan penyesuaian data panjang irigasi tersier dilapangan. Indikator ini didukung Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan memiliki 2(dua) kegiatan yaitu :

- Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 291.465.650,- terserap Rp. 285.257.850 (97,87%) realisasi fisik 100,00%
- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 506.191.500,- terserap Rp. 493.519.730 (98,29%) realisasi fisik 100,00%.

Panjang jaringan irigasi berdasarkan Jenis saluran

No	Jenis Saluran	Panjang (KM)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Irigasi Primer	1,027	1,027	1,027	1,027	1,117	1,117
2	Irigasi Sekunder	41,832	41,832	41,832	56,578	57,058	57,058
3	Irigasi Tersier	52,788	52,788	52,788	52,788	52,788	93,232
	JUMLAH	95,647	95,647	95,647	110,393	110,963	151,407

Sumber Data : Bidang Pengairan Tahun 2023

No	Jenis Saluran	Panjang (KM)		
		2024	2025	2026
1	Irigasi Primer	1,117		
2	Irigasi Sekunder	57,058		
3	Irigasi Tersier	93,232		
	JUMLAH	151,407		

Sumber Data : Bidang PSDA Tahun 2024

Panjang jaringan irigasi berdasarkan Kondisi Saluran

No	Kondisi Saluran	Panjang (KM)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik	67,65	69,95	67,95	79,73	80,332	14,767
2	Sedang	-	-	-	-	-	91,996
3	Rusak Ringan	-	-	-	-	-	-
4	Rusak berat	28,00	25,70	21,70	30,66	30,63	44,644
	JUMLAH	95,65	95,65	95,65	110,39	110,963	151,407

Sumber Data : Bidang Pengairan Tahun 2023

No	Kondisi Saluran	Panjang (KM)		
		2024	2025	2026
1	Baik	14,767		
2	Sedang	91,996		
3	Rusak Ringan	-		
4	Rusak berat	44,644		
	JUMLAH	151,407		

Penghitungan capaian indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan formula yaitu :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik} &= \frac{(\text{Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik:} \\
 &= \text{Panjang jaringan irigasi Seluruh Kota}) \times 100 \%}{100 \%} \\
 &= \frac{(106,763 \text{ km} : 151,407 \text{ km}) \times 100\%}{100 \%} \\
 &= 70,513 \%
 \end{aligned}$$

Pencapaian Komponen Indikator
Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian (%)	Ket
		Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	72,60	70,513	97,125	

3. Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik

Indikator kinerja persentase drainase kota dalam kondisi baik dengan target 42,50 % realisasi 52,597 % mengalami kenaikan. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) Program yaitu : 1). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan Anggaran Rp. 1.716.635.200 terserap Rp. 1.694.157.590 (98,69%) realisasi fisik 100 % dan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 1.716.635.200 terserap Rp. 1.694.157.590 (98,69%) realisasi fisik 100 %.

Panjang drainase kota dalam kondisi baik

No	Nama Drainase	Total (KM)	Panjang (KM)		
			2024	2025	2026
1	Drainase primer	18,536	7,66		
2	Drainase sekunder	44,060	25,89		
Total		62,596	33,55		

Penghitungan pencapaian indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan formula yaitu :

Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik	=	(Panjang drainase kota dalam kondisi baik : Panjang seluruh drainase kota) x 100 %
	=	(33,55 km : 62,596 km) x 100%
	=	53,597 %

Pencapaian Komponen Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian	Ket
		Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik	42,50	53,597	126,11	

5

Penjelasan Pencapaian Sasaran Tahun 2024 (realisasi tahun 2024, sumber data realisasi, dan informasi tambahan berupa realisasi indikator Kota Tahun 2023) target Tahun 2026

Capaian Kinerja Komponen Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2024 Dibandingkan Target Jangka Menengah (Tahun 2026)

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023 (%)	Realisasi 2024 (%)	Target Akhir Renstra 2026 (%)	% Capaian 2024 terhadap target 2026
1.	Persentase Panjang jalan kota dalam kondisi mantap	63,85	63,61	76,40	83,26
2.	Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik	42,67	53,597	47,50	112,835
3.	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	70,51	70,513	72,80	96,858
	Rata-rata persentase ketercapaian indikator kinerja sasaran	59,01	62,57	65,57	97,65

Capaian Kinerja Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2024 Dibandingkan Target Jangka Menengah (RPD Kota Parlamen Tahun 2026)

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023 (%)	Realisasi 2024 (%)	Target Akhir RPD 2026 (%)	% Capaian 2024 terhadap target 2026
1.	Indeks Infrastruktur daerah	59,01	62,92	68,25	97,93

6

Penjelasan terkait perbandingan realisasi Kota Pariaman sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah atau RPD Kota Pariaman 2024-2026

Adapun perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja dari Indeks Infrastruktur Daerah dengan target jangka menengah dan RPD Kota Pariaman sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023			Target RPD	Realisasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur Daerah	64,50	66,27	65,68	64,25	65,71	62,08	59,01	62,92

Berdasarkan hasil realisasi Indeks Infrastruktur Daerah beberapa tahun terakhir, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Indeks Infrastruktur Daerah cenderung turun, disebabkan karena defisit anggaran dan adanya penambahan ruas jalan baru.

Ditahun 2024 mengalami kenaikan disebabkan adanya dana dari pusat (Dana bagi hasil sawit).

Adapun capaian realisasi dibandingkan dengan target Akhir RPD adalah sebagai berikut:

Realisasi Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2024	Target Indeks Infrastruktur Daerah Periode Akhir RPD (2026)	Capaian
62,92 %	68,25 %	92,19 %

Tingkat capaian Indeks Infrastruktur daerah Tahun 2024 terhadap target akhir periode hanya bisa mencapai 92,19 %.

7	Penjelasan terkait upaya yang dilakukan Kota Pariaman melalui OPD terkait untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut	Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Indeks Infrastruktur daerah Tahun 2024 adalah: 1. Mengajukan Usulan penambahan anggaran ke pusat untuk mendukung indek infrastruktur daerah. 2. Perlunya pembebasan lahan sebelum dilakukan pembangunan infrastruktur 3. Melakukan pemeliharaan secara berkala/rutin terhadap infrastruktur	
8	Penjelasan terkait hambatan/permasalahan yang dihadapi oleh Kota Pariaman melalui OPD terkait untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut	Beberapa kendala Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Indeks Infrastruktur daerah Tahun 2024 adalah: 1. Terbatasnya Anggaran APBD 2. Belum adanya pembebasan lahan 3. Bencana alam yang merusak infrastruktur	
9	Penjelasan terkait yang harus dilakukan Kota Pariaman melalui OPD terkait untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut Tahun 2025	Beberapa upaya/strategi yang akan ditargetkan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka meningkatkan Indeks Infrastruktur daerah Tahun 2025 untuk mencapai target hasil Indeks Infrastruktur daerah sesuai dengan Target Kota Pariaman Tahun 2025 sebesar 66,15% adalah sebagai berikut: 1. Mengajukan Usulan penambahan anggaran ke pusat untuk mendukung indek infrastruktur daerah. 2. Perlunya pembebasan lahan sebelum dilakukan pembangunan infrastruktur 3. Melakukan pemeliharaan secara berkala/rutin terhadap infrastruktur	
10	Penjelasan terkait	Program yang mendukung meningkatkan Indeks Infrastruktur daerah Tahun 2024 adalah:	

Program untuk mendukung pencapaian sasaran	1. Program Penyelenggaraan Jalan dengan Anggaran Rp 14.880.398.159,- terserap Rp. 14.688.699.475,- (98,71%) realisasi fisik 100 % 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan Anggaran Rp. 797.657.150,- terserap Rp. 776.777.580,- (97,63%) realisasi fisik 100 % 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan Anggaran Rp. 1.716.635.200 terserap Rp. 1.694.157.590 (98,69%) realisasi fisik 100 %	



Pariaman, Januari 2025
Plt. Kepala Dinas

DASMANIAR, S.Sos, MM
NIP. 196701121988032002



Kepala Daerah (DR): Roberia, S.H., M.H.

Luas Wilayah : 64,76 Km²

Populasi : 197.206 jiwa

Kepala DPRD

: Muhajir Muslim

Kategori Daerah

: TIDAK TERTINGGAL

Pendapatan Per Kapita : -

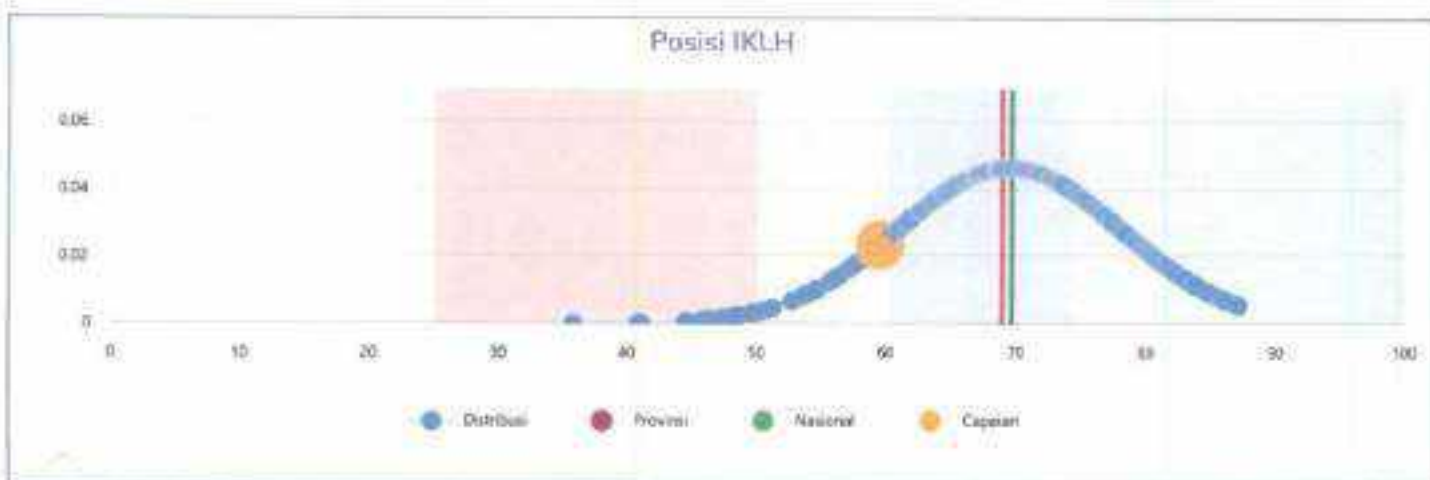
IKLH
59.44
SEDANG

Indeks Respon

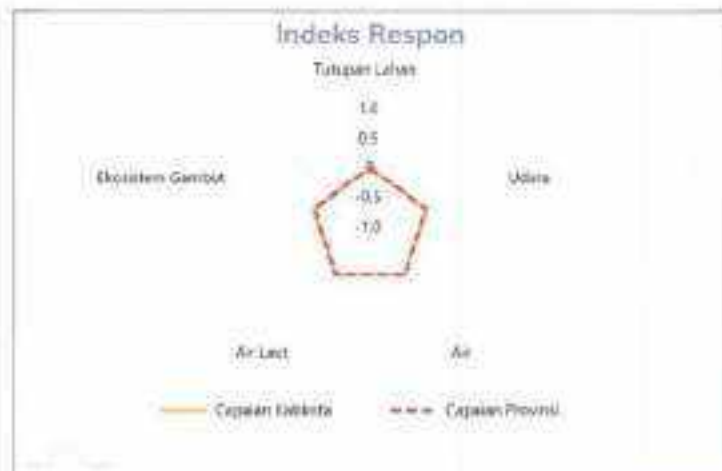
Peringkat

Nasional : 414 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 17 dari 19 Kabupaten/Kota



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
UDARA	11	8	8
AIR	24	36	36
LAHAN	0	1	1
TOTAL	35	45	45



Sebaran Titik Pemantauan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 190/660/2024
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA
DANA ALOKASI KHUSUS TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN
KUMUH TERPADU DESA PAUH BARAT KECAMATAN PARIAMAN TENGAH
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Seleksi Calon Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya kesepakatan warga pada Kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya untuk penanganan permukiman kumuh melalui Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman tahun anggaran 2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Penerima Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 583);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA DANA ALOKASI KHUSUS TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU DESA PAUH BARAT KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. *By Name By Address* (berdasarkan nama dan alamat) yang selanjutnya disingkat dengan BNBA.
 2. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK.
 3. Jenis Kelamin yang selanjutnya disingkat dengan JK.
 4. Laki-laki yang selanjutnya disingkat dengan L.
 5. Perempuan yang selanjutnya disingkat dengan P.
- KEDUA : Penerima Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024, Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua menjadi dasar penyiapan pelaksanaan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2024.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi perubahan anggaran, perubahan rencana penangan, atau perubahan hasil verifikasi dikarenakan penerima bantuan tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan, dilakukan perubahan terhadap Keputusan ini.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ROBERIA', written in a cursive style.

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 190/660/2024 TENTANG
PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN
BARU RUMAH SWADAYA DANA ALOKASI
KHUSUS TEMATIK PENGENTASAN
PERMUKIMAN KUMUH TERPADU DESA
PAUH BARAT KECAMATAN PARIAMAN
TENGAH KOTA PARIAMAN TAHUN
ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN

No.	No. BNBA	Nama	JK	NIK	Alamat
1	001	Herison Saptono	L	1377011909680001	Dusun Pasir Selatan
2	002	Yurnalis	P	1377014909520002	Dusun Pasir Selatan
3	003	Desriandi	L	1377011208780001	Dusun Pasir Selatan
4	004	Saprizal	L	1377011004820008	Dusun Pasir Selatan
5	005	Siswandi	L	1305011407790003	Dusun Pasir Selatan
6	006	Popy Julianda P.	P	1377015607040002	Dusun Pasir Selatan
7	007	Marliati	P	1377017006650009	Dusun Pasir Selatan
8	008	Pitri Yeni	P	1377015001850003	Dusun Pasir Selatan
9	009	Patmawati	P	1377045007870001	Dusun Pasir Selatan
10	010	Juslina	P	1377015007730003	Dusun Pasir Selatan
11	011	Ali Azwar	L	1377011506560001	Dusun Pasir Selatan
12	012	Syarifuddin	L	1377011707630005	Dusun Pasir Selatan
13	013	Masrizal	L	1377010811860005	Dusun Pasir Selatan
14	014	Ajismanto	L	1377021602820002	Dusun Pasir Selatan
15	015	Ely Wilta	P	1377015505820008	Dusun Pasir Selatan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

No.	No. BNBA	Nama	JK	NIK	Alamat
16	016	Marni	P	1377015808680002	Dusun Pasir Selatan
17	017	Ridwan	L	1377010212850002	Dusun Pasir Selatan
18	018	Marlini	P	1377015411790001	Dusun Pasir Selatan
19	019	Delhusna	P	3171066203750002	Dusun Pasir Selatan
20	020	Mardiah	P	1377014504680001	Dusun Pasir Selatan
21	021	Feri Irawan	L	1377022905740003	Dusun Pasir Selatan
22	022	Ranjid	L	1377010111950001	Dusun Pasir Selatan
23	023	Lesmana Abadi	L	1375021007640001	Dusun Pasir Selatan
24	024	Herman	L	1377010508870006	Dusun Pasir Selatan
25	025	Zulbaidah	P	1377014107790023	Dusun Pasir Selatan
26	026	Bendri	L	1377011608800001	Dusun Pasir Selatan
27	027	Eliza Nulita	P	1377016009850001	Dusun Pasir Selatan
28	028	Ahmad Jais	L	2171060511770002	Dusun Pasir Selatan
29	029	Dedi Purnama	L	3171030307750006	Dusun Pasir Selatan
30	030	Dedi Suherman	L	1377010205870001	Dusun Pasir Selatan
31	031	Aydil Putra	L	1377012304900001	Dusun Pasir Selatan
32	032	Zaiyalisman	L	1377013007620001	Dusun Pasir Selatan
33	033	Andrianto	L	1377010301970002	Dusun Pasir Selatan
34	034	Dori Saputra	L	1377012703880004	Dusun Pasir Selatan
35	035	Beariati	P	1306165706680001	Dusun Pasir Selatan
36	036	Fitria	P	1377014509890002	Dusun Pasir Selatan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

No.	No. BNBA	Nama	JK	NIK	Alamat
37	037	Junengsih	P	1377014606650002	Dusun Pasir Selatan
38	038	Tommi Yuliasman	L	1377012507890004	Dusun Pasir Selatan
39	039	Syamsinar	P	1377017112790002	Dusun Pasir Selatan
40	040	Risman Jhoni	L	1377011510850002	Dusun Pasir Utara
41	041	Dafit Triadi	L	1377011012860004	Dusun Pasir Utara
42	042	Afrizal	L	1377012103800001	Dusun Pasir Utara
43	043	Hari Saputra	L	1377012503870004	Dusun Pasir Utara
44	044	Desvendri	L	1377010512750003	Dusun Pasir Utara
45	045	Novri Hendri	L	1377011905810002	Dusun Pasir Utara
46	046	Zulaini	P	1377015409750001	Dusun Pasir Utara
47	047	Zaiyar	P	1377015505680004	Dusun Pasir Utara
48	048	Rani Anggraini	P	1377016811760002	Dusun Pasir Utara
49	049	Syafrida Syam	P	1377016003640001	Dusun Pasir Utara
50	050	Rani	P	1377014202780002	Dusun Pasir Utara
51	051	Santiani	P	1377015003890004	Dusun Pasir Utara

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Jalan Syekh Burhanuddin No. 145 Tel. (0751) 92509

BUKTI DUKUNG PERSENTASE AKSES SANITASI LAYAK

Sasaran Meningkatnya kualitas permukiman yang layak huni terdiri atas 2 (dua) indikator yaitu :

- 1). Persentase Akses Sanitasi layak

Tabel 15. Jumlah Rumah yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Layak

No.	Kecamatan	Rumah yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik				Jumlah	Dokumen	Keterangan
		Cubluk(Septic Tank)	Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja (menerima dan Mengolah Lumpur Tinja Setempat)	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengolahan Limbah Komunal			
1	Pariaman Tengah	873	0	487	611	1.971		Melampirkan Dokumen Laporan
2	Pariaman Selatan	1075	0	345	145	1.565		
3	Pariaman Timur	958	0	780	147	1.885		
4	Pariaman Utara	1690	0	717	496	2.903		
Jumlah		4.596	0	2.329	1.399	8.324		

Sumber Data : Bidang Cipta Karya Tahun 2024

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM PEKERJAAN UMUM PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

No	Kecamatan	Desa	TARGET	REALISASI					
			Total	Akses Layak	Akses Aman SPALD-S	Akses Aman SPALD-T	Terlayani Akses Air Limbah	Tanpa Akses	Belum Terlayani Akses Air Limbah
			(Rumah Tangga)	(Rumah Tangga)	(Rumah Tangga)	(Rumah Tangga)	(%)	(Rumah Tangga)	(%)
1	Pariaman Selatan	Pasir Sunur	90	65	2	0	74,44%	23	25,56
2		Marunggi	540	473	4	63	100,00%	0	0,00
3		Kampung Apar	231	148	3	0	65,37%	80	34,63
4		Sikabu	100	0	0	0	0,00%	100	100,00
5		Palak Aneh	273	51	40	11	37,36%	171	62,64
6		Padang Cakur	145	14	43	0	39,31%	88	60,69
7		Taluk	930	9	1	8	1,94%	912	98,06
8		Marabau	244	43	31	12	35,25%	158	64,75
9		Sungai Kasai	156	65	48	17	83,33%	26	16,67
10		Batang Tajongkek	206	44	34	10	42,72%	118	57,28
11		Balai Kurai Taji	319	23	10	13	14,42%	273	85,58
12		Pauh Kurai Taji	295	1	1	0	0,68%	293	99,32

13		Simpang	231	46	46	0	39,83%	139	60,17
14		Toboh Palabah	452	0	0	0	0,00%	452	100,00
15		Rambai	312	33	22	11	21,15%	246	78,85
16		Punggung Lading	587	60	60	0	20,44%	467	79,56
17	Pariaman Tengah	Karan Aur	451	16	16	0	7,10%	419	92,90
18		Jalan Baru	350	1	1	0	0,57%	348	99,43
19		Ujung Batung	254	27	27	0	21,26%	200	78,74
20		Jalan Kereta Api	210	95	95	0	90,48%	20	9,52
21		Cimparuh	750	94	94	0	25,07%	562	74,93
22		Alai Gelombang	190	86	9	95	100,00%	0	0,00
23		Taratak	390	72	25	47	36,92%	246	63,08
24		Kampung Baru	480	31	4	27	12,92%	418	87,08
25		Lohong	245	33	33	0	26,94%	179	73,06
26		Pasir	201	0	0	0	0,00%	201	100,00
27		Kampung Perak	157	3	3	0	3,82%	151	96,18
28		Pondok II	245	22	5	17	17,96%	201	82,04
29		Jawi-Jawi I	191	0	0	0	0,00%	191	100,00
30		Jawi-Jawi II	251	22	0	229	100,00%	0	0,00

31		Kampung Jawa II	225	43	6	37	38,22%	139	61,78
32		Kampung Jawa I	230	24	4	20	20,87%	182	79,13
33		Kampung Pondok	361	36	4	32	19,94%	289	80,06
34		Pauh Barat	430	170	89	81	79,07%	90	20,93
35		Pauh Timur	450	57	49	8	25,33%	336	74,67
36		Rawang	425	17	17	0	8,00%	391	92,00
37		Jati Hillr	375	6	6	0	3,20%	363	96,80
38		Jati Mudik	150	18	0	18	24,00%	114	76,00
39	Pariaman Timur	Kampung Gadang	301	138	49	0	62,13%	114	37,87
40		Talago Sarik	354	36	36	0	20,34%	282	79,66
41		Bato	276	14	14	0	10,14%	248	89,86
42		Batang Kabung	257	48	48	0	37,35%	161	62,65
43		Sungai Sirah	154	9	9	0	11,69%	136	88,31
44		Bungo Tanjung	260	52	52	0	40,00%	156	60,00
45		Kampung Kandang	331	58	58	0	35,05%	215	64,95
46		Kaluat	208	8	8	0	7,69%	192	92,31
47		Kajal	201	95	80	15	94,53%	11	5,47
48		Kampung Tengah	90	1	1	0	2,22%	88	97,78

49		Sungal Pasak	201	54	54	0	53,73%	93	46,27
50		Air Santok	370	122	122	0	65,95%	126	34,05
51		Cubadak Mentawai	298	99	59	98	85,91%	42	14,09
52		Koto Marapak	287	115	106	9	80,14%	57	19,86
53		Pakasai	279	91	66	25	65,23%	97	34,77
54		Kp. Baru Padusunan	291	18	18	0	12,37%	255	87,63
55	Pariaman Utara	Ampalu	496	194	33	161	78,23%	108	21,77
56		Tanjung Sabar	120	37	37	0	61,67%	46	38,33
57		Apar	324	70	31	39	43,21%	184	56,79
58		Manggung	300	79	79	0	52,67%	142	47,33
59		Cubadak Air	361	107	19	82	57,62%	153	42,38
60		Cubadak Air Selatan	224	167	12	13	85,71%	32	14,29
61		Sikapak Timur	289	52	52	0	35,99%	185	64,01
62		Sikapak Barat	464	75	45	30	32,33%	314	67,67
63		Tungkal Selatan	396	118	90	28	59,60%	160	40,40
64		Tungkal Utara	280	182	50	0	82,86%	48	17,14
65		Cubadak Air Utara	444	183	36	74	65,99%	151	34,01
66		Naras Hilir	305	34	26	8	22,30%	237	77,70

67	Naras I	550	30	30	0	10,91%	490	89,09
68	Balai Naras	600	37	20	17	12,33%	526	87,67
69	Padang Birik-Birik	364	94	63	31	51,65%	176	48,35
70	Sintuk	199	160	23	13	98,49%	3	1,51
71	Sungai Rambai	279	71	71	0	50,90%	137	49,10
Total		22275	4596	2329	1399		13951	
Persentase Layanan			20,63%	10,46%	6,28%	37,37%	62,63%	62,63%
Capaian SPM			37,37%					

Sumber Data : Bidang Cipta Karya Tahun 2024

Persentase Akses Sanitasi layak	=	Rumah yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (layak + aman) : Jumlah Rumah Tangga) x 100 %
	=	(8324 : 22.275) x 100%
	=	37,37 %

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian (%)	Ket
		Target (%)	Realisasi(%)		
1	Persentase Akses Sanitasi layak	71,53	37,37	46,65	

1. Alasan realisasi sanitasi rendah pada tahun 2024 yaitu

- A. Pada laporan SPM tahun 2023, dengan jumlah rumah di Kota Pariaman yaitu 17.748 rumah. Dan berdasarkan hasil pendataan SPM pada tahun 2024, jumlah rumah di Kota Pariaman yaitu 22.275 rumah. Ada penambahan jumlah rumah yaitu sebanyak 4.527 rumah.
- B. Kota Pariaman terdapat 4 kecamatan dan terdiri dari 71 Desa dan Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia 2020, dimana di Kota Pariaman terdapat 8 desa yang diklasifikasi kedalam perdesaan yaitu:
1. Kecamatan Pariaman Selatan
 - 1) Desa Pasir Sunur
 - 2) Desa Marunggi
 - 3) Desa Padang Cukur
 2. Kecamatan Pariaman Utara
 - 1) Desa Cubadak Air
 - 2) Desa Cubadak Air Selatan
 - 3) Desa Tungkal Utara
 - 4) Desa Cubadak Air Utara
 - 5) Desa Sintuk

Pada laporan SPM tahun 2023, masih menggunakan peraturan lama terdapat 17 desa yang diklasifikasi kedalam perdesaan dengan klasifikasi yaitu:

1. Kecamatan Pariaman Selatan
 - 1) Desa Pasir Sunur
 - 2) Desa Marunggi
 - 3) Desa Padang Cukur
 - 4) Kampung Apar
 - 5) Marabau
 - 6) Sungai Kassai
2. Kecamatan Pariaman Timur
 - 1) Desa Batang Kabung
 - 2) Desa Bungo Tanjung
 - 3) Desa Sungai Pasak
 - 4) Desa Air Santok
 - 5) Desa Cubadak Mentawai
 - 6) Koto Marapak

3. Kecamatan Pariaman Utara

- 1) Desa Cubadak Air
- 2) Desa Cubadak Air Selatan
- 3) Desa Tungkal Utara
- 4) Desa Cubadak Air Utara
- 5) Desa Sintuk

C. Sesuai dengan Permen PU no 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat: akses pelayanan air limbah domestik terdiri dari air limbah tanpa akses, air limbah dengan akses SPALD-S dan air limbah dengan akses SPALD-T, yaitu:

1. Tanpa Akses, terdiri dari:
 - a. BABS atau buang air besar sembarangan
 - b. CUBLUK (Perkotaan)
2. Akses SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
 - a. CUBLUK (Perdesaan)
 - b. Tangki Septik Individual
 - c. Tangki Septik Komunal
 - d. MCK
3. Akses SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
 - a. IPALD Permukiman: IPAL Komunal

D. Berdasarkan perbedaan jumlah klasifikasi perdesaan, maka akan mempengaruhi akses pelayanan air limbah untuk klasifikasi perkotaan, cubluk masuk kategori tanpa akses dan klasifikasi perdesaan, cubluk masuk kategori akses layak untuk klasifikasi perdesaan. Perbedaan tersebut sangat signifikan yaitu dari 17 perdesaan menjadi 5 perdesaan. Sehingga menyebabkan jumlah rumah yang memiliki akses layak turun dari 8.438 SR (11,09%) menjadi 1.769 SR (7,94%).

2. Faktor Penghambat, solusi dan strategi persentase sanitasi layak

Faktor penghambat:

- Pada kegiatan Hibah penyediaan tangki septik individual tahun sebelumnya, ada beberapa warga masyarakat yang menolak diberikan tangki septik individual.
- Anggaran kegiatan penyediaan sub sistem pengelolaan air limbah domestik sangat minim, pada tahun 2025 tidak ada kegiatan tersebut.
- Berkurangnya jumlah SR infrastruktur terbangun yang disebabkan oleh masyarakat yang menerima akses SPALDT memutus sambungan rumah
- KSM pengelola SPALDT tidak berjalan menyebabkan pemeliharaan SPALDT yang terbangun tidak ada dan infrastruktur menjadi rusak dan tidak dimanfaatkan
- Kurangnya pembinaan kepada masyarakat dan KSM menyebabkan jika terjadi permasalahan tidak ada perbaikan terhadap infrastruktur yang rusak

- Belum adanya ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik menyebabkan tidak adanya pengawasan dan tindakan yang tegas terhadap pembangunan rumah atau usaha yang tidak menggunakan tangki septik yang sesuai standar.

Solusi:

- Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan tangki septik lebih intensif terkait pemeliharaan dan pengelolaan.
- Segera mengesahkan ranperda Air Limbah Domestik.
- Penambahan anggaran untuk penyediaan tangki septik yang sesuai standar, pembangunan IPAL Komunal untuk kawasan perkotaan.

Strategi:

- Menjadikan kegiatan sanitasi dan air minum sebagai Program Strategis Kota Pariaman sehingga akan menjadi prioritas dalam mencapai target yang ditentukan, karena kegiatan sanitasi dan air minum merupakan salah satu indikator penentu dalam pengurangan angka stunting untuk mewujudkan Indonesia Emas di masa yang akan datang.

4. Faktor penunjang persentase penduduk berakses air minum mencapai 92,53%.

- Air minum merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, akses air minum Jaring Perpipaan (JP) mencapai 24,25% terdiri dari jaringan air minum dari UPTD Air Bersih, PDAM Kabupaten Padang Pariaman dan Jaringan Air Bersih PAMSIMAS. Adanya penambahan pelanggan setiap tahunnya pada UPT Air Bersih, Kegiatan DAK Penambahan Jaringan Perpipaan untuk masyarakat MBR dan adanya bantuan pembangunan PAMSIMAS setiap tahunnya membuat akses air minum jaringan perpipaan akan meningkat.
- Sedangkan bagi masyarakat yang mampu untuk membangun sumur bor yang masuk kategori Bukan Jaringan Perpipaan mencapai 68,28%. Hal ini tentu saja menambah akses air minum untuk Kota Pariaman.



Pariaman, Januari 2025
Plt. Kepala Dinas

DASMANIAR, S.Sos, MM
NIP. 196701121988032002



PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	689.473.661.957,00	644.362.029.673,36	96,25	625.829.083.470,04
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53.788.984.257,00	45.911.378.642,36	85,35	38.861.600.702,04
4.1.01	Pajak Daerah	14.135.000.000,00	14.398.111.950,00	101,85	14.323.956.113,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	132.032.170,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	1.551.851.563,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	22.400.500,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	135.000.000,00	136.464.108,00	101,08	127.745.417,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	5.179.248.587,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	5.170.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	5.906.220,00	0,00	151.162.880,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBSP2)	2.000.000.000,00	1.604.473.250,00	80,22	1.592.328.996,00
4.1.01.16	Bes Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.050.000.000,00	5.603.586.857,00	100,98	5.562.015.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	8.956.000.000,00	7.145.677.515,00	102,82	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	12.630.235.000,00	9.376.715.070,00	74,20	3.115.174.963,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	9.137.000.000,00	7.562.733.520,00	82,77	811.008.900,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.999.235.000,00	1.550.605.730,00	51,70	2.042.897.600,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	263.375.820,00	52,88	261.168.463,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.331.512.753,00	11.331.512.753,00	100,00	10.042.663.440,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	11.331.512.753,00	11.331.512.753,00	100,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	0,00	0,00	10.042.663.440,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.886.236.504,00	10.807.038.659,36	68,90	11.379.806.166,04
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	530.000.000,00	155.682.400,00	29,41	5.738.500,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000,00	693.433.441,25	34,67	695.462.516,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	109.375.000,00	4,38	252.053.335,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.750.000.000,00	2.478.422.123,69	90,12	2.237.703.439,34
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	448.732.052,00	0,00	450.324.010,70
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	25.775.453,00	0,00	92.067.942,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	58.339.875,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	173.226.024,22	0,00	2.300.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	7.829.738.504,00	6.669.901.287,00	85,19	7.320.337.268,00
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	264.951.200,00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	71.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.000.000,00	52.284.488,00	1.045,89	500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	53.788.984.257,00	45.911.378.642,36	85,35	38.861.600.702,04
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	615.684.677.700,00	598.450.651.031,00	97,20	586.803.758.628,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	569.225.396.000,00	565.486.692.998,00	99,34	553.174.284.492,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	527.380.968.000,00	523.642.264.998,00	99,20	505.788.526.492,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	527.380.968.000,00	523.642.264.998,00	99,20	505.788.526.492,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	6.012.923.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	41.844.428.000,00	41.844.428.000,00	100,00	41.372.835.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	41.844.428.000,00	41.844.428.000,00	100,00	47.385.758.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.459.281.700,00	32.963.958.033,00	70,96	27.629.474.036,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	46.459.281.700,00	32.963.958.033,00	70,96	26.989.474.036,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3) * 100	6
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	640.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	46.459.281.700,00	32.963.958.033,00	70,95	27.629.474.036,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	615.684.577.700,00	598.450.651.031,00	97,20	580.803.758.528,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	6.163.724.240,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	1.272.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dan Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	1.272.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	4.891.724.240,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	4.891.724.240,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	6.163.724.240,00
	JUMLAH PENDAPATAN	669.473.661.957,00	644.362.029.673,38	96,25	625.629.083.476,04
5	BELANJA DAERAH	675.857.149.536,00	648.100.984.541,33	95,89	619.154.014.291,00
5.1	BELANJA OPERASI	520.018.545.721,88	501.221.378.133,33	96,39	467.268.136.266,00
5.1.01	Belanja Pegawai	320.340.038.391,38	315.240.554.236,00	98,41	278.718.365.014,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	185.563.431.800,58	180.172.806.755,00	97,09	167.758.106.785,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	60.905.778.975,74	77.378.356.727,00	99,72	63.324.742.610,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN	40.549.297.239,98	44.229.309.569,00	109,08	39.721.885.304,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	6.395.653.378,00	6.165.974.726,00	96,41	5.694.911.703,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	333.066.238,08	114.676.312,00	34,49	275.096.860,00
5.1.01.08	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.680.000,00	379.800.000,00	92,44	410.680.000,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	290.418.000,00	270.018.000,00	92,98	265.627.858,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	6.791.510.950,00	6.529.611.737,00	96,14	2.025.112.897,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.170.146.627,50	163.720.037.200,00	91,89	174.333.143.316,00
5.1.02.01	Belanja Barang	36.728.125.184,59	33.461.286.245,00	91,11	43.810.168.533,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	74.905.483.518,00	68.307.970.757,00	91,19	66.226.135.544,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.951.775.362,00	10.201.349.086,00	93,92	11.037.009.108,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.930.437.361,00	18.776.632.740,00	89,71	24.440.684.361,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dibenkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.968.170.697,00	12.073.900.867,00	93,10	13.443.143.849,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.118.602.020,00	10.107.091.840,00	99,89	9.633.743.029,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.748.797.340,00	4.481.320.697,00	94,37	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.908.665.045,00	6.310.481.668,00	91,34	3.740.058.192,00
5.1.05	Belanja Hibah	20.784.042.703,00	21.850.244.697,33	104,17	16.822.268.936,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	13.981.261.255,00	13.981.261.265,00	100,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Komunitas, dan Berbadan Hukum Indonesia	4.576.300.000,00	4.543.449.661,00	99,22	13.030.043.549,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	1.950.903.387,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	675.252.334,00	675.252.333,33	100,00	641.230.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSD	1.371.229.104,00	2.273.281.238,00	165,78	0,00
5.1.09	Belanja Bantuan Sosial	724.320.000,00	610.542.000,00	84,29	366.360.000,00
5.1.09.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	724.320.000,00	610.542.000,00	84,29	366.360.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	520.018.545.721,88	501.221.378.133,33	96,39	467.268.136.266,00
5.2	BELANJA MODAL	64.737.258.930,00	58.767.684.209,00	90,78	63.803.169.485,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	117.700.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	117.700.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.313.489.448,00	10.229.512.049,00	83,08	12.532.002.808,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	640.341.408,00	179.000.000,00	27,95	183.020.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.025.520.000,00	2.025.280.000,00	99,99	8.766.370,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	66.602.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.466.906.664,00	1.431.753.765,00	97,49	3.559.827.426,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemanjar	0,00	0,00	0,00	24.179.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.213.561.100,00	2.963.067.502,00	92,21	2.004.326.219,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	461.850.000,00	341.421.100,00	73,92	223.985.042,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.216.944.250,00	1.072.048.886,00	88,09	1.823.484.242,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	49.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	70.979.406,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	39.810.000,00	34.018.810,00	85,46	613.748.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	139.358.750,00	129.075.000,00	92,61	658.990.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	23.810.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.581.604.775,00	786.620.900,00	49,47	2.412.437.482,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.515.060.500,00	1.276.825.486,00	84,28	391.240.625,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.744.551.723,00	27.172.293.811,00	88,38	23.033.557.412,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	30.304.581.723,00	26.999.104.749,00	89,09	21.506.517.716,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu, Tlok Kontrol/Pasti	173.600.000,00	173.192.062,00	99,82	1.527.039.596,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	288.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Ingsi	20.251.301.659,00	19.973.012.759,00	98,63	27.638.459.867,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	17.202.026.059,00	16.995.457.309,00	98,80	21.672.759.684,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.744.275.600,00	1.741.587.600,00	99,84	5.652.422.183,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	400.000.000,00	396.500.000,00	99,13	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	855.000.000,00	837.467.890,00	97,95	313.278.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Ingsi BLUD	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.427.906.100,00	1.392.482.550,00	97,52	430.440.406,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	14.550.000,00	14.529.000,00	99,86	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	600.000,00	600.000,00	100,00	6.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.412.756.100,00	1.377.333.550,00	97,49	475.440.400,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	64.737.268.930,00	58.767.684.209,00	90,78	63.803.160.485,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000,00	120.495.000,00	24,10	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	120.495.000,00	24,10	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	120.495.000,00	24,10	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	500.000.000,00	120.495.000,00	24,10	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	90.601.344.884,12	87.991.427.199,00	97,12	88.092.717.540,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.681.437.889,12	3.715.520.204,00	27,13	1.532.483.527,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemantahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.794.702.879,31	546.560.321,00	30,45	1.271.990.662,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.786.735.009,81	424.969.883,00	23,78	280.492.865,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	87.019.906.995,00	87.019.906.995,00	100,00	86.660.234.013,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	3.235.680.000,00	3.235.680.000,00	100,00	4.646.600.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	83.784.226.995,00	83.784.226.995,00	100,00	81.613.834.013,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	90.601.344.884,12	87.991.427.199,00	97,12	88.092.717.540,00
	JUMLAH BELANJA	675.857.149.536,00	548.100.984.541,33	95,89	618.164.914.291,00
	SURPLUS/DEFISIT	(6.383.487.579,00)	(3.736.954.887,97)	58,57	6.665.089.179,04
6	PEMBIAYAAN DAERAH	6.383.487.579,00	6.383.487.579,51	100,00	718.418.400,47
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.383.487.579,00	7.383.487.579,51	100,00	718.418.400,47
6.1.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.383.487.579,00	7.383.487.579,51	100,00	718.418.400,47
6.1.01.05	Panghasilan Belanja	7.383.487.579,00	7.383.487.579,51	100,00	718.418.400,47
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.383.487.579,00	7.383.487.579,51	100,00	718.418.400,47

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	6.383.487.579,00	6.383.487.579,51	100,00	718.418.400,47
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	2.644.532.711,54	0,00	7.393.487.579,51

Kota Pariaman, 18 Maret 2025
 Plt. Kepala Badan Pengelolaan
 Keuangan Dan Pendapatan Daerah,



ADRIAL, SE, MM
 NIP. 196709251989031004



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Jalan Syekh Burhanuddin No. 145 Tel. (0751) 92509

BUKTI DUKUNG PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM LAYAK

2). Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum/SPAM								Ket	
		Jaringan Perpipaan				Bukan Jaringan Perpipaan					Jumlah
		Unit air baku	Unit produksi	Unit distribusi	Unit pelayanan	Sumur dangkal	Sumur pompa	Bak penampungan air hujan	Terminal air		
1	Pariaman Selatan	1.180				3.412				4.592	
2	Pariaman Tengah	1.972				4.577				6.549	
3	Pariaman Timur	772				3.053				3.825	
Ds t	Pariaman Utara	1.478				4.168				5.646	
Jumlah		5.402				15.210				20.612	

Sumber Data : Bidang Cipta Karya Tahun 2024

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM PEKERJAAN UMUM PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	RW	Realisasi					Gap Pelayanan Dasar Air Minum (%)
			Terlayani JP	Terlayani JP	Terlayani BJP	Terlayani Air Minum	Belum Terlayani	Belum Terlayani Air Minum	
			(Rumah Tangga)	(Rumah Tangga)	(Rumah Tangga)	(%)	(Rumah Tangga)	(%)	
1	Pariaman Selatan	Pasir Sunur	90	50	40	100,00	0	0,00	0,00
2		Marunggi	540	169	344	95,00	27	5,00	5,00
3		Kampung Apar	231	107	120	98,27	4	1,73	1,73
4		Sikabu	100	84	16	100,00	0	0,00	0,00
5		Palak Aneh	273	50	192	88,64	31	11,36	11,36
6		Padang Cakur	145	66	79	100,00	0	0,00	0,00
7		Taluk	930	169	730	96,67	31	3,33	3,33
8		Marabau	244	95	149	100,00	0	0,00	0,00
9		Sungai Kasai	156	16	109	80,13	31	19,87	19,87
10		Batang Tjongkek	206	6	101	51,94	99	48,06	48,06
11		Balai Kurai Taji	319	15	278	91,85	26	8,15	8,15
12		Pauh Kurai Taji	295	30	260	98,31	5	1,69	1,69
13		Simpang	231	14	210	96,97	7	3,03	3,03

1	1		Toboh Palabai	452	85	330	91,81	37	8,19	8,19
4										
1	5		Rambai	312	49	249	95,51	14	4,49	4,49
1	6		Punggung Lading	587	175	205	64,74	207	35,26	35,26
1	7	Parlaman Tengah	Karan Aur	451	9	228	52,55	214	47,45	47,45
1	8		Jalan Baru	350	115	235	100,00	0	0,00	0,00
1	9		Ujung Batang	254	50	204	100,00	0	0,00	0,00
2	0		Jalan Kereta Api	210	23	125	70,48	62	29,52	29,52
2	1		Cimparuh	750	141	538	90,53	71	9,47	9,47
2	2		Alai Gelombang	190	98	91	99,47	1	0,53	0,53
2	3		Taratak	390	89	301	100,00	0	0,00	0,00
2	4		Kampung Baru	480	446	34	100,00	0	0,00	0,00
2	5		Lahong	245	1	244	100,00	0	0,00	0,00
2	6		Pasir	201	1	200	100,00	0	0,00	0,00
2	7		Kampung Perak	157	1	156	100,00	0	0,00	0,00
2	8		Pondok II	245	0	245	100,00	0	0,00	0,00
2	9		Jawi-Jawi I	191	7	184	100,00	0	0,00	0,00

30		Jawi-Jawi II	251	87	164	100,00	0	0,00	0,00
31		Kampung Jawa II	225	82	143	100,00	0	0,00	0,00
32		Kampung Jawa I	230	30	196	98,26	4	1,74	1,74
33		Kampung Pondok	361	230	127	98,89	4	1,11	1,11
34		Pauh Barat	430	187	192	88,14	51	11,86	11,86
35		Pauh Timur	450	169	281	100,00	0	0,00	0,00
36		Rawang	425	128	297	100,00	0	0,00	0,00
37		Jati Hilir	375	64	311	100,00	0	0,00	0,00
38		Jati Mudik	150	14	81	63,33	55	36,67	36,67
39	Pariaman Timur	Kampung Gadang	301	9	267	91,69	25	8,31	8,31
40		Talago Sarik	354	46	261	86,72	47	13,28	13,28
41		Bato	276	33	243	100,00	0	0,00	0,00
42		Batang Kabung	257	32	176	80,93	49	19,07	19,07
43		Sungai Sirah	154	23	120	92,86	11	7,14	7,14
44		Bungo Tanjung	260	1	216	83,46	43	16,54	16,54
45		Kampung Kandang	331	2	299	90,94	30	9,06	9,06

4		Kalut	208	6	172	85,58	30	14,42	14,42
6									
4		Kajai	201	12	187	99,00	2	1,00	1,00
7									
4		Kampung Tangah	90	0	27	30,00	63	70,00	70,00
8									
4		Sungai Pasak	201	24	175	99,00	2	1,00	1,00
9									
5		Air Santok	370	63	307	100,00	0	0,00	0,00
0									
5		Cubadak Mentawai	298	83	215	100,00	0	0,00	0,00
1									
5		Koto Marapak	287	283	4	100,00	0	0,00	0,00
2									
5		Pakasai	279	140	118	92,47	21	7,53	7,53
3									
5		Kp. Baru Padusunan	291	15	266	96,56	10	3,44	3,44
4									
5	Pariaman Utara	Ampalu	496	9	451	92,74	36	7,26	7,26
5									
6		Tanjung Sabar	120	45	71	96,67	4	3,33	3,33
5									
7		Apar	324	1	276	85,49	47	14,51	14,51
5									
8		Mangung	300	55	243	99,33	2	0,67	0,67
5									
9		Cubadak Air	361	68	293	100,00	0	0,00	0,00
6									
0		Cubadak Air Selatan	224	132	80	94,64	12	5,36	5,36
6									
1		Sikapak Timur	289	182	107	100,00	0	0,00	0,00

6 2		Sikapak Barat	464	174	290	100,00	0	0,00	0,00
6 3		Tungkal Selatan	396	122	257	95,71	17	4,29	4,29
6 4		Tungkal Utara	280	117	163	100,00	0	0,00	0,00
6 5		Cubadak Alir Utara	444	130	255	86,71	59	13,29	13,29
6 6		Naras Hilir	305	4	251	83,61	50	16,39	16,39
6 7		Naras I	550	54	457	92,91	39	7,09	7,09
6 8		Balai Naras	600	2	529	88,50	69	11,50	11,50
6 9		Padang Birik- Birik	364	2	348	96,15	14	3,85	3,85
7 0		Sintuk	199	107	92	100,00	0	0,00	0,00
7 1		Sungai Rambai	279	274	5	100,00	0	0,00	0,00
Total			22.275	5.402	15.210		1.663		
Persentase Layanan				24,25%	68,28%	92,53%	7,47%	7,47%	7,47%
Capaian SPM				92,53%					

Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	=	(Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum Layak : Jumlah Rumah Tangga)
	=	x 100 %
	=	(20.612 : 22.275) x 100%
	=	92,53 %

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian (%)	Ket
		Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	71,53	92,53	129,36	



Pariaman, Januari 2025
Plt. Kepala Dinas

DASMANIAR, S.Sos.MM
NIP. 196701121988032002



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Diponegoro No. 48 Pariaman Telp. (0751) 93844 Kode Pos 25538

BERITA ACARA
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PENGURANGAN LUASAN KUMUH
KOTA PARIAMAN

Nomor : 660/58 /DISPERKIM-LH/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** di Kota Pariaman, telah dilaksanakan Perhitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Tingkat Kota Pariaman untuk tahun 2024 sebesar 1,79 Ha dan total pengurangan sampai dengan tahun 2024 sebesar 51,47 Ha (27,92%) dari luasan kumuh berdasarkan SK No. 38/050/2022 dengan total luas kumuh 184,36 Ha.

Hasil perhitungan pengurangan luasan kumuh tahun 2025 Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat menetapkan hasil sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2020 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2021 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2022 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2023 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2024 (Ha)	Total Luasan Kumuh (Ha)
1	Pariaman Utara	Tungkul Selatan	Tungkul Selatan	6,79	0	0	0	0	0	6,79
2	Pariaman Utara	Sikapuk Barat	Sikapuk Barat	4,05	0	0	0	0	0	4,05
3	Pariaman Utara	Manggung	Manggung	13,4	0	0	0	3,63	0	9,79
4	Pariaman Utara	Ampalu	Pauh Barat Ampalu	9,82	0	0	0	0	0	9,82
	Pariaman Utara	Apar		2,01	0	0	0	0	0	2,01
	Pariaman Tengah	Pauh Barat		13,22	0	0	0	0	1,79	11,43
5	Pariaman Tengah	Cimparuh	Cimparuh	19,62	0	0	0	0	0	19,62
6	Pariaman Tengah	Jati Hillir	Jati	4,51	0	0	3,63	0	0	2,88
7	Pariaman Tengah	Kampung Pondok	Kampung Pondok	3,63	0	0	1,6	0	0	2,03
8	Pariaman Tengah	Jawi-jawi I	Jawi-jawi I	6,18	0	1,92	2,34	0	0	1,9
9	Pariaman Tengah	Jawi-jawi II	Jawi-jawi II	7,99	0	0	3,62	0	0	4,37
10	Pariaman Tengah	Karan Aur	Karan Aur	8,06	0	8,06	0	0	0	0
11	Pariaman Tengah	Kampung Perak	Kampung Perak Lohong Perak	5,77	0	5,77	0	0	0	0
	Pariaman Tengah	Lohong		8,01	0	8,01	0	0	0	0
	Pariaman Tengah	Perak		2,84	0	2,84	0	0	0	0
12	Pariaman Tengah	Pondok II	Pondok II	1,68	0	1,68	0	0	0	0
13	Pariaman Selatan	Pauh Kurai Tali	Kurai Tali	7,08	0	0	0	0	0	7,08
14	Pariaman Selatan	Punggung Lading	Sanggan Punggung Lading	19,73	0	0	0	0	0	19,73
15	Pariaman Selatan	Punggung Lading	Perit Punggung Lading		0	0	0	0	0	0
16	Pariaman Timur	Kampung Baru Padayaman	Padayaman	12,02	0	0	0	0	0	12,02
	Pariaman Utara	Cubadak Air Selatan			0	0	0	0	0	0
17	Pariaman Utara	Balai Nareh	Balai Nareh	6,5	5,5	0	0	0	0	0
18	Pariaman Timur	Sungai Sirih	Sungai Sirih	6,56	0	0	0	0	0	6,56
19	Pariaman Selatan	Polak Anah	Polak Anah	12,83	0	0	0	0	0	12,83
Total Luas Kawasan Kumuh				184,36	6,00	28,28	11,19	3,63	1,79	112,89

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini disusun dan disepakati para pihak dengan penuh kesadaran. Berita Acara ini akan dijadikan acuan penetapan luasan kumuh Kota Pariaman tahun 2025.

Kepala Bidang
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman



AZRIA PALDI DONAL, ST, MT
NIP. 19850630 201001 1 008

Kepala Dinas



FERI ANDRI, ST, MT
NIP. 19660225 199403 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL. Jend. Sudirman No. 47 Telp. 0751-890720, Fax. 0751-890721
E-mail : bpbdprovsumbar@yahoo.com

Padang, 14 Januari 2025
14 Rajab 1446 H

Nomor : 300.2.3/ 47 /PK/BPBD/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Nilai IKD dan IRB Tahun 2024

Yth: *Daftar pada lampiran*
di
Tempat

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Nomor B-06.03/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025, tanggal 8 Januari 2025, tentang Penyampaian IKD dan IRB 2024 di Provinsi Sumatera Barat, dengan ini disampaikan kepada Saudara beberapa hal berikut:

1. BPBD Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi terhadap BPBD Kabupaten/Kota yang telah melakukan penilaian IKD pada tahun 2024, sebagaimana terlampir.
2. Merujuk pada poin f pada surat tersebut, maka BPBD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk melakukan pendampingan dan pengumpulan IKD tahun 2025 yang dimulai pada bulan Juni 2025.
3. Informasi lebih lanjut terkait penilaian IKD dapat menghubungi Saudara/i Nur Rahmi Amalia, S.T. (Hp: 081261028895) atau Fachrul Rozi Ramadhan, S.T., M.T. (Hp: 082322606030), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumbar.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KEPALA PELAKSANA

RUDY RINALDY
Pembina Utama Madya
NIP. 19680624 199703 1 006

Lampiran I

Nomor : 300.2.3/ 49 /PK/BPBD/2025
Tanggal : 14 Januari 2025
Perihal : Penyampaian Nilai IKD dan IRB Tahun 2024

Daftar Lampiran:

BPBD Kabupaten/Kota

1. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang
2. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Panjang
3. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pariaman
4. Kepala Pelaksana BPBD Kota Payakumbuh
5. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bukittinggi
6. Kepala Pelaksana BPBD Kota Solok
7. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sawahlunto
8. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Padang Pariaman
9. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok
10. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Selatan
11. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dharmasraya
12. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sijunjung
13. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota
14. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam
15. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Datar
16. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasaman
17. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasaman Barat
18. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan
19. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai





BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

Nomor : B-06.03/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian IKD 2024 dan IRB 2024
di Provinsi Sumatera Barat

8 Januari 2025

Yth. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
di tempat

BNPB telah melakukan verifikasi dan finalisasi data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2024 untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2024 di tingkat kabupaten/kota melalui portal <https://inarisk.bnpb.go.id/admin>. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal berikut:

- BNPB memberikan apresiasi kepada Provinsi Sumatera Barat yang telah konsisten mendorong dan melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota untuk melakukan penilaian IKD setiap tahun;
- BNPB juga memberikan apresiasi terhadap BPBD Kabupaten/Kota yang telah melakukan penilaian IKD pada 2024, sebagaimana terlampir;
- BNPB telah menyampaikan surat Nomor B-449/BNPB/D-I/SS.01.03/12/2024. Dalam surat tersebut, pemerintah kabupaten/kota diberikan kesempatan untuk memperpanjang waktu pengumpulan dan pemenuhan bukti verifikasi;
- BNPB telah melakukan finalisasi pada IKD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlampir. File final IKD 2024 dapat diakses pada tautan https://bit.ly/IKD_Final_Sumatera_Barat_2024;
- Nilai IRB 2024 diproses dengan input salah satunya adalah nilai IKD 2024. Nilai IRB 2024 untuk Provinsi Sumatera Barat adalah 142,55;
- BNPB menghimbau Provinsi Sumatera Barat melalui BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk mengkoordinasikan pengumpulan IKD Kabupaten/Kota serta melakukan pendampingan di tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Deputi Bidang Sistem dan Strategi,

Rachya Jati

Tembusan :

- Kepala BNPB (sebagai laporan);
- Sekretaris Utama BNPB;
- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Lampiran

Nomor : B-06.03/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025

Tanggal : 8 Januari 2025

**Nilai IKD 2024 dan IRB 2024 Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat**

KABUPATEN/KOTA	IKD 2024	IRB 2024
Kepulauan Mentawai	0.39	190.67
Pesisir Selatan	0.52	149.22
Solok	0.30	137.20
Sijunjung	0.33	106.73
Tanah Datar	0.27	125.20
Padang Pariaman	0.49	152.17
Agam	0.33	204.61
Lima Puluh Kota	0.32	119.20
Pasaman	0.31	177.65
Solok Selatan	0.41	123.31
Dharmasraya	0.39	134.81
Pasaman Barat	0.39	192.85
Kota Padang	0.52	155.96
Kota Solok	0.36	124.92
Kota Sawahlunto	0.43	114.22
Kota Padang Panjang	0.30	113.20
Kota Bukittinggi	0.28	128.61
Kota Payakumbuh	0.30	104.80
Kota Pariaman	0.44	153.04



Deputi Bidang Sistem dan Strategi,

Rediyya Jati



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jln. DR. Suharjo No. 15 Kampung Baru Pariaman Fax (0751) 91558 Pariaman

JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DISELESAIKAN
KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan	Tindak lanjut	Status Pengaduan
1	Devita	01 Januari 2024	Pkl berjualan di jalan sekitaran kawasan wisata pantai yang mengakibatkan terganggunya pengguna jalan	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
2	Ade Saputra	02 Januari 2024	Anak punk yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
3	Ketua Pemuda Pondok II	04 Januari 2024	Adanya anak anak yang kumpul di mini market yang meresahkan masyarakat	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
5	Atika	07 Januari 2024	Badut yang mengganggu kenyamanan pengendara	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
6	Ibu Mita	09 Januari 2024	Pelajar yang meresahkan di smk 2 pariaman	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
7	Nasril	13 Januari 2024	Pemuda pemuda yang berduaan di payung ceper dan mengarah kearah maksiat	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
8	Darwin	15 Januari 2024	Pelajar yang berkeliatan pada jam pelajaran disekitaran warung dekat sekolah	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
9	Rina	16 Januari 2024	PKL yang memakai fasilitas umum	Satpol.PP Melakukan Penertuban	Terselesaikan

10	Novita	18 Januari 2024	Badut yang mengganggu kenyamanan pengendara	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
11	Rahayu	22 Januari 2024	Pkl di pantai cermin yang menggunakan fasilitas umum	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
12	Taufik	25 Januari 2024	Payung Cepet	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
13	Yudi	31 Januari 2024	Orgen tunggal yang beroperasi pada jam yang telah dilarang dan mengganggu kenyamanan masyarakat	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
14	Bayu	1 Februari 2024	Payung Cepet	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
15	Ridwan	6 Februari 2024	Orgen tunggal yang beroperasi pada jam yang telah dilarang dan mengganggu kenyamanan masyarakat	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
16	Fuad	7 Februari 2024	Anak-anak yang berkumpul di mini market yang meresahkan masyarakat	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
17	Yogi	9 Februari 2024	Pedagang yang menggunakan fasilitas umum	Satpol PP Melakukan Pengamanan	Terselesaikan
18	Vito	11 Februari 2024	Orgen tunggal yang beroperasi pada jam yang telah dilarang dan mengganggu kenyamanan masyarakat	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
19	Dedi	14 Februari 2024	MDG yang meresahkan di Kampung Haru	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
20	Salsa	15 Februari 2024	Gepeng/pengamen/badut yang meresahkan	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan

21	Gefi	18 Februari 2024	Gepeng/pengamen/badut yang meresahkan	Satpol.PP Melakukan Pengamanan	Terselesaikan
22	Vita	19 Februari 2024	Badut yang meresahkan	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
23	Frangki	22 Februari 2024	Payung Ceper	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
24	Wati	25 Februari 2024	PKL yang memakai fasilitas umum	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
25	Arisman	27 Februari 2024	Orgen tunggal yang beroperasi pada jam yang telah dilarang dan mengganggu kenyamanan masyarakat	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
26	Anto	29 Februari 2024	Payung Ceper	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
27	Robi	02 Maret 2024	ODGJ yang meresahkan di Simpang Sianik	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
28	Wahyu	03 Maret 2024	Badut yang meresahkan	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
29	Yusarman	07 Maret 2024	Gepeng/pengamen yang meresahkan di Simpang Apar	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
30	Ruddy	10 Maret 2024	PKL yang memakai fasilitas umum	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
31	Iqbal	12 Maret 2024	PKL yang memakai fasilitas umum Kp. Pondok	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
32	Yandri	14 Maret 2024	Warung Kelambu	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
33	Asni	16 Maret 2024	Kedai Kopi yang tetap berjualan siang hari di bulan Ramadhan	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
34	Jode	17 Maret 2024	Payung Ceper	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
35	Ridwan	18 Maret 2024	Pedagang yang menggunakan fasilitas umum	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan

36	Neneng	23 Maret 2024	Penertiban gepeng/pengamen yang meresahkan di KP. Pondok II	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
37	Asfandha	25 Maret 2024	Pelajar yang bekliran disekitaran warung dekat sekolah pada jam pelajaran SMA Negeri 5 dan SMP Negeri 6 Pariaman	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
38	Zizi	30 Maret 2024	Warung Kelambu	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
39	Fadel	01 April 2024	Warung Kelambu Dan Kedai Kopi Yang Memfasilitasi Minum Di Tempat (Simpang Apa)	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
40	Al	03 April 2024	Warung Kelambu Dan Kedai Kopi Yang Memfasilitasi Minum Di Tempat (Santok Dan Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Selatan)	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
41	Roni	04 April 2024	Warung Kelambu Dan Kedai Kopi Yang Memfasilitasi Minum Di Tempat (Kubel Kecamatan Pariaman Tengah)	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
42	Ibu Eni	06 April 2024	Warung kelambu dan kedai kopi yang memfasilitasi minum di tempat (KP. JAWA)	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
43	Fani	07 April 2024	Warung kelambu dan kedai kopi yang memfasilitasi minum di tempat (pariaman utara)	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
44	Ridho	09 April 2024	Muda-Mudi Yang Berduan Di Payung Ceper Di Sekitaran Kota Pariaman	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
45	Zulfianto	20 April 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan

			Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Sekitaran Kota Pariaman		
46	Tomi	22 April 2024	Pelajar Yang Berkeliaran Di Warung Dekat Sekolah Pada Jam Pelajaran (SMA Negeri 2 Pariaman)	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
47	Ida	23 April 2024	Pelajar yang berkeluaran di warung dekat sekolah pada jam pelajaran	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
48	Apirman	24 April 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Sekitaran Kota Pariaman	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
49	Dendi	29 April 2024	Pelajar Yang Berkeliaran Di Warung Dekat Sekolah Pada Jam Pelajaran (SMK Negeri 1 Pariaman)	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
50	Wawan	30 April 2024	Pelajar Yang Berkeliaran Di Warung Dekat Sekolah Pada Jam Pelajaran (SMK Negeri 3 Pariaman)	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
51	Wahyu	02 Mei 2024	Pelajar Yang Berkeliaran Disaat Jam Pelajaran Di Kota Pariaman (Cabut)	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
52	Aan	06 Mei 2024	Gepeng/Pengamen Yang Meresahkan Di Sekitaran Pantai Pariaman	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
53	Rayendra	09 Mei 2024	Pedagang yang menggunakan fasilitas umum	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan

54	Sarah	13 Mei 2024	Pelajar Yang Berkumpul-Kumpul Di Warung Dekat Sekolah Saat Jam Pelajaran (MTS Negeri 2 Pariaman)	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
55	Imam	16 Mei 2024	Pelajar Yang Berkumpul-Kumpul Di Warung Dekat Sekolah Saat Jam Pelajaran (MTS Negeri 1 Pariaman)	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
56	Rini	19 Mei 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam 5 Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Sekitaran Kecamatan Pariaman Utara	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
57	Datul	25 Mei 2024	Pelajar Yang Berkumpul-Kumpul Di Saat Jam Pelajaran (Pantai Penyu)	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
58	Ibra	28 Mei 2024	Pelajar Yang Berkumpul-Kumpul Di Saat Jam Pelajaran (SMK Negeri 3 Pariaman)	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
59	Wanda	31 Mei 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Kecamatan Pariaman Selatan	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
60	Herman	05 Juni 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Sekitaran Kota Pariaman	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan

61	Pitri	10 Juni 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Kampung Baru	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
62	Yuni	12 Juni 2024	Pedagang Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Pasar Pagi Pariaman	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
63	Irwan	17 Juni 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Sekitaran Pantai Pariaman	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
64	Rio	23 Juni 2024	Balap Liar di By Pass Pariaman	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
65	David	30 Juni 2024	Orang Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Sekitaran Kota Pariaman	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
66	Devita	01 Juli 2024	Badut Yang Mengganggu Kenyamanan Di Lampu Merah Simpang Amadin	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
67	Rizal	22 Juli 2024	Orang Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Sekitaran Kota Pariaman	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
68	Nurjanah	23 Juli 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Sekitaran Pantai Pariaman	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
69	Tutra	26 Juli 2024	Pelajar Yang Cabut Dan Berkumpul Di Pantai (Sekitaran Pantai Pariaman)	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan

70	Vivi	27 Juli 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Taratak Pariaman	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
71	Imron	28 Juli 2024	Balap Liar di By Pass Pariaman	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
72	Tio	29 Juli 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
73	Kiki	31 Juli 2024	Pelajar Yang Cabut Dan Berkumpul Di Pantai (Sekitaran Pantai Pariaman)	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
74	Wahyu	01 Agustus 2024	Pelajar Yang Berkeliaran Saat Jam Pelajaran (Sekitaran SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 6 Pariaman)	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
75	Yola	07 Agustus 2024	Badut Yang Mengganggu Kenyamanan Saat Di Lampu Merah Simpang Apar Pariaman	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
76	Diski	09 Agustus 2024	Pelajar Yang Berkeliaran Saat Jam Pelajaran (SMK Negeri 1 Pariaman)	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
77	Arsya	10 Agustus 2024	Pemuda Yang Berkumpul-Kumpul Di By Pass Dan Melakukan Balap Liar	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
78	Arian	13 Agustus 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Sikapak	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
79	Wita	15 Agustus 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan

			Depan RSUD Pariaman		
80	Robi	22 Agustus 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Nareh Pariaman	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
81	Popi	27 Agustus 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Kampung Pondok	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
82	Rama	30 Agustus 2024	Balap Liar di By Pass Pariaman	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
83	Khadafi	31 Agustus 2024	Pemuda Pemudi Yang Berkumpul-Kumpul Di Muaro Mangguang Yang Meresahkan (Pantai Penyu dan Muaro Mangguang Kota Pariaman)	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
84	Taufik	07 September 2024	Balap Liar di By Pass Pariaman	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
85	Heri	12 September 2024	Pedagang Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Pasar Pariaman	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
86	Julianda	15 September 2024	Balap Liar di By Pass Pariaman	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
87	Ulfiandri	20 September 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Sirambang Kota Pariaman	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
88	Teguh	24 September 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Taratak Pariaman	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
89	Nofi	30 September 2024	Pedagang Yang Menggunakan	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan

			fasilitas Umum Di Pasar Paraman		
90	Aryun	03 Oktober 2024	ODGJ Yang Meresahkan Di Kunatiji Paraman	Saprol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
91	Gefi	05 Oktober 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Pantai Gandorah Paraman	Saprol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
92	Tito	09 Oktober 2024	Cepeng/Pengamen/B adul Yang Meresahkan Di Simpang Apar Paraman	Saprol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
93	Wido	12 Oktober 2024	Balap Liar di By Pass Paraman	Saprol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
94	Jimii	19 Oktober 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Kampung Baru Paraman	Saprol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
95	Anto	26 Oktober 2024	Pengamen Yang Mengganggu Keayamanan Pengujung Pantai Gandorah Paraman	Saprol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
96	Rishky	30 Oktober 2024	Balap Liar di By Pass Paraman	Saprol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
97	Arwar	02 November 2024	Payung Cepet Di Sekitaran Pantai Paraman	Saprol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
98	Novia	07 November 2024	Pengamen Yang Mengganggu Keayamanan Wisatawan Di Pantai Gandorah	Saprol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
99	Emi	08 November 2024	Pelajar Yang Berhimpul-Kumpul Di Warung Dekat Sekolah Saat Jam Pelajaran (SMK N 1 Paraman)	Saprol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
100	Wahyudi	09 November 2024	Balap Liar di Sekitaran Pantai Paraman	Saprol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan

101	Yogi	10 November 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Kp Baru Pariaman	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
102	Emil	14 November 2024	Badut yang mengganggu kenyamanan pengendara di lampu merah simpang lapai	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
103	Ari	18 November 2024	Pedagang Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Pasar Pagi Pariaman	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
104	Sarijon	20 November 2024	Pelajar Yang Berkumpul-Kumpul Di Pantai Kata Pariaman Dan Balap-Balapan	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
105	Neti	20 November 2024	Orgen tunggal yang beroperasi pada jam yang telah dilarang dan mengganggu kenyamanan masyarakat	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
106	Ridwan	23 November 2024	Balap Liar di By Pass Pariaman	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
107	Fajar	29 November 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Taluk Kota Pariaman	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
108	Nofri	03 Desember 2024	Pedagang Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Pasar Pagi Pariaman	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
109	Irfan	07 Desember 2024	Pelajara Yang Cabut Dan Berkumpul Di Pantai (Sekitaran Pantai Pariaman)	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
110	Aruni	08 Desember 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan	Satpol.PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan

			Masyarakat Di Talago Sariak		
111	Aisyah	09 Desember 2024	Pelajar Yang Berkumpul-Kumpul Di Warung Dekat Sekolah Saat Jam Pelajaran (SMK N 2 Pariaman)	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
112	Randi	12 Desember 2024	Balap Liar di By Pass Pariaman	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
113	Irma	14 Desember 2024	Pemuda Pemudi Yang Berduan Di Ayunan Dan Payung Ceper Pantai Kata Pariaman	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
114	Mega	16 Desember 2024	Pelajar Yang Berkumpul-Kumpul Di Warung Dekat Sekolah Saat Jam Pelajaran (SMK N 1 Pariaman)	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
115	Ridhan	27 Desember 2024	Balap Liar di By Pass Pariaman	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan
116	Lina	29 Desember 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Marunggi	Satpol PP Melakukan Penertiban	Terselesaikan

Sumber Data : Kantor Satpol PP Kota Pariaman

Pariaman, Maret 2025
Kepala Satpol PP Dan Damkar
Kota Pariaman


Alfian S. Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197407261993111001



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jln. DR. Suharjo No. 15 Kampung Baru Pariaman Fax (0751) 91558 Pariaman

JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KESELURUH YANG TERDAFTAR
DI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan
1	Devita	01 Januari 2024	Pkl berjualan di jalan sekitar kawasan wisata pantai yang mengakibatkan terganggunya pengguna jalan
2	Ade Saputra	02 Januari 2024	Anak punk yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan
3	Ketua Pemuda Pondok II	04 Januari 2024	Adanya anak anak yang kumpul di mini market yang meresahkan masyarakat
4	Dika	06 Januari 2024	Orgen tunggal yang beroperasi pada jam yang telah dilarang dan mengganggu kenyamanan masyarakat
5	Atika	07 Januari 2024	Badut yang mengganggu kenyamanan pengendara
6	Ibu Mita	09 Januari 2024	Pelajar yang meresahkan di smk 2 pariaman
7	Ibu Ermi	12 Januari 2024	Pedagang yang berjualan di depan sma negeri 1 pariaman yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan trotoar
8	Nasril	13 Januari 2024	Pemuda pemudi yang berduaan di payung ceper dan mengarah kearah maksiat
9	Darwin	15 Januari 2024	Pelajar yang berkeliaran pada jam pelajaran

			disekitaran warung dekat sekolah
10	Rina	16 Januari 2024	PKL yang memakai fasilitas umum
11	Novita	18 Januari 2024	Badut yang mengganggu kenyamanan pengendara
12	Rahayu	22 Januari 2024	Pkl di pantai cermin yang menggunakan fasilitas umum
13	Taufic	25 Januari 2024	Payung Ceper
14	Yudi	31 Januari 2024	Orgen tunggal yang beroperasi pada jam yang telah dilarang dan mengganggu kenyamanan masyarakat
15	Bayu	1 Februari 2024	Payung Ceper
16	Nia	4 Februari 2024	PKL yang memakai fasilitas umum
17	Ridwan	6 Februari 2024	Orgen tunggal yang beroperasi pada jam yang telah dilarang dan mengganggu kenyamanan masyarakat
18	Fuad	7 Februari 2024	Anak anak yang kumpul di mini market yang meresahkan masyarakat
19	Yogi	9 Februari 2024	Pedagang yang menggunakan fasilitas umum
20	Vitto	11 Februari 2024	Orgen tunggal yang beroperasi pada jam yang telah dilarang dan mengganggu kenyamanan masyarakat
21	Dedi	14 Februari 2024	OTXJ yang meresahkan di Kampung Baru
22	Salsa	15 Februari 2024	Gepeng/pengamen badut yang meresahkan
23	Gefi	18 Februari 2024	Gepeng/pengamen badut yang meresahkan
24	Vita	19 Februari 2024	Badut yang meresahkan
25	Frangki	22 Februari 2024	Payung Ceper
26	Wati	25 Februari 2024	PKL yang memakai fasilitas umum
27	Arisman	27 Februari 2024	Orgen tunggal yang beroperasi pada jam yang telah dilarang dan mengganggu kenyamanan masyarakat

28	Anto	29 Februari 2024	Payung Ceper
29	Robi	02 Maret 2024	ODGJ yang meresahkan di Simpang Sianik
30	Wahyu	03 Maret 2024	Badut yang meresahkan
31	Yusarman	07 Maret 2024	Gepeng/pengamen yang meresahkan di Simpang Apur
32	Ruddy	10 Maret 2024	PKL yang memakai fasilitas umum
33	Iqbal	12 Maret 2024	PKL yang memakai fasilitas umum Kp. Pondok
34	Yandri	14 Maret 2024	Warung Kelambu
35	Asni	16 Maret 2024	Kedai Kopi yang tetap berjualan siang hari di bulan Ramadhan
36	Jode	17 Maret 2024	Payung Ceper
37	Ridwan	18 Maret 2024	Pedagang yang menggunakan fasilitas umum
38	Ramaini	20 Maret 2024	PKL yang memakai fasilitas umum di depan RSUD
39	Neneng	23 Maret 2024	Penertiban gepeng/pengamen yang meresahkan di KP. Pondok II
40	Asfaridha	25 Maret 2024	Pelajar yang bekliran disekitaran warung dekat sekolah pada jam pelajaran SMA Negeri 5 dan SMP Negeri 6 Pariaman
41	Zizi	30 Maret 2024	Warung Kelambu
42	Fadel	01 April 2024	Warung Kelambu Dan Kedai Kopi Yang Memfasilitasi Minum Di Tempat (Simpang Apa)
43	Al	03 April 2024	Warung Kelambu Dan Kedai Kopi Yang Memfasilitasi Minum Di Tempat (Santok Dan Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Selatan)
44	Roni	04 April 2024	Warung Kelambu Dan Kedai Kopi Yang Memfasilitasi Minum Di Tempat (Kubel)

			Kecamatan Pariaman Tengah)
45	Tania	05 April 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Sma Negeri 1 Pariaman Di Kota Pariaman
46	Ibu Eni	06 April 2024	Warung kelambu dan kedai kopi yang memfasilitasi minum di tempat (KP. JAWA)
47	Fani	07 April 2024	Warung kelambu dan kedai kopi yang memfasilitasi minum di tempat (pariaman utara)
48	Ridho	09 April 2024	Muda-Mudi Yang Berduan Di Payung Ceper Di Sekitaran Kota Pariaman
49	Zulfianto	20 April 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Sekitaran Kota Pariaman
50	Tomi	22 April 2024	Pelajar Yang Berkeliaran Di Warung Dekat Sekolah Pada Jam Pelajaran (SMA Negeri 2 Pariaman)
51	Ida	23 April 2024	Pelajar yang berkeliaran di warung dekat sekolah pada jam pelajaran
52	Apirman	24 April 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Sekitaran Kota Pariaman
53	Abrur	26 April 2024	Pedagang Yang Berjualan Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Pasar Pariaman
54	Dendi	29 April 2024	Pelajar Yang Berkeliaran Di Warung Dekat Sekolah Pada Jam Pelajaran (SMK Negeri 1 Pariaman)

55	Wawan	30 April 2024	Pelajar Yang Berkeliaran Di Warung Dekat Sekolah Pada Jam Pelajaran (SMK Negeri 3 Pariaman)
56	Wahyu	02 Mei 2024	Pelajar Yang Berkeliaran Disaat Jam Pelajaran Di Kota Pariaman (Cabut)
57	Zulfianto	04 Mei 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Kampung Pondok
58	Aan	06 Mei 2024	Gepeng/Pengamen Yang Meresahkan Di Sekitaran Pantai Pariaman
60	Rayendra	09 Mei 2024	Podagang yang menggunakan fasilitas umum
61	Sarah	13 Mei 2024	Pelajar Yang Berkumpul-Kumpul Di Warung Dekat Sekolah Saat Jam Pelajaran (MTS Negeri 2 Pariaman)
62	Imam	16 Mei 2024	Pelajar Yang Berkumpul-Kumpul Di Warung Dekat Sekolah Saat Jam Pelajaran (MTS Negeri 1 Pariaman)
63	Riri	19 Mei 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam 5 Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Sekitaran Kecamatan Pariaman Utara
64	Datul	25 Mei 2024	Pelajar Yang Berkumpul-Kumpul Di Saat Jam Pelajaran (Pantai Peny)
65	Ibra	28 Mei 2024	Pelajar Yang Berkumpul-Kumpul Di Saat Jam Pelajaran (SMK Negeri 3 Pariaman)
66	Wanda	31 Mei 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Kecamatan Pariaman Selatan
67	Wiwin	03 Juni 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di

			Sekitaran Pantai Pariaman
68	Herman	05 Juni 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Sekitaran Kota Pariaman
69	Pitri	10 Juni 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Kampung Baru
70	Yuni	12 Juni 2024	Pedagang Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Pasar Pagi Pariaman
71	Irwan	17 Juni 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Sekitaran Pantai Pariaman
72	Rio	23 Juni 2024	Balap Liar di By Pass Pariaman
73	David	30 Juni 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Sekitaran Kota Pariaman
74	Devita	01 Juli 2024	Badut Yang Mengganggu Kenyamanan Di Lampu Merah Simpang Amadin
75	Rizal	22 Juli 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Sekitaran Kota Pariaman
76	Nurjanah	23 Juli 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Sekitaran Pantai Pariaman
77	Tutra	26 Juli 2024	Pelajar Yang Cabut Dan Berkumpul Di Pantai (Sekitaran Pantai Pariaman)
78	Vivi	27 Juli 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Taratak Pariaman

79	Imron	28 Juli 2024	Balap Liar di By Pass Pariaman
80	Tio	29 Juli 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat
81	Kiki	31 Juli 2024	Pelajar Yang Cabut Dan Berkumpul Di Pantai (Sekitaran Pantai Pariaman)
82	Wahyu	01 Agustus 2024	Pelajar Yang Berkeliaran Saat Jam Pelajaran (Sekitaran SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 6 Pariaman)
83	Daus	04 Agustus 2024	Payung Ceper di Sekitaran Pantai Pariaman
84	Yola	07 Agustus 2024	Badut Yang Mengganggu Kenyamanan Saat Di Lampu Merah Simpang Apar Pariaman
85	Diski	09 Agustus 2024	Pelajar Yang Berkeliaran Saat Jam Pelajaran (SMK Negeri 1 Pariaman)
86	Arsya	10 Agustus 2024	Pemuda Yang Berkumpul-Kumpul Di By Pass Dan Melakukan Balap Liar
87	Arlan	13 Agustus 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Sikapak
88	Wita	15 Agustus 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Depan RSUD Pariaman
89	Robi	22 Agustus 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Nareh Pariaman
90	Popi	27 Agustus 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Kampung Pondok
91	Rama	30 Agustus 2024	Balap Liar di By Pass Pariaman

92	Khadafi	31 Agustus 2024	Pemuda Pemudi Yang Berkumpul- Kumpul Di Muaro Mangguang Yang Meresahkan (Pantai Penyu dan Muaro Mangguang Kota Pariaman)
93	Taufik	07 September 2024	Balap Liar di By Pass Pariaman
94	Heri	12 September 2024	Pedagang Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Pasar Pariaman
95	Julianda	15 September 2024	Balap Liar di By Pass Pariaman
96	Ulfiandri	20 September 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Sirambang Kota Pariaman
97	Teguh	24 September 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Taratak Pariaman
98	Nofi	30 September 2024	Pedagang Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Pasar Pariaman
99	Aryan	03 Oktober 2024	ODGJ Yang Meresahkan Di Kuraitaji Pariaman
100	Gefi	05 Oktober 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Pantai Gandoriah Pariaman
101	Tito	09 Oktober 2024	Gepeng/Pengamen/Badut Yang Meresahkan Di Simpang Apar Pariaman
102	Wido	12 Oktober 2024	Balap Liar di By Pass Pariaman
103	Jimi	19 Oktober 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Kampung Baru Pariaman
104	Kere	24 Oktober 2024	Gepeng/Pengamen/Badut Yang Meresahkan Di Simpang Amadin
105	Anto	26 Oktober 2024	Pengamen Yang Mengganggu Kenyamanan Pengunjung Pantai Gandoriah Pariaman

106	Rishky	30 Oktober 2024	Balap Liar di By Pass Pariaman
107	Azwar	02 November 2024	Payung Ceper Di Sekitaran Pantai Pariaman
108	Novita	07 November 2024	Pengamen Yang Mengganggu Kenyamanan Wisatawan Di Pantai Gandoriah
109	Erni	08 November 2024	Pelajar Yang Berkumpul-Kumpul Di Warung Dekat Sekolah Saat Jam Pelajaran (SMK N 1 Pariaman)
110	Wahyudi	09 November 2024	Balap Liar di Sekitaran Pantai Pariaman
111	Yogi	10 November 2024	PKL Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Kp Baru Pariaman
112	Emil	14 November 2024	Badut yang mengganggu kenyamanan pengendara di lampu merah simpang lapai
113	Ari	18 November 2024	Pedagang Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Pasar Pagi Pariaman
114	Sarijon	20 November 2024	Pelajar Yang Berkumpul-Kumpul Di Pantai Kata Pariaman Dan Balap-Balapan
115	Neti	20 November 2024	Orgen tunggal yang beroperasi pada jam yang telah dilarang dan mengganggu kenyamanan masyarakat
116	Ridwan	23 November 2024	Balap Liar di By Pass Pariaman
117	Fajar	29 November 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasi Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Taluk Kota Pariaman
118	Nofri	03 Desember 2024	Pedagang Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Pasar Pagi Pariaman
119	Irfan	07 Desember 2024	Pelajara Yang Cabut Dan Berkumpul Di Pantai

			(Sekitaran Pantai Pariaman)
120	Arani	08 Desember 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Talago Sariak
121	Aisyah	09 Desember 2024	Pelajar Yang Berkumpul-Kumpul Di Warung Dekat Sekolah Saat Jam Pelajaran (SMK N 2 Pariaman)
122	Randi	12 Desember 2024	Balap Liar di By Pass Pariaman
123	Irma	14 Desember 2024	Pemuda Pemuda Yang Berduan Di Ayunan Dan Payung Ceper Pantai Kata Pariaman
124	Mega	16 Desember 2024	Pelajar Yang Berkumpul-Kumpul Di Warung Dekat Sekolah Saat Jam Pelajaran (SMK N 1 Pariaman)
125	Zul	18 Desember 2024	ODGJ Yang Meresahkan Di Ampalu
126	Ridhan	27 Desember 2024	Balap Liar di By Pass Pariaman
127	Lina	29 Desember 2024	Orgen Tunggal Yang Beroperasional Pada Jam Yang Telah Dilarang Dan Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Di Marunggi

Pariaman, Maret 2025
Kepala Satpol PP Dan Damkar
Kota Pariaman





PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jln. DR. Suharjo No. 15 Kampung Baru Pariaman Fax (0751) 91558 Pariaman

JUMLAH KESELURUHAN PERDA/PERKADA YANG MEMUAT SANKSI YANG
DITEGAKKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Jenis Penegakan Perda	Keterangan
1	Kebersihan dan keindahan (K3) dalam Kota Pariaman	6 Tahun 2006	Sanksi Pidana	Ditegakkan Oleh Satpol.PP
2	Pajak mineral bukan logam dan batuan	6 Tahun 2010	Sanksi Administratif dan Pidana	Ditegakkan Oleh Satpol.PP dan Disperkim-Lh
3	Retribusi izin mendirikan bangunan	8 Tahun 2010	Sanksi Administratif dan Pidana	Ditegakkan Oleh Satpol.PP dan BPKPD
4	Retribusi rumah	7 Tahun 2012	Sanksi Pidana	Ditegakkan Oleh Satpol.PP dan OPD Terkait
5	Pajak Restoran	9 Tahun 2012	Sanksi Pidana	Ditegakkan Oleh Satpol.PP dan BPKPD
6	Pajak Hotel	10 Tahun 2012	Sanksi Pidana	Ditegakkan Oleh Satpol.PP dan OPD Terkait
7	Pajak Parkir	11 Tahun 2012	Sanksi Pidana	Ditegakkan Oleh Satpol.PP dan Dishub
8	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	2 Tahun 2013	Sanksi Pidana	Ditegakkan Oleh Satpol.PP dan Dishub
9	Tempat kusus parkir	3 Tahun 2013	Sanksi Pidana	Ditegakkan Oleh Satpol.PP dan Dishub
10	Bangunan Gedung	7 Tahun 2013	Sanksi Administratif dan Pidana	Ditegakkan Oleh Satpol.PP
11	Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat	10 Tahun 2013	Sanksi Administratif dan Pidana	Ditegakkan Oleh Satpol.PP
12	Pajak Reklame	5 Tahun 2014	Sanksi Pidana	Ditegakkan Oleh Satpol.PP dan BPKPD
13	Izin usaha depot air	9 Tahun 2015	Sanksi Administratif dan Pidana	Ditegakkan Oleh Satpol.PP dan Diskes
14	Ketentraman dan ketertiban umum	10 Tahun 2018	Sanksi Administratif dan Pidana	Ditegakkan Oleh Satpol.PP

15	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	1 Tahun 2019	Sanksi Administratif	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan Dinkes
16	Tentang ODGJ	47 Tahun 2021	Sanksi Pidana	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan Dinas
17	Retribusi parkir dan tempat pariwisata	19 Tahun 2021	Sanksi Administratif dan Pidana	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan Dinas Pariwisata

Sumber Data : Kantor Satpol PP dan Bagian Hukum Kota Pariaman

Pariaman, Maret 2025
Kepala Satpol PP Dan Damkar
Kota Pariaman


Allian, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV.c
NIP: 197407261993111001



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jln. DR. Suharjo No. 15 Kampung Baru Pariaman Fax (0751) 91558 Pariaman

JUMLAH KESELURUHAN PERDA/PERKADA YANG MEMUAT SANKSI
DI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Keterangan
1	Kebersihan dan keindahan (K3) dalam Kota Pariaman	6 Tahun 2006	Ditegakkan Oleh Satpol PP
2	Pajak mineral bukan logam dan batuan	6 Tahun 2010	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan Disperkim-Lh
3	Retribusi izin mendirikan bangunan	8 Tahun 2010	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan BPKPD
4	Retribusi rumah	7 Tahun 2012	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan OPD Terkait
5	Pajak Restoran	9 Tahun 2012	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan BPKPD
6	Pajak Hotel	10 Tahun 2012	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan OPD Terkait
7	Pajak Parkir	11 Tahun 2012	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan Dishub
8	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	2 Tahun 2013	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan Dishub
9	Tempat kusus parkir	3 Tahun 2013	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan Dishub
10	Bangunan Gedung	7 Tahun 2013	Ditegakkan Oleh Satpol PP
11	Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat	10 Tahun 2013	Ditegakkan Oleh Satpol PP
12	Pajak Reklame	5 Tahun 2014	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan BPKPD
13	Izin usaha depot air	9 Tahun 2015	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan Dinkes
14	Ketentrangan dan ketertiban umum	10 Tahun 2018	Ditegakkan Oleh Satpol PP
15	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	1 Tahun 2019	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan Dinkes
16	Tentang ODGJ	47 Tahun 2021	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan Dinsos

17	Retribusi parkir dan tempat pariwisata	19 Tahun 2021	Ditegaskan Oleh Satpol PP dan Dinas Pariwisata

Sumber Data : Kantor Satpol PP dan Bagian Hukum Kota Pariaman

Catatan : melampirkan rincian jumlah perda dan perkara yang memuat sanksi

Pariaman, Maret 2025
Kepala Satpol-PP Dan Damkar
Kota Pariaman



Affan, S.Sos., M.Si
Pemimpin Utama Muda, IV/c
NIP. 197407261993111001



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jln. DR. Suharjo No. 15 Kampung Baru Pariaman Fax (0751) 91558 Pariaman

WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME) PENANGANAN KEBAKARAN
DI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025

No	Nama Korban Kebakaran	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Jarak Tempuh	Waktu Menerima Laporan	Waktu Tiba Dilokasi Kejadian	Respon Time	Keterangan
1	Upik	Taji Taji Desa Sembung, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman	Selasa/09 Januari 2024	Lahan		11.40 Wib		15 menit	
2	Eriani	Desa Penggang Lading, Kec. Pariaman Selatan, Kota Pariaman	Senin/ 15 Januari 2024	Dapur Rumah		18.00 Wib		10 menit	
3	Zai	Pantai Pauh, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman	Minggu /21 Januari 2024	Pohon Ara		20.00 Wib		10 menit	
4	Rini	Sikapok, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman	Sabtu / 27 Januari 2024	Lahan		23.00 Wib		15 menit	
5	Ruan	Lapal Cimparuah, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman	Minggu / 28 Januari 2024	Kabel Induk		18.00 Wib		5 menit	
6	Delima	Naras, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman	Selasa /06 Februari 2024	Rumah		20.00 Wib		10 menit	
7	Halim	Koto Marapek, Kec. Pariaman Timur, Kota Pariaman	Kamis / 8 Februari 2024	Rumah Semi Permanen		12.00 Wib		10 menit	
8	Herman	Desa Batu Nara, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman	Jumat /09 Februari 2024	Rumah		12.45 Wib		13 menit	
9	Nuli	Jl. M. Yamin Desa Kp. Baru, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Senin / 12 Februari 2024	Motor		20.20 Wib		5 menit	
10	Syamsul Anshari	Jalan Baru, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Selasa / 13 Februari 2024	Ladang Jagung		15.43 Wib		10 menit	
11	Budi	Talao Pauh, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman	Minggu / 18 Februari 2024	Lahan		16.45 Wib		10 menit	
12	Winda	Simpang Manggung, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	Senin / 19 Februari 2024	Warung Kopi		22.30 Wib		10 menit	
13	Melisa Wati	Karas Air Pantai Cornia, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Kamis / 22 Februari 2024	Pohon Pinas		13.41 Wib		5 menit	

14	Opot	Jl Fatahillah Desa Kp. Baru Kec. Panaman Tengah Kota Panaman	Selasa / 05 Maret 2024	Godang		11.40 Wib		10 menit	
15	Mayok	Desa Rawang Kec. Panaman Tengah Kota Panaman	Selasa / 12 Maret 2024	Kilo Meter		19.48 Wib		10 menit	
16	Lani	Sei Rambai Kec. Panaman Utara Kota Panaman	Jumat / 15 Maret 2024	Dapur		15.60 Wib		15 menit	
17	Renni	Desa Batang Tajengkek Kurai Taji Kec. Panama Selatan Kota Panaman	Sabtu / 16 Maret 2024	Lahan		15.30 Wib		15 menit	
18	Rusmin	Kurau Aur Kec. Panaman Tengah Kota Panaman	Minggu / 17 Maret 2024	Warung		16.27 Wib		10 menit	
19	Samudhin	Kajai Kec. Panaman Timur Kota Panaman	Selasa / 19 Maret 2024	Meteran Listrik		22.00 Wib		15 menit	
20	Deki	Cubadak Air Utara Kec. Panaman Utara Kota Panaman	Kamis / 21 Maret 2024	Lahan		15.00 Wib		15 menit	
21	Masitah	Desa Marunggi Durun Tabing Rantau Kota Panaman	Kamis / 21 Maret 2024	Pohon Sawit		21.00 Wib		15 menit	
22	Safni	Desa Teluk Kec. Panaman Tengah Kota Panaman	Jumat / 22 Maret 2024	Lahan		12.00 Wib		10 menit	
23	Safni	Desa Teluk Kec. Panaman Tengah Kota Panaman	Sabtu / 23 Maret 2024	Lahan		12.00 Wib		10 menit	
24	Anton	Jawi Jawi 2 Kec. Panaman Tengah Kota Panaman	Rabu / 03 April 2024	Lahan		22.70 Wib		10 menit	
25	Raka Ari	Batang Kabuang Kec. Panaman Timur Kota Panaman	Kamis / 04 April 2024	Rumah		10.00 Wib		10 menit	
26	Yosep Rikardo	Padang Birik Birik Kec. Panaman Utara Kota Panaman	Kamis / 04 April 2024	Lahan		19.00 Wib		15 menit	
27	Yel	Depan Masjid Raya Punggung Lading Kota Panaman	Minggu / 14 April 2024	Rumah		02.00 Wib		10 menit	
28	Irfadi	Ulu Bonda Kec. Panaman Utara Kota Panaman	Kamis / 18 April 2024	Lahan		15.00 Wib		15 menit	
29	Sudirman	Pauh Kurai Taji Kec. Panama Selatan Kota Panaman	Rabu / 24 April 2024	MCB		10.48 Wib		10 menit	
30	Godung Sekolah	SD N 14 Kp. Baru Kec. Panaman Tengah Kota Panaman	Jumat / 26 April 2024	MCB		10.48 Wib		10 menit	
31	Adi Hamid	Naras Hilir Kec. Panaman Utara Kota Panaman	Sabtu / 04 Mei 2024	Lahan		10.45 Wib		15 menit	

32	Erdawan	Desa Marungga Kec Pariaman Selatan Kota Pariaman	Selasa /07 Mei 2024	Gudang perampian Barang		12.23 Wib	10 menit	
33	Jamil	Pantai Cermin Kec Pariaman Tengah Kota Pariaman	Rabu /08 Mei 2024	Pakon Air		15.00 Wib	5 menit	
34	Ronal	Sambang Kec Pariaman Timur Kota Pariaman	Selasa /14 Mei 2024	Meteran Listrik		21.00 Wib	10 menit	
35	Aifan	Kp Gudang Padisutan Kec Pariaman Timur Kota Pariaman	Sabtu /18 Mei 2024	Meteran Listrik		05.11 Wib	10 menit	
36	Rahayu TJ	Naras Kec Pariaman Utara Kota Pariaman	Minggu /19 Mei 2024	Kayu Mebel		23.11 Wib	10 menit	
37	Grand Djaro Swidaya	Depan Terminal Jati Kec Pariaman Tengah Kota Pariaman	Sabtu /25 Mei 2024	Meteran Listrik		22.03 Wib	5 menit	
38	Budi	Sinak Kec Pariaman Utara Kota Pariaman	Selasa /28 Mei 2024	Lahan		14.00 Wib	10 menit	
39		Karan Aur Kec Pariaman Tengah Kota Pariaman	Jumat /31 Mei 2024	Pakon		09.30 Wib	10 menit	
40	Siska	Manbau Padang Calauh Kec Pariaman Selatan Kota Pariaman	Rabu /05 Juni 2024	Dapur Rumah		02.30 Wib	10 menit	
41	Pasar Pariaman	Pasar Rakyat Kota Pariaman	Kamis /06 Juni 2024	Videoth		08.34 Wib	5 menit	
42	Sulirman	Desa Marungga Kec Pariaman Selatan Kota Pariaman	Sabtu /08 Juni 2024	Lahan		10.30 Wib	10 menit	
43	Safi	Tulogo Sarik Kota Pariaman	Kamis /12 Juni 2024	Kabel Tiang Listrik		19.28 Wib	5 menit	
44	Pin	Jati Hilir Kec Pariaman Tengah Kota Pariaman	Kamis /12 Juni 2024	Meteran Listrik		23.10 Wib	5 menit	
45	Alek	Pesa Hilalang Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman	Jumat /13 Juni 2024	Pondok		11.48 Wib	10 menit	
46	Tom	Sengas Rambai Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	Senin /17 Juni 2024	Lahan		14.30 Wib	10 menit	
47	Yulerman	Desa Sengol Kec Pariaman Timur Kota Pariaman	Selasa /18 Juni 2024	Sepeda Motor		19.30 Wib	10 menit	
48	Toko Rahman	Desa Batu Tangah Kec Pariaman Timur Kota Pariaman	Sabtu /13 Juli 2024	Gudang		02.00 Wib	10 menit	
49	Rika	Padisutan Kec Pariaman Timur Kota Pariaman	Sabtu /13 Juli 2024	Lahan		15.30 Wib	10 menit	

50	Kantor Kojaksan	Kel. Alam Galombang Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Kamis /18 Juli 2024	Kwh Metyan		12.40 Wib		5 menit	
51	Zulfandi	Padang Birik Birik Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Senin /22 Juli 2024	Lahan		15.30 Wib		15 menit	
52	Edwar	Ujung Batang Jl. Kereta Api Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Senin /29 Juli 2024	Lahan		17.00 Wib		5 menit	
53	Yusra Jaya	Pasar Pariaman Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Selasa /30 Juli 2024	Batang Ari		18.30 Wib		5 menit	
54	Ayang	Pasar Sinar Desa Sinar Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman	Selasa /06 Agustus 2024	Lahan		14.40 Wib		15 menit	
55	Amril	Padusunan Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman	Kamis /15 Agustus 2024	Lahan		14.00 Wib		10 menit	
56	Raka	Padusunan Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman	Sabtu /18 Agustus 2024	Lahan		15.30 Wib		10 menit	
57	Zamal	Desa Balai Nara Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	Senin /20 Agustus 2024	Mobil		08.15 Wib		15 menit	
58	Rina	By. Par. Desa Apar Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	Senin /20 Agustus 2024	Rumah		11.50 Wib		10 menit	
59	Suarni	Kampung Kundeng Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	Rabu /28 Agustus 2024	Kanur		16.45 Wib		10 menit	
60	Juan	Kel. Taratak Kec. Pariaman tengah Kota Pariaman	Kamis /29 Agustus 2024	Dapur		16.30 Wib		5 menit	
61	Rosi Ardes	Naras Padang Birik Birik Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	Minggu/08 September 2024	Sepeda Motor		02.30 Wib		15 menit	
62	Doni	Padusunan Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman	Rabu/11 September 2024	Lahan		16.30 Wib		10 menit	
63	Anteo Elektronik	Jl Setot Ali Basa Kel. Jati Hilir Kec. Pariaman tengah Kota Pariaman	Minggu/15 September 2024	Rumah		18.37 Wib		5 menit	
64	Daslimar	Sor. Rotan Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman	Minggu/22 September 2024	Lahan		02.30 Wib		5 menit	
65	Rhoda	Desa Palak Anah Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Rabu /02 Oktober 2024	Rumah		22.30 Wib		10 menit	
66	Susirman	Karan Air Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Kamis /03 Oktober 2024	Dapur		15.00 Wib		5 menit	
67	Rangkati	Jati Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Selasa /08 Oktober 2024	Lahan		16.45 Wib		5 menit	

68	Ibu	Kel.Kp.Perak Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Rabu /09 Oktober 2024	Kompor Gas		21.40 Wib		5 menit	
69	Haru	Pantai Cernin Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Kamis /10 Oktober 2024	Pohon Cemara		14.15 Wib		5 menit	
70	Benang	Pantai Ganderah Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Sabtu /19 Oktober 2024	Pondok		04.00 Wib		5 menit	
71	Zainal	Kampung Baru Padusunan Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman	Senin /21 Oktober 2024	Lahan		16.30 Wib		10 menit	
72	Boni Sora	Kel.Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Kamis /24 Oktober 2024	Lahan		10.30 Wib		5 menit	
73	Fari	Depan TMC Kec. Tengah Kota Pariaman	Jumat /25 Oktober 2024	Lahan		16.30 Wib		5 menit	
74	Budi	Kota Mandakek Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Minggu /26 Oktober 2024	Lahan		10.50 Wib		5 menit	
75	Icha	Karan Aur Pantai Cernin Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Minggu /27 Oktober 2024	Pohon Pinus		11.40 Wib		5 menit	
76	Hamdul	PJKA Simpang Apar Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	Senin /28 Oktober 2024	Lahan		16.10 Wib		5 menit	
77	Benk Beana	Plaza Kp. Perak Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Rabu /30 Oktober 2024	Toko Baju		00.50 Wib		5 menit	
78	Herman	Talago Sarik Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman	Minggu /10 November 2024	Kompor Gas		21.00 Wib		5 menit	
Total Menit Waktu Penanganan								725 MENIT	

Sumber Data : Kantor Pemadam Kebakaran Kota Pariaman

Pariaman, 2025
Kepala Satpol PP Dan Damkar
Kota Pariaman



Affan, S.Sos., M.Si
Pemdana Utama Muda, IV.c
NIP. 197407261993111001



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jln. DR. Suherjo No. 15 Kampung Baru Pariaman Fax (0751) 91558 Pariaman

JUMLAH KESELURUHAN PERDA/PERKADA YANG MEMUAT SANKSI
DI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Keterangan
1	Kebersihan dan keindahan (K3) dalam Kota Pariaman	6 Tahun 2006	Ditegakkan Oleh Satpol PP
2	Pajak mineral bukan logam dan batuan	6 Tahun 2010	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan Disperkim-Lh
3	Retribusi izin mendirikan bangunan	8 Tahun 2010	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan BPKPD
4	Retribusi rumah	7 Tahun 2012	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan OPD Terkait
5	Pajak Restoran	9 Tahun 2012	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan BPKPD
6	Pajak Hotel	10 Tahun 2012	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan OPD Terkait
7	Pajak Parkir	11 Tahun 2012	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan Dishub
8	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	2 Tahun 2013	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan Dishub
9	Tempat kusus parkir	3 Tahun 2013	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan Dishub
10	Bangunan Gedung	7 Tahun 2013	Ditegakkan Oleh Satpol PP
11	Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat	10 Tahun 2013	Ditegakkan Oleh Satpol PP
12	Pajak Reklame	5 Tahun 2014	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan BPKPD
13	Izin usaha depot air	9 Tahun 2015	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan Dinkes
14	Ketenraman dan ketertiban umum	10 Tahun 2018	Ditegakkan Oleh Satpol PP
15	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	1 Tahun 2019	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan Dinkes
16	Tentang ODGJ	47 Tahun 2021	Ditegakkan Oleh Satpol PP dan Dinsos

17	Retribusi parkir dan tempat pariwisata	19 Tahun 2021	Ditegaskan Oleh Satpol PP dan Dinas Pariwisata

Sumber Data : Kantor Satpol PP dan Bagian Hukum Kota Pariaman

Catatan : melampirkan rincian jumlah perda dan perkara yang memuat sanksi

Pariaman, Maret 2025
Kepala Satpol PP Dan Damkar
Kota Pariaman



Pembina Utama Muda, IV.c
NIP. 197407261993111001

RAPAT PEMBAHASAN TINDAK LANJUT HASIL REVIU LAPORAN KINERJA KOTA
PARIAMAN TAHUN 2024 OLEH INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN



RAPAT EVALUASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DAN PENETAPAN TARGET TAHUN 2025





PENDAMPINGAN SERTA FINALISASI PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025 KEPADA SELURUH PERANGKAT DAERAH



PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 OLEH WALI KOTA
PARIAMAN DAN SELURUH PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

